



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

**KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.4. Maksud dan Tujuan	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	
2.1. Aspek Administrasi, Geografi Dan Demografi	12
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	12
2.1.1.1. Adminstrasi Wilayah	12
2.1.1.2. Topografi.....	19
2.1.1.3. Geologi.....	20
2.1.1.4. Jenis dan Struktur Tanah	23
2.1.1.5. Geomorfologi.....	24
2.1.1.6. Kondisi Iklim.....	26
2.1.1.7. Hidrologi.....	28
2.1.1.8. Penggunaan Lahan.....	31
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	32
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah Ekonomi.....	36
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana.....	44
2.1.5. Demografi.....	46
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	49
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi....	49
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	61
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	66
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	66

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	66
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	85
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	102
2.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang.....	108
2.4. Aspek Daya Saing.....	110
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	110
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur.....	111
2.4.3. Fokus Investasi.....	113
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	114
2.5. Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	115
2.5.1. Indikator Kinerja Kunci.....	115
2.5.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	121
2.6. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan.....	124
2.7. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	152

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	177
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	177
3.1.2. Neraca Daerah	189
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	193
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	193
3.2.2. Analisis Pembiayaan	197
3.3. Kerangka Pendanaan.....	199
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	199
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	206

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	210
4.1.1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat...	210
4.1.2. Permasalahan Terkait Aspek Pelayanan Umum	212

4.1.3. Permasalahan Terkait Aspek Daya Saing Daerah...	225
4.2. Isu Strategis	226
4.2.1. Isu Strategis Terkait Kebijakan Internasional.....	226
4.2.2. Isu Strategis Terkait Kebijakan Pembangunan Nasional	229
4.2.3. Isu Strategis Terkait Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	233
4.2.4. Isu Strategis Terkait Kebijakan Pembangunan Daerah Tetangga	235
4.2.5. Isu Strategis Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	245
4.2.6. Isu Strategis Terkait dengan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah	246
BAB V	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.....	247
5.2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026	250
5.2.1. Visi.....	250
5.2.2. Misi.....	251
5.3. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021-2026.....	255
5.4. Keterkaitan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat dengan Program Unggulan Kabupaten Solok Selatan.....	259
5.5. Keterkaitan Visi Misi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	260
BAB VI	
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
6.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahap IV Tahun 2020-2025 RPJPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025	309
6.2. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.....	313
6.3. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.....	334
BAB VII	
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	309
7.2. Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	309
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	328
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	329
BAB IX PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Terhadap Program Prioritas Nasional.	
2. Perhitungan Indikator Kinerja Daerah.	



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Solok Selatan .
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

RPJMD bermaksud untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat .

Pasal 4

RPJMD bertujuan sebagai pedoman dalam:

- a. menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Solok Selatan;
- b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. penyusunan RKPD.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD meliputi penjabaran Visi, Misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan ;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah ;

- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah ;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah ;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah ;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; dan
 - i. BAB IX : Penutup .
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD, dituangkan dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilakukan setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana

- pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 25 Oktober 2021



Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/75/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RPJMD dengan Visi “MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN MAJU DAN SEJAHTERA”

dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD, agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dapat bersinergi dan berkelanjutan, dan dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Solok Selatan : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 39 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

- b. Solok Selatan Maju, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.
- c. Solok Selatan Sejahtera memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Adapun RPJMD berisi arah kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah yang disertai kerangka kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator daerah yang merupakan hasil *cascading* Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan daerah bagi seluruh pelaksana pembangunan.

Untuk mewujudkan visi diatas, telah dirumuskan Misi Bupati/Wakil Bupati Solok Selatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif.
Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang berdaya saing dengan perhatian utama peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.
Misi ini menitikberatkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan UMKM, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian dalam menunjang sektor pariwisata.
- c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani.
Misi ini bertujuan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik

pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

- d. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan dan pemertaan ketersediaan infrastruktur daerah dan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana).

- e. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Adapun dokumen rencana pembangunan bagi pemerintah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun yang memuat visi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun atau selama masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta dokumen tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD setiap tahunnya.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan perlunya menyusun perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah menyusun dokumen perencanaan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah, mengintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta disusun secara berjangka.

Dalam penyusunan RPJMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 26 April 2021 yaitu pasangan Bupati H. Khairunas, S.IP, M.Si dengan Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, MM yang merupakan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada serentak) pada tanggal 09 Desember 2020, maka kewajiban pemerintah daerah adalah menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka penentuan periodisasi RPJMD ditentukan berdasarkan masa jabatan kepala daerah yaitu tahun 2021-2026, dan bukan berdasarkan waktu menjabat Tahun 2021-2024. Sehingga dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan periodisasinya dihitung tahun 2021-2026.

Dalam dokumen RPJMD, Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan terpilih dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana kewenangan tersebut terdiri atas :

1. Urusan pemerintahan wajib, terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan;
- 18) kearsipan.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) energi dan sumber daya mineral;
- e) perdagangan;
- f) perindustrian;
- g) transmigrasi.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Unsur Pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat daerah;
 - 2) sekretariat DPRD.
- b. Unsur Penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan; .
- c. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
- d. Unsur Kewilayahan, meliputi kecamatan.
- e. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Untuk pendekatan substansi penyusunan RPJMD dilakukan melalui **yaitu pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial** dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya serta mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Selain itu penyusunan RPJMD juga dilakukan melalui beberapa pendekatan sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 yaitu:

1. **Pendekatan teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang dilaksanakan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada tahun 2020
2. **Pendekatan partisipatif**, hal ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, selain pemerintah daerah sendiri, maka

pemangku kepentingan yang dilibatkan adalah instansi vertikal, pemerintahan nagari, perwakilan masyarakat, serta pihak swasta, yang dilakukan melalui kegiatan Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD.

3. **Pendekatan politis**, sebagai salah satu muatan utama dalam penyusunan RPJMD, dimana RPJMD menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD
4. **Pendekatan atas-bawah**. Hal ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD Provinsi dan Nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan periode terakhir atau keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025. Berdasarkan hal tersebut penyusunan RPJMD ini ditujukan untuk pencapaian target dari RPJP dengan mempertimbangkan pola ruang yang telah ditetapkan pada RTRW. Sesuai dengan Visi RPJP Kabupaten Solok Selatan yaitu: ***Terwujudnya Kabupaten Bermartabat Yang AMANAH) (Aman, Makmur-Sejahtera, Agamis, Nalar Dan Harmonis).***

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk 5 (lima) kedepan. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Undang-Undang U Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

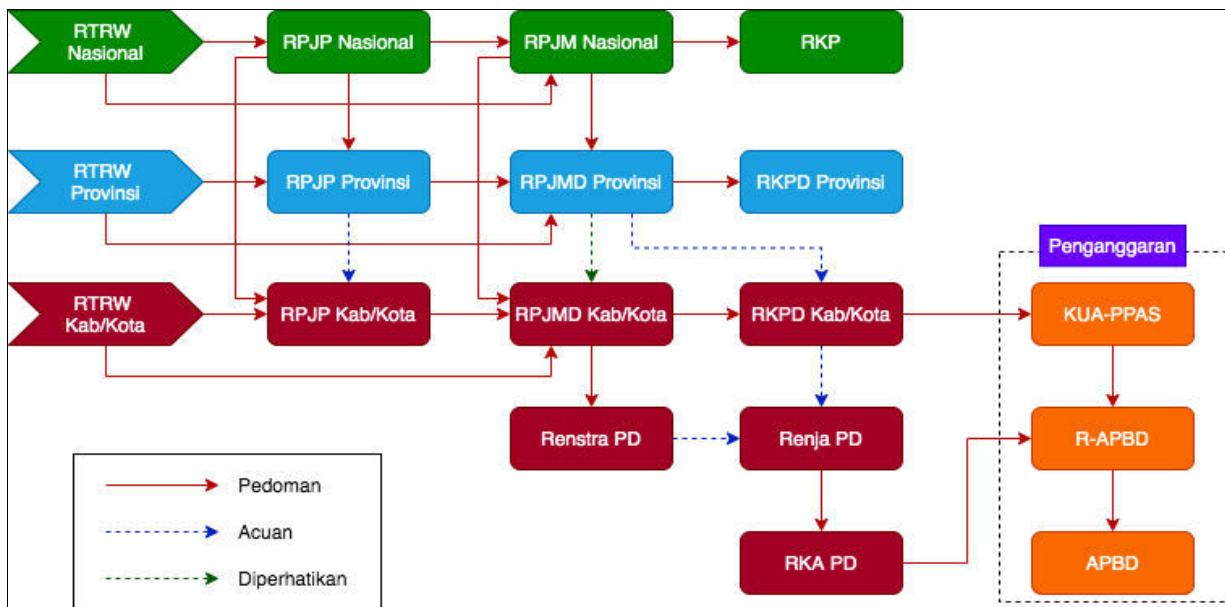
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
23. Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
24. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 260 yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut penyusunan RPMJD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 dengan mengacu pada pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2031 dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Solok Selatan dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan sektoral nasional, provinsi dan daerah.

Gambar. 1.1.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti Tahun 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, sekaligus menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2021-2026
2. Sebagai pedoman dan acuan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dan sekaligus indikator terhadap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2021-2026

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud

dan Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Solok Selatan yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan

BAB III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang kondisi keuangan di Kabupaten Solok Selatan yang dilihat berdasarkan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan

BAB IV. Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan tentang hasil identifikasi permasalahan pada masing-masing urusan, analisis lingkungan strategis, dan penetapan isu strategis pembangunan di Kabupaten Solok Selatan yang akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Pembangunan beserta target indikator yang akan dicapai pada tahun 2026.

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 beserta program yang menunjang pencapaian kebijakan pembangunan yang dipilih untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra

Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. Penutup

Bab ini menjelaskan hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahunan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026. Selain itu juga menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan diantaranya penetapan Renstra Perangkat daerah dan sebagai pedoman RKPD yang akan disusun di tahun berikutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Administrasi, Geografi Dan Demografi

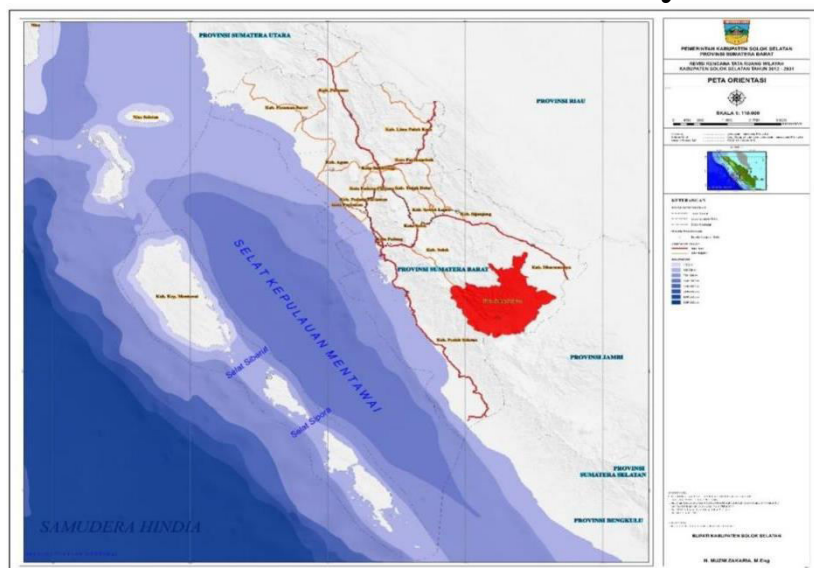
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1. Adminstrasi Wilayah

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok. Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu dari tiga kabupaten pemekaran yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Secara geografis daerah ini berada pada 01° 17' 13" - 01° 46' 45" Lintang Selatan dan 100° 53' 24"- 101° 26' 27" Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km². Tepatnya berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya

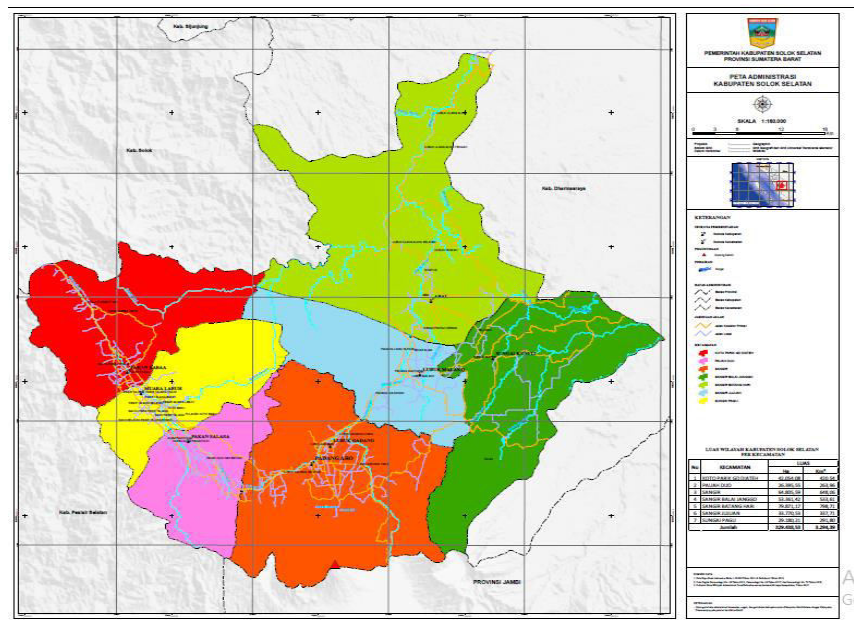
Gambar 2.1.
Peta Orientasi Perencanaan Wilayah



Namun luas wilayah ini dikoreksi oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten

Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, menyebabkan terjadinya penurunan luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan menjadi 3.294,39 Km².

Gambar 2.2.
Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2018

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Secara administratif, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari, Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh. Dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Sangir dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pauh Duo. Saat ini Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan yang terbagi 275 Jorong

Tabel 2.1.
Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)
1.	Sangir	648,06
2.	Sungai Pagu	291,80
3.	Koto Parik Gadang Diateh	420,54
4.	Sangir Jujuan	337,71
5.	Sangir Batang Hari	798,71
6.	Pauh Duo	263,96
7.	Sangir Balai Janggo	533,61
Jumlah		3.294.39

Sumber: Bagian PUM Sekretariat Daerah dan Dinas PU dan TR

Tabel 2.2.

Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong di Kabupaten Solok Selatan

Kecamatan		Desa / Nagari		Jorong	
1	Sangir	1	Lubuk Gadang	1	Timbulun
				2	Padang Aro
				3	Durian Taruang
				4	Sungai Padi
				5	Bukik Malintang
				6	Rimbo Tangah
				7	Taratak
				8	Lubuk Gadang
				9	Sariak Taba
				10	Gunung Pasir
				11	Bukik Patanahan
				12	Bukit Malintang Barat
				13	Bukit Malintang Utara
				14	Sungai Padi Utara
				15	Sungai Padi Selatan
				16	Timbulun Atas
				17	Koto Tinggi
				18	Padang Alai
				19	Jujutan
		2	Lubuk Gadang Timur	1	Sungai Landeh
				2	Sungai Aro
				3	Maluih
				4	Gaduang
				5	Durian Tanjak
				6	Taratak Tinggi
				7	Tanjuang Harapan
				8	Kampung Tangah
				9	Sungai Lingkitang
		3	Lubuk Gadang Tenggara **	1	Tandai
				2	Leter W
				3	Taluak Aia Putih
				4	Sungai Sanda
				5	Tandai Bukik Bulek
				6	Tandai Ateh
				7	Lubuak Rasak
				8	Tandai Simpang Tigo
		4	Lubuk Gadang Selatan	1	Sungai Lambai
				2	Pincuran Tujuh
				3	Sungai Lambai Timur
				4	Sungai Lambai Barat
				5	Sungai Kapur
				6	Pincuran Tujuh
				7	Pincuran Tujuh Barat
				8	Pincuran Tujuh Selatan
		5	Lubuk Gadang Barat **	1	Pasir putih
				2	Sapan
				3	Karang Putih
				4	Aia Manyuruak
		6	Lubuk Gadang Barat Daya **	1	Liki
				2	Liki Atas
				3	Sungai Bangku
		7	Lubuk Gadang Utara	1	Bariang
				2	Tanggo Aka
				3	Sampu
				4	Bariang Kampuang Dalam
				5	Manggis
				6	Koto Ramba

Kecamatan		Desa / Nagari		Jorong	
2	Sungai Pagu	8	Koto Baru	7	Bariang Palabihan
				1	Kampung Nan Limo
				2	Bariang Rao-Rao
				3	Lubuk Jaya
				4	Muaro Palak Gadang
				5	Kiambang Jaya
				6	Kiambang Sungai Aur
		9	Pasar Muara Labuh	7	Bariang Kapalo Koto
				1	Pasar Muara Labuh Timur
				2	Pasar Muara Labuh Barat
				3	Pasar Muara Labuh Selatan
				4	Pasar Muara Labuh Utara
		10	Pulakek Koto Baru	1	Kapalo Bukit
				2	Pulakek Tengah
				3	Koto Birah
				4	Air Batu
				5	Mantirai Indah
				6	Jolok Sungai Siriah
				7	Kapalo Koto
				8	Macang Masam
				9	Ujuang Tanjuang
				10	Ipuah Pasir Jambu
		11	Sako Pasia Talang	1	Mudiak Lolo Barat
				2	Mudiak Lolo Timur
				3	Mudiak Lolo Selatan
				4	Mudiak Lolo Utara
		12	Pasia Talang	1	Pasia Talang
				2	Tigo Lareh
					Bakapanjangan
				3	Melayu Palak Laweh
				4	Batang Pagu
				5	Panai
				6	TLB Selatan
		13	Bomas	7	MPL Timur
				1	Bangko
				2	Mato Aia
				3	Sungai Durian
				4	Bolai Sungai Durian
				5	Tanah Sirah Sei Durian
				6	Simpang Tigo Sei Durian
				7	Bangko Tengah
				8	Bangko Ulu
		14	Sako Selatan Pasia Talang	9	Bangko Ampera
				1	Sungai Talu
				2	Sawah Siluak
				3	Alai Sako
		15	Sako Utara Pasia Talang	4	Lolo Kaciak
				1	Sipotu
				2	Banda Gadang
				3	Mudiak Lawe Barat
		16	Pasia Talang Selatan	4	Mudiak Lawe Timur
				1	IV Jorong
				2	Kampung Palak
				3	Kalampaian
				4	Rawang
				5	IV Jorong Selatan

Kecamatan		Desa / Nagari		Jorong
3	Koto Parik Gadang Diateh	17	Pasia Talang Barat	1 Lundang
				2 Sungai Cangkar
				3 Batang Lawe Barat
				4 Batang Lawe Timur
		18	Pasia Talang Timur	1 Koto Kaciak
				2 Sigintir
				3 Banda Dalam
				4 Pampangan
		19	Pakan Rabaa	1 Pakan Rabaa
				2 Sungai Kapur
				3 Sungai Pangkua
				4 Sungai Bong Bandar Jelatang
		20	Pakan Rabaa Selatan **	1 Sungai Aro
				2 Sungai Aro Aia Angek
				3 Sungai Aro Sawa Lawe
				4 Sungai Aro Aia Tajun
		21	Pakan Rabaa Timur	1 Pinti Kayu Gadang
				2 Pinti Kayu Ketek
				3 Sapan Salak
				4 Tanjuang Nan IV
				5 Sapan Sungai Nan II
				6 Pasia Putiah
				7 Ladang Konsi
				8 Pinti Kayu Tengah
				9 Manggih
				10 Pasir Panjang
		22	Pakan Rabaa Utara	1 Sungai Kalu I
				2 Sungai Kalu II
				3 Batang Pasampan
				4 Koto Baru Sungai Kalu
				5 Pulau Bungkuak
				6 Batuang Bajawek
		23	Pakan Rabaa Utara Duo **	1 Ulu Suliti I
				2 Ulu Suliti II
				3 Ulu Suliti III
				4 Ulu Suliti IV
				5 Tanjuang Limau Kapeh
				6 Pasampan Timur
		24	Pakan Rabaa Tengah	1 Batang Limpauang
				2 Bancah
				3 Bancah Anak Lolo
				4 Bt Limpaung Tratak Panas
				5 Bt Limpaung Kandang Bniah
		25	Balun Pakan Rabaa Tengah **	1 Balun
				2 Balun Sungai Ipuh
				3 Balun Sawahtau
				4 Balun Balai Akad
		26	Batang Lolo **	1 Batang Lolo Sungai Rambutan
				2 Batang Lolo Atas
				3 Batang Lolo Panduang
				4 Batang Lolo Batu Kulambai
				5 Batang Lolo
4	Sangir Jujuan	27	Lubuk Malako	1 Koto Gadang
				2 Koto Tuo

Kecamatan		Desa / Nagari		Jorong	
5	Sangir Batang Hari	28	Padang Air Dingin	3	Padang Darek
				4	Bancah Kapeh
				5	Lubuk Batuang
				6	Taratak Baru
				7	Pangian Indah
				8	Koto Tuo Mata Air
				1	Buluh Kasok
				2	Sikayan Talang
				3	Padang Air Dingin
				4	Koto Japang
		29	Bidar Alam	1	Pasar Bidar Alam
				2	Batikan
				3	Kapalo Koto
				4	Simpang Tigo
				5	Harapan Baru
				6	Sungai Galugu Kapalo Koto
		30	Padang Limau Sundai	7	Bulian
				1	Sibalabeh Ateh
				2	Koto Ranah
				3	Tanjung Durian
		31	Padang Gantiang	4	Ranah Sungai Bamban
				1	Sirumbuk
				2	Pidang
				3	Padang Batu Bala
				4	Sungai Baramah
		32	Abai	1	Kapalo Koto
				2	Aur Duri
				3	Pasar
				4	Batu Nago
				5	Batu Kadunduang
				6	Limo Suku
				7	Simpang Ampek
				8	Pasar Baru
		33	Ranah Pantai Cermin	1	Koto Tuo
				2	Sungai Mintan
				3	Talakiak
				4	Simpang Tigo
		34	Dusun Tengah	5	Rawan
				1	Sinuek
				2	Koto Tengah
				3	Sungai Cupak
				4	Sungai Gadang
		35	Sitapus	5	Bukik Indah
				6	Koto Lingkek
				1	Bangkar Dalam
				2	Padang Koto Tuo
		36	Lubuk Ulang Aling	3	Padang Beringin
				4	Padang Osoli
				1	Pulau Panjang
				2	Koto Ranah
				3	Kampung Baru
				4	Batu Gajah
		37	Lubuk Ulang Aling Selatan	1	Limau Sundai
				2	Muaro Sangir
				3	Batu Lauang
				4	Sungai Penuh
				5	Gasiang
				6	Ombak Kubu
				7	Talantam

Kecamatan		Desa / Nagari		Jorong	
6	Pauh Duo	38	Lubuk Ulang Aling Tengah	1	Tanah Galo
				2	Pulau Karam
				3	Rantau Limau Kapeh
		39	Alam Pauh Duo	1	Pk Salasa
				2	Ampalu
				3	Simancung
				4	Durian 3 Capang
				5	Karang Hitam Simancuang
		40	Pekonina Alam Pauh Duo **	1	Pekonina
				2	Taratak Tinggi Pekonina
				3	Sapan Sari Pekonina
				4	Kampung Baru Pekonina
				5	Lubuak Paraku
		41	Kapau Alam Pauh Duo	1	Lasuang Batu
				2	Bulantik
				3	Taratak Baru
				4	Koto Kapau
				5	Kampung Nan Baru
				6	Banuaran
		42	Luak Kapau Alam Pauh Duo	1	Pinang Sinawa
				2	Ujung Jalan
				3	Janjang Kambiang
				4	Batu Jarang
				5	Sungai Duo
				6	Tubo Taratak Tinggi
		43	Pauh Duo Nan Batigo	1	Taratak Bukareh
				2	Paninjauan
				3	Jorong Pinang Awan
				4	Bukik Sikumpa
7	Sangir Balai Janggo	44	Sungai Kunyit	1	Koto Sungai Kunyit
				2	Taratak Sungai Sungkai
				3	Sungai takuak
				4	Mercu
				5	Mukti Tama
				6	Psr Sungai Sungai Sungkai
				7	Sungai Tengah
				8	Log Batu Sandi
		45	Talunan Maju	1	Kurnia Maju
				2	Talunan Indah Sepakat
				3	Talunan I
				4	Talunan II
		46	Talao Sungai Kunyit	1	Talao
				2	Sungai Keruh
				3	Sungai Jerinjing
				4	Sungai Talang
		47	Sungai Kunyit Barat	1	Sungai Gadiang
				2	Ngalau Indah
				3	Sungai Lasuang
				4	Sinar Paninjauan
				5	Ngalau Indah II

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keterangan ** Nagari/ Desa Persiapan

2.1.1.2. Topografi

Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan memiliki bentang alam yang sebagian besar berbukit-bukit. Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Klasifikasi lerengnya, sebagian besar lerengnya curam (886,00 Km²) dan yang sangat curam (482,11 Km²) Keadaan ini memberi implikasi bahwa sebagian besar wilayah rawan terhadap bahaya longsor.

Tabel 2.3.
Klasifikasi lereng wilayah Kabupaten Solok Selatan

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Km ²)
1	Datar, Agak Landai	0 – 8	792,12
2	Landai	8 – 15	530,68
3	Agak Curam	15 – 25	608,32
4	Curam	25 – 40	885,17
5	Sangat Curam	> 40	480,11
Total			3.294,39

Sumber : Hasil Olahan Peta Kontur RBI 1:50.000 Tahun 2017

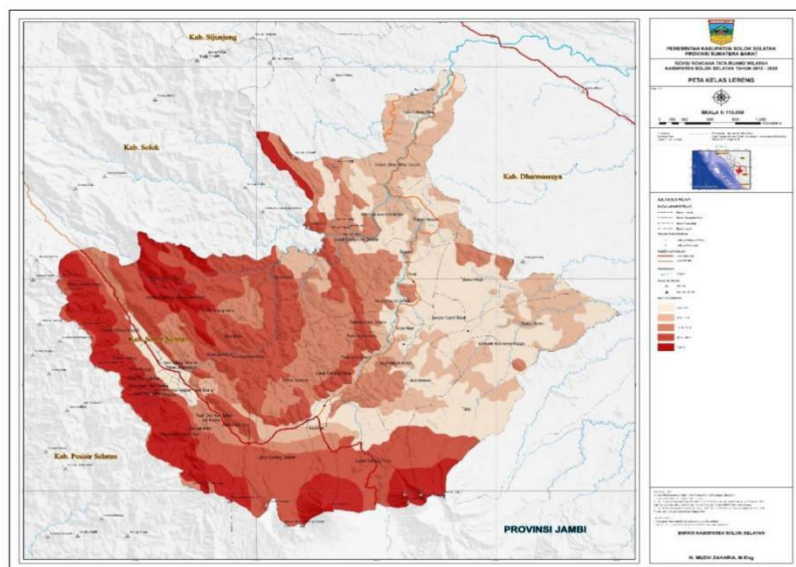
Secara topografis wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

1. Kawasan dataran tinggi bergelombang yang menempati bagian Timur daerah dan sedikit memanjang disekitar Muara Labuh. Wilayah ini menempati sekitar 25 % dari luas Kabupaten Solok Selatan, elevasi 50 m–100 m (dpl) dengan lereng berkisar antara 5%-15%. Litologi yang menempati satuan ini berupa Tos, Pbl, Pp, Qal. Aliran air melimpah dengan dilaluinya beberapa sungai besar, banyak cabang sungai sehingga mudah meresapkan air dan mudah digali. Pada dataran ini juga banyak dijumpai mata air terutama di Padang Aro dan sekitarnya. Kelemahan di daerah ini adalah dilaluinya zona patahan besar Sumatera dan beberapa patahan kecil akibat pergerakan patahan Sumatera (patahan Semangko);
2. Kawasan perbukitan, lebih mendominasi daerah dengan sebaran sekitar 60% dari luas Kabupaten Solok Selatan. Satuan ini menempati bagian tengah dan utara dengan elevasi antara 100 m–500 m (dpl) kelerengan berkisar 15 % -30 %. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan dari Formasi Barisan (Pb. Pbl) serta batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Kgr, Jgr) . Potensi di daerah ini adalah aliran air sangat baik, banyak cabang sungai.

Kelemahannya mudah erosi, dengan kelerengan tinggi berpotensi terjadi gerakan tanah (longsor).;

3. Kawasan lembah kaki pegunungan yang menempati bentang alam kaki pegunungan menempati tepi bagian Barat dan Selatan dari wilayah perencanaan dengan sebaran sekitar 15 % dari luas keseluruhan. Bentang alam ini mempunyai elevasi antara 500 m–3500 m (dpl) dengan kelerengan berkisar 30 % sampai lebih dari 40%. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Tomp, Qou, Qol dan Qyu). Potensi daerah ini berupa aliran air yang sangat baik dengan banyak cabang sungai.

Gambar 2.3.
Peta Kelas Lereng Kabupaten Solok Selatan



2.1.1.3. Geologi

Litologi Dan Stratigrafi

Penamaan dan pengelompokan satuan batuan di Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada peta geologi lembar Painan skala 1 : 250.000 yang disusun oleh *HMD Rosidi, S Tjokrosapoetro, B Pendowo, S Gafoer dan Suharsono, 1996*, dan berdasarkan Peta Geologi Lembar Painan Timur Laut, Sumatra, skala 1 : 250.000, oleh *Kastowo dan Gerhard, W.Leo, 1973* terbitan Direktorat Geologi Bandung, dimana satuan batuan di Kabupaten Solok Selatan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan yang urutan stratigrafi dari muda ke tua, sebagai berikut:

a. Endapan Permukaan

Aluvium Sungai (Qal); berupa pasir kerikil dan bongkah batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf yang diendapkan sepanjang dataran banjir. Umumnya endapan ini tersebar di sekitar sungai-sungai besar dan

daerah limbah banjir, misalnya Batang Hari, Batang Suliti, Batang Sangir dan lain-lain.

b. Batuan Sedimen

Formasi Sinamar (Tos); Konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar berwarna abu-abu kekuning-kuningan, batu pasir kuarsa mengandung mika berwarna coklat sampai abu-abu kekuning-kuningan, batu pasir arkosan, batu lempung abu-abu, napal dan batu lempung pasiran. Di dalamnya termasuk juga lapisan-lapisan batubara dan batu gamping koral. Komponen konglomerat adalah kuarsit, kuarsa susu, dan pecahan-pecahan granit. Di dekat batuan granitan *Pratiesier*, batu pasir kuarsa condong membentuk susunan arkosa. Isi perbandingan batu lempung, serpih dan napal dalam formasi itu makin bertambah kearah atas. Formasi ini terletak tidak selaras di atas batuan pra tersier. Umumnya diperkirakan Oligosen dan dapat dikolerasikan dengan Formasi Batupasir Kuarsa dari *Musper* (1994). Tebalnya mencapai ± 750 meter.

Formasi Barisan(Pb) ; Terdiri dari filit, batu sabak, batu gamping, *batu tanduk* dan greywacke meta. Rijang banyak sekali terdapat, juga urat kuarsa sulfida magmatik mengandung emas.

Anggota Batu Gamping Formasi Barisan(Pbl); Terpualamkan, berhablur, pejal berwarna abu-abu muda sampai tua. Urat-urat kalsit biasa terdapat dan batugamping ini sangat terpecah-pecah dalam jalur-jalur sesar seperti Sesar Besar Sumatera. Batugamping di deretan sebelah timur, yang mengandung *Schwagerina sp.* menunjukkan umur Perm-Awal. Di dalam batu gamping sepanjang Sesar Besar Sumtera tidak ditemukan fosil. Diabas dan serpentinit yang tergabung dengan batu gamping ini di lembar Solok, di anggap berumur Perm (Volz, 1904).

c. Batuan Vulkanik

Batuan Gunung Api yang Tak Dipisah-Pisahkan (Qyu); berupa Breksi, endapan lahar, aliran lava, lapili dan tufa, semuanya bersusunan basal sampai andesit dengan plagioklas menengah sampai basa (oligoklas, andesin, labradorit), amfibol, biotit, dan piroksin; di dalam batuan basalt terdapat sedikit olivin. Batuan ini berasal dari Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh. Tanah pelapukan berupa lempung lanauan hingga lempung pasiran, berwarna coklat kemerahan, plastisitas sedang-tinggi, konsistensi teguh-kaku, dengan ketebalan 0,5–2 meter

Lava(Qyl) ; Susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan. Alirannya terdapat disekitar Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh.

Breksi Vulkanik yang Tak Dipisah-Pisah (Qou) ; Breksi tufa, lahar dan aliran lava: kebanyakan bersusunan andesitan. Batuan basalan merupakan sebagian kecil dari satuan ini. Secara setempat batuan ini diterobos oleh retas dasitan dan terpropilitasikan. Pusat-pusat letusan batuan ini tidak dapat ditemukan, tetapi mungkin berasal dari gunung Kerinci yang tua, Gunung Tujuh, Gunung Runcing dan Gunung Api Panjang. Mereka dinyatakan berumur Kwartter Awal. Di sekitar Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh tertutup oleh batuan gunung api menerobos Formasi Painan (Tmop) yang berumur Tersier-bawah, dan tertutup oleh batuan vulkanik Kwartter, tersingkap di barat daya daerah ini.

Lava (Qol) ; Susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan. Alirannya terdapat disekitar lereng Gunung Runcing, Gunung Lumut dan Gunung Panenjolan.

d. Batuan Terobosan (Batuan Intrusi)

Granodiorit (Tgdr) ; Komposisi granit hornblenda sampai granodiorit, berumur Miosen Tengah karena menerobos Formasi Painan yang berumur Tersier Bawah.

Batuan Granitan (Kgr) ; Susunannya berkisar antara granodiorit sampai granit, berwarna biru muda dengan bintik-bintik mineral-mineral mafik abu-abu semu hijau. Terdapat sebagai *stok*. Secara setempat mineral-mineral mafik. Mineral-mineral mafik telah berubah secara setempat. Di jalur Sesar Sumatera batuan ini telah terkoyakkan kuat sekali dan bertekstur genes. Batuan ini menerobos baik batuan Mesozoikum maupun Paleozoikum dan karena itu dinyatakan berumur Mesozoikum-Akhir (Kapur) dan dapat dikorelasikan dengan Granit Lassi yang berumur Kapur Akhir (112 ± 240 juta tahun) di dataran tinggi padang (Katili, 1962, 1973).

Granit (Jgr) ; Berwarna biru muda sampai semu merah muda dengan bintik-bintik mineral mafik kehijau-hijauan. Terdapat sebagai *stok*. Susunannya berkisar antara granit biotit hornblenda sampai granodiorit; plagioklas dari jenis oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi dan secara setempat terdapat apatit.

Kabupaten Solok Selatan berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko serta sesar-sesar ikutannya, lipatan dan kelurusan. Sesar berarah utara-selatan, timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Di bagian barat laut dan tenggara sumbu lipatan berarah utara-selatan. Kelurusan umumnya searah dengan sesar Semangko yaitu berarah barat laut-tenggara. Zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia ini masih aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika

terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi.

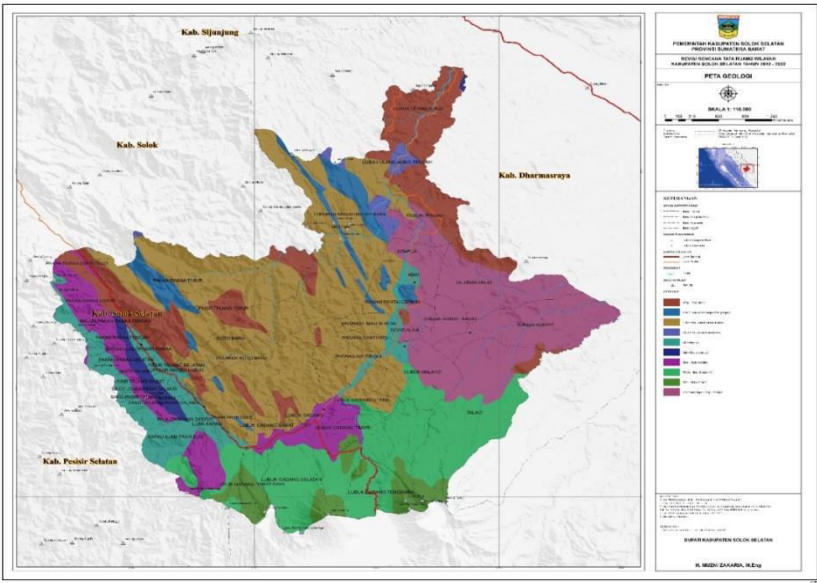
Secara umum total luasan area geologi di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh batu sabak campur kuarsa (PCks) seluas 996,67 Km², dan yang paling sedikit adalah batu andesit campur tufa (QTta) seluas 37,36 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:

Tabel 2.4.
Kondisi Geologi Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Batuan	Kode Geologi	Luas Area (Km ²)
1	Batu granit	MPip	499,20
2	Batu sabak campur batu gamping	Pckl	120,71
3	Batu sabak campur kuarsa	PCks	996,67
4	Alluvium	Qh	228,44
5	Batu apung tufa	QPt	41,64
6	Batu andesit campur tufa	QTta	37,36
7	Batu lava/lahar	Qvte	224,22
8	Batu granodiorit	TMiab	517,10
9	Batu volcanic	Tmv	123,66
10	Batu napal campur andesit	Tos	505,39
Jumlah			3.294,39

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2018

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Solok Selatan



2.1.1.4. Jenis dan Struktur Tanah

Komposisi jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 4 (empat) jenis tanah, yaitu tanah Aluvial, Glei Humus, Latosol, dan Podsolik. Jenis tanah yang paling luas adalah tanah glei humus dengan luasan seluas 2.659,78 Km², dan yang paling sedikit adalah tanah aluvial dengan luasan seluas 0,25 Km².

Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian,

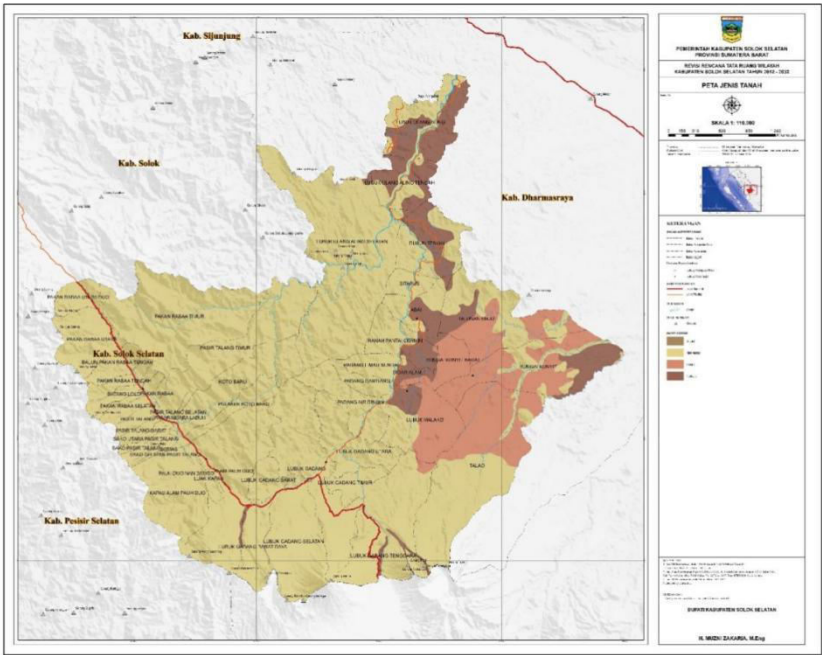
terutama tanaman hortikultura dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:.

Tabel 2.5.
Jenis Tanah Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Tanah	Luas (Km ²)
1	Aluvial	0,25
2	Glei Humus	2.659,78
3	Latosol	360,95
4	Podsolik	273,41
Jumlah		3.294,39

Sumber: RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

Gambar 2.5.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Solok Selatan



2.1.1.5. Geomorfologi

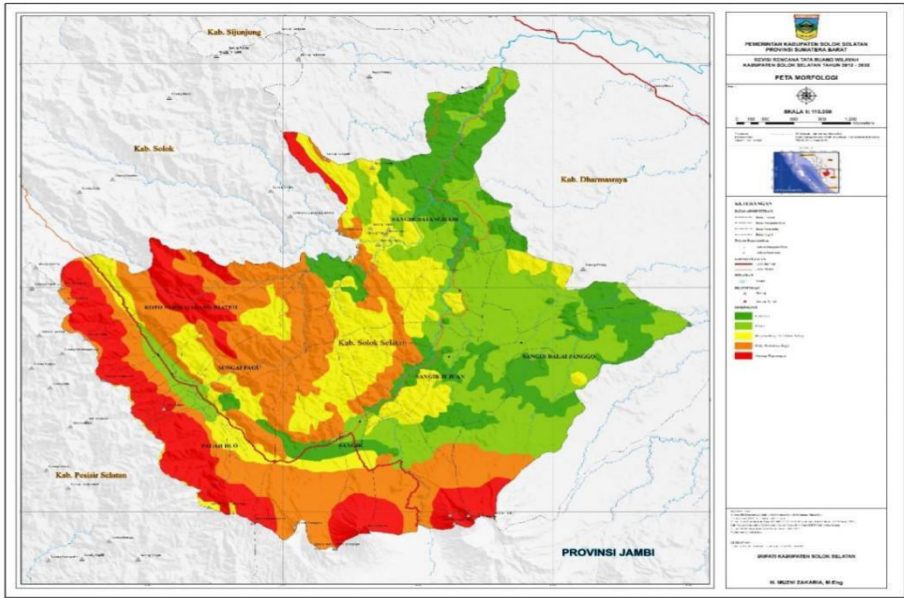
Morfologi Kabupaten Solok Selatan cukup beragam, mulai dari dataran hingga gunung/pegunungan, adapun morfologi di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh tipikal bukit/perbukitan terjal dengan luasan seluas 885,17 Km², dan yang paling sedikit adalah tipikal morfologi gunung/pegunungan dengan luasan seluas 480,11 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:

Tabel 2.6.
Jenis Morfologi Solok Selatan

No	Jenis Morfologi	Luas Area (Km ²)
1	Bergelombang/ Perbukitan Sedang	608,32
2	Bukit/ Perbukitan Terjal	885,17
3	Datar	790,12
4	Gunung/ Pegunungan	480,11
5	Landai	530,68
Jumlah		3.294,39

Sumber : RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

Gambar 2.6.
Peta Morfologi Kabupaten Solok Selatan



Sedangkan Geomorfologi Kabupaten Solok Selatan dapat dibagi atas beberapa bentuk lahan. Untuk tipe satuan bentuk lahan yang paling besar yaitu berupa igir pegunungan metamorf terkikis hujan (Denudasional) Sebesar 888, 30 Km², dan tipe satuan bentuk lahan yang paling kecil yaitu dataran tufa gunung api dengan lahan bergelombang hingga berbukit (Denudasional) 1,34 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:

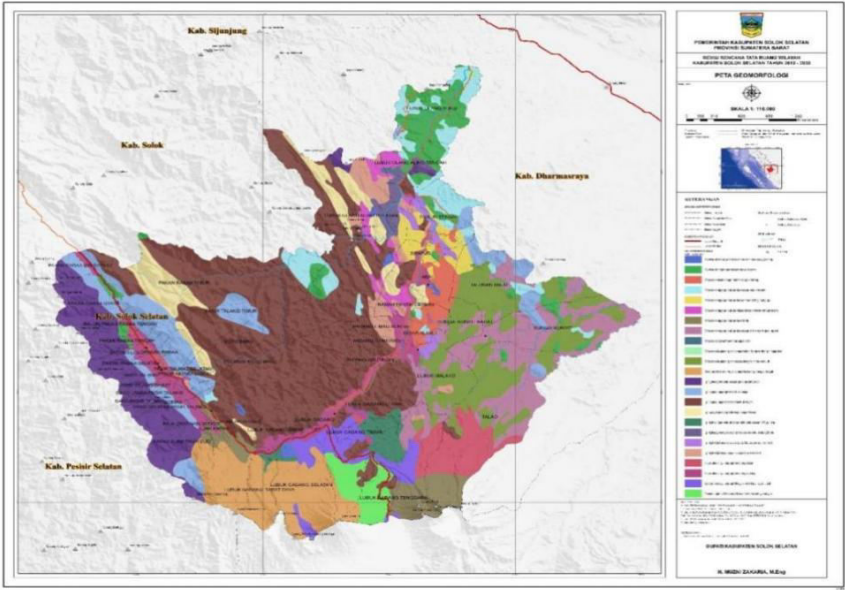
Tabel 2.7.
Satuan Bentuk Lahan Kabupaten Solok Selatan

No	Bentuk Lahan	Luas Area (Km ²)
1	Bukit-bukit kapur pada batuan marmer dan batu gamping (karst)	11,70
2	Bukit-bukit terjal pada batuan beku masam (denudasional)	139,40
3	Dataran bertufa dengan lahan bergelombang (denudasional)	53,37
4	Dataran hingga perbukitan berbatuan beku masam (denudasional)	132,88
5	Dataran hingga perbukitan bersedimen tufa gunung api (denudasional, struktural)	50,27
6	Dataran hingga perbukitan diatas batuan metamorf campuran (denudasional)	42,55
7	Dataran hingga perbukitan lava basic (denudasional, volkanik)	88,35
8	Dataran hingga perbukitan berbatuan tufa masam gunung api (denudasional)	252,81
9	Dataran metamorf berlahan agak datar (denudasional)	2,45
10	Dataran tufa gunung api dengan lahan bergelombang hingga berbukit (denudasional)	1,34
11	Dataran tufa gunung api masam dengan lahan berbukit (denudasional)	269,16
12	Gunung api strato muda dengan batuan gunungapi basalt (volkanik)	229,22

No	Bentuk Lahan	Luas Area (Km ²)
13	Igir gunungapi pada batuan gunung api basalt (denudasional, vulkanik)	222,81
14	Igir pegunungan granit terkikis hujan (denudasional)	232,53
15	Igir pegunungan metamorf terkikis hujan (denudasional)	888,30
16	Igir sangat panjang dari pegunungan kapur (karst)	137,13
17	Igir-igir dengan pola aliran paralel pada batuan tufa gunung (denudasional)	47,48
18	Igir-igir pegunungan terjal pada batuan beku sedang/basic (denudasional)	27,38
19	Igir-igir terjal pada satu sisinya pada batuan sedimen tufa (denudasional)	26,12
20	Igir-igir terjal pegunungan diatas batu metamorf (denudasional)	69,54
21	Kipas aluvial gunung api berlereng datar (fluvial)	129,53
22	Kipas aluvial gunung api berlereng sedang (fluvial)	106,50
23	Lereng lahar gunung api dengan kemiringan agak terjal (fluvial, vulkanik)	73,48
24	Pegunungan terkikis pada batuan tufa masam gunung api (denudasional)	60,08
Jumlah		3.294,39

Sumber : RTRW Kabupaten Solok Selatan 2012-2032

Gambar 2.7.
Peta Geomorfologi Kabupaten Solok Selatan



2.1.1.6. Kondisi Iklim

Secara umum Kabupaten Solok Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan 1.600–4.000 mm/tahun. Curah hujan paling banyak terdapat pada Kecamatan Sangir terutama pada bulan April dan bulan September–Desember, sedangkan Kecamatan Sungai Pagu mempunyai curah hujan yang relatif paling sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:

Tabel 2.8.

Data Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Solok Selatan

Nama Stasiun : Muara Labuh

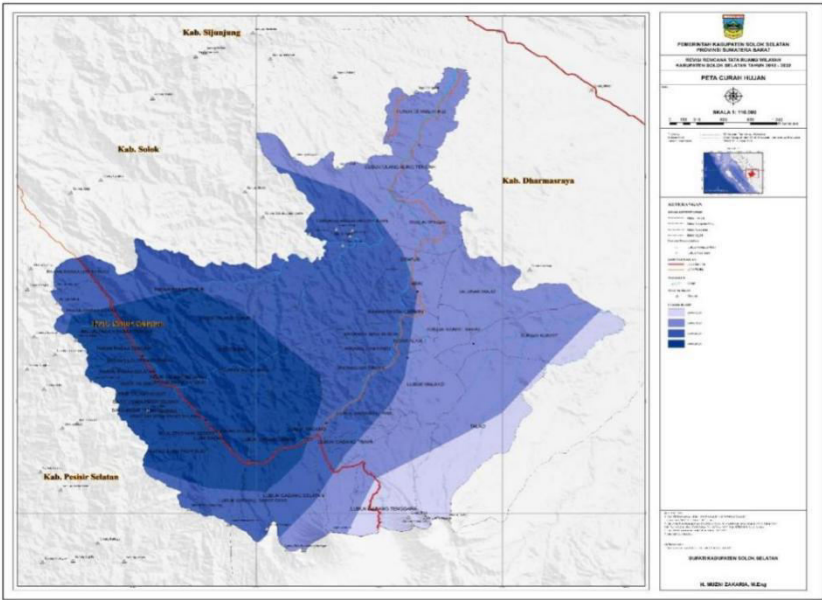
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	49	144	52	137	97	47	133	56
Februari	230	1	196	139	82	37	152	104
Maret	199	71	111	111	111	150	65	82
April	80	102	41	84	107	136	92	103
Mei	81	199	95	20	144	6	61	46
Juni	47	22	45	37	48	5	155	161
Juli	154	33	16	52	69	41	69	76
Agustus	22	78	40	89	107	112	73	78
September	87	120	0	82	185	64	112	136
Oktober	170	179	25	20	82	93	88	84
November	138	167	290	74	108	112	168	165
Desember	140	19	119	18	72	110	308	6
Total	1397	1135	1030	863	1212	913	1476	1097
Rata-rata	116,42	94,58	85,83	71,92	101	76,08	123	91,42

Nama Stasiun : Padang Aro

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	257	336	270	574	140	79	370	422
Februari	261	82	363	495	566	195	531	432
Maret	122	80	537	526	261	552	189	289
April	214	55	394	588	427	551	371	511
Mei	109	21	262	381	412	383	122	251
Juni	3	20	282	141	213	223	366	359
Juli	105	191	81	202	279	278	201	160
Agustus	3	123	103	274	235	189	53	250
September	194	1	82	245	381	177	250	295
Oktober	283	193	68	276	240	46	195	213
November	126	514	677	409	216	97	501	504
Desember	144	238	460	61	159	111	601	66
Total	1821	1854	3579	4172	3529	2881	3750	3752
Rata-rata	151,75	154,5	298,25	347,67	294,08	240,08	312,5	312,67

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, 2021

Gambar 2.8.
Peta Curah Hujan Kabupaten Solok Selatan



2.1.1.7. Hidrologi

Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dari arah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi.

Secara keseluruhan Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi bagian hulu sungai dari Sungai Batang Hari yang merupakan sungai lintas provinsi, dan tergabung ke Daerah Aliran Sungai Batang Hari, yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Adapun sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Solok Selatan yang tergabung ke dalam Wilayah / Daerah Aliran Sungai Batang Hari tersebut pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, dan bersifat permanen / berair disepanjang musim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9.
Sungai-Sungai dan Lokasinya

No .	Nama Sungai	Lokasi	Panjang g (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Mins (m ³ /dtk)
1	Bt. Timbulun	Kec. KPGD	7,50	8,00	0,00	2,00	2,30	0,80
2	Bt. Simuncung	Kec. KPGD	3,50	2,00	0,00	1,00	1,25	0,30
3	Bt. Tanjung	Kec. KPGD	6,75	3,75	0,00	1,50	2,10	0,50
4	Bt. Air busuk	Kec. KPGD	5,25	3,10	0,00	1,00	2,10	0,30
5	Bt. Pasampan	Kec. KPGD	3,50	6,00	0,00	2,00	2,50	1,50
6	Bt. Sei. Kalu	Kec. KPGD	3,00	5,00	0,00	1,00	2,00	1,20
7	Bt. Sei. Manau	Kec. KPGD	3,00	6,00	0,00	2,50	3,60	2,50
8	Bt. Sei. Ipuh	Kec. KPGD	6,75	3,75	0,00	2,00	3,20	1,50
9	Bt. Limpauang	Kec. KPGD	5,25	2,10	0,00	1,50	2,00	0,75
10	Bt. Bancah	Kec. KPGD	2,00	3,50	0,00	1,50	2,50	1,25
11	Bt. Sei. Rambutan	Kec. KPGD	2,50	2,30	0,00	1,50	1,50	0,80
12	Bt. Sei. Rambun	Kec. KPGD	2,50	2,00	0,00	1,00	1,50	0,70
13	Bt. Sei. Kapur	Kec. KPGD	8,75	4,50	0,00	1,50	2,00	0,80
14	Bt. Sei. Bong	Kec. KPGD	2,00	2,00	0,00	1,50	1,30	0,20
15	Bt. Sei. Aro	Kec. KPGD	2,50	5,00	0,00	2,00	2,80	1,50
16	Bt. Sapan	Kec. KPGD	3,50	6,00	0,00	1,50	0,80	0,25
17	Bt. Bt. Pagu	Kec. KPGD	8,00	7,00	0,00	2,00	1,75	0,85
18	Bt. Sei Ratak	Kec. KPGD	2,75	1,60	0,00	1,00	0,45	0,10
19	Bt. Sei. Pangkua	Kec. KPGD	4,00	2,50	0,00	1,10	1,50	0,35
20	Bt. Sei. Binuang	Kec. KPGD	3,00	3,00	0,00	1,50	1,70	0,68
21	Bt. Sei. Jilatang	Kec. KPGD	3,00	3,00	0,00	1,00	1,60	0,65
22	Bt. Suliti	Kec. Sungai Pagu	37,50	25,00	0,00	2,50	10,50	2,75
23	Bt. Kula	Kec. Sungai Pagu	2,50	2,00	0,00	1,50	1,20	0,20
24	Bt. Sei.	Kec. Sungai	8,00	14,50	0,00	2,00	2,90	0,50

No .	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Mins (m ³ /dtk)
	Cangkar	Pagu						
25	Bt. Lawe	Kec. Sungai Pagu	6,00	4,50	0,00	2,00	2,38	1,45
26	Bt. Tembong	Kec. Sungai Pagu	12,00	2,50	0,00	1,20	1,20	0,80
27	Bt. Sipotu	Kec. Sungai Pagu	4,00	3,00	0,00	1,50	2,60	0,80
28	Bt. Lolo	Kec. Sungai Pagu	6,00	5,00	0,00	2,50	2,85	2,15
29	Bt. Bangko	Kec. Sungai Pagu	46,00	28,00	0,00	2,50	10,50	3,00
30	Bt. Sei. Languang	Kec. Sungai Pagu	3,00	3,00	0,00	1,00	1,25	0,25
31	Bt. Siluak	Kec. Sungai Pagu	6,00	3,00	0,00	2,25	1,50	0,35
32	Bt. Sei. Talu	Kec. Sungai Pagu	2,50	2,00	0,00	1,80	1,20	0,30
33	Bt. Bt. Bolai	Kec. Sungai Pagu	3,00	4,00	0,00	0,80	1,00	0,40
34	Bt. Sei. Durian	Kec. Sungai Pagu	3,00	2,50	0,00	2,00	0,85	0,35
35	Bt. Sei. Asahan	Kec. Sungai Pagu	3,50	2,50	0,00	1,50	0,75	0,25
36	Bt. Sei. Lundang	Kec. Pauh Duo	3,50	3,00	0,00	2,00	1,50	0,50
37	Bt. Bulantiak	Kec. Pauh Duo	2,50	4,75	0,00	2,50	1,25	0,60
38	Bt. Sei. Dareh	Kec. Pauh Duo	2,50	3,00	0,00	6,80	1,50	0,45
39	Bt. Bangko Ketek	Kec. Pauh Duo	9,00	11,00	0,00	2,00	15,50	2,50
40	Bt. Malinteh	Kec. Pauh Duo	7,00	6,00	0,00	1,00	1,20	0,45
41	Bt. Kumingking	Kec. Pauh Duo	12,00	3,00	0,00	1,50	1,50	0,77
42	Bt. Pulakek	Kec. Pauh Duo	17,00	8,00	0,00	2,00	2,75	1,50
43	Bt. Bangko Gadang	Kec. Pauh Duo	15,00	35,00	0,00	2,50	4,00	3,00
44	Bt. Liki	Kec. Sangir	28,00	40,00	0,00	2,50	3,25	1,50
45	Bt. Sei. Bangku	Kec. Sangir	8,00	13,00	0,00	2,50	2,25	1,20
46	Bt. Sei. Kapur	Kec. Sangir	9,00	20,00	0,00	2,00	3,00	1,50
47	Bt. Baramé	Kec. Sangir	13,00	12,00	0,00	2,50	2,85	1,75
48	Bt. Sei. Lambai	Kec. Sangir	13,00	13,00	0,00	1,00	1,20	0,55
49	Bt. Sei. Rambutan	Kec. Sangir	7,00	6,00	0,00	2,50	2,25	0,98
50	Bt. Belangir	Kec. Sangir	15,00	10,00	0,00	9,00	3,00	1,25
51	Bt. Sei. Napa	Kec. Sangir	13,00	11,00	0,00	10,00	1,00	0,25
52	Bt. Timbulun	Kec. Sangir	13,00	20,00	0,00	4,50	15,00	0,85
53	Bt. Lompatan	Kec. Sangir	5,00	12,50	0,00	1,50	1,00	0,20
54	Bt. Lipek Patah	Kec. Sangir	6,00	12,50	0,00	1,00	1,20	0,25
55	Bt. Limau Puruik	Kec. Sangir	3,00	6,00	0,00	1,00	0,85	0,20
56	Bt. Sei. Aro	Kec. Sangir	11,00	15,00	0,00	1,50	2,25	1,20
57	Bt. Pasimpai	Kec. Sangir	12,00	12,00	0,00	1,50	1,50	0,50
58	Bt. Sei. Landeh	Kec. Sangir	3,00	3,00	0,00	1,50	3,00	1,20

No .	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Mins (m ³ /dtk)
59	Bt. Malus	Kec. Sangir	12,00	15,00	0,00	2,50	2,25	1,20
60	Bt. Palabian	Kec. Sangir	6,00	10,00	0,00	1,50	1,00	0,50
61	Bt. Sangir	Kec. Sangir	78,00	64,00	0,00	2,50	75,00	3,50
62	Bt. Uwau	Kec. Sangir Jujuan	4,50	18,00	0,00	1,50	0,75	0,20
63	Bt. Alau	Kec. Sangir Jujuan	5,00	18,00	0,00	2,00	1,20	0,50
64	Bt. Ekor	Kec. Sangir Jujuan	5,00	18,00	0,00	4,00	2,50	1,35
65	Bt. Kinang	Kec. Sangir Jujuan	3,00	7,00	0,00	0,50	1,00	0,50
66	Bt. Sei. Dahan	Kec. Sangir Jujuan	14,00	20,00	0,00	1,50	2,25	1,20
67	Bt. Jujuan	Kec. Sangir Balai Janggo	12,50	30,00	0,00	2,50	3,65	1,55
68	Bt. Sei. Gading	Kec. Sangir Balai Janggo	13,00	25,00	0,00	2,00	2,00	1,10
69	Bt. Pangian	Kec. Sangir Balai Janggo	18,50	20,00	0,00	2,50	3,50	1,75
70	Bt. Kulai	Kec. Sangir Balai Janggo	29,50	20,00	0,00	2,50	2,50	1,50
71	Bt. Ganah	Kec. Sangir Balai Janggo	10,00	6,00	0,00	2,50	1,50	0,50
72	Bt. Talantam	Kec. Sangir Batang Hari	23,00	8,00	0,00	2,00	1,20	0,25
73	Bt. Hari	Kec. Sangir Batang Hari	88,00	80,00	0,00	6,00	230,40	96,00
74	Bt. Talunan	Kec. Sangir Batang Hari	18,00	12,00	0,00	1,50	1,20	0,80
75	Bt. Kapiu	Kec. Sangir Batang Hari	1,50	8,00	0,00	1,50	1,00	0,60
76	Bt. Tiak	Kec. Sangir Batang Hari	7,50	10,00	0,00	2,50	1,40	0,80
77	Bt. Pamong	Kec. Sangir Batang Hari	12,00	15,00	0,00	2,00	3,00	1,50
78	Bt. Hari	Kec. Sangir Batang Hari	120,00	50,00	0,00	3,00	200,00	5,00

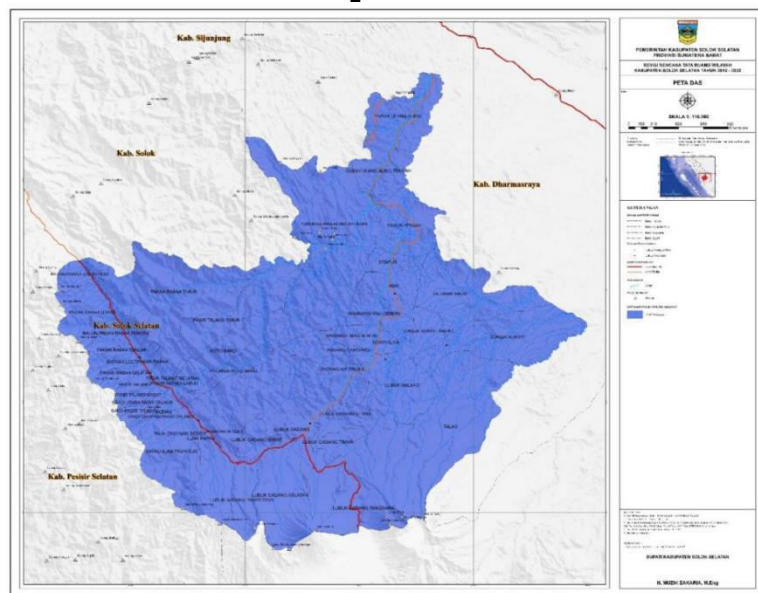
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Disamping aliran air permukaan berupa sungai, di Kabupaten Solok Selatan juga memiliki potensi air tanah yang sangat baik. Gambaran potensi air di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- Akuifer Endapan Aluvium dan Danau, dijumpai di daerah dataran bergelombang terutama di daerah Muara Labuh serta daerah Lubuk Malako dan sekitarnya. Akuifer ini mempunyai permukaan air tanah dekat dengan permukaan tanah, beberapa muncul mata air debit mencapai lebih dari 500 l/dt dengan debit sumur diperkirakan lebih dari 10 l/dt.
- Akuifer Endapan Gunung Api tua; dijumpai di daerah Padang Aro-Lubuk Gadang dan sekitarnya. Debit sumur diperkirakan berkisar antara 5 l/dt sampai 10 l/dt, setempat dijumpai adanya kemunculan mata air dengan debit ada yang mencapai 100 l/dt.

- c. Akuifer Konglomerat dan Batupasir; dijumpai di bagian timur Lubuk Malako dan Abai (bagian timur daerah perencanaan), umumnya air tanah belum dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah.
- d. Akuifer Batu gamping Pejal dan Berongga; dijumpai di Daerah Talantam, Sungai Penuh (Kecamatan Sangir Batang Hari) dan disebelah utara Sungai Pangkur (Koto Parik Gadang Diateh). Kedudukan muka air tanah umumnya dalam, sumber air tanah umumnya dijumpai pada celahan atau daerah depresi.
- e. Akuifer Granit-Granodiorit; dijumpai di Bukit Batuang Bajawek, Balun (Koto Parik Gadang Diateh) dan di sekitar Koto Ranah (Sangir Batang Hari). Umumnya kelulusan sangat rendah setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah rendah ataupun pada zona pelapukan.
- f. Akuifer Campuran Batuan Sedimen dan Gunung api; dijumpai di daerah kaki pegunungan bagian barat. Kelulusan sangat beragam umumnya rendah, terdapat air tanah dangkal.

Gambar 2.9.
Peta DAS Kabupaten Solok Selatan



2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk dari segala aktifitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat di atas suatu lahan. Aktifitas tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam suatu guna lahan yang merupakan dominasi dari pemanfaatan ruang yang ada. Berdasarkan hasil analisis dengan sumber Citra spot 7 Tahun 2017 bahwa luas penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh hutan rimba dengan luasan $\pm 2.143,74 \text{ Km}^2$ (65,07 %), sedangkan penggunaan lahan paling sedikit adalah danau/situ dengan luasan

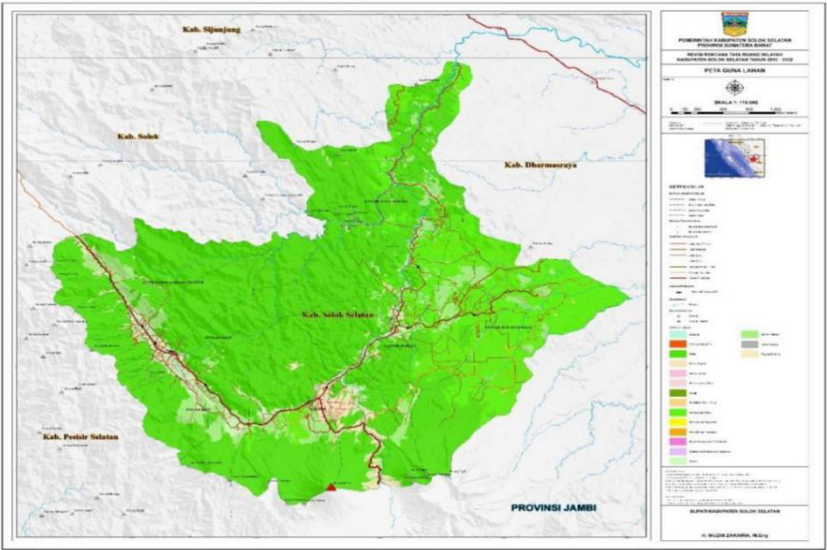
seluas ± 0,03 Km² (0,001 %) dari luas seluruh Kabupaten Solok Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini:

Tabel 2.10.
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017

No	Guna Lahan	Luas Area (Km ²)	Persentase (%)
1	Danau/Situ	0,03	0,001
2	Empang	0,13	0,004
3	Gedung/Bangunan	0,26	0,008
4	Hutan	2.143,75	65,073
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,71	0,021
6	Perkebunan/Kebun	686,77	20,847
7	Permukiman Pedesaan	6,28	0,191
8	Permukiman Perkotaan	8,90	0,270
9	Sawah	68,93	2,092
10	Sawah Irigasi	44,95	1,364
11	Semak Belukar	257,77	7,825
12	Sungai	19,09	0,579
13	Tanah Kosong	0,27	0,008
14	Tegalan/Ladang	56,56	1,717
Jumlah		3.294,39	100

Sumber : Hasil Analisis Citra Spot 7 Tahun 2017

Gambar 2.10.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Solok Selatan



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan arahan kebijakan RTRW Kabupaten Solok Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan diarahkan pada “**Upaya Optimalisasi Lahan Produktif Bagi Pengembangan Wilayah Dengan Tetap Menjaga Keseimbangan Fungsi Perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Hutan Lindung**”. Optimalisasi lahan produktif merupakan upaya ekonomisasi wilayah agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan melalui kreatifitas penyelenggaraan sumber daya buatan yang ramah lingkungan.

Perlindungan TNKS dan hutan lindung sebagai upaya penjaminan kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Solok Selatan serta wilayah hilir, terkait dalam hal dukungan penyediaan sumber daya alam. Dukungan untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan hanya mungkin terjadi kalau aset alam yang ada sekarang ini mendapat perlindungan sebaik mungkin. Kabupaten Solok Selatan termasuk kepada kawasan strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Solok Selatan adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem Zonasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang kebudayaan, dan berpotensi untuk rekreasi / pariwisata. Sedangkan fungsinya adalah sebagai perbandingan sistem penyangga kehidupan, pengawasan, serta pemanfaatan secara lestari keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. TNKS yang mempunyai luas areal sekitar $\pm 1.368.000$ ha membentang dipunggung Bukit Barisan yang meliputi 4 provinsi. Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada pada wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah seluas $\pm 65.911,21$ hektar atau 20,01 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, yang tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Selain itu Kabupaten Solok Selatan mempunyai Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Saribu Rumah Gadang, yang merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan Saribu Rumah Gadang terdapat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, merupakan kawasan pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan dan situs cagar budaya berupa Rumah Gadang.

Kegiatan pembangunan pada kawasan strategis akan menjadi prioritas penanganannya karena kawasan ini mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya dalam memacu pengembangan wilayah di Kabupaten Solok Selatan maupun untuk pertimbangan strategis lainnya. Dengan menggarap suatu kawasan strategis secara multisektor dan terintegrasi diharapkan akan terjadi pengembangan wilayah sesuai karakteristiknya sehingga secara umum akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Kawasan strategis ditetapkan dalam RTRW dimaksudkan untuk:

- 1) Mengarahkan perhatian seluruh pihak terhadap perlunya pemusatan sumber daya pembangunan yang ada. baik dari level pusat hingga daerah, maupun sumber-sumber donor lain yang memungkinkan ke kawasan-

kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis. secara terintegrasi sehingga mampu memicu efek pengganda bagi perekonomian wilayah secara menyeluruh;

- 2) Memusatkan perhatian para pemangku kepentingan pembangunan daerah pada kawasan-kawasan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunannya melihat potensi dan permasalahan yang ada.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Solok Selatan diarahkan ke dalam tiga wilayah pengembangan yang didasarkan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut:

- a. **Kecamatan Sangir** yang berpusat di Padang Aro sebagai pusat pengembangan I dengan *growth point* pelayanan pemerintahan, pelayanan umum, jasa dan perdagangan.
- b. **Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh** sebagai pusat pengembangan II yang dipusatkan di Muara Labuh dengan *growth point* pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, budaya dan sentra produksi tanaman pangan.
- c. **Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo** sebagai pusat pengembangan III dengan *growth point* sektor perkebunan dan pertambangan.

Sekaitan dengan zonasi tersebut, maka pengembangan kawasan strategis di Wilayah Kabupaten Solok Selatan yang akan diangkat meliputi:

1) **Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi**

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan adalah:

- ❖ **Kawasan Perekonomian Padang Aro** merupakan kawasan ibukota Kabupaten Solok Selatan. Disamping sebagai pusat pelayanan administrasi dan pemerintahan, kawasan ini direncanakan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Sangir dan sekitarnya.
- ❖ **Kawasan Perekonomian Muara Labuh** sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan bagian barat, dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh.
- ❖ **Kawasan Perekonomian Lubuk Malako** sebagai kawasan pusat ekonomi bagi masyarakat pada bagian timur Kabupaten Solok Selatan, dengan daerah pelayanan Kecamatan Sangir Jujuan dan Sangir Balai Janggo. Serta juga merupakan simpul menuju dan dari

daerah tetangga dan lintas tengah Sumatera (Sungai Rumbai / Kabupaten Dharmasraya).

- ❖ **Kawasan Perekonomian Abai** sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Sangir Batang Hari, sekaligus merupakan kawasan koridor masuk/keluar dari dan ke Kabupaten Solok Selatan dari daerah tetangga/lintas tengah Sumatera (Kabupaten Dharmasraya).

2) **Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya**

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kabupaten Solok Selatan adalah :

- ❖ **Kawasan Koto Baru**, merupakan kawasan pengembangan adat istiadat dan budaya di Kabupaten Solok Selatan. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan wisata budaya yang didukung oleh peninggalan rumah adat (rumah gadang) dalam jumlah yang banyak dengan jarak yang berdekatan, serta didukung oleh situs Surau Menara dan Masjid Raya Koto Baru.
- ❖ **Kawasan Pasir Talang**, merupakan pusat dari Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Wilayah ini juga menyisakan banyak peninggalan berupa rumah gadang, dan masjid tua. Kawasan strategis ini meliputi wilayah Nagari Pasir Talang, Sako Pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu dan Pakan Rabaa Tengah di Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch.
- ❖ **Kawasan Abai**, merupakan kawasan yang memiliki peninggalan unik berupa belasan rumah gadang panjang yang tidak dijumpai di daerah lainnya di Minangkabau. Kebudayaan unik yang berkembang di kawasan ini adalah kesenian batombe yang tidak dijumpai di daerah lainnya di Sumatera Barat. Kawasan strategis ini meliputi Nagari Abai dan Ranah Pantai Cermin di Kecamatan Sangir Batang Hari.
- ❖ **Kawasan Bidar Alam**, merupakan kawasan yang pernah menjadi tempat Mr. Syafruddin Prawiranegara mengkonsolidasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948-1949. Sebagai Ketua PDRI, beliau menjalankan pemerintahannya dari nagari ini. Masih banyak peninggalan terutama rumah tempat berdiamnya Mr. Syafruddin Prawiranegara dapat ditemui di kawasan ini.
- ❖ **Kawasan Sungai Padi**, merupakan kawasan peninggalan sejarah yang lebih mengutamakan nilai religi, yaitu dengan terdapatnya

Surau dan Makam Syekh Muhammad Arif Sampu serta adanya pengajian yang dinamakan dengan Ratik Zaman. Kawasan Strategis ini meliputi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir.

3) **Kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup**

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah :

- ❖ **Kawasan Batang Sangir**, merupakan kawasan dengan aliran sungai yang berarus deras yang cocok dikembangkan sebagai objek wisata minat khusus seperti arung jeram dan kayak. Kawasan strategis ini meliputi Nagari Lubuk Gadang, Lubuk Gadang Timur, dan Lubuk Gadang Utara di Kecamatan Sangir.
- ❖ **Kawasan Sapan Maluluang**, merupakan kawasan yang berada di Kecamatan Pauh Duo dengan potensi wisata berupa sumber air panas dan pemandangan alam. Kawasan ini telah dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan objek wisata buatan berupa *hot water boom* dan objek wisata Puncak Laras.
- ❖ **Kawasan Golden Arm**, merupakan kawasan yang berada di kaki Gunung Kerinci, dimana merupakan kawasan yang perlu dijaga perkembangannya karena merupakan kawasan hulu sungai. Kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi wisata alam, dengan atraksi berupa panorama Gunung Kerinci, jalur pendakian Gunung Kerinci, Danau Bontak, Situ Sutan Pamenan, perkebunan kopi, Bumi Perkemahan Camintoran, dan lain sebagainya.

2.1.3. **Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah**

Potensi pengembangan ekonomi terkait erat dengan pengembangan dan ketersediaan kawasan budidaya yang ditetapkan berdasarkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten Solok Selatan diarahkan kepada:

A. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830 / Kpts / RC.040 / 12 /

2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-848-2019 tentang Penetapan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 524-978-2016 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat maka Kabupaten Solok Selatan termasuk kedalam lokasi pengembangan kawasan pertanian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan komoditi prioritas adalah:

1. Tanaman pangan: meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu;
2. Hortikultura: meliputi bawang merah, cabai, jeruk, pisang dan manggis;
3. Perkebunan: meliputi tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa; dan
4. Peternakan: meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik.

Rencana pengembangan kawasan pertanian meliputi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan dengan sebaran sebagai berikut:

- ❖ Kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditi prioritas berupa padi (baik padi sawah maupun padi ladang), jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ubi kayu.
- ❖ Kawasan pertanian hortikultura tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujuan, dan Sangir Batang Hari dengan komoditi berupa sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmako, dan tanaman hias. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura di Kabupaten Solok Selatan diarahkan untuk pengembangan komoditi prioritas berupa jeruk, pisang, manggis, durian, sayuran, cabai, bawang dan tanaman hias
- ❖ Kawasan perkebunan tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditi prioritas berupa tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa
- ❖ Kawasan peternakan tersebar diseluruh kecamatan dengan komoditi unggulan ternak, berupa sentra ternak sapi, sentra ternak kerbau, sentra ternak kambing, dan sentra ternak unggas (ayam dan itik)
- ❖ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan

kedaulatan pangan nasional dengan luas 9.162 Ha sawah, dengan rincian:

- a. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh seluas 2.027 Ha;
- b. Kecamatan Sungai Pagu seluas 1.680 ha;
- c. Kecamatan Pauh Duo seluas 1.538 Ha;
- d. Kecamatan Sangir seluas 2.752 Ha;
- e. Kecamatan Sangir Jujuan seluas 794 Ha;
- f. Kecamatan Sangir Balai Janggo seluas 22 Ha; dan
- g. Kecamatan Sangir Batang Hari seluas 349 Ha;

B. Kawasan Perikanan;

Kawasan perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan adalah kawasan perikanan budidaya perairan darat, dengan jenis ikan yang berpotensi untuk dikembangkan berupa ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bawal, ikan patin, dan ikan garing, serta belut.

Pengembangan kegiatan perikanan budidaya perairan darat di Kabupaten Solok Selatan dapat dikembangkan di kolam, saluran irigasi, sungai, dan embung, serta pada kawasan budidaya lainnya yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan tersebut diseluruh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan potensi sumber daya air untuk perikanan, pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Solok Selatan direncanakan tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

C. Kawasan pertambangan;

❖ **Kawasan pertambangan Mineral** tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari . Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, maka potensi pengembangan kegiatan pertambangan mineral di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kabupaten Solok Selatan meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan $\pm 76.193,47$ (tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga dan empat tujuh perseratus) hektar atau 23,13 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan

Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

2. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Solok Selatan meliputi:

- Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam dengan luasan $\pm 192.666,67$ (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam dan enam tujuh perseratus) hektar atau 58,48 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar diseluruh kecamatan;
- Wilayah Usaha Pertambangan Batu Bara dengan luasan $\pm 3.496,94$ (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam dan sembilan empat perseratus) hektar atau 1,06 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya terdapat di Kecamatan Sangir Balai Janggo;
- Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan dengan luasan $\pm 54.967,50$ (lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan lima nol perseratus) hektar atau 16,69 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, dimana lokasinya tersebar diseluruh kecamatan.

3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Solok Selatan dengan luasan $\pm 2.113,95$ (dua ribu seratus tiga belas dan sembilan lima perseratus) hektar atau 0,64 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, yang tersebar diseluruh kecamatan.

❖ **Kawasan panas bumi**, Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3415 K / 30 / MEM / 2015 tentang Izin Panas Bumi PT. Supreme Energy Muara Laboh di Wilayah Kerja Liki Pinang Awan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka rencana pengembangan kawasan panas bumi di Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan luasan ± 56.000 (lima puluh enam ribu) hektar pada wilayah kerja panas bumi Liki Pinang Awan yang tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

❖ **Kawasan pembangkitan tenaga listrik**, Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan pembangkitan tenaga listrik, baik yang bersumber dari energi air, maupun panas bumi. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan seluas $\pm 169,25$ (seratus enam puluh sembilan dan dua lima perseratus) hektar atau 0,05 % dari luas

Kabupaten Solok Selatan yang tersebar di Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

D. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:

- ❖ Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan ini tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari.
- ❖ Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.
- ❖ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

E. Kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri membutuhkan hamparan areal yang cukup luas dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Solok Selatan tersebar di Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Solok Selatan, direncanakan pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah untuk mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Solok Selatan. Rencana Pengembangan Sentra Industri di Kabupaten Solok Selatan, antara lain:

Tabel 2.11.
Rencana Pengembangan Sentra Industri Kabupaten Solok Selatan

Jenis Industri/ Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi	Kawasan Sentra Bahan Baku
Industri Pengolahan Makanan dan Minuman		
Umbi-umbian	1. Sungai Pagu 2. Pauh Duo 3. Sangir	1. Sungai pagu 2. Pauh Duo 3. Sangir
Kacang tanah	1.Koto Parik Gadang Diateh 2.Pauh Duo 3.Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sangir
Pisang	1. Pauh Duo 2. Sangir	1. Sangir 2. Pauh Duo 3. Koto Parik Gadang Diateh 4. Sungai Pagu 5. Sangir Jujuan
Kopi	1. Sangir 2. Koto Parik Gadang Diateh	1. Sangir 2. Sangir Jujuan 3. Sangir Balai Janggo 4. Sangir Batang Hari 5. Sungai Pagu 6. Pauh Duo 7. Koto Parik Gadang Diateh
Kakao	Sangir Jujuan	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Manggis	Sangir Batang Hari	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Jahe Merah	Sangir Jujuan	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir Jujuan
Susu	Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo
Jeruk	Pauh Duo	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir
Daging dan kulit	1. Sungai Pagu 2. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu 3. Pauh Duo 4. Sangir 5. Sangir Jujuan 6. Sangir Batang Hari 7. Sangir Balai Janggo

Jenis Industri/ Bahan Baku	Kawasan Sentra Produksi	Kawasan Sentra Bahan Baku
Industri Pengolahan Minyak Atsiri		
Minyak Atsiri	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sangir	1. Koto Parik Gadang Diateh 2. Sungai Pagu
Industri Tekstil dan produk tekstil (Sulaman dan Bordir)		
Benang Sulam	Koto Parik Gadang Diateh	
Benang Sulam	Sungai Pagu	
Industri Alat dan mesin pertanian		
Besi	Koto Parik Gadang Diateh	Padang

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Solok Selatan

F. Kawasan pariwisata;

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Solok Selatan termasuk ke dalam DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). Kawasan tearsebut lebih dikenal dengan kawasan seribu rumah gadang yang merupakan representasi perkampungan adat yang memiliki sebanyak 125 unit rumah gadang berbagai kaum dan suku, balai adat, surau dan sebuah makam. Berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai pagu. Beberapa unit rumah gadang ini dapat *homestay* bagi wisatawan yang ingin menikmati sensasi kehidupan tradisonal minang kabau tempo dulu.

Kawasan ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan adanya program revitalisasi rumah gadang oleh Kementerian PU PR Tahun 2019. Beberapa unit rumah gadang dilakukan renovasi dan melengkapi beberapa sarana fisik diantaranya pembangunan menara songket dan pembangunan jembatan untuk kelancaran arus transportasi sekitar kawasan. Selain di Kawasan Seribu Rumah Gadang, Rumah Gadang tersebar hampir di seluruh wilayah Solok Selatan yang desain dan bentuk bangunan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

Berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Solok Selatan terkait dengan pembangunan kewilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah ditetapkan 3 KPP yaitu :

1. KPP 1 Padang Aro, fokus pada pengembangan tema wisata ekowisata petualangan alam didukung Wisata budaya dan sejarah.
Ekowisata petualangan alam tersebut adalah :

- a. Air Terjun Tangsi Ampek (Kipas);
- b. Aia Malanca;
- c. Air Terjun Baskom;
- d. Air Terjun Kupitan;
- e. Air Terjun Kembar;
- f. Air Terjun Timbulun;
- g. Arung Jeram Sungai Batang Sangir;
- h. Pulau Mutiara;
- i. Danau Bontak;
- j. Pemandangan Gunung Api Kerinci;
- k. Lubuk Patamuan;
- l. Arung Jeram Sungai Batang Bangko;
- m. Arung Jeram Tangsi Ampek Atas;
- n. Panorama Camintoran;
- o. Danau Bontak; dan
- p. Arung Jeram Batang Sangir.

Wisata budaya yang dikembangkan adalah rumah gadang durian taruang, batu buayo putih daguak, selanjutnya Wisata sejarah pada KPP ini adalah mesjid sampu dan makam syekh syampu.

2. KPP 2 Muara Labuh, fokus pada pengembangan tema Wisata budaya didukung Wisata alam.mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch dan Kecamatan Pauh Duo dengan pusat pelayanan di Muara Labuh.

Wisata budaya pada KPP 2 ini terdiri dari:

- a. Istana Rajo Balun;
- b. Rumah Gadang Tuan Raja Malenggang;
- c. Rumah Gadang Tuan Raja Batuah;
- d. Istana Raja Disambah “Raja Alam Surambi Sungai Pagu”; dan
- e. Kampung Adat Saribu Rumah Gadang.

Dan Wisata alam sebagai pendukung adalah:

- a. Sumber Air Panas Sapan Maluluang;
- b. Air Terjun Ulu Suliti;
- c. Air Terjun Lambe;
- d. Air Panas Sapan Balun;
- e. Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo;
- f. Air Terjun Ngalau Batang Pagu;
- g. Air Terjun Batu Lawe;
- h. Pacu Codang;

- i. Ekowisata Hutan Simancuang;
 - j. Tubing Ducati;
 - k. Air Terjun Batang Sungai Mangun;
 - l. Air Terjun Jorong Sungai Duo;
 - m. Air Terjun Batang Sungai Lundang; dan
 - n. Air Terjun Tubo Taratak Tinggi.
3. KPP 3 Lubuk Malako. fokus pada pengembangan tema Wisata geowisata didukung wisata budaya mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari dengan pusat pelayanan di Lubuk Malako.

Geowisata tersebut terdiri dari:

- a. Bukit Sangko Puyuah;
- b. Ngalau Lubuk Malako;
- c. Goa Batu Kapal (Ngalau Indah);
- d. Bukit Sungai Mintan RPC;
- e. Talang Sunyi RPC;
- f. Goa Intan RPC;
- g. Goa Kuda RPC;
- h. Goa Batang RPC;
- i. Goa Kering RPC;
- j. Goa Laba-Laba RPC;
- k. Bukit Cermin RPC;
- l. Bukit Pandam RPC;
- m. Bukit Selasih RPC;
- n. Bukit SMP RPC; Dan
- o. Goa Putih Lindung Bulan.

Dan Wisata budaya sebagai objek pendukung terdiri dari:

- a. Rumah PDRI;
- b. Tugu PDRI;
- c. Rumah Gadang 21 Ruang; dan
- d. Rumah Gadang Melayu 18 Ruang.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memiliki potensi resiko degradasi lingkungan dan bencana alam. Melihat kedudukan Kabupaten Solok Selatan yang berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam

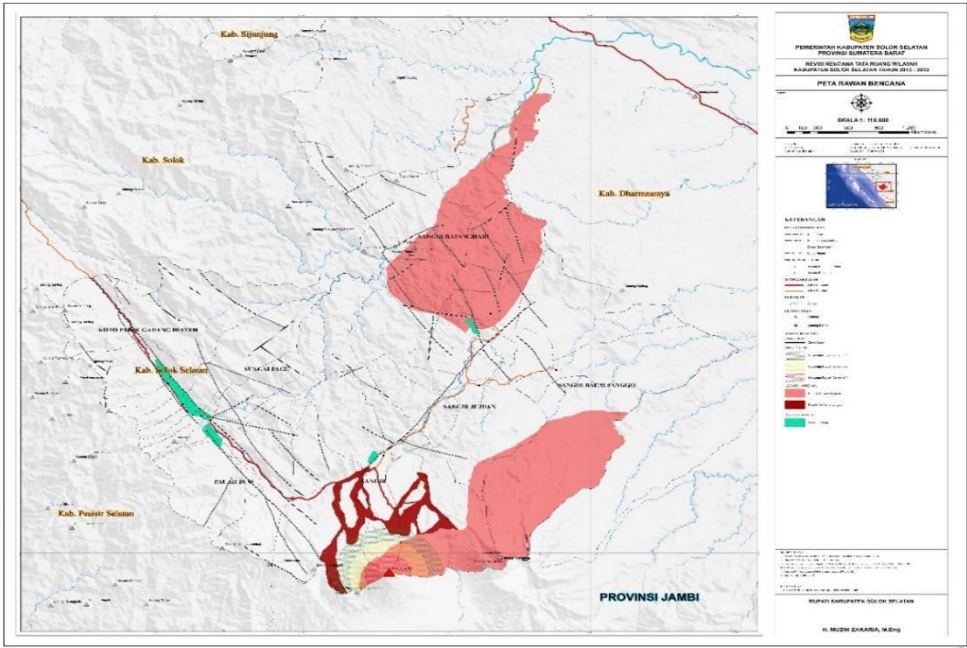
menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana baik gempa bumi, longsor maupun banjir. Secara kewilayahan, wilayah-wilayah kritis lingkungan di Kabupaten Solok Selatan meliputi lahan kritis, erosi, bencana tanah longsor dan banjir.

Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1. **Letusan Gunung Api.** Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Walaupun sebenarnya Kabupaten Solok Selatan secara administrasi daerah tidak memiliki gunung api, tetapi sebahagian besar wilayah kaki Gunung Kerinci berada diwilayahnya. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah akan terkena imbas yang tidak langsung dari letusan dari gunung tersebut (awan panas dan lahar dingin) seperti wilayah Sangir dan Pauh Duo
2. **Gempa Bumi / Sempadan Aktif,** Keberadaan Gunung Kerinci dan Zona Patahan Semangko yang melintasi Kabupaten Solok Selatan menyebabkan Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kawasan rawan gempa bumi, baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Kawasan yang terletak pada patahan aktif di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauh Duo
3. **Longsor.** Longsor umumnya terjadi pada daerah perbukitan yang bertebing terjal dan daerah tebing sungai terutama pada daerah *cut of slope* seperti pada daerah berlereng dengan kelerengan $>15\%$, daerah perbukitan bergelombang, daerah perbukitan terjal dan daerah kaki pegunungan. Daerah ini meliputi sebahagian besar wilayah Kabupaten Solok Selatan terutama 1). Nagari Pakan Rabaa Utara, Nagari Pakan Rabaa Tengah dan Nagari Pakan Rabaa Timur di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh; 2). Nagari Sako Pasir Talang dan Nagari Sako Utara Pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu; 3). Nagari Alam Pauh Duo dan Nagari Kapau Alam Pauh Duo di Kecamatan Pauh Duo; 4). Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Timur, dan Nagari Lubuk Gadang Utara di Kecamatan Sangir; 5). Bukik Manggiu, Bukik Kingkiang, Bukik Koto Jepang di Sangir Jujuan; 6). Nagari Ranah Pantai Cermin di Kecamatan Sangir Batang Hari.
4. **Banjir.** Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Selain itu juga daerah cekungan-cekungan dapat juga terjadi genangan yang menyebabkan banjir. Daerah yang perlu diwaspadai

(berpotensi) rawan banjir terdapat di sepanjang Sungai Batang Hari, Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti, Sungai Batang Liki dan sepanjang Sungai Batang Sangir.

Gambar 2.11.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Solok Selatan



2.1.5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 176.931 jiwa pada tahun 2016 menjadi 182.936 jiwa pada tahun 2020. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 1,67% namun pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan yaitu 0,67% menjadi 0,45%. Sedangkan untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, hal ini dapat dilihat dari Rasio jenis kelamin penduduk Solok Selatan diatas 100%. Namun jika dilihat pada periode tahun 2017-2020 Sex Rasio cenderung mengalami penurunan dari 104,81 pada tahun 2017 menjadi 103,92% pada tahun 2020.

Tabel 2.12.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	176.931	177.931	180.905	182.117	182.936
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	53,71	54,01	54,91	55,28	55,53
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,81	0,57	1,67	0,67	0,45
Sex Ratio (%)	101,17	104,81	104,27	104,00	103,92

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2020 berdasarkan luas wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan adalah 55,53 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (114,96 jiwa/km²), menyusul Kecamatan Sangir (79,28 jiwa/km²), Pauh Duo (74,36 jiwa/km²), Koto Parik Gadang Diateh (70,58 jiwa/km²), Sangir Jujuan (44,11 jiwa/km²), Kecamatan Sangir Balai Janggo (32,86 jiwa/km²) dan Sangir Batang Hari (20,37 jiwa/km²).

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk			Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Sangir	26.251	25.126	51.377	79,28
2	Sungai Pagu	16.733	16.811	33.544	114,96
3	Koto Parik Gadang Diateh	15.119	14.564	29.683	70,58
4	Sangir Jujuan	7.665	7.232	14.897	44,11
5	Sangir Batang Hari	8.303	7.969	16.272	20,37
6	Pauh Duo	9.945	9.683	19.628	74,36
7	Sangir Balai Janggo	9.211	8.324	17.535	32,86
Jumlah		93.227	89.709	182.936	55,53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan (Data diolah).

Ditinjau dari klasifikasi kepadatan penduduk. Kabupaten Solok Selatan tergolong daerah yang berpenduduk tidak padat (Undang-Undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk. yaitu: tidak padat. dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/Km², kurang padat antara 51-250 jiwa/Km², cukup padat 251-400 jiwa/Km², dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/Km²).

Sebaran penduduk menurut kelompok usia (umur) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2019 dapat menggambarkan Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk yang produktif dan non produktif Kabupaten Solok Selatan sebesar 46,67%, ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46-47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jika dilihat per kecamatan dapat dilihat secara berurutan Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio) Kecamatan Sungai Pagu yang paling tinggi yaitu 49,42% dan diikuti oleh Pauh Duo (48,06%), Sangir Jujuan (47,39%), KPGD (46,58), Sangir (46,45%), Sangir Batang Hari (45,01%), dan terakhir Sangir Balai Janggo (41,83%). Penyebaran penduduk per kelompok umur perkecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	Sangir	Sungai Pagu	KPGD	SJJ	SBH	Pauh Duo	SBJ	Total
00-04	4.087	2.157	2.166	1.147	1.236	1.442	1.241	13.476
05-09	4.846	2.964	2.507	1.382	1.563	1.835	1.649	16.746
10-15	4.945	2.985	2.744	1.381	1.584	1.877	1.801	17.317
15-19	5.275	3.028	3.049	1.396	1.758	1.999	1.835	18.340
20-24	5.022	3.032	2.863	1.421	1.574	1.902	1.623	17.437
25-29	3.972	2.318	2.171	1.127	1.244	1.370	1.385	13.587
30-34	3.941	2.313	2.150	1.195	1.324	1.416	1.469	13.808
35-39	4.126	2.512	2.286	1.198	1.279	1.511	1.579	14.491
40-44	3.827	2.217	2.012	1.097	1.193	1.416	1.421	13.183
45-49	3.038	2.073	1.743	934	963	1.123	1.200	11.074
50-54	2.441	1.885	1.497	728	814	975	822	9.162
55-59	1.911	1.622	1.298	539	589	841	597	7.397
60-64	1.528	1.450	1.181	472	483	704	432	6.250
65-69	1.112	1.136	864	349	304	491	233	4.489
70-74	580	692	480	230	176	296	126	2.580
>=75	726	1.160	672	301	188	430	122	3.599
Total Kabupaten	51.377	33.544	29.683	14.897	16.272	19.628	17.535	182.936

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan (Diolah)

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan menurut tingkat pendidikan secara umum dapat dilihat sebaran penduduk Kabupaten Solok Selatan menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu Tidak/Belum Sekolah sebesar 22,90%, Belum Tamat atau masih bersekolah pada tingkat SD sebesar 14,57%, tamat SD atau sedang bersekolah pada tingkat SLTP sebesar 24,26%, tamat SLTP atau masih sedang bersekolah pada tingkat SLTA sebesar 15,42%, tamat SLTA atau sedang melanjutkan ke jenjang Diploma/S1 sebesar 17,50% dan berpendidikan Diploma/S1/S2/S3 5,32%. Secara rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tidak/Blm Sekolah	21.593	20.311	41.904
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	14.146	12.522	26.668
3	Tamat SD/Sederajat	22.195	22.201	44.396
4	SLTP/Sederajat	14.902	13.312	28.214
5	SLTA/Sederajat	16.916	15.098	32.014
6	Diploma I/II/III	892	2.022	2.914
7	Diploma IV/Strata I	2.433	4.128	6.561
8	Strata-II	148	111	259
9	Strata-III	2	4	6
Jumlah Penduduk		93.227	89.709	182.936

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

Ditinjau dari jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 menurut jenis kegiatan utamanya dapat dilihat bahwa sebaran penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa 47,64% penduduk belum bekerja/tidak bekerja (terdiri dari anak-anak, penduduk yang bukan usia kerja, dan ibu rumah tangga), Pelajar dan Mahasiswa sebesar 20,53%, Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebesar 14,61%, Wiraswasta sebesar 11,47%, dan ASN, Pensiunan, Tenaga Pengajar, Tenaga Kesehatan, dan serta Penyuluh Agama sebesar 2,60%. Secara rinci penyebaran penduduk berdasarkan jumlah kegiatan utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16.
Jumlah Penduduk Solok Selatan Menurut Jenis Kegiatan Utama 2020

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	26.365	60.788	87.153
2	Aparatur/Pejabat Negara	1.539	2.244	3.783
3	Tenaga Pengajar	137	476	613
4	Wiraswasta	18.271	2.721	20.992
5	Pertanian/Peternakan	23.544	3.549	27.093
6	Nelayan/Perikanan	13	3	16
7	Pelajar/Mahasiswa	20.270	17.376	37.646
8	Tenaga Kesehatan	34	322	356
9	Pensiunan	265	197	462
10	Lainnya	2.789	2.033	4.822
Jumlah Penduduk		93.227	89.709	182.936

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi
A. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan dominasi sektor-sektor pembentuk ekonomi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah. Dalam melihat perkembangan PDRB dapat dihitung melalui 2 pendekatan yaitu Atas Dasar harga Berlaku yang menghitung nilai tambah batang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan Atas Dasar Harga Konstan yang mengitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) periode 2016-2019

terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari Rp. 4.598.229,50 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 5.571.732,28 juta pada tahun 2019 untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 3.435.196,44 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 3.977.409,14 juta pada tahun 2019 untuk PDRB berdasarkan ADHK. Meskipun mengalami pertumbuhan disetiap tahunnya namun tingkat pertumbuhan baik PDRB ADHB dan ADHK tahun 2016-2019 terus mengalami perlambatan dari 8,55% menjadi 5,08% untuk PDRB berdasarkan ADHK dan 5,12% menjadi 4,80% untuk PDRB berdasarkan ADHB. Penurunan ini terjadi seiring dengan perlambatan dari pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang diiringi oleh penurunan harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian.

Untuk tahun 2020 merupakan tahun yang paling berat bagi perekonomian dunia, nasional dan daerah dimana dihadapkan kepada bencana Pandemi Covid 19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid 19 yaitu melalui *social distancing* dan *physical distancing*, yang diikuti oleh kebijakan yang lebih luas di beberapa daerah yang salah satunya Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak terhadap terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha baik dari penawaran (supply) dan sektor permintaan (demand). Disisi produksi atau penawaran (supply) kebijakan ini mengakibatkan penurunan hasil produksi, dimana akses masyarakat dan dunia usaha ke faktor-faktor produksi dibatasi sehingga produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan sedangkan dari sisi permintaan (demand) kebijakan ini berdampak kepada penurunan permintaan yang disebabkan karena terbatasnya pergerakan masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam memenuhi konsumsinya. Kondisi ini menyebabkan pelaku ekonomi cenderung melakukan *wait and see* dalam keputusan ekonominya, atau dengan kata lain menahan kegiatan konsumsi maupun investasi.

Selain itu, larangan mudik serta pemotongan atau penundaan dana transfer diberlakukan oleh pemerintah pusat ke daerah (mengakibatkan penurunan belanja daerah) akan berdampak terhadap perekonomian daerah, hal ini didasari oleh Laporan Bank Indonesia setiap tahunnya yang menyatakan bahwa perputaran uang yang cukup besar di Sumatera Barat pada umumnya terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat menyambut Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal) dan pada saat akhir tahun terutama pada waktu pencairan belanja pembangunan yang berasal dari pemerintah. Kondisi ini akhirnya menyebabkan terjadinya kontraksi (pertumbuhan dibawah 0%) dalam perekonomian yang ditandai oleh

menurunnya PDRB dari tahun sebelumnya dari Rp. 5,571,732,28 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528,507,31 juta pada tahun 2020 (mengalami penurunan 0,78%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan dari Rp. 3.977.409,14 juta menjadi Rp. 3.928.031,94 juta (mengalami penurunan -1,24%) untuk PDRB berdasarkan ADHK.

Tabel 2.17.
PDRB Kabupaten Solok Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (harga berlaku)		PDRB (harga konstan tahun)	
	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	4.598.229,50	8,55	3.435.196,44	5,12
2017	4.990.779,69	8,54	3.612.139,52	5,18
2018	5.302.502,22	6,25	3.795.200,14	5,04
2019	5,571,732,28	5,08	3.977.409,14	4,80
2020	5.528,507,31	-0,78	3.928.031,94	-1,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari per sektor pembentuk PDRB atas Harga Berlaku dapat dilihat hampir seluruhnya sektor perekonomian mengalami penurunan pertumbuhan kecuali sektor yang terkait dengan penanganan Covid 19, malahan terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; dan Jasa lainnya. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Pendidikan masih dapat bertumbuh dan bertahan meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tetap dapat bertumbuh lebih besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jaminan sosial terhadap masyarakat dan peningkatan anggaran kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi dan mengurangi dampak *Pandemi Covid 19*.

Sedangkan dari sisi PDRB atas Harga Konstan yang menggambarkan kondisi riil pertumbuhan nilai tambah barang dengan mengeluarkan inflasi harga barang dari perhitungan dengan cara memakai harga dasar tahun 2010 dapat dilihat bahwa sebahagian besar sektor perekonomian mengalami penurunan, malahan terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa lainnya, Konstruksi, Pengadaan Listrik

dan Gas, Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan. Meskipun masih mengalami penurunan pertumbuhan namun sektor utama pembentuk perekonomian Kabupaten Solok Selatan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih bisa bertumbuh masing-masing 0,25% dan 0,09%. Beberapa sektor yang masih bisa tetap mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 7,44 untuk sektor Informasi dan Komunikasi dan 7,40 untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Peningkatan ini lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sekolah daring dan memaksimalkan penggunaan internet dan aplikasi untuk penyelesaian tugas-tugas pemerintahan dan dunia usaha serta peningkatan anggaran pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran *Pandemi Covid 19*.

Dilihat dari struktur perekonomian periode tahun 2016-2020 struktur perekonomian kontribusi sektor perekonomian Kabupaten Solok Selatan masih didominasi oleh sektor primer yaitu rata-rata 40,64% dari PDRB ADHB, dengan sektor utama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; dan Pengadaan Listrik dan Gas. Namun dominasi sektor primer ini terus mengalami penurunan dari 43,53% (pada tahun 2016) menjadi 38,21% (pada tahun 2020) seiring dengan melambatnya pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Pertambangan dan Penggalan dan meningkat dan berkembangnya sektor sekunder dan tersier seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel 2.18.**Perkembangan Nilai dan Petumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)**

Sektor	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.546,34	7,45	1.597,08	3,28	1.626,26	1,83	1.626,72	0,03	1.590,98	- 2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	454,05	6,11	462,68	1,90	491,03	6,13	527,66	7,46	519,50	- 1,55
C	Industri Pengolahan	247,11	4,62	246,59	- 0,21	246,80	0,09	234,85	- 4,84	237,70	1,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,22	16,93	1,56	28,14	1,81	16,03	2,20	21,55	2,11	- 4,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,10	8,76	2,24	6,51	2,38	6,25	2,59	8,82	2,63	1,54
F	Konstruksi	528,61	7,90	584,08	10,49	648,48	11,03	724,26	11,69	707,20	- 2,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	833,38	11,15	915,33	9,83	1.014,21	10,80	1.126,05	11,03	1.116,73	- 0,83
H	Transportasi dan Pergudangan	272,22	9,34	295,99	8,73	326,62	10,35	367,31	12,46	337,83	- 8,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,63	12,85	38,41	10,91	41,75	8,70	47,98	14,92	43,53	- 9,27
J	Informasi dan Komunikasi	184,78	10,62	209,48	13,37	233,54	11,49	265,85	13,83	285,31	7,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,76	10,48	38,92	- 2,11	40,50	4,06	43,55	7,53	44,30	1,72
L	Real Estate	37,65	9,04	39,78	5,65	42,52	6,89	46,18	8,60	46,60	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,67	9,10	0,73	8,78	0,77	6,05	0,84	9,09	0,83	- 1,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,91	10,44	239,72	12,07	255,91	6,75	278,46	8,81	304,84	9,47
P	Jasa Pendidikan	99,49	13,77	110,85	11,42	119,22	7,55	136,66	14,63	144,40	5,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,25	6,86	53,40	10,67	59,63	11,67	66,18	10,98	73,28	10,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	54,04	17,08	57,03	5,53	64,74	13,52	74,38	14,89	70,76	- 4,87
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.598,22	8,55	4.893,87	6,43	5.216,18	6,59	5.571,73	6,82	5.528,51	- 0,78

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.19.**Perkembangan Nilai dan Petumbuhan Per Sektor PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)**

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.106,20	2,95	1.126,25	1,81	1.150,90	2,19	1.170,07	1,67	1.172,98	0,25
B	Pertambangan dan Penggalian	287,92	6,3	290,32	0,83	301,87	3,98	317,35	5,13	310,48	-2,16
C	Industri Pengolahan	201,37	2,52	200,45	-0,46	201,94	0,74	196,76	-2,57	193,26	-1,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,8	10,22	0,87	8,75	0,95	9,20	1,01	6,32	0,96	-4,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,74	3,31	1,85	6,32	1,94	4,86	2,01	3,61	2,02	0,50
F	Konstruksi	401,16	6,83	437,29	9,01	469,84	7,44	499,48	6,31	467,56	-6,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	644,17	5,5	698,89	8,49	744,43	6,52	795,87	6,91	796,62	0,09
H	Transportasi dan Pergudangan	217,65	7,61	234,79	7,88	253,7	8,05	276,32	8,92	247,21	-10,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,23	5,98	26,49	9,33	28,64	8,12	31,13	8,69	27,88	-10,44
J	Informasi dan Komunikasi	186,69	8,71	208,55	11,71	227,61	9,14	246,43	8,27	264,77	7,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30,09	6,85	29,03	-3,52	29,44	1,41	30,07	2,14	30,12	0,17
L	Real Estate	28,13	4,56	29,51	4,91	30,81	4,41	32,49	5,45	32,5	0,03
M,N	Jasa Perusahaan	0,51	4,79	0,55	7,84	0,58	5,45	0,61	5,17	0,59	-3,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	155,73	5,81	167,47	7,54	178,64	6,67	189,03	5,82	188,04	-0,52
P	Jasa Pendidikan	72	8,64	79,04	9,78	84,61	7,05	91,95	8,68	96,23	4,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,08	3,96	41,53	9,06	45,25	8,96	48,67	7,56	52,27	7,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	38,71	10,57	40,25	3,98	44,06	9,47	48,16	9,31	44,53	-7,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.435,20	5,12	3.613,14	5,18	3.795,20	5,04	3.977,41	4,80	3.928,03	-1,24

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.20.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Perlapangan Usaha Atas Harga Berlaku (ADHB)
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (%)

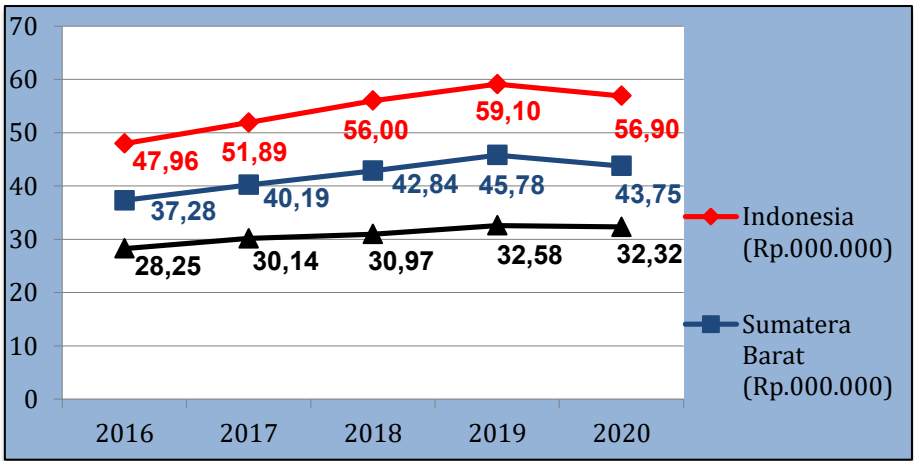
Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,63	32,20	32,63	31,17	31,18	30,33	29,20	29,42	28,78	29,86
B	Pertambangan dan Penggalian	9,87	8,38	9,45	8,04	9,41	7,95	9,47	7,98	9,40	7,90
C	Industri Pengolahan	5,37	5,86	5,04	5,55	4,73	5,32	4,22	4,95	4,30	4,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	11,50	11,68	11,93	12,10	12,43	12,38	13,00	12,56	12,79	11,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,12	18,75	18,70	19,34	19,44	19,62	20,21	20,01	20,20	20,28
H	Transportasi dan Pergudangan	5,92	6,34	6,05	6,50	6,26	6,68	6,59	6,95	6,11	6,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,71	0,78	0,73	0,80	0,75	0,86	0,78	0,79	0,71
J	Informasi dan Komunikasi	4,02	5,43	4,28	5,77	4,48	6,00	4,77	6,20	5,16	6,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,88	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,76	0,80	0,77
L	Real Estate	0,82	0,82	0,81	0,82	0,82	0,81	0,83	0,82	0,84	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,65	4,53	4,90	4,64	4,91	4,71	5,00	4,75	5,51	4,79
P	Jasa Pendidikan	2,16	2,10	2,27	2,19	2,29	2,23	2,45	2,31	2,61	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1,11	1,09	1,15	1,14	1,19	1,19	1,22	1,33	1,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,18	1,13	1,17	1,11	1,24	1,16	1,33	1,21	1,28	1,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

B. PDRB Per Kapita

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan. Dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa pada periode 2016-2019 PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 28,23 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.32,58 juta pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 32,32 juta atau mengalami penurunan Rp. 0,26 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pertumbuhan dari PDRB berdasarkan ADHB dari Rp. 5,571,732,28 Juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 5.528,507,31 Juta pada tahun 2020.

Gambar 2.12.
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



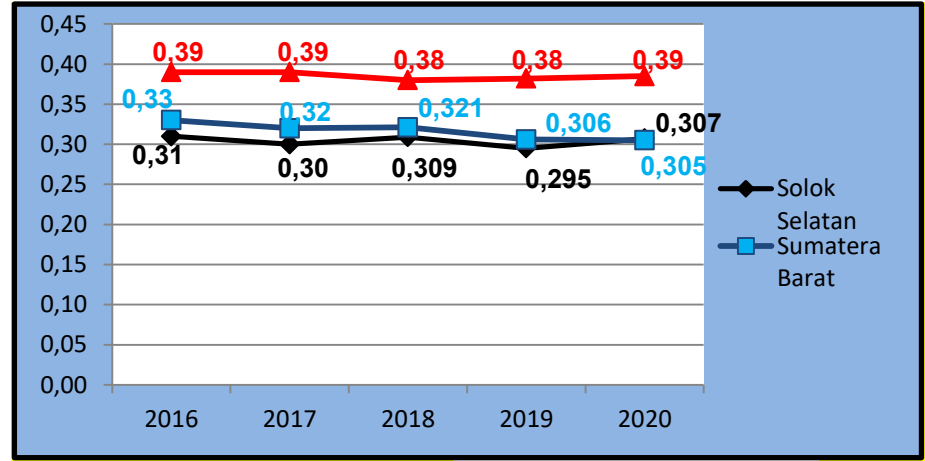
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 namun jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi dan Nasional, penurunan PDRB perkapita Kabupaten Solok Selatan lebih rendah. Hal ini menyebabkan selisih antara PDRB perkapita Provinsi dan Nasional semakin mengecil yaitu dari 13,20 juta dengan Provinsi dan 26,52 juta dengan Nasional pada tahun 2019 menjadi Rp 11,43 juta dengan Provinsi dan 24,93 juta dengan Nasional pada tahun 2020.

C. Indek Gini (Gini Rasio)

Koefisien indeks gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti semakin besar indeks gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial.

Gambar 2.13.
Perbandingan Indek Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari perkembangan, Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 berfluktuasi setiap tahunnya yaitu dari 0,310 tahun 2016, turun menjadi 0,300 pada tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi 0,310 pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 0,295 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,307, kenaikan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin tidak merata atau dengan kata lain *gap* antara penduduk pendapatan tertinggi dengan terendah semakin meningkat dengan kata lain dampak pandemic Covid 19 lebih berdampak terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat pendapatan menengah kebawah. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi dan Nasional Indek Gini Kabupaten Solok Selatan lebih baik dari rata-rata Nasional (berada dibawah rata-rata Nasional) akan tetapi lebih rendah dari rata-rata Provinsi (berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari perkembangan indek gini, distribusi Kabupaten Solok Selata masih berada pada kategori ketimpangan sedang karena indeknya masih berada diantara 0,3 dan dibawah 0,5 ($0.3 \leq G \leq 0.5$).

D. Angka Kemiskinan

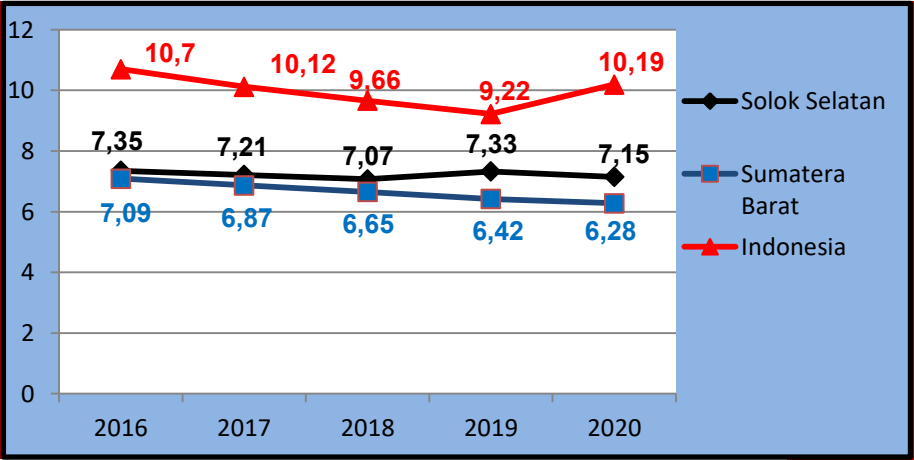
Menurut Bank Dunia (2000), pada umumnya definisi kemiskinan mengacu kepada ide dasar bahwa kemiskinan adalah masalah “kekurangan” dalam “kesejahteraan”. Di lain pihak Badan Pusat Statistik (BPS) secara lebih spesifik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonominya tinggi, serta diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin ini bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang menghitungnya, serta kriteria yang ditetapkan.

Dari gambar dibawah dapat kita lihat bahwa sampai tahun 2018 tingkat kemiskinan penduduk Solok Selatan terus mengalami penurunan dari 7,35% pada tahun 2016 menjadi 7,07% pada tahun 2018, namun penurunannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 Tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan mengalami kenaikan menjadi 7,33%, kenaikan ini disebabkan karena melemahnya harga-harga komoditas unggulan Kabupaten Solok Selatan seperti Sawit dan Karet dan pemberantasan *illegal mining*. Selain itu serta faktor bencana yang melanda Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2019 yang menyebabkan rusaknya sarana dasar masyarakat serta sarana perekonomian masyarakat seperti sawah, kebun, tenak. Namun pada tahun 2020 meskipun dalam kondisi Pandemic Covid 19, namun tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,15 atau turun sebesar 0,18% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tingkat kemiskinan ini diikuti oleh menurunnya jumlah penduduk miskin dari 12,49 ribu jiwa menjadi 12,39 ribu jiwa dan peningkatan garis kemiskinan (rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan) dari Rp. 387.438 per bulan menjadi Rp.419 442 perbulan.

Penurunan tingkat kemiskinan ini diikuti oleh peningkatan dari kesejahteraan penduduk miskin yang dapat dilihat dari penurunan dari indikator pendukungnya yaitu Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,84 pada tahun 2019 menjadi 0,79 pada tahun 2020 dan Keparahan Kemiskinan (P2)

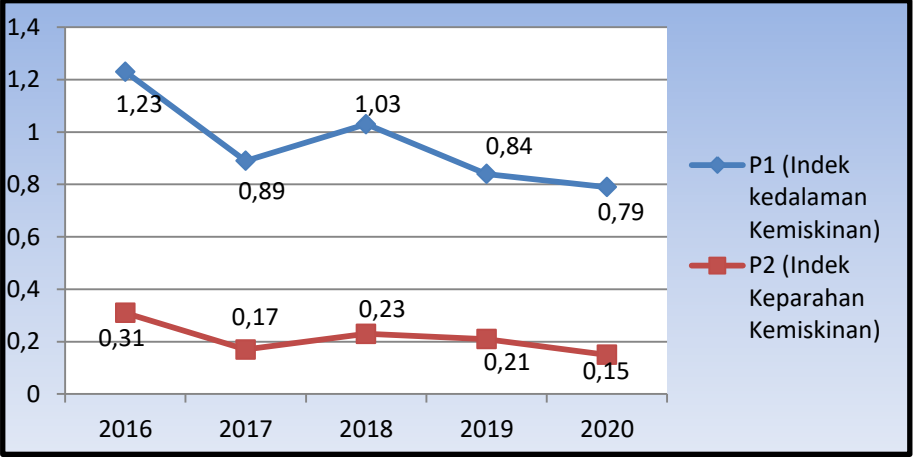
dari 0,21 pada tahun 2019 menjadi 0,15 pada tahun 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan penduduk miskin. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indek keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan semakin lebar ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan sangat miskin.

Gambar 2.14.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan
 Catt : Tahun 2020 berdasarkan kondisi bulan Maret

Gambar 2.15.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

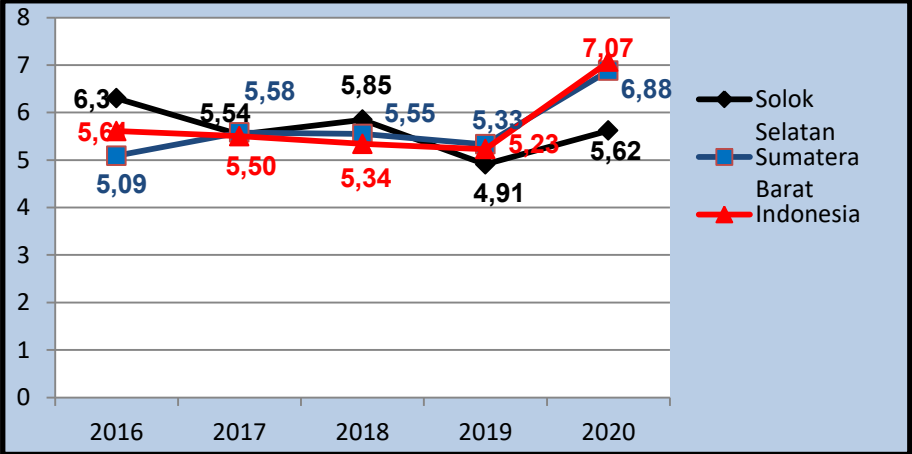
E. Pengangguran

Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau

yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Dilihat dari perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2019 Tingkat pengangguran di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi cenderung mengalami penurunan yaitu dari 6,3% pada tahun 2016, 5,54% pada tahun 2017, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 5,85%, dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 4,91%. Penurunan ini lebih disebabkan karena meningkatnya penduduk usia produktif untuk kembali melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Namun pada tahun 2020 TPT kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 5,62%. Peningkatan ini terjadi sebagai akibat penurunan kondisi perekonomian dunia termasuk Solok Selatan akibat kebijakan penanganan Pandemic Covid-19 melalui Kebijakan PSBB, yang membatasi aktifitas masyarakat dalam perekonomian.

Gambar 2.16.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

F. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga angka kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk melihat tingkat keamanan masyarakat maka dapat dilihat dari perkembangan angka kriminalitas. Jika dilihat dari perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016-2020 mengalami

penurunan yaitu dari 35,72 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 18,69 per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Penurunan ini seiring dengan menurun kasus kriminalitas dari 632 kasus menjadi 342 kasus.

Penurunan angka kriminalitas dapat diartikan tingkat keamanan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan semakin meningkat seiring dengan menurunnya angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.21.
Perkembangan Jumlah Kasus dan Kasus yang terselesaikan dan Angka Kriminalitas Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus Kriminal ditangani	632	528	458	443	342
2.	Persentase Kasus yang Terselesaikan	47,15	64,77	50,65	68,39	100
3.	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	35,72	29,67	25,31	24,32	18,69

Sumber: BPS dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan

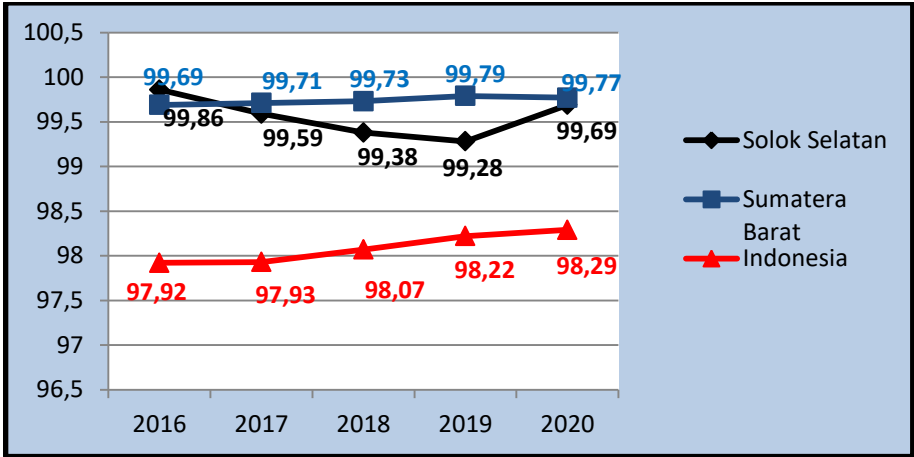
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15-64 tahun yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Selama periode tahun 2016-2019, capaian angka melek huruf di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 99,86%, terus mengalami penurunan, sampai tahun 2019 menjadi 99,28%. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 99,69%. Ini berarti masih terdapat 0,31% penduduk yang berusia 15-64 tahun yang masih buta huruf. Pada tahun 2020 angka melek huruf penduduk berjenis laki-laki masih lebih besar dari pada penduduk perempuan yaitu laki-laki 100% dan perempuan 99,37%. Jika dilihat dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata nasional akan tetapi masih berada dibawah rata-rata provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.17.
Perkembangan Persentase Melek Huruf Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

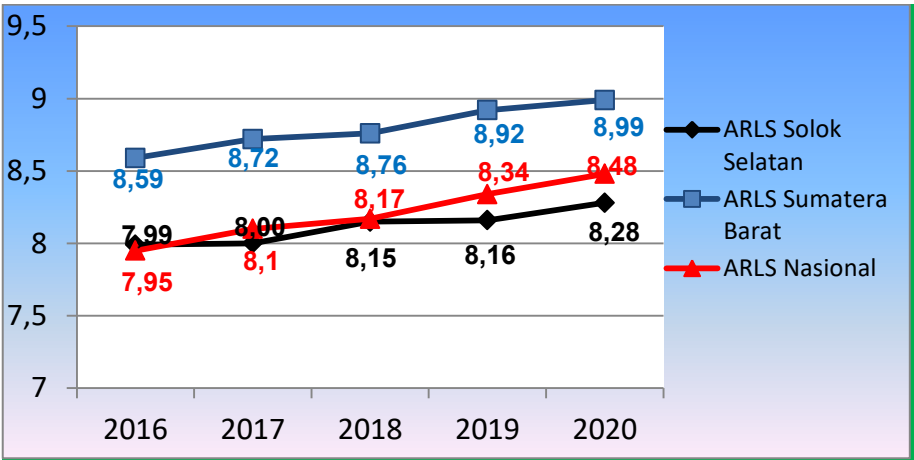
Untuk melihat rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat melalui Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun keatas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah dimasa mendatang.

Jika dilihat dari perkembangan ARLS, terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 7,99 tahun pada tahun 2016 menjadi 8,28 tahun pada tahun 2020. ARLS Kabupaten Solok Selatan sebesar 8,28 tahun dapat diartikan rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas menamatkan pendidikan setara kelas 2-3 SMP. Lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia diatas 45 tahun serta relatif banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi maupun Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMK/MA) yang cenderung mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah diluar Kabupaten Solok Selatan.

Sedangkan untuk AHLS menunjukan adanya peningkatan yaitu dari 12,51 tahun pada tahun 2016 menjadi 12,71 tahun pada tahun 2020. Ini berarti rata rata harapan lama sekolah penduduk yang akan masuk sekolah (usia 7 tahun) diprediksi bersekolah sampai tingkat SMA-D1. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan pendidikan dari pendidikan dasar sembilan tahun menjadi pendidikan universal (12 tahun) serta hampir meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah.

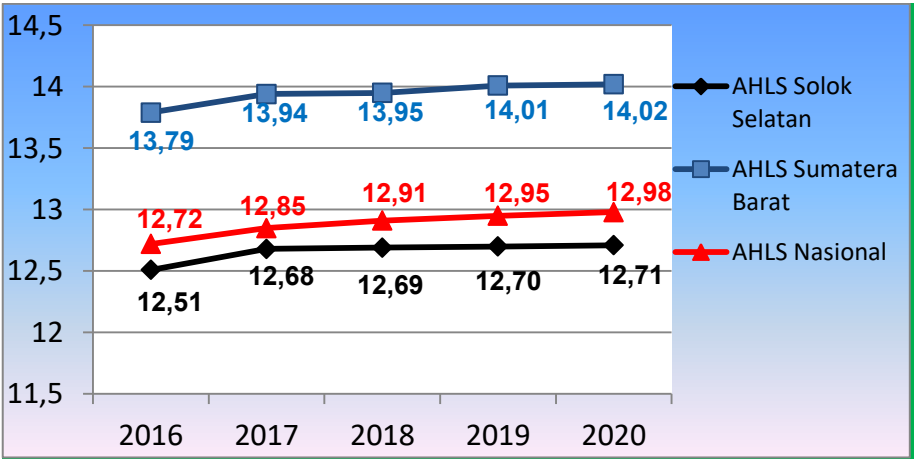
Meskipun terus mengalami kenaikan ARLS dan AHLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu 8,99 tahun dan 8,48 tahun untuk ARLS dan 14,02 tahun dan 12,98 tahun untuk AHLS.

Gambar 2.18.
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

Gambar 2.19.
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



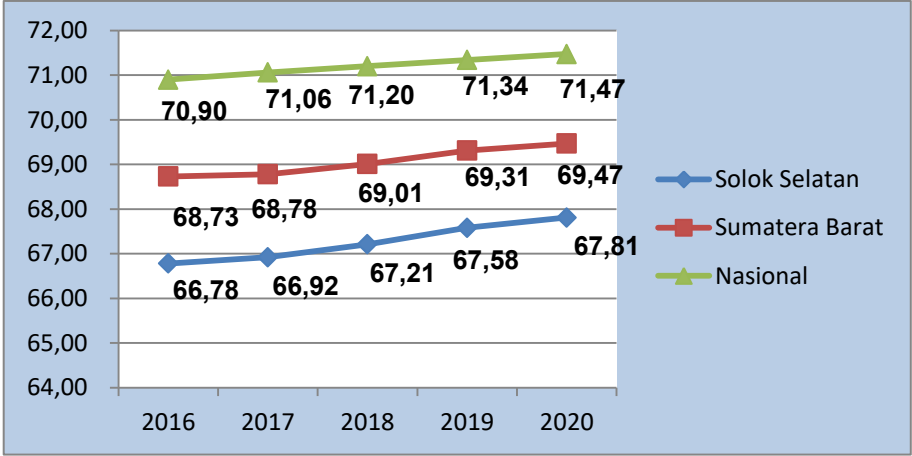
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

C. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan indikator kesehatan yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Umur harapan hidup adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah. Dilihat dari perkembangan Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 adalah 66,78 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 67,81 tahun. Peningkatan umur harapan hidup seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera

Barat dan Nasional pada periode tahun 2016-2020 terlihat bahwa peningkatan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan lebih besar yaitu 1,93 tahun sedangkan nasional hanya sebesar 0,57 tahun dan Provinsi Sumatera Barat hanya sebesar 0,74 tahun. Meskipun Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (diatas rata Kabupaten Pasaman, Sijunjung dan Mentawai) dan Nasional.

Gambar 2.20.
Pembandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan

D. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat dari dua indikator pokok yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Dilihat dari perkembangan TPAK Kabupaten Solok Selatan tahun 2017-2020 cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 69,19% pada tahun 2016 menjadi 72,67% pada tahun 2020. Peningkatan TPAK ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja di Kabupaten Solok Selatan tersedia untuk melakukan kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan TPAK ini kurang diikuti oleh peningkatan penduduk usia produktif yang bekerja terutama periode 2019-2020 yang mengalami penurunan dari 95,09% menjadi 94,38%.

Sedangkan tingkat produktifitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan yang dapat dilihat dari Rasio PDB per Tenaga Kerja sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga Rp. 67,72 juta pertahun, namun pada tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan menjadi 65,38 juta pertahun pada tahun 2019 menjadi 64,81 juta pertahun. Penurunan ini lebih disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan dari 5,07% pada

tahun 2018 menjadi 4,89% pada tahun 2019 dan -1,24% pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan beberapa harga beberapa komoditi unggulan daerah terutama hasil pertanian yang merupakan mayoritas penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Solok Selatan serta kebijakan penanganan Pandemic Covid-19 melalui Kebijakan PSBB, yang membatasi aktifitas masyarakat dalam perekonomian

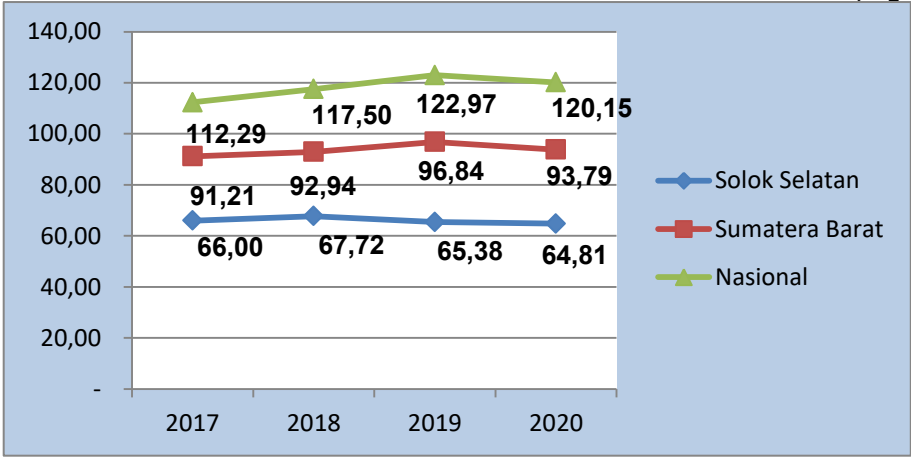
Tabel 2.22.
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	nd	69,19	74,64	72,12	72,67
2	Penduduk Usia Produktif yang Bekerja (%)	nd	94,46	94,14	95,09	94,38
3	PDB Per Tenaga Kerja (Produktifitas Tenaga Kerja) (Rp.juta)	na	66,00	67,72	65,38	64,81

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan produktifitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat produktifitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Rendahnya produktifitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan disebabkan belum berkembangnya industri terutama industri padat modal dan sebahagian besar tenaga kerja masih bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan dan industri menengah kebawah yang pengolahannya masih bersifat padat karya sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil.

Gambar 2.21.
Pembandingan PDB Per Tenaga Kerja Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 (Rp. Juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan nasional bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dilihat dari perkembangan pembangunan seni budaya dan olahraga periode tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Namun dilihat dari sisi pengelolaan baik group kesenian maupun klub olahraga sebahagian besar belum dikelola secara profesional sehingga sering tumbuh, hilang dan berganti. Untuk ketersediaan Gedung Kesenian masih belum ada karena sampai tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan belum memiliki Gedung Kesenian, namun untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya diselenggarakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muaralabuh, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro, Balai Adat Koto Baru dan Kawasan Saribu Rumah Gadang. Sedangkan untuk ketersediaan sarana olahraga terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,49% pada tahun 2016 mejadi 3,96% pada tahun 2020, Namun sebahagian besar tidak permanen dan dikelola oleh kelompok masyarakat dan nagari sehingga pengelolaannya belum optimal.

Tabel 2.23.
Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Group Kesenian per 10.000 penduduk	5,10	5,01	4,98	3,80	5,15
2	Rasio Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0
3	Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk	8,91	7,55	7,42	9,61	9,61
4	Rasio Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,49	0,48	0,47	0.53	3,96

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat

meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

Berikut ini diuraikan gambaran perkembangan indikator kinerja di Urusan Wajib Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020:

1) Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD)

Jika dilihat kinerja jenjang pendidikan TK/PAUD pada periode 2017-2019, terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD dari 68,13 pada tahun 2017 menjadi 47,42% pada tahun 2019 meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 54,88%. Rendahnya APK TK/PAUD ini disebabkan karena masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan TK/PAUD yang dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah masih berada pada angka 20,45 Per 10000 penduduk usia sekolah atau 1 (satu) TK/PAUD melayani 486 penduduk usia sekolah. Hal ini juga diikuti oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada TK/PAUD serta masih terdapatnya anak usia 6 tahun yang sudah bersekolah pada tingkat SD/MI.

Tabel 2.24.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar	63,87	68,13	52,03	47,42	54,88
2	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	13,84	15,25	18,73	19,42	20,45
3	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	18,64	18,55	16,95	16,95	13,97
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	18,18	38,51	40,75	42,54	35,92
5	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	37,80	41,52	36,25	32,13	54,0
6	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	44,02	19,97	23,00	25,23	10,08
7	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	0	0	0	0	0
8	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	1:15	1:15	1;15	1;10	1;10
9	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	38,75	42,60	42,60	53,60	65,30

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

2) Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A)

Untuk pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2020 terus mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel dibawah ini seperti Angka Partispasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan. Meskipun mengalami

perbaikan masih terdapat beberapa indikator yang belum maksimal pecaiaannya seperti Angka Partisipasi Murni yang masih berada pada angka 90,33% yang berarti masih terdapat 9,67% penduduk usia sekolah yang 7-12 yang masih belum bersekolah/tidak bersekolah/berada pada jenjang yang seharusnya, selain itu masih terdapatnya penduduk usia sekolah SD/MI yang putus sekolah sebesar 0,80% dan tidak melanjutkan ke pendidikan menengah pertama sebesar 3,29% dari lulusan pendidikan dasar.

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 124-125 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas:14,65 siswa. Namun dari sisi kualitas cendrung mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari menurunnya ruang kelas kondisi baik dari 65,95% menjadi 23,34%, penurunan ini disebabkan karena bencana alam dan kondisi bangunan yang sudah berumur. Disisi ketersediaan tenaga pengajar terdapat penurunan Rasio Guru per murid dari 68,23 per 1000 siswa pada tahun 2017 menjadi 62,46 per 1000 siswa pada tahun 2020. Meskipun dari sisi rasio jumlah mengalami penurunan namun disisi kualitas terus mengalami kenaikan hingga 91,94% pada tahun 2020.

Tabel 2.25.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Dasar
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	112.48	116.30	117.50	117.47	115,50
2	Angka Partispasi Murni (APM)	91.87	81.84	84.02	87.34	90,33
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99.65	99.46	100	99.10	99,42
4	Angka Putus Sekolah (APtS)	0,35	0,32	1,25	0,76	0.80
5	Angka Kelulusan (AL)	100	100	100	100	100
6	Angka Melanjutkan (AM)	100	100	97,85	96,34	96,71
7	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	72,25	77,86	73,14	78,16	80,59
8	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	18,94	18,94	19,18	19,12	14,65
9	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	84,97	78,97	68,18	65,94	23,34
10	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	7,10	11,42	9,61	8,00	63,07
11	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	4,58	8,09	12,07	13,01	13,14
12	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	3,36	1,52	10,14	13,04	0,45
13	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	57,49	68,23	68,23	64,44	62,46
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	62,98	82,41	91,26	91,40	91,94

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

3) Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B)

Untuk pelayanan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2017-2020 terdapat beberapa indikator yang mengalami perbaikan meskipun sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016 seperti Angka Partispasi Kasar, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, namun untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah mengalami sedikit penurunan kinerja

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 198-199 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas:18-19 siswa. Namun dari sisi kualitas cenderung mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari menurunnya ruang kelas kondisi baik dari 78,76% menjadi 33,54%, penurunan ini disebabkan karena bencana alam dan kondisi bangunan yang sudah berumur. Disisi ketersediaan tenaga pengajar meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 77,83 namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 73,13 per 1000 siswa pada tahun 2020. Meskipun dari sisi rasio jumlah mengalami penurunan namun disisi kualitas terus mengalami kenaikan hingga 95,54% pada tahun 2020.

Tabel 2.26.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	91.87	81.84	84.02	87.34	90,33
2	Angka Partispasi Murni (APM)	73.53	76.32	74.36	77.44	76,90
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99.16	99.25	97,91	97.27	96,75
4	Angka Putus Sekolah (APtS)	0,16	0,27	2,98	2,18	2,20
5	Angka Kelulusan (AL)	100	100	99,07	100	100
6	Angka Melanjutkan (AM)	98,63	99,45	94,13	84,91	99,11
7	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10000 penduduk usia Sekolah)	62,67	58,80	59,11	50,50	50,50
8	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	19,90	20,38	20,75	24,08	18,79
9	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	79,86	81,85	81,72	78,76	33,54
10	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	6,14	6,85	0,00	0,00	57,23
11	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	9,22	6,85	6,45	16,99	9,23
12	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	4,78	4,45	11,83	4,25	0
13	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	62,54	62,54	43,47	77,83	73,13
14	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	83,94	87,86	95,35	95,80	95,54

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

4) Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA/Paket C)

Untuk pelayanan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2016-2020 hanya indikator Angka Partispasi Kasar yang mengalami peningkatan dari 70,73% menjadi 79,71%. Sedangkan untuk indikator lainnya cenderung kinerjanya mengalami penurunan seperti Angka Partisipasi Murni dari 67,15% pada tahun 2016 menjadi 64,30% pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah dari 80,87% pada tahun 2016 menjadi 76,33% pada tahun 2020, Angka Putus Sekolah dari 0,10% pada tahun 2016 naik menjadi 1,77% pada tahun 2019 namun kembali mengalami penurunan menjadi 0,82% pada tahun 2020

Disisi dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan cukup baik hal ini dapat dilihat dari Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah yaitu 1 sekolah melayani 420-421 penduduk usia sekolah serta Rasio Ketersediaan Ruang Kelas 1 ruang kelas 18,79 siswa. Peningkatan ini diiringi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah yang dapat dilihat dari peningkatan persentase ruang kelas yang berkualitas baik dari 50,34% pada tahun 2016 menjadi 98,48% pada tahun 2020. Disisi ketersediaan tenaga pengajar terdapat oleh penurunan Rasio Guru permurid dari 76,36 per 1000 siswa pada tahun 2016 menjadi 70,53 per 1000 siswa pada tahun 2020. Meskipun dari sisi rasio jumlah mengalami penurunan namun disisi kualitas terus mengalami kenaikan hingga 97,40% pada tahun 2020.

Tabel 2.27.
Perkembangan Indikator Pelayanan Pendidikan Menengah Atas
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	70.73	70.10	73.32	78.87	79,71
2	Angka Partispasi Murni (APM)	67.15	67.31	64.54	63.82	64,30
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	80.87	73,46	75,50	76.33	76,33
4	Angka Putus Sekolah (APtS)	0,10	0,10	1,77	1,77	0,82
5	Angka Kelulusan (AL)	99,9	100	100	100	100
6	Rasio Ketersediaan Sekolah (Per 10.000 penduduk usia Sekolah)	20,50	26,80	26,47	20,94	23,79
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas (Jumlah murid Per Ruang Kelas)	27,61	28,43	24,77	23,16	18,79
8	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	50,34	52,34	64,89	98,48	98,48
9	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan	48,98	0,00	33,59	0,00	0,00
10	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang	0,68	46,38	0,00	0,00	0,00
11	Persentase Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat	1,28	1,28	1,53	1,52	1,52
12	Rasio Guru Per Murid (Per 1000 siswa)	76,36	75,01	63,29	67,93	70,53
13	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	95,16	95,83	97,75	97,40	97,40

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

B. Urusan Wajib Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diperoleh masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas dari sarana dan pelayanan masyarakat sangat menentukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Wajib Kesehatan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (0-59 Bulan) yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita mempresentasikan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKB dan AKI merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Dilihat dari perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2019 cenderung berfluktuasi akan tetapi cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 3,17 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB, 3,5 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBA dan 126,86 per 100.000 kelahiran hidup untuk AKI. Namun pada tahun 2020 baik AKB, AKBA dan AKI kembali mengalami peningkatan menjadi menjadi 7,92 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB, 8,56 per 1000 kelahiran hidup untuk AKBA dan 198,08 per 100.000 kelahiran hidup untuk AKI. Peningkatan ini disebabkan rendahnya kesadaran orang tua dalam memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Pandemi Covid 19 mengakibatkan terbatasnya akses ke sarana kesehatan serta kurang optimalnya pelayanan kesehatan. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, Cakupan kunjungan bayi serta Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan kompilasi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonatus, Cakupan pelayanan anak balita dan Cakupan

balita pneumonia yang ditangani oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan.

Tabel 2.28.
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
serta Cakupan Layanan Ibu dan Anak
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	6,43	6,46	4,76	3,17	7,92
2	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 Kelahiran hidup	6,74	7,04	5,1	3,5	8,56
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran hidup	153,2	88,03	254,04	126,86	198,08
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	81,5	75,16	79,00	77,8	73
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani(%)	63,5	46,2	46,1	16,0	41,3
6	Cakupan imunisasi lengkap bayi (%)	95,87	97,21	96,7	95,7	74,2
7	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	81,1	82,7	78,3	76,0	69,5
8	Cakupan pelayanan nifas (%)	78,5	81,7	79,0	78,4	68,4
9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	21,6	7,8	8,5	19,0	22,2
10	Cakupan kunjungan bayi (%)	82,5	90,65	91,04	85,3	83,8
11	Cakupan pelayanan anak balita (%)	41,43	72,62	87,79	70,6	85,9
12	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	6,4	8,11	10	19,6	4,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (berdasarkan angka yang dilaporkan)

2) Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut SDG's adalah Status Gizi Balita. Status Gizi Balita dapat diukur berdasarkan tiga perhitungan yaitu 1). Berat Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi secara umum, dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Gizi Buruk, 2). Tinggi Badan menurut Umur, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, ini dapat dilihat melalui indikator Persentase Balita Stunting dan, 3). Berat Badan menurut Tinggi Badan, memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, indikator ini dapat dilihat melalui Persentase Balita Gizi Kurang.

Dilihat dari perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2020 mengalami penurunan yaitu dari 0,04% pada tahun 2016 menjadi 0,01% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%) maka persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan masih dibawah standar WHO.

Sedangkan persentase balita gizi kurang meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,55%, namun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 6,6%. Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan dari persentase balita stunting pada tahun 2020 dari 9,5% menjadi 13,7%. Kenaikan ini sangat erat kaitannya dengan terbatasnya akses ibu dan balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Pandemic Covid 19 yang dapat dilihat dari menurunnya beberapa indikator seperti cakupan kunjungan ibu hamil, cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan balita.

Masih terdapatnya Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting di Kabupaten Solok Selatan sebahagian besar disebabkan oleh rendahnya asupan makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Selain itu faktor orang tua dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan yang tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Tabel 2.29.
Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stunting
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,04	0,03	0,03	0,03	0,01
2	Persentase Balita Gizi Kurang	0,4	0,7	3,55	4,6	6,6
3	Prevalensi Balita Stunting	2,5	14,6	16,46	9,5	13,7
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

3) Kondisi derajat kesehatan masyarakat

Untuk melihat kualitas kesehatan di Kabupaten Solok Selatan terutama untuk penyakit menular terbanyak dapat dilihat dari beberapa indikator penyakit yaitu:

- Tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 2016-2019 yaitu dari 36,26 per 100.000 penduduk tahun 2016 menjadi 162,5 per 100.000 penduduk tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 121,57 per 100.000 penduduk atau 215 kasus. Penurunan prevalensi tuberkolosis ini diiringi dengan peningkatan kematian karena tuberkolosis yaitu dari 1,75 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 3,4 per 100.000 penduduk.
- Tingkat prevalensi DBD periode 2016-2020 mengalami penurunan, dengan tingkat prevelensi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 98,94 per 100.000 penduduk namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 16,47 per 100.000 penduduk atau 29 kasus.
- Tingkat Prevalensi Diare penduduk periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan meskipun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 22,49 per 1000 penduduk pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 17,49 per 1000 penduduk atau 2434 kasus.
- Tingkat Prevalensi penyakit Malaria penduduk pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan meskipun pada tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,01 per 1000 penduduk pada tahun 2019 (2 kasus), menjadi 0,00 per 1000 penduduk pada tahun 2020 (0 orang dari 88 kasus konfirmasi malaria)
- Tingkat Prevalensi HIV/AIDS penduduk di Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 berfuktuasi dengan tingkat prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,0059%. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,0029%, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,0034% seiring dengan bertambahnya kasus menjadi 6 kasus.

Tabel 2.30.
Perkembangan Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	36,26	50,12	155,57	162,5	121,57
2.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,84	1,21	2,7	1,75	3,4
3.	Prevalensi DBD(per 100.000 penduduk)	98,94	60,22	61,2	43,25	16,47
4.	Prevalensi Diare (per 1000 penduduk)	19,5	18,92	18,9	22,49	17,49
5.	Prevalensi penyakit Malaria (per 1000 penduduk)	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
6.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,0030	0,0012	0,0059	0,0029	0,0034

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	(persen)					
7.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
8.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	91,95	96,38	93,2	89,5	83,4
9.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

4) Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan

Untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator penyakit yaitu:

1. Rasio jumlah posyandu per satuan balita (per 1000 balita) dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yaitu dari 14,94 per 1000 balita pada tahun 2016 menjadi 16,5 per 1000 balita (294 Posyandu) pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan rasio ideal pelayanan 1 unit posyandu melayani balita adalah antara 75–100 balita (10,0-13,3 per 1000 balita), maka cakupan pelayanan posyandu Kabupaten Solok Selatan masih diatas rasio ideal yaitu 1 unit posyandu melayani 63-64 balita. Namun peningkatan rasio posyandu tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan yaitu persentase Posyandu Mandiri (Posyandu yang melaksanakan kegiatan minimal 8 kali dalam setahun, mempunyai kader 5 orang dan cakupan kegiatan utamanya lebih dari 50%) yang mengalami penurunan dari 56,6% pada tahun 2019 menjadi 40,8% pada tahun 2020. Penurunan pelayanan ini berdampak kepada penurunan Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) /Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dari 100% pada tahun 2019 menjadi 70,2% pada tahun 2020
2. Rasio jumlah puskesmas untuk per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan yaitu dari 0,055 per 1000 penduduk tahun 2016 menjadi 0,057 per 1000 penduduk pada tahun 2020 atau 1 puskesmas melayani 17.543 penduduk. Dilihat dari cakupan pelayanan puskesmas per kecamatan terjadi juga peningkatan yakni dari 114,29% pada tahun 2016 (8 Puskesmas) menjadi 142,85% pada tahun 2020 (10 Puskesmas). Dengan rasio puskesmas untuk per satuan penduduk dan cakupan pelayanan puskesmas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sarana pelayanan kesehatan setingkat puskesmas sudah mencukupi dengan standar rasio

1 puskesmas per 30.000 penduduk, dan untuk cakupan 1 puskesmas per 1 kecamatan. Sedangkan untuk cakupan pelayanan puskesmas pembantu yang standar pelayanannya 1 per desa (nagari) sedikit mengalami penurunan sudah berada diangka 130,77% pada tahun 2019 menjadi 108,51% pada tahun 2020 dengan jumlah puskesmas pembantu 51 unit penurunan ini seiring dengan pemekaran 8 Nagari tahun 2019 .

3. Rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis (perawat, bidan) per 1000 penduduk secara umum belum terpenuhi yang tersebar Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Pada tahun 2020 jumlah dokter di Fasilitas Tingkat I berjumlah 30 orang (22 dokter umum dan 8 dokter gigi) dengan rasio dokter sebanyak 0,17 per 1000 penduduk / 1 dokter melayani 5.822 penduduk (standar 0,4 per 1000 penduduk/ 1 dokter : 2500 penduduk). Sementara itu untuk tenaga paramedis yang terdiri dari perawat berjumlah 108 orang dan bidan 185 orang dengan rasio baru mencapai 1,66 per 1000 penduduk atau 1 tenaga medis melayani 601 penduduk.
4. Selama periode 2016-2020 pelayanan RSUD Kabupaten Solok Selatan belum optimal disebabkan standar pelayanan RSUD baru akreditasi C dengan Rasio Ketersediaan Rumah Sakit adalah 0,0057 per 1000 penduduk dengan jumlah tenaga medis dokter adalah dokter spesialis 17 Orang, dokter gigi 5 orang, dokter umum 7 orang. Untuk capaian *Bed Occupancy Rate/BOR* (persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu) pada periode tahun 2016- 2018 terus mengalami peningkatan yaitu dari 50,98% pada tahun 2016 menjadi 55,5% pada tahun 2018 namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 45,7. Sedangkan untuk *Gross Death Rate/GDR* (angka kematian umum) meskipun mengalami penurunan sampai tahun 2018 yaitu 12,7 per 1000 pasien keluar, namun kembali mengalami peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 19,2 per 1000 pasien keluar. Peningkatan *Gross Death Rate/GDR* diikuti oleh penurunan *Net Death Rate/NDR* (angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat) yang pada tahun dari 18,0 per 1000 pasien keluar pada tahun 2018 menjadi 16,0 per 1000 pasien keluar pada tahun 2020.
5. Sedangkan untuk cakupan pelayanan dasar melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan yaitu dari 54,5% menjadi 47,3%. Penurunan ini seiring dengan kebijakan BPJS untuk meningkatkan iuran asuransi kesehatan

serta penurunan sharing pendanaan dari provinsi dari 40% menjadi 30%.

Tabel 2.31.
Perkembangan Indikator Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio posyandu per 1000 balita	14,94	15,3	16,1	15,74	16,5
2.	Persentase Posyandu Mandiri	61,3	58,21	59,1	56,6	40,8
3.	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	0,055	0,054	0,053	0,053	0,057
4.	Rasio puskesmas pembantu per 1000 penduduk	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
5.	Cakupan puskesmas	128,57	128,57	128,57	128,57	142,85
6.	Cakupan puskesmas pembantu	125,64	125,64	130,77	130,77	108,51
7.	Rasio dokter per 1000 penduduk di Puskesmas dan jaringanya	0,28	0,21	0,1	0,18	0,12
8.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Puskesmas dan jaringanya	3,10	2,58	2,27	2,0	1,66
9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,0061	0,0060	0,0059	0,0058	0,0057
10.	Gross Death Rate (per 1000 pasien keluar)	27,71	18,04	12,7	15,4	19,2
11.	Net Death Rate (per 1000 pasien keluar)	18,12	11,38	18,0	18,6	16
12.	Bed Occupancy Rate (BOR)	50,98	52,66	55,5	45,1	45,7
13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93,3	100	100	100	70,2
14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
15.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	91,95	96,38	93,2	89,5	83,4
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
17.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	97,87	97,92	97,31	97,5	87,2
18.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui jamkesda dan jamkesmas	54,5	54,9	54,2	58,20	47,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Gambaran kinerja pelayanan sub Urusan Wajib Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sampai tahun 2020 panjang jalan di Kabupaten Solok Selatan sepanjang

1430,77 km yang terdiri dari 99,2 km jalan Nasional, 153,44 jalan Provinsi, dan 1178,13 km jalan Kabupaten, dengan jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 527 ruas. Jika dilihat dari kondisi jalan baik jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Solok Selatan berada pada kondisi 28,49% kondisi baik, 31,40% kondisi rusak ringan, 20,95% kondisi rusak sedang dan 19,17% berada pada kondisi rusak berat. Jika dilihat dari kemantapan jalan kabupaten yang merupakan tanggung jawab Kabupaten Solok Selatan, kondisi tidak mantap 58,46% dan hanya 41,54% dalam kondisi mantap. Sedangkan untuk jembatan, hingga tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan memiliki 253 jembatan dengan kondisi baik sebesar 73,91%.

Tabel 2.32.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2020

No	KECAMATAN	Panjang	JENIS PERKERASAN					
			Aspal HTX	Beton	Burda	Burtu	Telford /Kerikil	Tanah
1	Koto Parik Gadang Diateh	129,69	51,55	39,50	-	-	23,27	15,37
2	Sungai Pagu	136,62	58,19	37,78	0,40	-	11,84	28,41
3	Pauh Duo	111,16	42,36	10,43	3,00	-	28,89	26,48
4	Sangir	312,50	62,79	24,72	20,51	-	106,55	97,94
5	Sangir Jujuan	108,44	27,23	12,70	5,60	-	33,30	29,61
6	Sangir Balai Janggo	204,93	8,40	9,95	19,10	-	136,00	31,48
7	Sangir Batang Hari	174,79	4,90	7,56	9,10	-	109,43	43,80
JUMLAH		1.178,13	255,42	142,63	57,71	-	449,28	273,09

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

Tabel 2.33.
Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Menurut Kepemilikannya

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Nasional					
	% Kondisi Baik	28,82	31,34	25,02	26,46	20,40
	% Kondisi Sedang	56,66	59,89	51,10	52,09	70,62
	% Kondisi Rusak Ringan	12,09	8,47	19,00	16,28	7,76
	% Kondisi Rusak Berat	2,42	0,30	4,89	5,17	1,22
2	Jalan Provinsi					
	% Kondisi Baik	na	7,60	13,24	37,12	30,63
	% Kondisi Sedang	na	63,32	60,32	21,62	13,87
	% Kondisi Rusak Ringan	na	1,81	2,14	4,32	14,41
	% Kondisi Rusak Berat	na	27,27	24,29	36,94	41,08
3	Jalan Kabupaten					
	% Kondisi Baik	na	15,54	19,20	19,83	28,89
	% Kondisi Sedang	na	16,33	17,22	17,29	30,38
	% Kondisi Rusak Ringan	na	49,89	47,20	46,51	22,91
	% Kondisi Rusak Berat	na	18,23	16,38	16,37	17,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya di Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan. Meskipun dari sisi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten terus mengalami peningkatan dari 7.609,87 hektar pada tahun 2016 menjadi 9.613,06 pada tahun 2020, peningkatan luas daerah irigasi diirigi oleh peningkatan rasio jaringan irigasi terhadap luas sawah dari 0,75 menjadi 0,94 pada tahun 2020. Namun dari sisi kualitas irigasi kabupaten yang berkondisi baik terus mengalami penurunan yaitu dari 72,52% pada tahun 2016 menjadi 21,36% pada tahun 2020, penurunan yang disebabkan oleh faktor bencana yang seringnya terjadi di Kabupaten Solok Selatan seperti banjir dan longsor terutama yang terjadi pada akhir tahun 2020. Sedangkan untuk Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten sampai tahun 2020 baru mencakup sekitar 25%
3. Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan selama periode 2016–2020 yaitu dari 36,43% pada tahun 2016 menjadi 59,17% pada tahun 2020. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah.
4. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rumah tangga sudah mengakses air minum layak sudah mencapai 52,72% dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 77,04%. Selain peningkatan dari akses air minum yang bersumber dari PDAM, pelaksanaan program PAMSIMAS yang telah dimulai tahun 2008 dan tetap berlanjut sampai dengan tahun 2020 dan memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan cakupan rumah tangga pengguna air minum di Kabupaten Solok Selatan.
5. Dilihat dari Rasio Ketaatan Tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan baru berada pada angka 46,73%. Masih rendahnya hal ini disebabkan masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antar urusan serta masih terbatasnya ketersediaan dokumen turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur pembangunan kawasan.
6. Dilihat dari Rata-rata Indek kesulitan geografis daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dari 28,11 pada tahun 2019 menjadi 29,43 pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya rata-rata indik pelayanan dasar yang

disebabkan karena bencana yang melanda Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2020. Indek kesulitan geografis merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar (Nilai maksimal 100). Dilihat dari komponen perhitungan indek kesulitan geografis bahwa permasalahan utama Kabupaten Solok Selatan berada pada komponen pelayanan dasar masyarakat dengan rata-rata indek infrastruktur 46,77 dan aksesibilitas masyarakat.dengan indeks 26,81.

Tabel 2.34.
Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (%)	21,28	31,88	37,13	46,17	41,54
2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	45	67	70	71,94	78,26
3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	442,32	456,13	531,25	543,92	488,73
4	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	72,52	75,32	70,02	45,87	21,36
5	Luas Irigasi Teknis (Ha)	7.609,87	7.750	7.750	7.750	9.613,06
6	Rasio Jaringan Irigasi	0,75	0,76	0,76	0,76	0,94
7	Akses Air Minum Layak (%)	52,72	53,40	62,78	69,02	77,04
8	Akses Sanitasi Layak (%)	36,43	39,47	49,38	51,14	59,17
9	Rasio ketaatan terhadap RTRW	46,71	na	na	na	46,73
10	Rata-Rata Indek Kesulitan Geografis	na	na	na	28,11	29,43
	a) Pelayanan_Dasar	na	na	na	13,55	20,75
	b) Infrastruktur	na	na	na	47,78	46,77
	c) Aksesibilitas	na	na	na	28,21	26,81

Sumber Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

D. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal penggunaan listrik, jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN dan Non PLN selama periode 2016-2019 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik berjumlah 97,47%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 97,85%. Namun berdasarkan hasil konsolidasi antara Dinas ESDM Provinsi Sumatera

Barat dengan PLN Regional Sumatera untuk tahun 2020 terjadi penurunan rumah tangga pengguna listrik menjadi 96,18%. Meskipun sudah 96,18% rumah yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama namun masih terdapat 3,89% rumah tangga pengguna listrik non PLN yang pada umumnya menggunakan genset, PLTMH dan Tenaga Surya (panel surya) baik dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat.

2. Dilihat dari perkembangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi tetapi cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 1.618 rumah pada tahun 2016 menjadi 3.458 rumah pada tahun 2020, Peningkatan ini disebabkan selain akibat kondisi perekonomian masyarakat serta bencana alam yang melanda Kabupaten Solok Selatan setiap tahunnya seperti gempa, banjir dan longsor tetapi karena adanya pendataan yang dilakukan terhadap perumahan masyarakat yang melibatkan Walinagari pada tahun 2018-2020.
3. Untuk kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yaitu dari 2 lokasi pada tahun 2019 yaitu Kampung Palak dan Kampung Tarandam menjadi 1 lokasi pada tahun 2020 yaitu Kampung Tarandam.

Tabel 2.35.
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Akses Rumah Penerangan utama listrik (%)	97,47	97,69	98,36	97,85	96,18
2.	Rumah Tidak Layak Huni	1618	3337	2539	3384	3458
3	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	2	2	2	2	1

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perumkim & LH

E. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran kinerja pelayanan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, Kesbangpol Linmas, dan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	9,34	9,78	8,68	8,30	8,49
2.	Jumlah Linmas	0	0	0	0	0
3.	Peresentase Jorong Memiliki Pos Kamling	28	98,14	97,06	97,45	98,53
4.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	80	77	84,21	100	100
5.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Siaga Tribun dan Tramas)	0,14	0,43	0,57	0,60	0,29
6.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten	100	92,59	94,74	100	100
7.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
8.	Cakupan layanan WMK	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
9	Capaian Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	nd	60,00	68,18	64,10	53,85
10	Persentase Nagari Tangguh Bencana	28,20	53,84	74,36	92,31	92,31
11	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana	100	100	100	100	100
12	Indek Resiko Bencana Solok Selatan (berdasarkan IRBI)	137.20	137.20	137.20	137.20	137.20
13	Indeks Ketahanan Daerah	na	na	na	na	0,30

Sumber: BPBD dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

Data pada tabel diatas menunjukan beberapa indikator pelayanan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengalami perbaikan yaitu Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk, Persentase Jorong Memiliki Pos Kamling kenaikan ini diikuti oleh kenaikan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3. Namun untuk Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Siaga Tribun dan Tramas) mengalami penurunan seiring dengan adanya pembatasan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Solok Selatan.

Disisi pelayanan kebakaran terjadi penurunan Capaian Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%) terutama dari tahun 2018-2020 dari 68,18% menjadi 53,86%. Penurunan ini disebabkan karena pengembangan wilayah pemukiman tidak diiringi dengan penambahan infrastruktur dan cakupan layanan WMK sehingga menyebabkan baru 15,84% wilayah Kabupaten Solok Selatan yang terlayani. Sampai tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan baru memiliki 3 pos pemadam kebakaran (SPM 7 unit) dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 3 unit.

Sedangkan untuk pelayanan penanganan bencana terus mengalami peningkatan yaitu disisi mitigasi atau kesiapan menghadapi bencana sampai tahun 2020 terdapat 92,31% Nagari Tangguh Bencana dengan tingkat Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana yang ditangani 100%. Meskipun demikian, jika dilihat dari perkembangan Indek Resiko Bencana (indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia) Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori resiko sedang dengan indeks 137,20 sedangkan jika dilihat dari indek ketahanan daerah Kabupaten Solok Selatan baru sebesar 0,30 dari 1 (Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap/Indek Resiko Bencana tetap).

Selanjutnya dapat pula digambarkan kinerja pelayanan sub urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2016-2020 seperti terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
dan Pembinaan Politik Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016–2020

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyuluhan wasbang					
	a) Pelaksanaan (kali)	1	1	1	1	1
	b) Peserta (orang)	70	70	70	70	70
2	FKUB					
	a) Pelaksanaan (kali)	4	2	2	2	1
	b) Peserta (orang)	21	20	20	26	23
3	Sosialisasi P4GN					
	a) Pelaksanaan (kali)	1	1	1	2	-
	b) Peserta (orang)	150	100	100	100	-
4	Pendidikan Politik bagi warga Negara					
	a) Pelaksanaan (kali)	1	-	1	3	1
	b) Peserta (orang)	39	-	39	258	75
5	Pembinaan Politik Daerah					
	a) Jumlah Parpol	12	12	12	16	16
	b) Parpol yang mendapat	11	11	11	12	10
	c) Jumlah LSM / Ormas	30	17	18	24	34
6	Bakorpullahdasila/Kominda					
	a) Anggota KOMINDA (orang)	25	27	33	84	51
	b) Pelaksanaan Rapat (kali)	4	2	2	2	1
	c) Onservasi Lapangan (kali)	-	-			

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten. Solok Selatan

F. Urusan Sosial

Dilihat dari jumlah PPKS di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu dari 33.106 orang menjadi 15.193 orang. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 26.974 orang. Peningkatan yang cukup tinggi ini disebabkan oleh

bencana alam yang cukup berdampak terhadap kehidupan masyarakat Solok Selatan seperti gempa bumi, banjir dan longsor. Peningkatan mengakibatkan terjadinya penurunan cakupan pelayanan terhadap PPKS dari 75% menjadi 70,28%. Pada tahun 2020 jumlah PPKS kembali mengalami penurunan menjadi 16.756 orang. Namun penurunan ini tidak diikuti oleh peningkatan PPKS yang ditangani dari 70,28% menjadi 57,62%.

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib didorong oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan hingga tahun 2020 berjumlah 4 unit. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, salah satunya pemberian bantuan, pendampingan serta pemberian pekerjaan agar menjadi produktif. Gambaran kinerja pelayanan urusan sosial Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.38.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Sosial
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	33.106	25.380	15.193	26.974	16.756
2	Persentase PPKS yang ditangani	66	70	75	70,28	57,62
3	Ketersediaan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2	2	2	4	4
4	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15,15	12,34	56,72	69,3	57,62
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)/ sejenis lainnya	0	0	0	0	0
6	Persentase Ketersediaan Tenaga Pendamping (minimal 66 orang)	87	100	100	100	100
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1,04	1,04	1,04	3,11	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2017-2020 berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada periode tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 69,19% pada tahun 2017 menjadi 74,64% pada tahun 2018. Peningkatan ini diiringi oleh meningkatnya tingkat pengangguran dari 5,54% pada tahun 2017 menjadi 5,85% pada tahun 2018. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penduduk Kabupaten Solok Selatan yang sudah menamatkan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2019 TPAK kembali mengalami penurunan menjadi 72,12% yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,91%. Namun pada tahun 2020 TPAK kembali mengalami peningkatan menjadi 7,67%, peningkatan ini diiringi oleh meningkatnya tingkat pengangguran menjadi 5,62%. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan di Sumatera Barat termasuk Kabupaten Solok Selatan yang membatasi akses masyarakat untuk beraktifitas termasuk kegiatan perekonomian sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) terhadap perekonomian Kabupaten Solok Selatan
2. Sedangkan perkembangan tingkat ketaatan perusahaan terhadap aturan dapat dilihat dari indikator pemenuhan tingkat keselamatan dan persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dapat dilihat pada periode 2016-2020. Persentase perusahaan yang menerapkan standar keselamatan dan perlindungan cenderung mengalami perubahan yaitu dari 83% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 57,69%. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yang terutama terkait dengan penerapan standar prosedur kesehatan menghadapi *pandemic Covid 19* . Sedangkan untuk persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pada lembaga formal terus mengalami penurunan yaitu dari 3,4% tahun 2016 menjadi 0% tahun 2020 .
3. Untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan selalu di mediasi oleh pemerintahan daerah melalui forum Tripartit (pemerintah, pengusaha dan perserikatan tenaga kerja) yang ditandai dengan persentase kasus tenaga kerja yang ditangani 100%.

Tabel 2.39.
Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	nd	69,19	74,64	72,12	72,67
2	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	2,9	0,34	11,67	13,22	19,6
3	Tingkat pengangguran terbuka	nd	5,54	5,85	4,91	5,62
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan standar Keselamatan dan perlindungan	83	83	72	80	57,69
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	3,4	nd	1,6	na	0
6	Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pembangunan Gender bertujuan untuk melihat indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 94,54 pada tahun 2017 menjadi 95,08 pada tahun 2020. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender ini diikuti oleh peningkatan peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender dari 51,17 pada tahun 2017 menjadi 53,15 pada tahun 2020.
2. Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya pada tahun 2017-2020 partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2017 tingkat partisipasi berada di posisi 54,73% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 63,37%. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 57,87%, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan mejadi 59,42%. Pola penurunan dan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan ketersediaan lapangan kerja baru dan tingginya kecenderungan wanita

melanjutkan pendidikan atau menjadi ibu rumah tangga. Peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita ini diikuti oleh pertumbuhan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yaitu dari 48,68% pada tahun 2016 menjadi 55,80% pada tahun 2020.

3. Penanganan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2016-2020 berfluktuasi tergantung jenis kasus yang ditangani. Pada 2016-2017 pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan yang ditangani berada pada tingkat 100%. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 89% namun sampai tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 89,7%. Jika dilihat peningkatan rasio KDRT terhadap jumlah penduduk kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 meskipun berfluktuasi namun relatif masih rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, rasio KDRT di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yaitu dari 0,054 per 1000 penduduk menjadi 0,021 per 1000 penduduk. Penurunan ini lebih disebabkan karena menurunnya kasus KDRT dari 10 Kasus pada tahun 2019 menjadi 4 kasus pada tahun 2020.

Tabel 2.40.

Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Pembangunan Gender	na	94,54	94,92	95,03	95,08
2	Indek Pemberdayaan Gender	na	51,17	51,40	52,25	53,15
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	na	54,73	63,37	57,87	59,42
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,68	49,83	54,39	54,69	55,80
5	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0,026	0,054	0,052	0,054	0,021
6	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditangani	100	100	89	89,5	89,7

Sumber: Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan

C. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pangan adalah ada atau tidaknya peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

dan lain sebagainya, kemudian ketersediaan pangan utama yang dihitung dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun. Kondisi kinerja urusan pangan di Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 memperlihatkan masih kurangnya jumlah regulasi pangan. Selama periode ini belum ada produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pangan, yang ada hanyalah berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Dilihat dari tingkat ketersediaan bahan pangan utama mengalami peningkatan kecuali daging, telur dan susu. Peningkatan ini diikuti oleh terjadinya diversifikasi pangan yang ditandainya bergesernya ketersediaan pangan utama dari kacang-kacangan, ubi kayu dan ubi jalar ke jagung. Namun peningkatan kurang diiringi oleh peningkatan ketersediaan bahan pangan hewani seperti daging, telur dan susu. Oleh karena itu, dimasa datang kelembagaan dan personil aparatur yang melaksanakan urusan pangan perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya, apalagi saat ini kedaulatan pangan menjadi isu dan prioritas nasional. Namun disisi keamanan pangan, sampai tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan belum memlilki Satgas Pangan.

Tabel 2.41.
Perkembangan Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Pangan Utama, berupa:						
	• Padi	ton	125.903	147.747	147.898	152.488	142.581
	• Jagung		59.344	95.862	76.630	103.323	82.909
	• Kacang Hijau		0	18	12	13	13,86
	• Kacang Tanah		5.592	2.560	1.260	1.281	1.189
	• Kedelai		669	12	76	137	26,79
	• Ubi Jalar		30.011	2.247	1.891	2.683	3.551
	• Ubi Kayu		4.747	3.720	3.720	3.546	4.538,4
	Pangan Hewani						
	• Daging	ton	975,87	981,71	1.034,19	1.082,86	757.0
	• Telur		199,31	208,23	222,73	231,7	248,04
	• Susu		14,11	9,07	28,22	32,56	18,14
	• Ikan		2.063	1.231	1.340	1.731	1.661,5
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	51,8	73,6	76,5	77,6	77,8

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan

D. Urusan Pertanahan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari perkembangan jumlah tanah bersertifikat yang diterbitkan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.42.
Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah tanah yang bersertifikat yang dikeluarkan	bidang	1.646	1.520	3.539	6.516	2.276
1	Hak Milik	bidang	1.611	1.514	3.483	6.480	2.051
2	Hak Guna Bangunan	bidang	29	3	51	33	171
3	Hak Pakai	bidang	6	3	5	3	54

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2016-2019 jumlah sertifikat yang dikeluarkan berfluktuasi setiap tahunnya dengan trend meningkat, yaitu dari 1.698 bidang tanah pada tahun 2016, 1.646 bidang tanah tahun 2016, 1.520 bidang tanah tahun 2017 3.539 bidang tanah tahun 2018, menjadi 6.416 bidang tanah pada 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 2.276 bidang tanah. Fluktuasi jumlah sertifikat yang dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah kegiatan sertifikat prona yang dibiayai oleh pemerintah pusat, selain permintaan pribadi masyarakat.

Tabel 2.43.
Status Kepemilikan Lahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021

No	Status Pengusahaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hak Guna Bangunan	205	0,16
2	Hak Guna Usaha	69.140	56,47
3	Hak Milik	15.327	12,52
4	Hak Pakai	91	0,073
5	Hak Wakaf	8	0,006
6	Belum Teridentifikasi	37.649	30,75
Total		122.419	99,979

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan

E. Urusan Lingkungan Hidup

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk capaian pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari indek kualitas lingkungan hidup yang mengalami peningkatan dari 79,53 pada tahun 2019 menjadi 79,72 pada tahun 2020. Peningkatan ini lebih dipicu oleh peningkatan indek kualitas udara dari 81,82 pada tahun 2019 menjadi 93,26. Peningkatan ini merupakan dampak dari penurunan kasus kebakarann hutan diwilayah Riau dan Jambi. Sedangkan untuk Indek kualitas air dan indek kualitas lahan cendrung mengalami penurunan yaitu dari 79,38 dan 75,57 pada tahun 2019 menjadi 67,50 dan 75,64 pada tahun 2020. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri, pertambangan, perkebunan, dan sampah.

2. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Solok Selatan harus mendapat perhatian khusus. Bila dilihat dari sudut pandang pemberian layanan (*service provider*) di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 182.936 orang. Dihat dari pelayanan terhadap persampahan dari 2017-2019 terus mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari perkiraan produksi sampah 26.088 M³ pada tahun 2017 yang terangkut sebesar 12.150 M³ (46,57%) dan terkelola 17.550 M³ (67,27%) dan pada tahun 2019 dari perkiraan produksi sampah 26.589 M³ yang terangkut 3.013 M³ (11,33%), yang terkelola 3.013 M³ (11,33%). Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana persampahan menjadi terangkut 7.408 M³ (27,78%), yang terkelola 7.408 M³ (27,78%) dengan perkiraan produksi sampah 26.667 M³. Untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana persampahan dan mempercepat beroperasinya TPA Jujutan.
3. Dilihat dari cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan yaitu dari 75,0% pada tahun 2017 mejadi 68,18% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 80.0%. Meskipun cakupan pengawasan terhadap AMDAL masih belum optimal namun dengan berkat kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, penegakan hukum lingkungan yang dapat dilihat dari persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dapat ditindaklanjuti seluruhnya yaitu 100%.

Tabel 2.44.
Perkembangan Kinerja Lingkungan Hidup
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	na	79,58	79,62	79,53	79,72
	➤ Indek Kualitas Udara	na	84,68	87,54	81,82	93,26
	➤ Indek Kualitas Air	64,00	76,41	73,44	79,38	67,50
	➤ Indek Kualitas Lahan	na	75,59	75,61	75,57	75,64
2	Cakupan Pelayanan Persampahan					
	➤ Terangkut (%)	na	46,57	37,98	11,33	27,78
	➤ Terkelola (%)	na	67,27	45,40	11,33	27,78
3	Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL (%)	na	75,0	70,58	68,18	80,0

Sumber: Dinas Perumkim dan LH Kabupaten Solok Selatan

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Rumah Tangga di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki Kartu Keluarga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 yaitu dari 86,23% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 92,66%.
2. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan dari 75,48% pada tahun 2016 menjadi 98,94% pada tahun 2019. Peningkatan ini diikuti oleh pembersihan dan penghapusan data ganda serta peningkatan pelayanan, persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 88,93%
3. Untuk kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 47,80% pada tahun 2016 menjadi 85,94% pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kelahiran terutama untuk bayi yang baru lahir.
4. Sedangkan untuk rasio pasangan yang berakte perkawinan (ditujukan bagi pasangan non muslim) yang diukur dari jumlah pasangan nikah berakte perkawinan terus mengalami peningkatan dari 5,0% pada tahun 2016, menjadi 68,45% pada tahun 2020.

Tabel 2.45.
Perkembangan Indikator Kinerja Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	88,23	88,5	100	100	92,66
2	Persentase penduduk ber KTP	75.48	77,18	84,69	98,94	88,93
3	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	47.80	66,1	75,27	78,13	85,94
4	Persentase Penduduk yang memiliki akte perkawinan	5.00	14.00	15,27	51,97	68,45

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri

sendiri. Dilihat dari perkembangan indikator rata-rata Indeks Desa Membangun terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,6255 pada tahun 2016 menjadi 0,7133 pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan seluruh komponen pembentuk Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Dilihat dari ketiga rata-rata indeks pembentuk diatas permasalahan utama masih terletak pada Indeks Ketahanan Ekonomi yang masih berada pada angka 0,6590. Peningkatan Indeks Desa Membangun merupakan dampak langsung dari penurunan dari jumlah desa/nagari tertinggal/sangat tertinggal dari 16 desa/nagari tertinggal dan 6 desa/nagari sangat tertinggal pada tahun 2016 menjadi 3 desa/nagari tertinggal/sangat tertinggal pada tahun 2020. Penurunan ini diikuti juga oleh peningkatan dari status desa/nagari dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, maju menjadi mandiri. Nagari yang masih dikategorikan tertinggal adalah Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Permasalahan utama dari tiga nagari tersebut disebabkan rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, rendahnya kualitas lingkungan, rendahnya aksesibilitas ke pusat pertumbuhan.

Tabel 2.46.

Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketahanan Desa Membangun	indeks	0,6255	0,6538	0,6786	0,7024	0,7133
	➤ Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,6311	0,7141	0,7410	0,7733	0,8022
	➤ Indeks Ketahanan Ekonomi	indeks	0,6411	0,6156	0,6650	0,6346	0,6590
	➤ Indeks Ketahanan Lingkungan	indeks	0,6133	0,6316	0,6160	0,6991	0,6786
2	Persentase Desa Mandiri	%	5.13	7.69	10.26	7.69	23.33
3	Persentase Desa Maju	%	17.95	43.59	38.46	48.72	43.59
4	Persentase Desa Berkembang	%	48.72	38.46	43.59	30.77	30.77
5	Persentase Desa tertinggal	%	23.08	10.26	7.69	0.00	0.00
6	Persentase Desa sangat tertinggal	%	2.56	0.00	0.00	7.69	7.69

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Meningkatnya kualitas individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh peningkatan kualitas institusi keluarga. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang saling kasih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Gambaran

kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika dilihat perkembangannya akseptor KB aktif periode 2016-2020 di Kabupaten Solok Selatan kecuali tahun 2017 persentase akseptor KB terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016, akseptor KB aktif sebesar 77,18%, menjadi 80,26% pada tahun 2020. Peningkatan ini seiring meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB aktif dari 21.287 pasangan menjadi 27.801 pasangan yang salah satu akibat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB yang dapat dilihat dari peningkatan akseptor KB mandiri dari 5,035% menjadi 16,27%
2. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 1,67% namun sampai tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 0,45%. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah rata-rata anggota keluarga per rumah tangga yaitu dari 3,72 orang pada tahun 2019 menjadi 3,46 orang tahun 2020.
3. Sedangkan persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I juga mengalami penurunan pada periode 2016-2018 dari 32,36% pada tahun 2016 menjadi 27,30% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 27,32%. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan dari tingkat kemiskinan daerah dari 27,30% pada tahun 2018 menjadi 27,32 pada tahun 2019.

Tabel 2.47.
Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan penduduk	0,81	0,57	1,67	0,67	0,45
Rata-rata jumlah anggota keluarga per Rumah Tangga	3,46	3,46	3,45	3,72	3,46
Cakupan Akseptor KB aktif (%)	77,18	73,66	80,21	81,27	80,26
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	32,36	27,39	27,30	27,32	28,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Dinas P2KB&P3A, BPS (Data diolah)

I. Urusan Perhubungan

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum terdapat transportasi umum yang representatif di Kabupaten Solok Selatan, selain itu volume kendaraan angkutan penumpang dalam jangka

waktu tahun 2016-2020 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Layanan angkutan umum masih didominasi oleh kendaraan yang tidak resmi dan tidak terdaftar yang beroperasi dan melayani angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Selain itu rendahnya standard kelayakan dan kondisi terminal angkutan umum di Kabupaten Solok Selatan baik dari ketersediaan sarana dan prasarana yang belum dapat difungsikan. Untuk menunjang pelayanan arus penumpang ke daerah yang belum memiliki moda transportasi angkutan umum. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kecelakaan dari 1,80 per 10.000 pada tahun 2017 penduduk menjadi 2,40 per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Dilihat dari cakupan layanan, cakupan layanan angkutan sungai lebih baik dari pada cakupan layanan angkutan per 100 penduduk yaitu untuk angkutan sungai 31,20 per 100 penumpang melayani sedangkan untuk layanan angkutan darat baru 0,0413 per 100 penumpang

Tabel 2.48.
Perkembangan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Jumlah Arus Penumpang Umum, Rasio Izin Trayek dan Jumlah Terminal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (Angkutan penumpang)	Unit	11	15	15	20	20
2.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	52.351	52.350	51.212	44.401	48.451
3.	Rasio Izin Trayek/jumlah penduduk (10.000 penduduk)	Rasio	0,676	0,843	0,829	0,714	1,093
4.	Rasio angka kecelakaaan per 10.000 peduduk	Rasio	nd	1,20	2,43	2,14	2,40
5.	Jumlah Terminal	Unit	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Dermaga	Unit	1	1	1	1	2
7.	Jumlah angkutan Sungai	Unit	315	315	351	311	326
8.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Sungai	Orang	1350	1.345	1.118	997	1045
9.	Rasio layanan angkutan darat (per 100 penumpang)	Rasio	0,0210	0,0287	0,0293	0,0450	0,0413
10	Rasio layanan angkutan sungai (per 100 penumpang)	Rasio	23,33	23,42	31,40	31,19	31,20
11.	Jumlah orang melalui dermaga / terminal per tahun	orang	5.440	5.435	5.269	5.013	5.132

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

- Kinerja pada urusan perhubungan juga dapat dilihat dari cakupan layanan terhadap kendaraan umum. Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yang memilik KIR mengalami peningkatan yaitu dari 78% pada

tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum penumpang/barang dalam melakukan uji kelayakan kendaraannya sesuai ketentuan yang berlaku cukup tinggi.

Tabel 2.49.
Perkembangan Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

N o.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	78	87	89	91	100
2.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Kendaraan /Menit	20	20	20	20	20
3.	Biaya KIR:						
	PNP	Rp.	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
			61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
			(Ganti buku)	(Ganti buku)	(Ganti buku)	(Ganti buku)	(Ganti buku)
	Bus dan Barang	Rp.	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
			61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
			(Ganti Buku	(Ganti Buku	(Ganti Buku	(Ganti Buku	(Ganti Buku

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari perkembangan jumlah Jaringan Telekomunikasi, Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk, Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal, Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal, Website Milik Pemerintah Daerah, Pameran/Expo, Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik. Dilihat dari indikator kinerja untuk mendukung pelayanan publik perkembangan komunikasi dan informatika dan cakupan layanan telekomunikasi masih kurang maksimal. Sampai tahun 2020 jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Layanan Publik baru 9 OPD dan untuk cakupan layanan telekomunikasi baru 83,28% yang dilayani oleh 3 Provider (dengan jumlah kawasan pemukiman yang termasuk *Blank Spot Area* sebanyak 46 Jorong). Sedangkan untuk PDRB sektor informasi dan komunikasi cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,78% pada tahun 2017 mejadi 7,44% pada tahun 2020.

Tabel 2.50.
Perkembangan Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Jaringan Telekomunikasi	Provider	6	5	4	4	3

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Surat Kabar	17	17	17	17	18
3.	Jumlah Penyiaran Radio	Stasiun	2	2	2	2	2
4.	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Pameran/Expo	Kegiatan	3	1	0	1	1
6.	Jumlah OPD yang mengaplikasikan Sistem Informasi layanan Publik	OPD	5	6	6	7	9
7.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	86
8.	Indeks SPBE	Indek	nd	nd	1,92	1,74	1,70
9.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	71,00	71,38	76,87	76,87	83,28
10	Pertumbuhan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi	RP. Milyar	8,71	11,78	9,07	8,27	7,44

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan

K. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum keberadaan Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal, sehingga kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, secara kuantitas jumlah koperasi di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yaitu dari 131 unit pada tahun 2016 menjadi 115 unit pada tahun 2019. Adanya penurunan jumlah koperasi ini disebabkan kebijakan pemerintah untuk melakukan pembubaran dan pencabutan badan hukum koperasi yang bermasalah oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya peningkatan dari persentase koperasi aktif dari 40,6% pada tahun 2016 menjadi 56,5% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 peningkatan koperasi aktif diiringi dengan penurunan dari koperasi aktif yang melakukan RAT dari 61,3% pada tahun 2019 menjadi 43,1% pada tahun 2020. Namun jika dilihat dari persentase koperasi berkualitas atau koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial baru sekitar 16,2%

Tabel 2.51.
Perkembangan Kinerja Koperasi
Kabupaten Selatan Tahun 2016-2020

No .	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	Unit	131	107	109	114	115
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	65	67	54	62	65
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	40,6	62,6	49,5	54,4	56,5
4.	Jumlah Koperasi Aktif yang RAT	Unit	21	30	26	38	28
5.	Persentase Koperasi Aktif yang RAT	%	32	44,8	48,1	61,3	43,1

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

- Selain Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Dari dibawah dapat dilihat terjadinya peningkatan UMKM yang cukup sangat signifikan dari 3.375 unit pada tahun 2016 menjadi 9.907 unit pada tahun 2020. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan perdagangan kecil.

Tabel 2.52.
Perkembangan UMKM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UMKM	Unit	3.375	3927	4047	4240	9907
2.	Jumlah BPR/LKM	Unit	5	5	3	3	3
3.	Persentase UMKM Non BPR/LKM	%	96,36	99,1	98,9	99,1	99,6

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

L. Urusan Penanaman Modal

Perkembangan kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Solok Selatan. Jika dilihat perkembangan investasi pada tahun 2016-2020 dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi investasi yang berasal dari PMDN pada tahun 2018 yaitu dari Rp.100.128 juta pada tahun 2017 menjadi 518,726 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan masuknya investasi baru di sektor pertambangan (PT Bumi Indonesia Bersinar) dan investasi pabrik kelapa sawit oleh PT Mas Unggul Sejagat. Namun pada tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan menjadi Rp.234.850 juta tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan penyelesaian kedua investasi tersebut dan tidak terdapatnya investasi besar baru, sehingga pembentukan investasi kembali ditopang oleh investasi pemerintah,

perseorangan dan UMKM. Sedangkan untuk investasi yang berasal dari PMA pada tahun 2017 terjadi peningkatan investasi menjadi \$167.093 ribu yang disebabkan aktifitas eksplorasi panas bumi (geothermal) oleh PT Supreme Energi. Namun kemudian cenderung mengalami penurunan sejalan dengan penyelesaian eksplorasi *Geothermal* oleh PT Supreme Energy.

Gambaran kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan investasi selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53.
Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional: ➤ PMDN ➤ PMA	Rp (juta)	56.072	100.128	518.726	339.618	234.850
		\$ (ribu)	10.606	167.093	52.265	72.407	13.847
3	Rata-rata lama pelayanan perizinan	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang seni yang permanen hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan gelanggang seni masih perlu ditingkatkan. Sampai tahun 2019 terdapat 2 gelanggang tempat petunjukan seni di Kabupaten Solok Selatan meskipun dari segi ketersediaan sarana dan prasarana perlu ditinggkatkan yaitu RTH Muaralabuh dan RTH Padang Aro. Dalam penyediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2019 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2016 rasio lapangan olahraga sebesar 1,85 per 10.000 penduduk dan mengalami penurunan menjadi 1,75 per 10.000 pada tahun 2019. Sedangkan untuk prestasi di bidang Olahraga terjadi peningkatan prestasi, hal ini dapat dilihat pada event PORPROV Sumatera Barat terjadi peningkatan ranking Kabupaten Solok Selatan yaitu dari peringkat 18 tahun 2014 dan peringkat 11 tahun 2016 dan peringkat 12 tahun 2018.

Tabel 2.54.
Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Perkembangan (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	10	34
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	34	34	34	45	40
3.	Rasio Gelanggang Remaja/ Gelanggang Seni (per 10.000 penduduk)	0,061	0,060	0,059	0,11	0,22
4.	Rasio Lapangan Olahraga (per 10.000 penduduk)	1,85	1,87	1,76	1,75	1,75
5.	Peringkat PORPROV	11	-	12	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan

N. Urusan Statistik

Gambaran kinerja pelayanan Urusan Statistik Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 adalah disusun dan diterbitkannya dokumen/buku statistik sebagai berikut:

1. Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2020 dokumen ini selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Solok Selatan dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
2. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.55.
Perkembangan Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

O. Urusan Persandian

Selama periode tahun 2016-2020 penyelenggaraan Urusan Persandian belum optimal dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, dan masih menyiapkan kerangka dan regulasi untuk pelaksanaan urusan meskipun organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Persandian sudah

dibentuk melalui demikian Peraturan daerah Nomor:15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tabel 2.56.
Perkembangan Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah aplikasi informasi daerah	7	9	9	10	12
2	Persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan

P. Urusan Kebudayaan

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah Sanggar Budaya yang berprestasi. Dari tahun 2016-2020 Kabupaten Solok Selatan rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya yang disebut dengan Festival Sarantau Sasurambi. Kegiatan ini berupa pementasan potensi seni dan budaya anak nagari dan pameran atau bazar usaha-usaha kecil dan menengah serta produk-produk kerajinan dan kuliner Kabupaten Solok Selatan. Selain itu terdapat festival-festival rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat dan nagari untuk memperingati momen-momen penting yang menjadi budaya masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Selain festival seni dan budaya Minangkabau seperti Maarak Bungo Lamang, Balimau Adat, Mambantai Kabau Nan Gadang terdapat juga festival etnis Jawa seperti wiwitan, sedekah bumi dan kuda kepang.

Sampai tahun 2020 Kabupaten Solok Selatan sudah mempunyai 1 kawasan cagar budaya yang sudah diakui oleh provinsi dan nasional yaitu Kawasan Saribu Rumah Gadang berada di Kenagarian Koto Baru. Pada tahun 2018-2019 Kabupaten Solok Selatan mendapatkan 2 penghargaan yaitu tahun 2018 Kawasan Saribu Rumah Gadang pemenang pada Nominasi Kampung adat yang terpopuler dan 2019 Rumah Adat Panjang pemenang Situs Sejarah Terpopuler di Indonesia pada Festival Anugrah Pesona Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Tabel 2.57.
Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	8	8	12	7
2.	Jumlah sarana	Unit	2	2	3	4	4

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	penyelenggaraan seni dan budaya						
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	17	14,29	15	28,08	30,76
4	Jumlah Sanggar Budaya yang berprestasi	sanggar	3	0	3	3	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan

Q. Urusan Perpustakaan

Hingga saat ini, peran perpustakaan masih kurang dalam menarik minat baca masyarakat agar mau membaca di perpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai serta makin mudahnya akses internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu penyebab makin rendahnya pengunjung perpustakaan.

Jika dilihat dari rasio koleksi buku perpustakaan (perbandingan antara judul buku dengan jumlah buku) di Perpustakaan Daerah terjadi peningkatan yaitu dari 0,34 pada tahun 2016 menjadi 0,39 pada tahun 2020. Peningkatan ini diiringi dengan penambahan jumlah judul maupun jumlah buku yang tersedia dari 4.002 judul buku dengan jumlah koleksi 11.474 buku pada tahun 2016 menjadi 6.555 judul buku dengan jumlah koleksi 16.467 buku pada tahun 2020. Namun Peningkatan koleksi ini diikuti oleh penurunan kunjungan ke perpustakaan terutama tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan dari 2.850 pegunjung pada tahun 2018 menjadi menjadi 698 orang pada tahun 2020.

Tabel 2.58.
Perkembangan Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan	Unit	144	144	171	171	171
2.	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Unit	39	39	45	17	10
3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	2.694	2.566	2.850	1.155	698
4.	Rasio Kunjungan Perpustakaan	Rasio	1,98	1,88	2,09	0,85	0,51
5.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah						
	• Jumlah Judul • Jumlah Buku	Judul Buah	4.002 11.474	4.375 11.757	5.090 12.624	5.395 13.901	6.555 16.467

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan

R. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Gambaran kinerja pelayanan urusan kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku, peningkatan SDM pengelola kearsipan. Dilihat persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meskipun mengalami peningkatan tetapi pencapaiannya masih relatif rendah. Sampai tahun 2020 perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku baru 33,33% (11 OPD). Peningkatan pengelolaan kearsipan ini terus ditingkatkan melalui peningkatan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan yang diperuntukan oleh pengelola Arsip OPD, Nagari dan Sekolah.

Tabel 2.59.
Perkembangan Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2020

No .	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	6,06	6,06	6,06	15,15	33,33
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	3	3	7	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok Selatan

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi menjadi alternatif pilihan untuk dikembangkan dimasa depan, ditopang oleh ketersediaan wisata alam Kabupaten Solok Selatan yang masih alami serta potensi kearifan lokal di sektor kebudayaan yang relatif original dengan ikon **Nagari Seribu Rumah Gadang** yang merupakan representasi perkampungan adat yang memiliki sebanyak 125 unit rumah gadang berbagai kaum dan suku, balai adat, surau dan sebuah makam yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai pagu. Pengembangan potensi pariwisata ini diawali dengan perubahan cara berfikir eksploitatif yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertambangan menjadi berfikir konservasi produktif dengan menjadikan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya sebagai pendorong sektor ekonomi lain. Disisi objek wisata terjadi peningkatan dari jumlah objek wisata di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 2 lokasi objek wisata yang dikelola menjadi 10 objek wisata. Diantara objek wisata unggulan daerah adalah, Jalur Pendakian Gunung Kerinci terintegrasi dengan Bumi Perkemahan Camin Toran, Kawasan Saribu Rumah Gadang,

Rumah Gadang Panjang, Goa Batu Kapal, Hot Water Boom Sapan Maluluang, Kebun Teh Liki (Desa Wisata Wonorejo), Kawasan PDRI, Puncak Laras, Air Terjun Kembar.

Peningkatan jumlah lokasi wisata ini berdampak terhadap peningkatan kunjungan ke obek wisata dari 31.289 orang pada tahun 2016 menjadi 68.012 orang pada tahun 2019. Selain itu peningkatan ini ditunjang oleh peningkatan jumlah event-event promosi daerah dan meningkatnya pengelolaan objek wisata unggulan daerah baik yang dikelola pemerintah maupun kelompok masyarakat. Namun seiring dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berdampak terhadap kujungan ke Objek Wisata sehingga mengalami penurunan menjadi 36.196 orang. Jika kita lihat dari persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis mengalami penurunan yaitu 0% pada tahun 2016 menjadi 35,0% pada tahun 2020. Disisi jumlah terjadi peningkatan dari objek wisata yang sudah dikelola oleh Pokdarwis yaitu dari 20 Objek Wisata menjadi 21 Objek Wisata.

Tabel 2.60.
Perkembangan Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan ke objek wisata						
	Wisatawan Nusantara	Orang	31.187	35200	68.149	67.761	36.196
	Wisatawan Manca Negara	Orang	102	120	249	241	0
2.	Objek wisata unggulan yang dikelola	Objek	2	7	7	10	10
3	Jumlah Objek wisata	Objek	65	60	60	60	70
4	Persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis	Objek	0	33,33	33.33	33.33	35,0

Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Solok Selatan.

B. Urusan Pertanian

Kabupaten Solok Selatan merupakan Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, dimana 48,30% penduduk bergerak disektor pertanian. Sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Dalam pembentukan struktur ekonomi, sektor ini merupakan sektor andalan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020, yaitu sebesar 31,08%. Meskipun kontribusinya terus mengalami penurunan dari 33,63% pada tahun 2016 menjadi 28,78% pada tahun 2020 namun nilai produksinya tetap mengalami pertumbuhan rata-rata 1,77%

pertahun. Sub sektor yang paling dominan di sektor pertanian adalah sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan tanaman hortikultura.

Tabel 2.61.
Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi atau bahan pangan lainnya utama	Ton/Ha	5.51	5,4	5,4	5,48	5,43
2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	33,69	32,59	31,18	29,20	28,78
3	Cakupan bina kelompok petani	%	71,35	80,95	80,95	38,84	38,84
4	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	59,29	59,29	59,00	73,11	57,43
5	Jumlah KSP Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Kawasan	4	8	8	8	8
6	Jumlah KSP Perkebunan	Kawasan	3	4	4	4	4
7	Jumlah KSP Peternakan	Kawasan	1	2	2	2	3

Sumber: Dinas Pertanian dan BPS kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari produksi tanaman pangan Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2020 produksi utama yang dihasilkan oleh petani kecuali umbi-umbian cendrung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan produksi tertinggi adalah padi sebesar 142.581 ton/tahun, yang diikuti oleh jagung sebesar 82.909 ton/tahun, umbi-umbian sebesar 8.089,4 ton/tahun dan kacang-kacangan 757 ton/tahun. Penurunan ini disebabkan karena masih terdapatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, perubahan iklim dan bencana alam yang melanda lahan pertanian seperti longsor dan banjir. Untuk produksi padi Kabupaten Solok Selatan memiliki luas baku 10.225 Ha dengan Indek Pertanaman (IP) 2,59 pertahun dapat memproduksi 142.581 ton atau tingkat produktivitas 5,44 ton/hektar. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.62.
Produksi Komoditi Tanaman Pangan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ton/Tahun)

No	Komoditi	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	125.903	147.747	147.898	152.488	142.581
2	Jagung	66.679	95.862	76.630	103.323	82.909
3	Kacang Hijau	307	19	12	13	13,86
4	Kacang Tanah	5.600	1.459	1.260	1.281	757,0
5	Kedelai	707	12	76	137	26,79
6	Ubi Jalar	32.324	2.247	1.891	2.683	3.551
7	Ubi Kayu	39.205	3.720	3.720	3.546	4.538,4

Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan

Untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan Kabupaten Solok Selatan telah mencadangkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan luas 9.162 Ha sawah.

Sedangkan untuk perkembangan produksi buah-buahan utama di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 terdiri dari jeruk, pisang dan manggis sedangkan untuk produksi perkebunan terdiri dari karet, kelapa sawit dan kopi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.63.
Perkembangan Produksi Buah-Buahan dan Perkebunan Utama Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ton/Tahun)

No	Komoditi	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jeruk	4.786,9	7.107,2	3.882,8	3.383,3	5.845,2
2	Manggis	632,30	95,9	147,8	458,7	898,9
3	Pisang	1.016,4	3.065,4	759,1	599,6	4.508
4	Karet	12.019,97	12.226,37	14.606,39	14.624,80	10.192,81
5	Kelapa Sawit	41.491,95	44.233	41,739,84	42.059,58	43.515,98
6	Kopi	1.760	2.014,21	2.483,31	2.784,36	2.754

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan jumlah ternak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.64.
Perkembangan Jumlah Ternak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 (Dalam Ekor)

No	Ternak	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	9.540	10.117	10.361	10.571	10.795
2	Sapi Perah	16	17	28	32	18
3	Kerbau	6.482	6.727	6.748	6,951	5.177
4	Kambing	8.729	8.917	9.073	9.346	8.560
5	Ayam Petelur	4.500	5.000	5.150	5.000	7.699
6	Ayam Pedaging	82.225	83.879	84.245	86.773	173.980
7	Ayam Buras	91.704	92.988	94.958	97.807	99.823
8	Itik	28.986	30.126	30.616	31.250	32.029

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan

C. **Urusan Perdagangan**

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan perdagangan selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp. 833,38 milyar pada tahun 2016 menjadi 1.116,73 milyar pada tahun 2020. Peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten yaitu dari 18,12% pada tahun 2016 menjadi 20,20% pada tahun 2020. Untuk inflasi daerah Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Inflasi Kota Padang, Hal ini disebabkan karena di Sumatera Barat, BPS hanya menerbitkan inflasi untuk dua daerah yaitu Kota Padang dan Bukittinggi. Dilihat dari perkembangan indikator inflasi tahun 2017-2020 cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari perkembangan realisasi inflasi yang berada pada angka 1,72-2,12%

Data ini memberikan arti bahwa pengelolaan sektor perdagangan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Secara teoritis, untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam perspektif industrialisasi antara lain dilihat dari sejauh mana perkembangan kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap PDRB suatu daerah. Sedangkan untuk cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dari tahun 2017-2020 tidak mengalami peningkatan. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.65.
Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,12	18,70	19,44	20,21	20,20
2	Tingkat Inflasi	%	5,02	2,11	2,55	1,72	2,12
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	29,05	43,34	43,34	43,34	43,34
4	Jumlah sarana perdagangan (pasar)	unit					
	➤ Pasar Kabupaten		2	2	2	2	2
	➤ Pasar Tradisional		32	31	31	31	31

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

D. **Urusan Perindustrian**

Dilihat dari kecenderungan perkembangan urusan industri selama tahun 2016-2020 nilainya mengalami penurunan yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB yaitu dari Rp.247,11 milyar pada tahun 2016, menjadi Rp 237,70 milyar pada tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 berkontribusi 5,37% dan pada tahun 2020 menjadi 4,30%. Penurunan ini

disebabkan karena melemahnya kondisi perekonomian nasional dan global, serta belum jelasnya fokus pengembangan sektor industri di Kabupaten Solok Selatan. Jika dilihat dari pertumbuhan industri kecil dan menengah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya meskipun angka pertumbuhannya berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari industri kecil dan menengah yaitu 26,63%, peningkatan ini disebabkan oleh insentif dan kemudahan akses ke permodalan bagi usaha kecil dan menengah. Namun pada tahun 2020 meskipun kondisi perekonomian mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) namun jumlah Industri kecil dan menengah tetap mengalami pertumbuhan sebesar 4,63%.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan, pengembangan sektor perindustrian adalah pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, seperti pengolahan produk. Gambaran kinerja pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.66.
Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,37	5,04	4,73	4,20	4,30
2.	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	12,64	1,81	4,88	26,63	4,63
3.	Cakupan Bina Pengrajin	%	13,32	21,38	25,38	4,00	3,7
4.	Persentase IKM yang Mengekspor Produk ke luar Daerah	%	0,23	1,08	1,38	1,32	1,26
5.	Persentase IKM yang menerapkan Good Higiene	%	0	3,6	3,4	2,6	2,5
6.	IKM yang memiliki HAKI	IKM	1	3	11	16	17
7.	Persentase IKM memiliki Sertifikat Halal	%	3,7	21,6	18,8	18,0	20,2

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

E. Urusan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selama tahun 2016-2020 tidak ada kegiatan transmigrasi swakarsa. Kegiatan Urusan Transmigrasi hanya dalam bentuk fasilitasi beberapa kegiatan pendukung perkembangan eks UPT transmigrasi yang dibangun sebelum tahun 2014 di Kabupaten Solok Selatan, yaitu dengan fokus pada penyelesaian masalah tanah, pengembangan ekonomi warga UPT Dusun Tengah Kecamatan

Sangir Batang Hari serta persiapan perencanaan pembentukan Kawasan Perkotaan Baru

F. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan, karena didukung oleh banyak sungai dan daerah ini juga dikenal dengan sebutan sebagai Nagari Saribu Sungai yang keberadaan debit airnya cukup terjamin dengan terlindunginya Taman Nasional Kerinci Seblat. Disamping potensi sungai, juga terdapat beberapa potensi embung yang salah satunya berfungsi untuk lahan budidaya perikanan darat. Kemudian, pola budidaya perikanan berupa kolam, empang dan juga mina padi juga telah dilakukan oleh masyarakat di kawasan pertanian.

Namun pada sisi lain, kegiatan pengembangan budidaya perikanan belum berkembang dengan baik, meskipun dilihat dari produksi sektor perikanan terus mengalami peningkatan yaitu dari 874,19 ton pada tahun 2016 menjadi 1.661 ton pada tahun 2020. Namun peningkatan tersebut belum dapat menutupi kebutuhan ikan di Kabupaten Solok Selatan, hal ini dapat dilihat dari masih besarnya impor kebutuhan ikan dari luar daerah untuk dikonsumsi masyarakat Kabupaten Solok Selatan . Data menunjukkan bahwa impor ikan yang masuk ke Kabupaten Solok Selatan, untuk jenis ikan tawar (ikan mas dan ikan nila) berasal dari Maninjau Kabupaten Agam dan Koto Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota, Singkarak Kabupaten Solok yang membudidayakan ikan tawar (perikanan darat). Sedangkan untuk jenis ikan laut berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat Solok Selatan dari 20,30 kg/perkapita tahun 2016 menjadi 31,58 kg perkapita tahun 2020.

Tabel 2.67.
Perkembangan Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Capaian Produksi perikanan	%	94,00	90.00	100	105	91,79
	Jumlah produksi Ikan	Ton	874,19	1.017	1.340	1.731	1.661
2	Cakupan bina perikanan	%	72,15	79	82,18	90,0	97,24
3	Persentase Produksi perikanan Budidaya	%	86.9	92,0	98,0	94,0	97,25
4	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ kapita	20,30	27	28,06	30,80	31,58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

Pelayanan Fungsi Penunjang merupakan fungsi pelayanan pemerintah yang bertugas atau menjalani tugas dan fungsi mengatur dan mengurus

pelayanan urusan pemerintahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Fungsi penunjang ini terdiri atas beberapa unsur:

- 1) Unsur Pendukung Urusan Pemerintah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- 2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengelolaan Perbatasan
- 3) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri atas Inspektorat Daerah
- 4) Unsur Kewilayahan terdiri atas Kecamatan
- 5) Unsur Pemerintahan Umum terdiri atas Kesatuan Bangsa

Dari tabel dibawah dapat dilihat perkembangan dan capaian kinerja Fungsi Penunjang Pelayanan Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2.68.
Perkembangan Kinerja Fungsi Penujang Pemerintahan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
I	Sekretariat Daerah					
1.	Nilai LAKIP/SAKIP	CC	CC	CC	CC	CC
2.	Nilai LKPJ/LPPD	1,6816 Sedang	2,5547 Tinggi	2,8656 Tinggi	3,0293 Sangat tinggi	NA
3.	Persentase pencapaian SPM per-urusan	70	70	95	83,60	83,60
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.	Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Lembaga dan Swasta yang disepakati	16	16	0	3	0
6.	Peringkat MTQ Nasional Tingkat Provinsi	-	15	-	14	-
7.	Tuan Rumah MTQ Nasional Tingkat Provinsi	-	belum	-	belum	-
II	Sekretariat DPRD					
1.	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	35	20	22	16	12
2.	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	0	1	1	1	1
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
I	Perencanaan					
1.	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu (RKPD dan RKPD Perubahan)	50	50	50	100	100
2.	Persentase pencapaian kinerja Daerah	na	na	na	na	na
3.	Pencapaian Nilai Perencanaan pada SAKIP	44,70	57,97	57,13	55,93	58,37
II	Keuangan					
1.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Pencapaian Target PAD	114,95	95	87,8	88,79	109,29
3.	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	5,43	9,18	7,67	7,83	10,07
III	Kepegawaian					
1.	Indek Merit	na	na	na	na	154
2.	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan	na	35	50	88,26	88,26

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Analisa Jabatan					
IV	Pendidikan dan Pelatihan					
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	na	na	na	na	47,76
2.	Persentase Eselonering yang mengikuti Diklat Struktural					
	- Eselon II	65	65	43,3	17	17
	- Eselon III	21	21	15,3	21	21
	- Eselon IV	18	30	18,3	22	22
3.	Persentase Aparatur yang berijazah Sarjana dan Pasca Sarjana:					
	- S1	58,23	55,26	55,34	58,73	65,89
	- S2	4,51	4,30	4,55	4,62	4,86
	- S3	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
V	Penelitian dan Pengembangan					
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	100	100	100	100	0
2.	Inovasi Daerah dalam Pelayanan Pemerintah	-	-	-	26	6
VI	Pengelolaan Perbatasan					
1.	Persentase tapal batas antar nagari yang ditetapkan	na	na	na	15,38	35,89
2.	Persentase tapal batas antar kecamatan yang ditetapkan	na	na	na	na	na
3	Jumlah Nagai yang telah ditetapkan Tapal Batas antar Nagari	na	na	na	6	14
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
I	Inspektorat Daerah					
1.	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	II dengan catatan	II	II+	II+	II+

Sumber: Bappeda, Inspektorat, BPKD, BKSDM, Sekretariat Daerah dan Sekwan

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

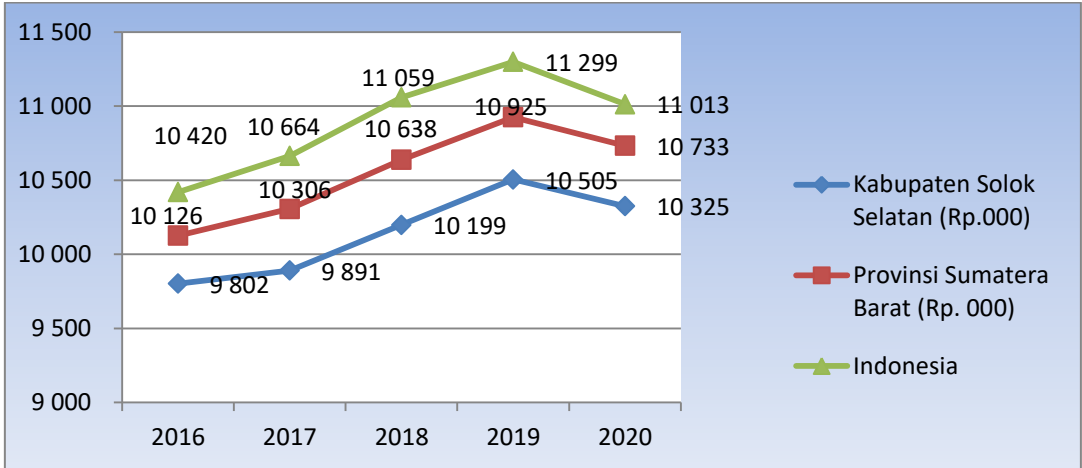
A. Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk

Pengeluaran per kapita menggambarkan berapa rata-rata pengeluaran penduduk perbulan dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan berupa makanan maupun non makanan. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indek Pembangunan Manusia khususnya untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka pengeluaran perkapita ini merupakan angka perkapita yang disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli dengan menggunakan 96 komoditas (66 Komoditas makanan, dan 30 komoditas non makanan). Jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2016-2019 dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 9.653.000,- (rata-rata Rp.804.417 per bulan) pada tahun 2016 menjadi Rp. 10.505.000,- (rata-rata Rp. 875.417 per bulan) pada tahun 2019, namun pada

tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp.10.325.000 (rata-rata Rp. 860.417 per bulan).

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan jarak deviasi semakin melebar yaitu dari Rp. 324.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 408.000,- Tahun 2020 dengan Provinsi dan dari Rp. 618.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 688.000,- Tahun 2020 dengan Nasional.

Gambar 2.22.
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Penduduk
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun
2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani menjadi satu-satu indikator urusan pertanian untuk mengukur dari aspek daya saing daerah dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah. Secara konseptual, yang dimaksud dengan nilai tukar petani merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indek harga yang dibayarkan petani (Ib). Ini berarti semakin tinggi Nilai Tukar Petani maka semakin sejahtera petani. Jika dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016 baru berada pada angka 106,60% dimana indeks yang diterima (It) petani sebesar 107,70% dan indek yang dbayar petani (Ib) sebesar 101,03%. Dimana NTP terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu 110.23%, diikuti oleh sektor hortikultura yaitu 109,51% dan subsektor tanaman pangan 105,73%.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

A. Infrastruktur Perhubungan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan perhubungan dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio panjang

jalan per jumlah kendaraan, jumlah barang/orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pertahun. Perkembangan indikator urusan perhubungan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.69.
Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan untuk Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1,92	2,26	2,49	2,76	2,87
2.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	6.024	6.022	5.702	5.500	5.625
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	351.214	350.110	370.104	373.205	375.342
3.	Jumlah orang melalui dermaga/ terminal per tahun	orang	5.440	5.435	5.102	5.013	5.132
	Jumlah barang melalui dermaga/ terminal per tahun	Ton	320.110	329.009	301.614	289.701	292.561

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

B. Infrastruktur Prasarana Wilayah

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat diukur melalui empat indikator yaitu: jenis dan jumlah bank dan cabangnya, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya, jenis, kelas dan jumlah restoran, jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel. Perkembangan indikatornya di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.70.
Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Solok SelatanTahun 2016-2020

No .	Indikator	Satua n	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis dan jumlah bank dan cabangnya						
	Jumlah Bank	Buah	12	12	12	12	12
	Bank Umum	Buah	5	5	5	5	5
	Bank Syariah	Buah	2	2	2	2	2
	BPR	Buah	5	5	5	5	5
2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi						
	Jumlah perusahaan asuransi	Buah	3	3	3	3	3
	Asuransi jiwa	Buah	1	1	1	1	1
	Asuransl lainnya	Buah	2	2	2	2	2
3.	Jenis, kelas dan jumlah restoran						
	Restoran	Buah	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Rumah Makan	Buah	32	31	31	31	31
4.	Jenis, dan kelas dan jumlah penginapan/hotel						
	Jumlah Penginapan/Hotel	Buah	16	16	16	16	16
	Kelas Wisma	Buah	10	10	10	10	10
	Hotel Melati	Buah	5	5	5	5	5
	Hotel Bintang 1	Buah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

Aspek daya saing daerah dari fokus fasilitas wilayah/infrastruktur untuk urusan komunikasi, informatika dan energi dapat diukur melalui tiga indikator yaitu: rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan jumlah daerah *blank spot*. Perkembangan indikator urusan komunikasi, informatika dan energi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.71.
Perkembangan Indikator Infrastruktur Dasar Wilayah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Elektrifikasi	persen	97,47	97,69	98,36	97,85	96,18
2	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan Non PLN)	%	97,47	97,69	98,36	97,85	99,57
3	Jumlah Jorong Blank Spot	Jorong	46	46	46	46	46

Sumber: Dinas Kominfo, Dinas Perumkim &LH, BPS Kabupaten Solok Selatan dan Ranting PLN Muara Labuh

2.4.3. Fokus Investasi

Untuk melihat fokus iklim berinvestasi dalam mengukur aspek daya saing daerah dilakukan dengan mengukur enam indikator yaitu: 1) angka kriminalitas, 2) jumlah demo, 3) lama proses perizinan, 4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, 5) jumlah perda yang mendukung iklim investasi, dan 6) persentase desa berstatus swasembada/mandiri terhadap total desa. Perkembangan fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72.
Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Angka kriminalitas,	per 10.000 penduduk	35,72	29,67	25,31	24,32	18,69

No .	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Demo	Kali/ Tahun	1	3	2	0	0
3.	Lama Proses Perizinan,	Hari	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
4.	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah						
	Jumlah Pajak Daerah	(Milyar Rp)	4,962	6.961	7.617	8.420	6.801
	Jenis Pajak Daerah	Jenis	9	9	9	9	9
	Jumlah Retribusi Daerah	(Milyar Rp)	1,164	1.231	903	1.378	1.199
	Jenis Retribusi Daerah	Jenis	14	14	10	10	10
5.	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi	Dokumen	2	2	2	2	2
6.	Persentase Desa Berstatus swasembada/ Mandiri Terhadap Total Desa	%	5,13	7,69	10,26	7,69	23,33

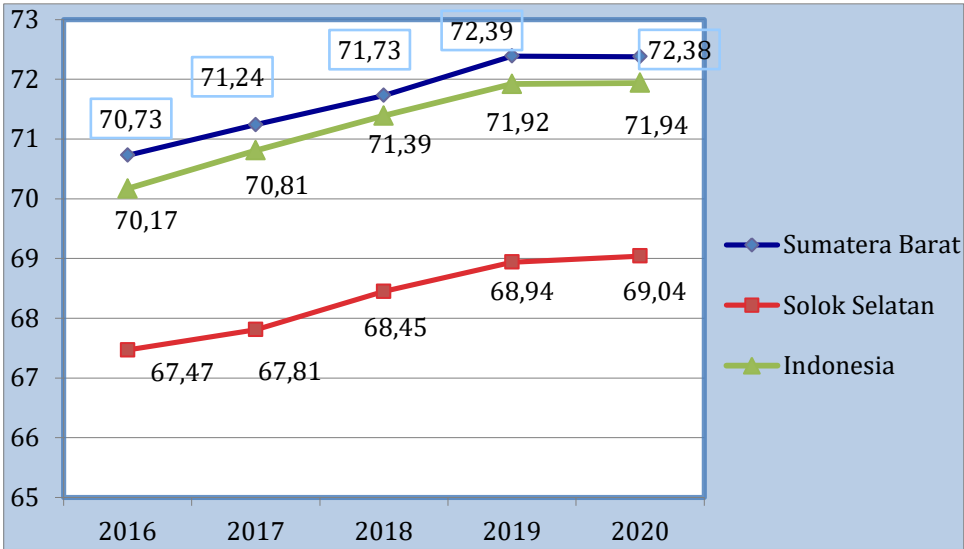
Sumber: Kantor Kesbang Pol, BPKD, Dinas Penanaman modal dan PTSP dan Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Solok Selatan

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Dalam konsep ini, manusia dipandang sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah. Jika dilihat dari perkembangan Indeks pembangunan Manusia selama tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan menunjukan trend peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 67,47 pada tahun 2016 menjadi 69,04 pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun angkanya masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 72,38 dan Nasional yaitu 71,94 pada tahun 2020. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat berada pada rangking 15 berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.23.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Solok Selatan.Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.5. Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

2.5.1. Indikator Kinerja Kunci

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada pada tahun 2020 yang merupakan data awal (*base line*) dari tahun perencanaan dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja Kunci (IKK) daerah seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibawah ini:

Tabel 2.73.
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
I	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	69,04
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,24
4	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Juta/ Tahun	32,32
5	Pengeluaran Perkapita	Rp/Bulan	860.417
6	Indek Gini Ratio	Indek	0,307
7	Tingkat Pengangguran	%	5,62
8	Tingkat Kemiskinan	%	7,15
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
I	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.	Pendidikan		
a	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92,37
b	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun	%	95,94

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020
	yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
c	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	75,94
d	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,94
2.	Kesehatan		
	Meningkatnya Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	67,81
a	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,77
b	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100
c	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	69,47
d	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	73,04
e	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	83,84
f	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	85,9
g	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,19
h	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86,95
i	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	69,17
j	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	54,82
k	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
l	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	62,84
m	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100
n	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	9,04
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
a	Persentase Pembangunan sesuai dokumen perencanaan tata ruang	%	46,73
b	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	25
c	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten		-
d	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	25,69
e	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	77,04
f	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	59,17
g	Rasio kepatuhan IMB kota	%	100
	Tingkat kemantapan jalan kota	%	41,54

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020
h	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0
i	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
a	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100
b	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	%	100
c	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100
d	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	9,27
e	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	49,64
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
a	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
b	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
c	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	63.996
d	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	40
e	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.246
f	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	53,86
g	Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	53,85
6	Urusan Sosial		
a	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100
b	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Urusan Ketenagakerjaan		
a	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100
b	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,74
c	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)	Rp. Juta	46,05
d	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0
e	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	%	19,82
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat		
a	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	12,64

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020
b	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	%	0,0036
c	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,11
3	Urusan Pangan		
a	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	122,29
4	Urusan Pertanahan		
a	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100
b	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100
c	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0
d	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	
e	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0
f	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0
5	Lingkungan Hidup		
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Indeks	79,72
b	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	27,78
c	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	100
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
a	Perekaman KTP Elektronik	%	88,93
b	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	%	24,76
c	Kepemilikan akta kelahiran	%	85,95
d	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	0
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
a	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	7,69
b	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	23,33
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
a	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,87
b	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	65,45
c	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	100
9	Urusan Perhubungan		
a	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,48
b	V/C Ratio di jalan Kota	%	29
10	Urusan Komunikasi dan Informasi		
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
b	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30,3
c	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	%	25,44

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020
	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota		
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
a	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	16,52
b	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0,75
12	Urusan Penanaman Modal		
a	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	-28,45
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
a	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,22
b	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,56
c	Peningkatan prestasi olahraga		
	Ø emas	Buah	-
	Ø Perak	Buah	-
	Ø Perunggu	Buah	-
13	Urusan Statistik		
a	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
b	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
14	Urusan Persandian		
a	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0
15	Urusan Kebudayaan		
a	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	30,77
16	Urusan Perpustakaan		
a	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,95
b	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	18,66
17	Urusan Kearsipan		
a	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai Rata	24,47
b	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai Rata	2,67
III	Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan		
a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di	Ton	1661
2	Urusan Pariwisata		
a	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-100
b	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	-46,58
c	Tingkat hunian akomodasi	%	41,66
d	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	25,29
e	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,61
3	Urusan Pertanian		
a	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,44

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020
b	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	27,76
4	Urusan Energi Sumber Daya Mineral		
a	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota	%	100
5	Urusan Perdagangan		
a	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	65
b	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	19,03
c	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	50,02
6	Urusan Perindustrian		
a	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	%	4,63
b	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	30
c	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100
d	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100
e	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	100
f	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	ada
III	Fungsi Penunjang		
1	Perencanaan		
a	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	na
2	Penelitian dan Pengembangan		
b	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0
3	Keuangan		
a	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
b	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	29,44
c	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	1,94
d	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,09
e	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,92
e	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		0
f	Assets Management	Nilai	4
g	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,70
h	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		100

No.	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020
i	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		100
4	Kepegawaian		
a	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,87
b	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,64
c	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	47,25
5	Pelayanan Pemerintahan lainnya		
a	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	15,16
b	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	94,72
c	Maturitas SPIP	nilai	2,6
d	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	II+

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020

2.5.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk melihat keberhasilan kinerja standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka dapat dilihat dari Indikator Standar Pelayanan Minimal dibawah ini

Tabel 2.74.
Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020			
		Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Kesenjangan GAP (%)
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	97,05	3
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	17,54	82
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	92,37	7.63
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	69.47	30,53

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020			
		Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Kesenjangan GAP (%)
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	73,04	26,96
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	83,84	16,16
7	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	85,9	14,1
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	87,2	12,8
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,95	13,05
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	69,17	30,83
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	54,82	45,18
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	-
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100	62,84	37,16
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	-
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahun Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	9,04	90,96
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	80	77,04	2,96

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020			
		Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Kesenjangan GAP (%)
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	70	59,17	10,83
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	-
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100	100	-
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	100	100	-
21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	63,99	36,01
22	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-
23	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	Persentase Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-
24	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-
25	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-
26	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar panti	100	100	-

Sumber: Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Tahun 2020

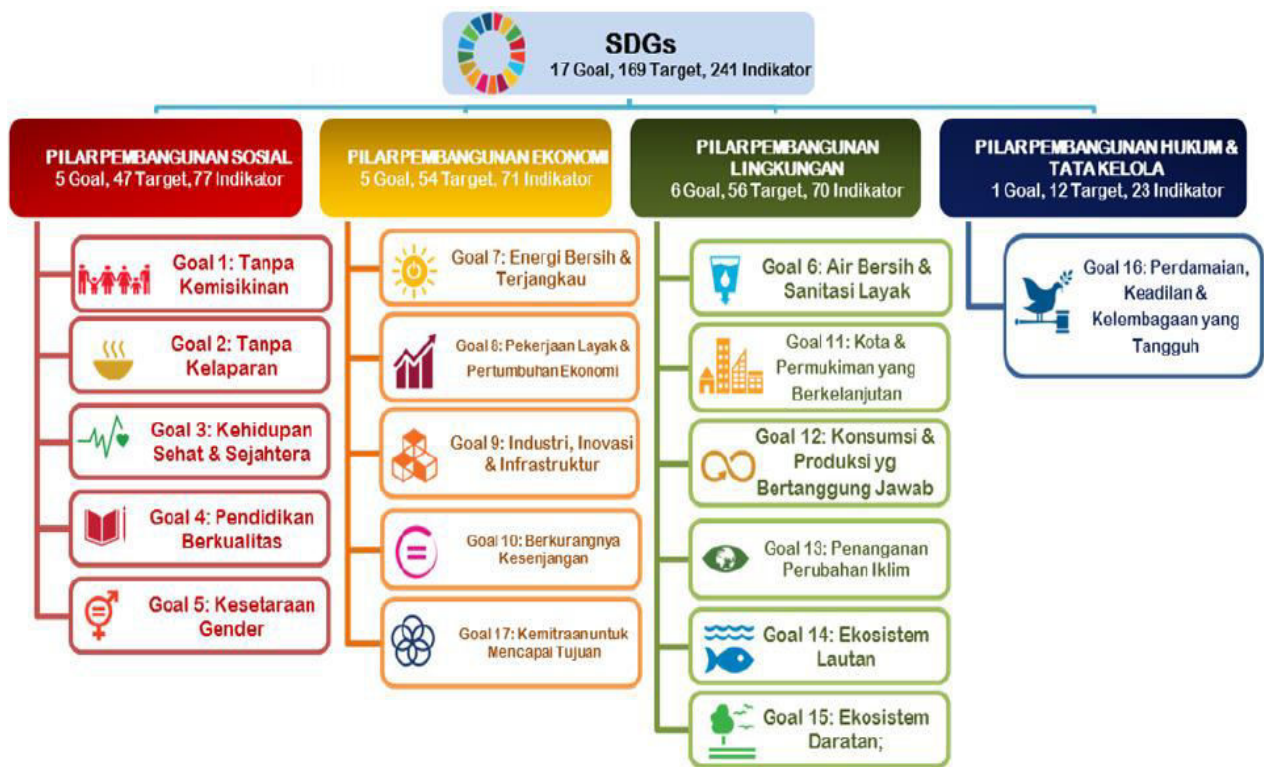
2.6. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 Goals (tujuan), seperti pada gambar dibawah ini:

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millenium (*Millenium Development Goals* / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapai Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian *17 goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gambar 2.24.
Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Berdasarkan hasil analisis dari 17 *goals* capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan Kabupaten Solok Selatan hanya 16 Goals (kecuali Goals 14) dengan jumlah indikator 220 indikator yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan), terdiri dari 24 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar pembangunan sosial.
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan), terdiri dari 11 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar pembangunan sosial.
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), terdiri dari 34 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar pembangunan sosial.
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas), terdiri dari 13 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar pembangunan sosial.
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender), terdiri dari 14 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar sosial.

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak), terdiri dari 18 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar lingkungan.
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau), terdiri dari 2 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar ekonomi.
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), terdiri dari 19 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar ekonomi.
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), terdiri dari 13 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar ekonomi.
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan), terdiri dari 11 indikator yang termasuk ke dalam pilar ekonomi.
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), terdiri dari 13 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar lingkungan.
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), terdiri dari 5 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar lingkungan.
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim), terdiri dari 2 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar lingkungan.
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan). Indikator ini tidak menjadi kewenangan kabupaten.
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta

Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan); terdiri dari 4 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar lingkungan.

16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh), terdiri dari 21 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar hukum dan tata Kelola.
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), terdiri dari 16 indikator kewenangan kabupaten yang termasuk ke dalam pilar ekonomi.

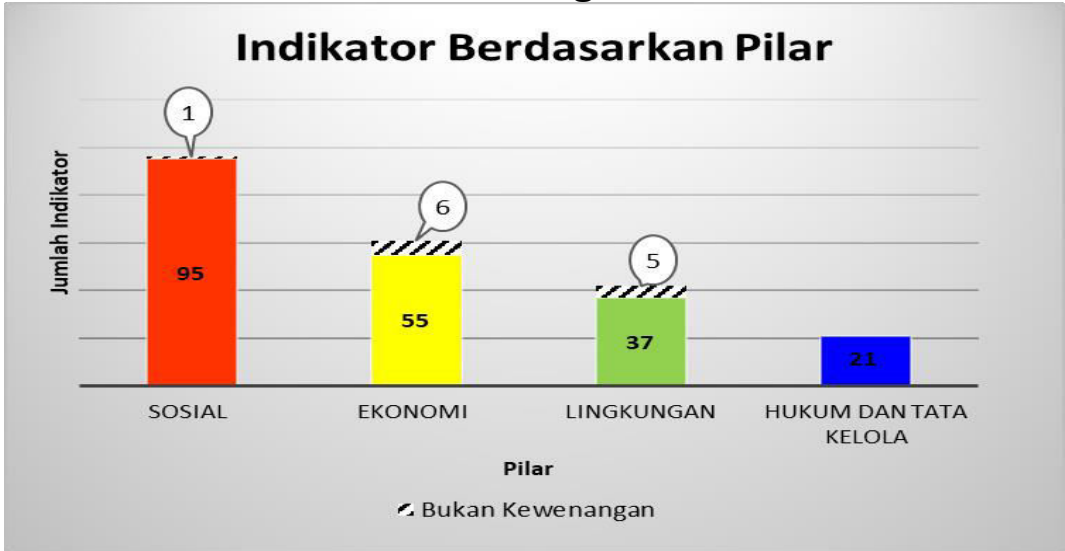
Dari 220 indikator yang terkait dengan Kabupaten Solok Selatan terdapat 12 (Dua Belas) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Solok Selatan yakni :

No	INDIKATOR TPB	Pilar	Keterangan
TPB 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender)			
1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Sosial	Tidak sesuai dengan Culture Minangkabau
TPB 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan			
2	Kualitas air danau.	Lingkungan	Tidak terdapat danau
TPB 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
3	Bauran energi terbarukan.	Ekonomi	Merupakan kewenangan provinsi
4	Intensitas energi primer.	Ekonomi	Merupakan kewenangan provinsi
TPB 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			
5	Panjang pembangunan jalan tol.	Ekonomi	Tidak ada pembangunan jalan tol
6	Panjang jalur kereta api.	Ekonomi	Tidak ada jalur kereta api
7	Jumlah dermaga penyeberangan.	Ekonomi	Tidak ada dermaga dan rencana dermaga penyeberangan
8	Jumlah pelabuhan strategis.	Ekonomi	Khusus daerah yang terdapat 24 pelabuhan laut
TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
9	Jumlah kawasan perkotaan	Lingkungan	Khusus daerah yang menjadi/

No	INDIKATOR TPB	Pilar	Keterangan
	metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).		memiliki kawasan perkotaan metropolitan
10	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Lingkungan	Khusus kab/kota di luar jawa yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan baru sebagai PKN
11	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Lingkungan	Khusus untuk daerah yang memiliki kawasan perkotaan metropolitan
12	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Ekonomi	Khusus untuk daerah yang memiliki kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang

Dengan demikian, jumlah indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok Selatan adalah 208 indikator.

Gambar 2.25.
Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Pilar Pembangunan dan TPB/SDGs



Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
- d. Indikator TPB yang bukan kewenangan/BK atau tidak ada di wilayah kajian.

A. Capaian Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Goals

Berdasarkan analisis data perkembangan 3 tahun terakhir yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 71 indikator (34,13%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 91 indikator (43,27%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 47 indikator (22,60%).

Tabel 2.75.
Capaian Indikator per Goals TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan
Terhadap Target Nasional

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Mecapai Target	Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	8	13	3	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	5	2	4	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16	16	2	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	7	6	0	Sosial
5	Kesetaraan Gender	5	7	1	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	7	3	Lingkungan
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1	9	9	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	4	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	3	5	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	4	1	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	3	2	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	1	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	1	3	0	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	8	7	6	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	7	6	3	Ekonomi
	Jumlah	74	91	43	
	Tingkat Capaian (%)	35,58	43,75	20,67	

Sumber : Hasil Analisis TPB/SDGs, 2021

Tabel 2.76.
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan
Terhadap Target Nasional

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
A	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	
1	Tanpa Kemiskinan (Pilar Sosial)	
	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%
	2. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%
	3. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%
	5. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun
	6. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada
	7. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat
	8. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat
2	Tanpa Kelaparan (Pilar Sosial)	
	1. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%
	2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%
	3. Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%
	5. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Pilar Sosial)	
	1. Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306
	2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24
	3. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%
	4. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245
	5. Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun
	6. Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Meningkat menjadi 300 Target lokal 7 Kecamatan
	7. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 61)	Meningkat
	8. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun
	9. Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
		Solsel 7 kecamatan
	10. Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280
	11. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%
	12. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%
	13. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38
	14. Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%
	15. Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun
	16. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat
4	Pendidikan Berkualitas (Pilar Sosial)	
	1. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat
	2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%
	3. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat
	4. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%
	5. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%
	6. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat
	7. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat
5	Kesetaraan Gender (Pilar Sosial)	
	1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun
	2. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%
	3. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun
	4. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%
	5. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak (Pilar Lingkungan)	
	1. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik
	2. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat
	3. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) (Solsel 40 desa/nagari)
	4. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat
	5. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat
	6. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat
	7. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Ada
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Pilar Ekonomi)	
	1. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Pilar Ekonomi)	
	1. Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat
10	Berkurangnya Kesenjangan (Pilar Ekonomi)	
	1. Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36
	2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%
	3. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Pilar Lingkungan)	
	1. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada
	2. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada
	3. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun
	4. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Pilar Lingkungan)	
13	Penanganan Perubahan Iklim (Pilar Lingkungan)	
	1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada
15	Ekosistem Daratan (Pilar Lingkungan)	
	1. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	meningkat
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Pilar Hukum dan Tata Kelola)	
	1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun
	2. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun
	3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
	4. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun
	5. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun
	6. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%
	7. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat
	8. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan (Pilar Ekonomi)	
	1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat
	2. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%
	3. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.
	4. Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat
	5. Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	Meningkat
	6. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada
	7. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat
B	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	
1	Tanpa Kemiskinan (Pilar Sosial)	
	1. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%
	2. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta
	4. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%
	5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%
	6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%
	7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%
	8. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.
	9. Jumlah korban meninggal, hilang, dan	Menurun

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
	terkena dampak bencana per 100.000 orang.	
	10. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah (Nagari =40 Nagari)
	11. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu
	12. Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu
	13. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450
2	Tanpa Kelaparan (Pilar Sosial)	
	1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun
	2. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Pilar Sosial)	
	1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%
	2. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %
	3. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun
	4. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun
	5. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%
	6. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.
	7. Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%
	8. Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%
	9. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun
	10. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%
	11. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%
	12. Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28
	13. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat
	14. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%
	15. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun
	16. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat
4	Pendidikan Berkualitas (Pilar Sosial)	
	1. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%
	4. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%
	6. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat
5	Kesetaraan Gender (Pilar Sosial)	
	1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16
	2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun
	3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat
	4. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat
	5. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%
	6. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%
	7. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak (Pilar Lingkungan)	
	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%
	2. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%
	3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%
	4. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota. (Solsel 40 desa/nagari)
	5. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota
	6. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat
	7. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Pilar Ekonomi)	
	1. Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat
	2. PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
	3. Persentase tenaga kerja formal.	51%
	4. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%
	5. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan	Menurun

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
	jenis kelamin dan kelompok umur.	
	6. Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)
	7. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat
	8. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat
	9. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Pilar Ekonomi)	
	1. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat
	2. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat
	3. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat
	4. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat
10	Berkurangnya Kesenjangan (Pilar Ekonomi)	
	1. Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional) Target lokal 0
	2. Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa Target lokal 40 Nagari
	3. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Pilar Lingkungan)	
	1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga
	2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun
	3. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%
	4. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Pilar Lingkungan)	
	1. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)
	2. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat
	3. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat
13	Penanganan Perubahan Iklim (Pilar Lingkungan)	
	1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun
15	Ekosistem Daratan (Pilar Lingkungan)	
	1. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat
	2. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)
	3. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.	ada
	4. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan)	
	1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat
	2. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkat menjadi 80%
	3. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%
	4. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kabupaten/Kota: 80%
	5. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat
	6. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat
	7. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan (Pilar Ekonomi)	
	1. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%
	2. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada
	3. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada
	4. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat
	5. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat
	6. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat
C. Indikator yang belum memiliki data (NA)		
1	Tanpa Kemiskinan (Pilar Sosial)	
	1. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%
	2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%
	3. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6
2	Tanpa Kelaparan (Pilar Sosial)	
	1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun
	2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
	3. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %
	4. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Pilar Sosial)	
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun
	1. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun
5	Kesetaraan Gender (Pilar Sosial)	
	1. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak (Pilar Lingkungan)	
	1. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS
	2. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)
	3. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Pilar Ekonomi)	
	1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat
	2. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat
	3. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat
	4. Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat
	5. Tingkat setengah pengangguran.	Menurun
	6. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat
	7. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%
	8. Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat
	9. Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Pilar Ekonomi)	
	1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat
	2. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Laju pertumbuhan PDRB Solse
	3. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat
	4. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat
10	Berkurangnya Kesenjangan (Pilar Ekonomi)	
	1. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional) Perlu Ditetapkan Target Lokal
	2. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat

No	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target Nasional
	3. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun
	4. Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87
	5. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Pilar Lingkungan)	
	1. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Pilar Lingkungan)	
	1. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional) Perlu ditetapkan target lokal Solok Selatan
	2. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Pilar Hukum dan Tata Kelola)	
	1. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat
	2. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun
	3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0
	4. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.	Meningkat menjadi: Kabupaten/Kota: 50%
	5. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%
	6. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan (Pilar Ekonomi)	
	1. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat
	2. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi
	3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat

Sumber : Hasil Analisis TPB/SDGs, 2021

B. Capaian Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jika dilihat dari pencapaian Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 61 indikator dari 208 indikator yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73 %, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut.

1. SPM Pendidikan

SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91 % dari seluruh indikator TPB dan 21,31 % dari indikator SPM.

2. SPM Kesehatan

SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82 % dari seluruh indikator TPB dan 42,62 % dari indikator SPM.

3. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,39 % dari indikator SPM.

4. SPM Pekerjaan Umum

SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,48 % dari indikator SPM.

5. SPM Perumahan Rakyat

SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45 % dari seluruh indikator TPB dan 1,64 % dari indikator SPM.

6. SPM Sosial

SPM Sosial sebanyak 4 indikator atau 1,82 % dari seluruh indikator TPB dan 6,56 % dari indikator SPM.

Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan yang merupakan target SPM dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:.

Tabel 2.77.
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan SPM

No	SPM	SS		SB		NA		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pendidikan	6	46,15	7	53,85	0	0,00	13
2	Kesehatan	15	57,69	11	42,31	0	0,00	26
3	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	4	40,00	5	50,00	1	10,00	10
4	Pekerjaan Umum	1	14,29	6	85,71	0	0,00	7
5	Perumahan Rakyat	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
6	Sosial	1	25,00	2	50,00	1	25,00	4
		27		32		2		61

Sumber : Hasil Analisis TPB/SDGs, 2021

C. Capaian Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Perangkat Daerah

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration.

Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan “*No one left behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”.

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan focus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kabupaten Solok Selatan dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada Tabel 2.78 dan Tabel 2.79

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan total indikator yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator, maka setelah dilakukan pengumpulan data pada OPD terkait di Kabupaten Solok Selatan, dari 220 indikator tersebut, terdapat 12 indikator yang bukan menjadi kewenangan sehingga berdasarkan kesepakatan Tim Pembuat KLHS maka indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok Selatan adalah 208 indikator. Pada tabel berikut dapat dilihat capaian indikator TPB Kabupaten Solok Selatan berdasarkan OPD berwenang.

Tabel 2.78.
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD/ Instansi Sumber Data	SS		SB		NA		Jumlah Indikator
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Bag. Hukum Setda	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2
2	Bag. Organisasi Setda	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
3	Bag. PBJ Setda	0	0,00	3	100,00	0	0,00	3
4	Bag. Perekonomian dan SDA	0	0,00	1	50,00	1	50,00	2
5	BAPPEDA	2	50,00	2	50,00	0	0,00	4

No	OPD/ Instansi Sumber Data	SS		SB		NA		Jumlah Indikator
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
6	BKPSDM	0	0,00	3	100,00	0	0,00	3
7	BPBD	6	42,86	7	50,00	1	7,14	14
8	BPKD	3	50,00	1	16,67	2	33,33	6
9	BPS	1	20,00	3	60,00	1	20,00	5
10	Dinas Kesehatan	24	48,98	22	44,90	3	6,12	49
11	Dinas Pertanian	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1
12	Dinsos PMD/N	3	18,75	8	50,00	5	31,25	16
13	Disdikpora	8	53,33	7	46,67	0	0,00	15
14	Disdukcapil	2	40,00	2	40,00	1	20,00	5
15	Diskominfo	3	33,33	4	44,44	2	22,22	9
16	Disnakertrans	0	0,00	3	30,00	7	70,00	10
17	Disparbud	1	20,00	2	40,00	2	40,00	5
18	Disperindagkop UKM	1	14,29	3	42,86	3	42,86	7
19	DKPP	1	33,33	0	0,00	2	66,67	3
20	DP2KBP3A	8	53,33	5	33,33	2	13,33	15
21	DPKPLH	4	23,53	11	64,71	2	11,76	17
22	DPMPTSP	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1
23	DPUTRP	0	0,00	1	25,00	3	75,00	4
24	Inspektorat	1	20,00	1	20,00	3	60,00	5
25	Kesbangpol	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1
26	PDAM	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1
27	Polres	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3
28	Setwan	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1
Total Indikator		74		91		43		208

Sumber : Hasil Analisis TPB/SDGs, 2021

Tabel 2.79.
Peran OPD / Instansi di Kabupaten Solok Selatan dalam Pencapaian Indikator TPB/SDGs

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinsos PMD/N	SS
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinsos PMD/N	SB
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinsos PMD/N	SB
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinsos PMD/N	NA
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinsos PMD/N	SB
6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	SS
7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang	Dinas	SS

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
	menerima imunisasi dasar lengkap.	Kesehatan	
8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DP2KBP3A	SB
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	SB
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	SB
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Disdikpora	SS
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Disdikpora	SB
13	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil	SB
14	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinsos PMD/N	NA
15	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	SB
16	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	SB
17	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	SB
18	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinsos PMD/N	SB
19	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD	SB
20	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	NA
21	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	SS
22	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	SS
23	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinsos PMD/N	SS
24	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BPKD	SS
25	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	DKPP	NA
26	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	SS
27	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DKPP	NA
28	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Kesehatan	NA
29	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	Dinas	SB

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
	pada anak di bawah lima tahun/balita.	Kesehatan	
30	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	SS
31	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	SB
32	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	SS
33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	SS
34	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DKPP	SS
35	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pertanian	NA
36	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	SS
37	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	SB
38	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	SB
39	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	SB
40	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	SB
41	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	SS
42	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	SB
43	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	SS
44	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	SS
45	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	SS
46	Jumlah Kabupaten/Kota (Kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Dinas Kesehatan	SS
47	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 61)	Dinas Kesehatan	SS
48	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	SS
49	Jumlah provinsi (Kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	SS
50	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian	Dinas Kesehatan	SB

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
	transmisi tahap I).		
51	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	SB
52	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	SB
53	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	NA
54	Angka kematian (<i>insiden rate</i>) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan	SB
55	Jumlah Kabupaten/Kota (Kecamatan/Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	SS
56	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	SS
57	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan	NA
58	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Kesehatan	SB
59	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DP2KBP3A	SS
60	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas Kesehatan	SB
61	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR).	Dinas Kesehatan	SS
62	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	Dinas Kesehatan	SB
63	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	SS
64	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinsos PMD/N	SB
65	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	SB
66	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	SS
67	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Kesehatan	SB
68	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	SS
69	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	SB
70	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Disdikpora	SS

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
71	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Disdikpora	SS
72	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Disdikpora	SB
73	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Disdikpora	SB
74	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Disdikpora	SB
75	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Disdikpora	SB
76	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Disdikpora	SB
77	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Disdikpora	SS
78	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Disdikpora	SB
79	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Disdikpora	SS
80	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Disdikpora	SS
81	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Disdikpora	SS
82	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Disdikpora	SS
83	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP2KBP3A	SB
84	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP2KBP3A	SS
85	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP2KBP3A	SS
86	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP2KBP3A	SS
87	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP2KBP3A	SS
88	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP2KBP3A	SS
89	Median usia kawin pertama perempuan pernah	DP2KBP3A	NA

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
	kawin umur 25-49 tahun.		
90	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	DP2KBP3A	SB
91	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	SetDPRD	SB
92	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDM	SB
93	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DP2KBP3A	SB
94	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DP2KBP3A	SB
95	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	SB
96	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Kesehatan	SB
97	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PDAM	SS
98	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	SB
99	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas kesehatan	SS
100	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas kesehatan	SB
101	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas kesehatan	SS
102	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas kesehatan	SS
103	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	DPKPLH	SB
104	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPKPLH	SS
105	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	DPKPLH	SB
106	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPKPLH	SB
107	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DPKPLH	SS
108	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DPKPLH	SS
109	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DPUTRP	SB
110	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DPUTRP	NA
111	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah	DPUTRP	NA

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
	tangkapan sungai dan danau.		
112	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DPUTRP	NA
113	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BAPPEDA	SB
114	PDB per kapita.	BAPPEDA	SB
115	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Disnakertrans	NA
116	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Disnakertrans	NA
117	Persentase tenaga kerja formal.	Disnakertrans	SB
118	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Disnakertrans	NA
119	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Disperindagkop UKM	SB
120	Upah rata-rata per jam pekerja.	Disnakertrans	NA
121	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Disnakertrans	SB
122	Tingkat setengah pengangguran.	Disnakertrans	NA
123	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Disnakertrans	NA
124	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Disparbud	NA
125	Jumlah wisatawan mancanegara.	Disparbud	SB
126	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disparbud	SB
127	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Disparbud	NA
128	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Disnakertrans	SB
129	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bag. Perekonomian dan SDA	SB
130	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DPMPTSP	NA
131	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Disperindagkop UKM	SS
132	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Disperindagkop UKM	NA
133	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Disperindagkop UKM	NA
134	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Disperindagkop UKM	SB
135	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Disperindagkop UKM	NA
136	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Disperindagkop UKM	SB
137	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BPKD	NA
138	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	SB
139	Proporsi individu yang menguasai/memiliki	Diskominfo	SB

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
	telepon genggam		
140	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	SS
141	Koefisien Gini.	BAPPEDA	SS
142	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinsos PMD/N	SS
143	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinsos PMD/N	NA
144	Jumlah desa tertinggal.	Dinsos PMD/N	SB
145	Jumlah Desa Mandiri.	Dinsos PMD/N	SB
146	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinsos PMD/N	NA
147	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinsos PMD/N	SB
148	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinsos PMD/N	NA
149	Indeks Kebebasan Sipil.	Inspektorat	NA
150	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bag. Hukum Setda	SS
151	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnakertrans	NA
152	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DPKPLH	SB
153	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bag. Perekonomian dan SDA	NA
154	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Disparbud	SS
155	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	SB
156	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	SB
157	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	SS
158	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	SS
159	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DPKPLH	SB
160	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	SS
161	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DPKPLH	SB
162	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DPKPLH	NA
163	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DPKPLH	SB
164	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DPKPLH	SB
165	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DPKPLH	NA

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
166	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	SS
167	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	SB
168	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DPKPLH	SS
169	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DPKPLH	SB
170	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.	DPKPLH	SB
171	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DPKPLH	SB
172	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	SS
173	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polres	SS
174	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	SS
175	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Kesbangpol	NA
176	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP2KBP3A	NA
177	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP2KBP3A	SS
178	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DP2KBP3A	SS
179	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat	NA
180	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKD	SB
181	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	inspektorat	SS
182	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Inspektorat	NA
183	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Bag. PBJ Setda	SB
184	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Inspektorat	SB
185	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Bag. Organisasi Setda	SB

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
	Indikator Lokal Indeks kepatuhan pelayanan publik		
186	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BKPSDM	SB
187	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	SB
188	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	SS
189	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Disdukcapil	NA
190	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil	SB
191	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	NA
192	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bag. Hukum Setda	SS
193	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKD	SS
194	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKD	SS
195	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKD	NA
196	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskominfo	NA
197	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Diskominfo	SS
198	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskominfo	SS
199	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Diskominfo	SB
200	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag. PBJ Setda	SB
201	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag. PBJ Setda	SB
202	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	SB
203	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	SB
204	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	SB
205	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda	SS

No	INDIKATOR TPB	OPD/Instansi Sumber Data	CAPAIAN
206	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Disdukcapil	SS
207	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	SS
208	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	NA

Sumber : Hasil Analisis TPB/SDGs, 2021

2.7. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Kajian muatan KLHS dilakukan dengan cara menganalisis dampak dan pengaruh KRP terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) jasa ekosistem Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 20 jasa ekosistem yang dapat dikelompokkan menjadi jenis 4 jasa ekosistem yaitu:

1. Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jasa Ekosistem Penyediaan terdiri dari 5 (lima) jasa yaitu: Jasa Penyediaan Pangan, Jasa Penyediaan Air Bersih, Jasa Penyediaan Serat (Fiber), Jasa Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil dan Jasa Penyediaan Sumber daya Genetik.

2. Jasa Ekosistem Regulasi.

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Jasa Ekosistem Regulasi terdiri dari 8 (delapan) jasa: Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir, Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana, Jasa Pengaturan Pemurnian Air, Jasa Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah, Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara, Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (*Pollination*), Jasa Pengaturan Pengendalian hama dan penyakit

3. Jasa Ekosistem Kultural (Budaya)

Jasa ekosistem kultural adalah jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Jasa ini berupa jasa non-material melalui pengayaan budaya, perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi dan estetika. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan

budaya tersebut. Jasa ekosistem kultural ini memberikan daya dukung dan sekaligus juga daya tampung. Jasa Ekosistem Kultural terdiri dari 3 (tiga) jasa yaitu: Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup, Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism, Jasa Budaya Estetika (Alam)

4. Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa Ekosistem Pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya. Jasa Ekosistem Pendukung terdiri dari 4 (empat) jasa yaitu Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan, Jasa Pendukung Siklus hara (Nutrient Cycle), Jasa Pendukung Produksi Primer, Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah).

Dari 20 jasa ekosistem di dalam dokumen DDDTLH tersebut, yang digunakan untuk analisis *overlay* adalah 6 jasa ekosistem yang mewakili masing-masing jenis jasa ekosistem yaitu:

1. Jasa Penyediaan Pangan

Jasa penyediaan pangan adalah jasa ekosistem dalam menghasilkan barang yang dapat digunakan untuk pangan, baik dikonsumsi langsung maupun menjadi bahan baku bagi produksi pangan. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi di antaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan pangan di Kabupaten Solok Selatan hanya sebagain kecil yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi.

Secara detail sebaran daya dukung dan daya tampung jasa penyediaan pangan Kabupaten Solok Selatan menurut Kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.80.
Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Penyediaan Pangan
di Kabupaten Solok Selatan

No	Kecamatan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Sangir Balai Janggo	43.576,84	56,77	2.287,53	5,85	6.229,49	2,94	52.093,86	15,89
2	Sangir Jujuan	11.870,04	15,46	4.841,72	12,38	22.964,64	10,83	39.676,40	12,10
3	Sangir	6.561,42	8,55	16.524,77	42,27	24.863,05	11,73	47.949,24	14,63
4	Sangir Batang Hari	14.596,62	19,02	8.959,70	22,92	66.907,74	31,56	90.464,06	27,59
5	Pauh Duo	-	-	2.261,33	5,78	23.424,79	11,05	25.686,13	7,83

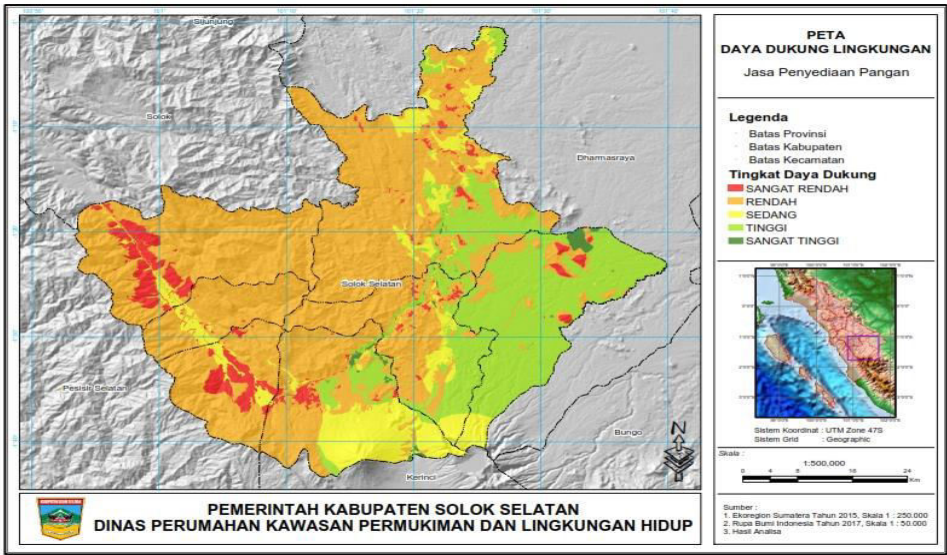
No	Kecamatan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
6	Sungai Pagu	-	-	2.007,33	5,13	17.251,96	8,14	19.259,29	5,87
7	Koto Parik Gadang Diateh	154,73	0,20	2.212,41	5,66	50.356,50	23,75	52.723,64	16,08
Solok Selatan		76.759,65	100,00	39.094,80	100,00	211.998,16	100,00	327.852,61	100,00
Persentase		23,41		11,92		64,66		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Dari tabel diatas, dapat dilihat hanya 23,41% luasan lahan di Kabupaten Solok Selatan yang memberikan daya dukung yang tinggi pada jasa penyediaan pangan. Sementara itu, sebagian besar dari luasan lahan Kabupaten Solok Selatan tersebut, sekitar 64,66%, memberikan daya dukung yang masuk kategori sangat rendah dan rendah pada jasa penyediaan pangan. Sisanya, sebesar 11,92%, adalah masuk kategori sedang.

Daya dukung jasa penyediaan pangan yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi tersebar di 4 Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Sebagian besar berada di Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan luas 43.576,84 ha atau 56,77% dari kategori yang sama. Kemudian di Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luas 14.596,62 ha atau 19,02%, Kecamatan Sangir Jujuhan dengan luas 11.870,04 ha atau 15,46% dan Kecamatan Sangir dengan luas 6.561,42 ha atau 8,55%.

Gambar 2.26.
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Solok Selatan



2. Jasa Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga ketersediaannya menjadi penting dalam mendukung aktivitas manusia di suatu wilayah. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Air bersih erat kaitannya

dengan ketersediaan catchment area dan recharge area di suatu wilayah. Ketersediaan akan menjaga stabilitas pasokan air baik air permukaan dan bawah permukaan.

Kawasan hutan memiliki daya dukung dalam menyediakan air bersih bagi manusia. Semakin tinggi luasan hutan maka kemampuan penyediaan air bersih akan semakin tinggi. Alih fungsi lahan dari hutan ke peruntukan lain akan menyebabkan perubahan terhadap ketersediaan air bersih di suatu kawasan khususnya air permukaan.

Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Solok Selatan sebagian besar masuk kategori sedang, Kategori sedang untuk jasa penyediaan air bersih memiliki luasan187.290,65 ha atau 57,13% dari luasan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan untuk kategori tinggi dan sangat tinggi hanya 85.896,49 ha (26,20%) dan kategori rendah dan sangat rendah memiliki luasan 54.665,47 atau 16,67% dari total luas Kabupaten Solok Selatan

Secara detail sebaran daya dukung dan daya tampung jasa penyediaan air bersih Kabupaten Solok Selatan menurut kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.81.
Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Penyediaan Air Bersih
Di Kabupaten Solok Selatan

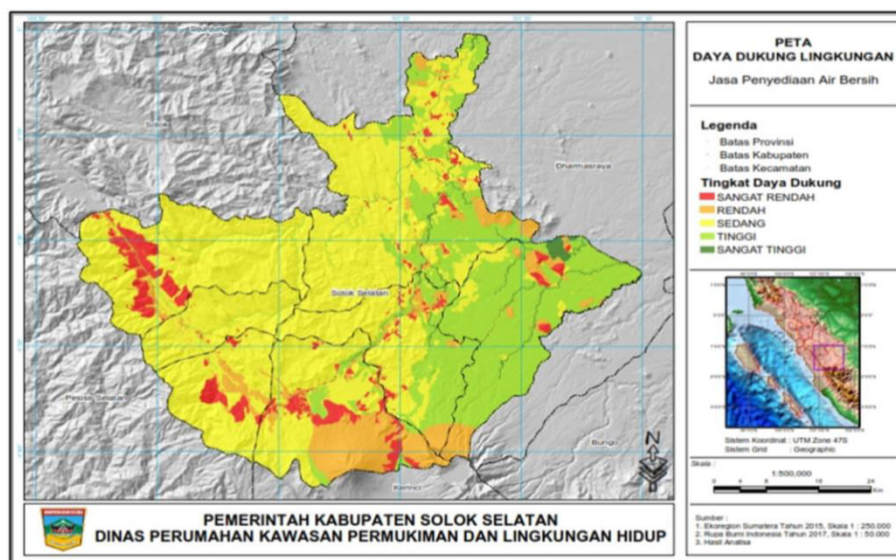
No	Kecamatan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Sangir Balai Janggo	43.538,75	50,69	2.646,68	1,41	5.908,42	10,81	52.093,86	15,89
2	Sangir Jujuan	13.900,62	16,18	20.676,05	11,04	5.099,72	9,33	39.676,40	12,10
3	Sangir	4.148,29	4,83	22.084,63	11,79	21.716,32	39,73	47.949,24	14,63
4	Sangir Batang Hari	23.971,18	27,91	58.930,79	31,46	7.562,09	13,83	90.464,06	27,59
5	Pauh Duo	9,54	0,01	20.520,24	10,96	5.156,35	9,43	25.686,13	7,83
6	Sungai Pagu	113,05	0,13	18.429,41	9,84	716,83	1,31	19.259,29	5,87
7	Koto Parik Gadang Diateh	215,07	0,25	44.002,84	23,49	8.505,73	15,56	52.723,64	16,08
SOLOK SELATAN		85.896,49	100,00	187.290,65	100,00	54.665,47	100,00	327.852,61	100,00
Persentase		26,20		57,13		16,67		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Daya dukung jasa penyediaan air bersih pada kategori sedang tersebar hampir pada seluruh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, diantaranya di Kecamatan Sangir Batang Hari (31,46%), Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (23,49%) dan Kecamatan Sangir (11,79%). Sekitar 15,56% dari luas wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh memiliki daya dukung jasa penyediaan air bersih dengan kategori rendah dan sangat rendah. Kategori tersebut juga

terdapat di Kecamatan Sangir dengan luasan 21.716,32 ha dan Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luas 7.562,09 ha.

Gambar 2.27.
Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Solok Selatan



3. Jasa Pengaturan Iklim

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Penentuan tipe suatu iklim dilakukan berdasarkan sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang. Ekosistem mampu memberikan jasa berupa pengaturan iklim mikro secara alamiah, seperti pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon.

Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Ekosistem Kabupaten Solok Selatan mampu memberikan jasa pengaturan iklim dengan kategori tinggi dan sangat tinggi seluas 276,777.88 ha atau 84.42% dari luas wilayah. Luas wilayah dengan sedang adalah seluas 32,078.38 ha atau 9.78% dan kategori rendah dan sangat rendah seluas 18,996.35 ha atau 5.79%

Secara detail sebaran daya dukung dan daya tampung jasa pengaturan iklim Kabupaten Solok Selatan menurut kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini:

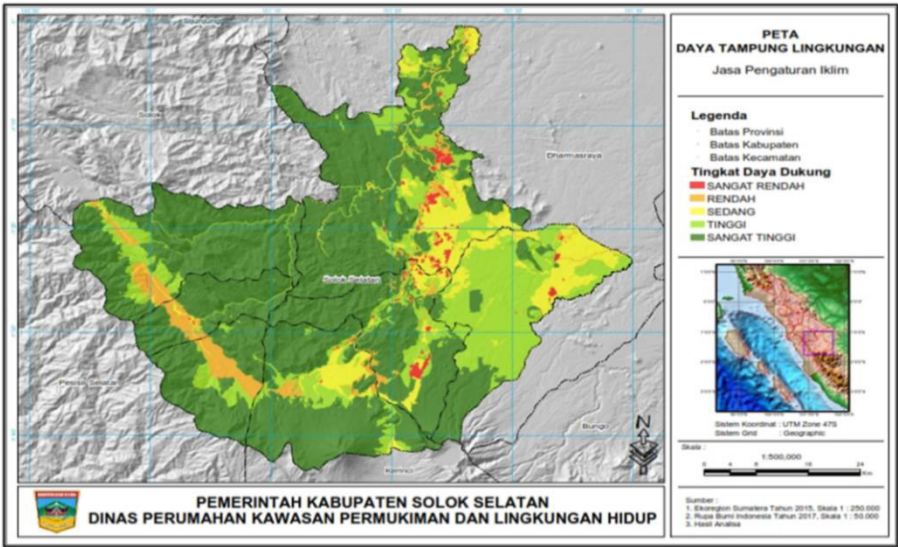
Tabel 2.82.
Daya Dukung dan Daya Tampung pada Jasa Pengaturan Iklim
di Kabupaten Solok Selatan

No	Kecamatan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Sangir Balai Janggo	40.620,48	14,68	10.811,84	1,41	661,55	3,48	52.093,86	15,89
2	Sangir Jujuan	33.919,40	12,26	3.290,79	11,04	2.466,21	12,98	39.676,40	12,10
3	Sangir	41.771,79	15,09	4.366,21	11,79	1.811,24	9,53	47.949,24	14,63
4	Sangir Batang Hari	72.069,34	26,04	13.285,75	31,46	5.108,97	26,89	90.464,06	27,59
5	Pauh Duo	22.081,70	7,98	9,54	10,96	3.594,89	18,92	25.686,13	7,83
6	Sungai Pagu	16.929,94	6,12	139,30	9,84	2.190,05	11,53	19.259,29	5,87
7	Koto Parik Gadang Diateh	49.385,24	17,84	174,96	23,49	3.163,44	16,65	52.723,64	16,08
SOLOK SELATAN		276.777,88	100,00	32.078,38	100,00	18.996,35	100,00	327.852,61	100,00
Persentase		84,42		9,78		5,79		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Jasa pengaturan iklim lebih banyak dihasilkan oleh tutupan hutan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Balai Janggo mempunyai daya dukung dengan kategori sangat tinggi dan tinggi, karena memang pada ketiga kecamatan tersebut tutupan lahan dominan adalah hutan lahan kering primer.

Gambar 2.28.
Peta Daya Tampung pada Jasa Pengaturan Iklim di Kabupaten Solok Selatan



4. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

Jasa pengaturan dalam pencegahan dan perlindungan dari bencana termasuk memberikan informasi tentang kemampuan dari suatu daerah di Kabupaten Solok Selatan untuk terlindungi dari bencana baik, longsor, kekeringan, banjir, erupsi dan lainnya. Secara umum Kabupaten Solok Selatan

berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi dalam hal jasa pengaturan ini. Jika dilihat dari tabel dibawah, Kabupaten Solok Selatan memiliki kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 86,23% dari luasan Kabupaten Solok Selatan sedangkan kategori sedang 4,32% dan kategori rendah 9,46%.

Secara detail sebaran daya dukung dan daya tampung jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Solok Selatan menurut Kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.83.
Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kabupaten Solok Selatan

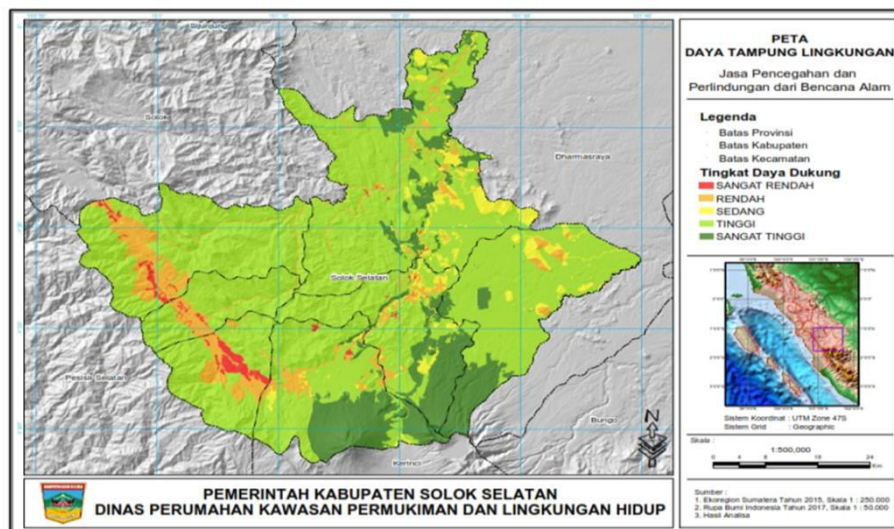
No	Kecamatan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Sangir Balai Janggo	48.082,17	17,01	2.890,30	1,41	1.121,38	3,62	52.093,86	15,89
2	Sangir Jujuan	34.601,20	12,24	2.351,53	11,04	2.723,66	8,78	39.676,40	12,10
3	Sangir	43.164,66	15,27	1.337,70	11,79	3.446,88	11,12	47.949,24	14,63
4	Sangir Batang Hari	79.057,05	27,97	7.527,51	31,46	3.879,50	12,51	90.464,06	27,59
5	Pauh Duo	18.797,35	6,65	28,77	10,96	6.860,01	22,13	25.686,13	7,83
6	Sungai Pagu	16.517,25	5,84	1,08	9,84	2.740,96	8,84	19.259,29	5,87
7	Koto Parik Gadang Diatch	42.472,03	15,02	19,99	23,49	10.231,62	33,00	52.723,64	16,08
SOLOK SELATAN		282.691,71	100,00	14.156,90	100,00	31.004,01	100,00	327.852,61	100,00
Persentase		86,23		4,32		9,46		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Daerah yang memiliki tingkat pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dengan kategori sangat tinggi dan tinggi berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Kecamatan terluas yang memberikan daya tampung tinggi dan sangat tinggi adalah Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luasan 79.057,05 ha atau 27,97%. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan luasan 48,082.17 ha atau 17,01% dan Kecamatan Sangir dengan luas 43.164,66 ha atau 15,27%. Daya tampung Kabupaten Solok Selatan dalam hal jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana, tentunya, kontribusi terhadap pencegahan kerugian baik moril dan materil.

Sedangkan untuk Kategori sedang untuk jasa ini terluas juga berada di Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luas 7.527,51 ha atau 53,17% dan Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan luas 2.890,30 ha atau 20,42%. Kecamatan dengan kategori rendah dan sangat rendah terluas adalah pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch dengan luas 10.231,62 ha dan Kecamatan Pauh Duo dengan luas 6.860,01 ha.

Gambar 2.29.
Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Solok Selatan



5. Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup Kabupaten Solok Selatan pada kategori rendah dan sangat rendah yaitu mencapai 69,84%. Kategori tinggi dan sangat tinggi hanya 8,47% sedangkan kategori sedang mencapai 21,69%. Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Solok Selatan dengan kategori sangat tinggi dan tinggi adalah di Kecamatan Sangir Batang Hari 14.195,35 ha atau 51,09% dari luas total daya dukung sangat tinggi dan tinggi se Kabupaten Solok Selatan. Kecamatan Sangir Balai Janggo berada di urutan kedua yang mencapai 10.000,66 ha atau 36,00 %.

Daya tampung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup ini justru tidak ada yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi di Kecamatan Pauh Duo dan Sungai Pagu. Dua kecamatan terakhir ini hanya memiliki wilayah yang masuk kategori sedang, rendah dan sangat rendah untuk jasa ekosistem ini. Ini mengindikasikan bahwa dua kecamatan ini, berpotensi melewati batas daya dukung dengan cepat, apabila banyak bagian wilayahnya dikembangkan menjadi permukiman.

Secara detail sebaran daya dukung dan daya tampung Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Solok Selatan menurut Kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.84.
Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
di Kabupaten Solok Selatan

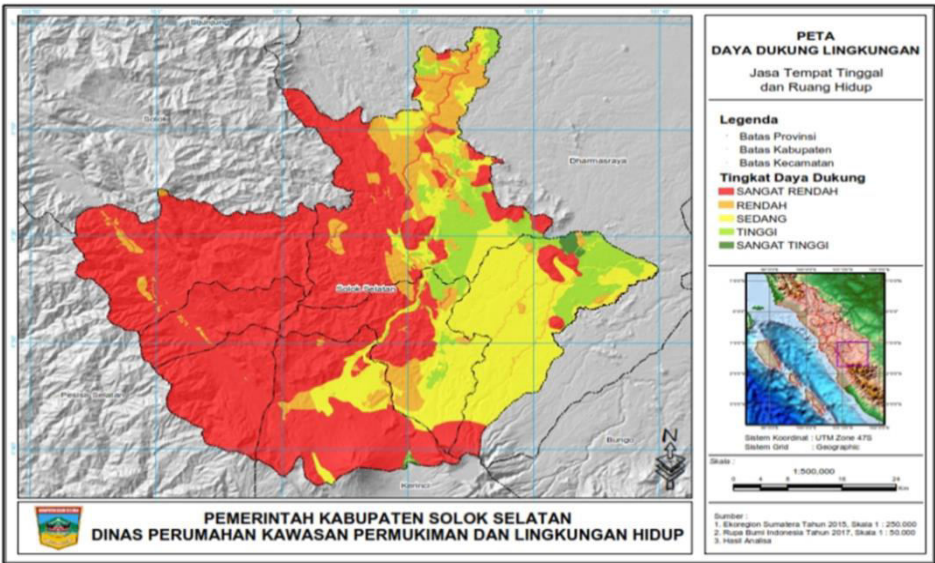
No	Kecamatan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Sangir Balai Janggo	10.000,66	36,00	36.219,41	50,93	5.873,79	2,57	52.093,86	15,89
2	Sangir Jujuan	2.977,87	10,72	13.384,87	18,82	23.313,65	10,18	39.676,40	12,10
3	Sangir	605,59	2,18	7.550,32	10,62	39.793,32	17,38	47.949,24	14,63
4	Sangir Batang Hari	14.195,35	51,09	13.432,07	18,89	62.836,64	27,44	90.464,06	27,59
5	Pauh Duo	-	-	132,52	0,19	25.553,61	11,16	25.686,13	7,83
6	Sungai Pagu	-	-	257,40	0,36	19.001,88	8,30	19.259,29	5,87
7	Koto Parik Gadang Diateh	3,37	0,01	136,13	0,19	52.584,15	22,97	52.723,64	16,08
SOLOK SELATAN		27.782,85	100,00	71.112,73	100,00	228.957,04	100,00	327.852,61	100,00
Persentase		8,47		21,69		69,84		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Dari Tabel diatas dapat dilihat, kategori sedang terluas berada pada Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan luas 36.219,41 ha atau 50,93%, Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luas 13.432,07 ha atau 18,89% dan Kecamatan Sangir Jujuan dengan luas 13.384,87 ha atau 18,82 %.

Kategori rendah dan sangat rendah yang luas terdapat di Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luas 62.836,64 ha atau 27,44 %, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh berada pada urutan kedua dengan luas 52.584,15 ha atau 22,97% dan Kecamatan Sangir dengan luas 39.793,32 ha atau 17,38%

Gambar 2.30.
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Solok Selatan



6. Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah)

Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang tergolong sangat tinggi dan tinggi mencapai 78,70% dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan. Sisanya tergolong ke dalam kategori sedang dan rendah.

Tingginya daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem biodiversitas ini disebabkan karena beragamnya biodiversitas/ keanekargaman hayati yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan. Seperti diketahui biodiversitas meliputi keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetik. Dilihat dari keanekargaman ekosistem memang diketahui di Kabupaten Solok Selatan terdapat Gunung dengan ekosistem yang juga bervariasi, sungai, dataran tinggi dan lain-lain. Selain itu relatif masih tingginya ekosistem dengan vegetasi pepohonan (hutan) maka hal tersebut mendukung tingginya keanekaragaman jenis/spesies dan juga keanekaragaman genetik.

Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh memberikan kontribusi terbesar untuk jasa ekosistem pendukung biodiversitas dengan kategori sangat tinggi dan tinggi.

Secara detail sebaran daya dukung dan daya tampung Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Solok Selatan menurut kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.85.
Jasa Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Solok Selatan

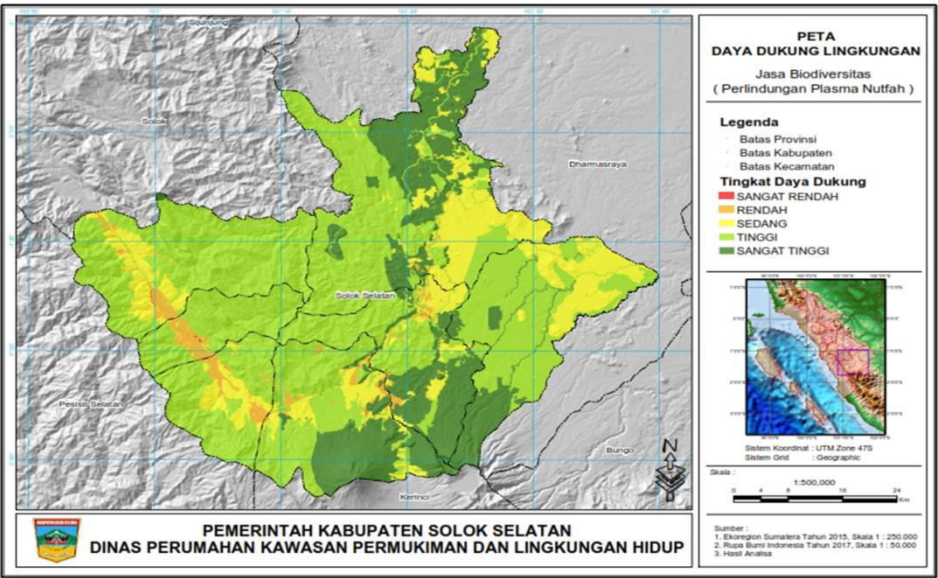
No	Kecamatan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Sangir Balai Janggo	39.714,00	15,39	12.112,89	21,52	266,97	1,97	52.093,86	15,89
2	Sangir Jujuan	32.504,50	12,60	4.993,77	8,87	2.178,12	16,11	39.676,40	12,10
3	Sangir	39.109,91	15,16	6.551,83	11,64	2.287,50	16,92	47.949,24	14,63
4	Sangir Batang Hari	68.580,25	26,58	20.694,18	36,76	1.189,64	8,80	90.464,06	27,59
5	Pauh Duo	18.806,88	7,29	4.481,66	7,96	2.397,58	17,73	25.686,13	7,83
6	Sungai Pagu	16.630,30	6,45	244,30	0,43	2.384,69	17,63	19.259,29	5,87
7	Koto Parik Gadang Diateh	42.687,10	16,54	7.217,87	12,82	2.818,68	20,84	52.723,64	16,08
Solok Selatan		258.032,94	100,00	56.296,51	100,00	13.523,17	100,00	327.852,61	100,00
Persentase		78,70		17,17		4,12		100,00	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Luas wilayah dengan jasa ekosistem pendukung biodiversitas, kategori sangat tinggi dan tinggi di Kecamatan Sangir Batang Hari luas 68,580.25 ha, Koto Parik Gadang Diateh seluas 42,687.10 ha dan Kecamatan Sangir Balai Janggo mencapai 39,714.00 ha. Luas wilayah dengan jasa ekosistem

pendukung biodiversitas, kategori sangat tinggi dan tinggi di Kecamatan Sangir Batang Hari luas 68,580.25 ha, Koto Parik Gadang Diateh seluas 42,687.10 ha dan Kecamatan Sangir Balai Janggo mencapai 39,714.00 ha . Kenyataan ini sejalan dengan daya dukung jasa penyediaan sumber daya genetik yang juga tersebar di 3 kecamatan tersebut di atas.

Gambar 2.31.
Peta Daya Dukung Lingkungan terhadap Jasa Pendukung Biodiversitas diKabupaten Solok Selatan



Hasil evaluasi KLHS terhadap kaitan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Jasa Ekosistem terhadap TPB dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 2.86.

Evaluasi Kaitan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Jasa Ekosistem terhadap TPB

No	Jasa Ekosistem	Persentase Luas DDDTLH (%)			KAITAN DDDTLH DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)																
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jasa Penediaan																				
1	Pangan	23,41	11,92	64,66	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
2	Air Bersih	26,20	57,13	16,67	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
3	Serat	85,53	6,69	7,78	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	Bahan Bakar	84,41	10,91	4,68	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
5	Sumberdaya Genetik	78,16	18,03	3,80	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak
	Jasa Pengaturan																				
1	Iklim	84,42	9,78	5,79	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak
2	Tata Aliran Air dan Banjir	76,83	6,23	16,95	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
3	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	86,23	4,32	9,46	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak
4	Pemurnian Air	72,91	23,77	3,33	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	Pengolahan dan Penguraian Limbah	61,07	20,03	18,90	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak
6	Kualitas Udara	85,09	11,33	3,58	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak
7	Penyerbukan Alami (Pollination)	93,36	4,02	2,61	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
8	Pengendalian Hama dan Penyakit	86,73	8,15	5,12	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Jasa Budaya																				
1	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	8,47	21,69	69,84	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
2	Rekreasi dan Ecotourism	62,23	23,64	14,13	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak
3	Estetika	60,68	22,19	17,13	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak
	Jasa Pendukung																				
1	Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	89,41	5,04	5,55	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
2	Siklus Hara (Nutrient Cycle)	86,50	6,92	6,58	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
3	Produksi Primer	88,17	10,41	1,43	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak
4	Biodiversitas	78,70	17,17	4,12	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Tidak	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Terkait	Terkait	Tidak	Tidak

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa mendatang. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan – peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang berdasarkan kepada peraturan perundangan yang telah disebutkan di muka, secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan tersebut di atas. Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terhadap peraturan-peraturan pengelolaan keuangan telah menuai hasil yang dibuktikan dengan capaian WTP Kabupaten Solok Selatan atas pengelolaan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2016.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana sumber-sumber pembiayaan desentralisasi fiskal tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (pendapatan transfer), pinjaman daerah, dan penerimaan

lain yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui pendekatan penganggaran terpadu yang dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran dalam suatu sistem yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai implementasinya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*), dampak hasil (*outcome*) dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran, serta mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Dengan demikian APBD tidak hanya berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaannya, namun merupakan alat kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur pertama yang menentukan kemampuan keuangan daerah adalah penerimaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah terdiri atas: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 struktur APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendapatan asli daerah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diimplementasikan oleh Kabupaten Solok Selatan melalui: 1). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012, tentang Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Kabupaten Solok Selatan bersumber dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah; 2). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

3 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan retribusi daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan oleh Kabupaten Solok Selatan melalui: 1). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 2). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 3). Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Solok Selatan bersumber dari:

- a) Retribusi Jasa Umum, bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan; Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum; Retribusi Pasar; Retribusi PKB; Retribusi Menara Telekomunikasi.
- b) Retribusi Jasa Usaha, bersumber dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Tempat Khusus Parkir
- c) Retribusi Perizinan Tertentu bersumber dari Retribusi IMB

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan bagi hasil dari penyertaan modal daerah pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pendapatan ini bersumber dari Bagi Hasil/Deviden dari keuntungan Bank Nagari.

4) Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah. Pendapatan ini bersumber dari:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. pendapatan transfer. Kebijakan pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas:

❖ Dana Transfer Umum, terdiri atas:

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Umum terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

DBH bersumber dari:

a) Pajak;

DBH yang bersumber dari Pajak terdiri dari:

- (a) pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
- (b) pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan

(c) cukai hasil tembakau;

b) Sumber Daya Alam.

DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

(a) penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

(b) penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

(c) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

(d) penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

(e) penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan

(f) penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

❖ Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Yang termasuk dalam Dana Transfer Khusus adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Alokasi Khusus terdiri atas:

a. DAK Fisik

DAK fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. DAK Non Fisik.

DAK Non fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus Non fisik yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

❖ Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu..

❖ Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah:

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah

- b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah yang terdiri atas:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini terdiri:

1) Belanja Pegawai;

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium

2) Belanja Barang dan Jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, Belanja jasa kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.

3) Belanja Bunga;

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Subsidi;

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dengan tujuan digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah;

Belanja hibah diberikan berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Belanja modal yang terdiri atas objek belanja:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- f. Belanja asset Lainnya

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut :

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat.
- d. Keperluan mendesak.
- e. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- f. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri:

1. Belanja Bagi Hasil;

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam hal ini Kabupaten Solok Selatan hanya menganggarkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada tahun bersangkutan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kabupaten Solok Selatan menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa/nagari berupa Dana Desa sebesar perkiraan pendapatan yang diperuntukan oleh pemerintah pusat serta Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari perkiraan Alokasi Pendapatan Dana Transfer Umum dari Pemerintah Pusat.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan

pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat

meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa. Transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat kinerja dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 relatif cukup baik dengan rata-rata pencapaian pendapatan daerah sekitar 97,32% sedangkan realisasi belanja daerah 92,05%, penerimaan pembiayaan 99,07% dan realisasi pengeluaran pembiayaan 67,16%. Ini dapat bahwa target dari perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode 2016-2019 cukup realistis.

A. Pendapatan Daerah

Dalam penganggaran pendapatan daerah dalam APBD diharuskan dilakukan secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah merupakan sumber utama yang dapat menentukan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dilihat perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari Rp. 776.513.084.983,- pada tahun 2016 menjadi Rp 913.268.324.424,- pada tahun 2019 dan menjadi Rp. 861.998.332.754,- pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,65%.

Penurunan pendapatan tahun 2020 disebabkan karena bencana *pandemi covid -19* yang melanda dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia, nasional dan daerah. Selain itu perubahan kebijakan pengelolaan keuangan nasional untuk daerah dengan dikeluarkannya tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, sangat berdampak besar terhadap penurunan dari pendapatan daerah tahun 2020, terutama pendapatan yang

berasal dari dana transfer daerah baik yang berasal dari Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

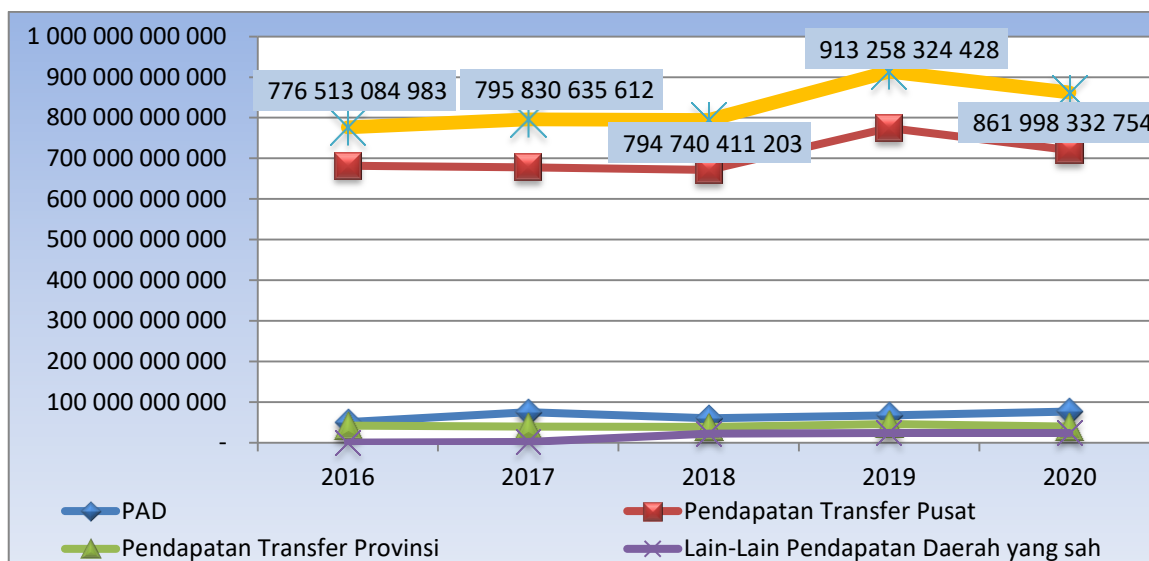
Meskipun mengalami peningkatan sampai tahun 2019 namun jika dilihat dari tingkat realisasi capaian kinerja (perbandingan antara realisasi dengan target APBD) cenderung mengalami penurunan dari 99,82% pada tahun 2016 menjadi 93,03% pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan tidak tercapainya target pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah terutama yang berasal dari pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dana transfer terutama yang berasal dari dana alokasi khusus daerah dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Namun untuk tahun 2020, meskipun secara nilai mengalami penurunan dari Rp. 913.258.324.425,- pada tahun 2019, menjadi Rp. 861.998.332.754,- pada tahun 2020, namun dari tingkat realisasi capaian kinerja pendapatan cenderung mengalami peningkatan dari 93,03% menjadi 99,49%.

Selanjutnya dilihat dari realisasi pendapatan daerah sampai tahun 2020 terlihat bahwa sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan masih bersumber dari dana transfer baik transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi dana transfer terhadap pendapatan rata-rata 90,23% per tahun dengan sumber 85,19% dari pemerintah pusat dan 5,05% dari pemerintah provinsi. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan pendapatan yang berasal dari hibah ke Pemerintah Daerah Solok Selatan yang berasal dari dunia usaha atau pemerintah lainnya serta Bantuan Operasional Sekolah rata-rata berkontribusi sebesar 1,76%. Besarnya kontribusi dana transfer ini dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Solok Selatan untuk membiayai pembangunan daerah sangat tinggi. Meskipun dari segi jumlah dana transfer cenderung mengalami peningkatan, namun kontribusinya terus mengalami penurunan dari 93,31% pada tahun 2016 menjadi 90,23% pada tahun 2020. Jika dilihat dari komponen pembentuk dana transfer dapat dilihat besaran kontribusi dana transfer ini sangat dipengaruhi oleh besaran penerimaan yang berasal dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana desa. Khusus untuk tahun 2019 peningkatan dana transfer lebih disebabkan karena perubahan kebijakan pemerintah pusat untuk merubah pola Dana Tugas Pembantuan (Dana TP) yang awalnya tidak dianggarkan melalui mekanisme APBD (transfer langsung) menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sehingga dianggarkan melalui APBD serta didatarkannya Dana Intensif Daerah oleh Kabupaten Solok Selatan sebagai reward terhadap pengelolaan APBD tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah sampai tahun 2020 baru memiliki rata-rata kontribusi 8,01% dari total pendapatan daerah. Meskipun kontribusi pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada periode 2017-2019 dari 9,49% pada tahun 2017 menjadi 7,43% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,01%, seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah terutama yang berasal dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan ini lebih didorong dari diterimanya penerimaan yang berasal dari bonus produksi dari pengelolaan panas bumi yang dilakukan oleh PT Supreme Energi pada tahun 2020. Sedangkan untuk pajak dan retribusi daerah pajak dan retribusi yang seharusnya menjadi sumber pendapatan utama daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah sampai pada tahun 2020 baru berkontribusi 0,79% untuk pajak daerah dan 0,14% untuk retribusi daerah. Masih rendahnya penerimaan dan kontribusi pendapatan asli daerah terutama untuk pajak dan retribusi menggambarkan masih lemahnya aktifitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan objek pungut, serta belum tergalinya dan terkelolanya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penggalan sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Penggalan sumber pendapatan tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah baik secara nilai dan kontribusi terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 780.000.000,- dengan kontribusi 0,10% pada tahun 2016 menjadi Rp. 24.678.304.505,- dengan kontribusi 2,86% pada tahun 2020. Peningkatan ini lebih disebabkan karena masuknya dana Bantuan Operasional Sekolah yang awalnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi langsung ke sekolah tanpa tercatat di APBD namun sejak tahun 2018 pencatatanya dimasukkan ke APBD Kabupaten Solok Selatan.

Gambar 3.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020



B. Belanja Daerah

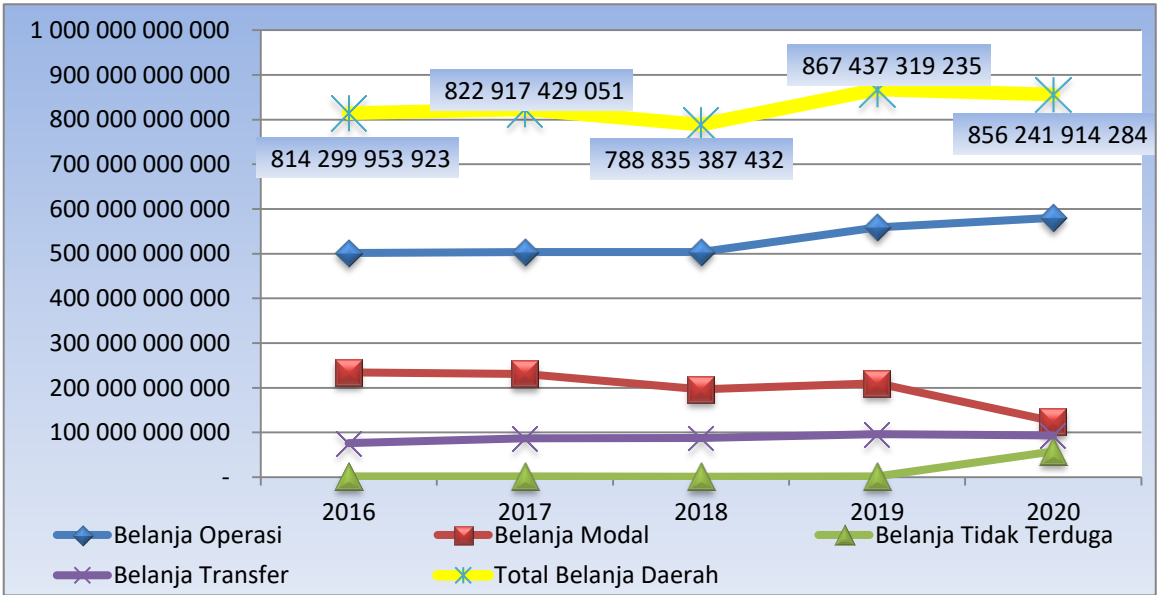
Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin

Untuk melihat perkembangan kemampuan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran target belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Secara umum trend target belanja Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 863.149.466.224,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 930.210.853.201,- pada tahun 2020, dengan rata-rata peningkatan 1,26%. Besarnya target belanja ini sejalan dengan perkembangan target pendapatan daerah dari Rp. 777.888.333.567,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 866.385.491.288,- pada tahun 2020 dan target surplus pembiayaan daerah dari Rp. 85.475.438.657,- pada tahun 2016 menjadi Rp.63.825.361.913,- pada tahun 2020.

Dilihat dari pertumbuhan dan realisasi kinerja belanja Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2019 cukup berfluktuasi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,26% dengan rata-rata tingkat realisasi 92,56% . Pada tahun 2016-2018 tingkat realisasi belanja daerah terus mengalami peningkatan yaitu dari 94,34% pada tahun 2016 menjadi 94,88% pada tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 86,90%. Penurunan ini lebih disebabkan karena terdapat beberapa proyek prioritas daerah yang terkendala atau belum optimal dalam pelaksanaannya karena kendala kesiapan lahan dan

dokumen perencanaan baik yang dianggarkan melalui pembiayaan APBD murni seperti pembangunan mesjid agung dan Dana Alokasi Khusus Daerah seperti pembangunan rumah sakit daerah, dan peningkatan jalan kabupaten. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 92,05%.

Gambar 3.2.
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2020



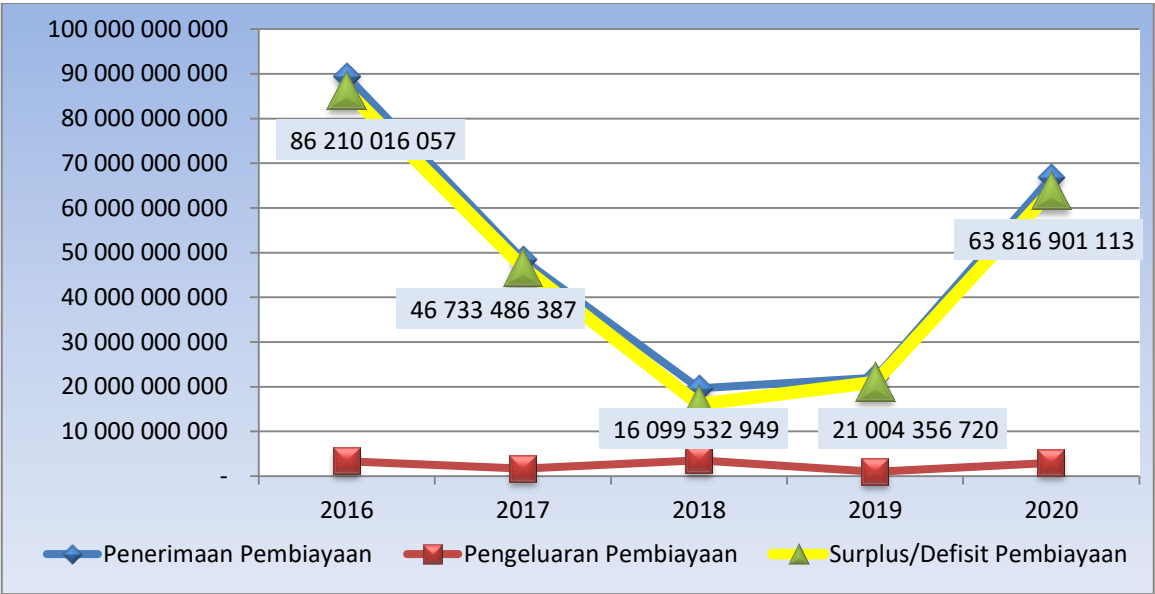
C. Pembiayaan Daerah

Dari sisi pembiayaan daerah dapat dilihat pada periode 2016-2020 mengalami surplus atau penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah dengan nilai yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada periode tahun 2016-2018 surlus penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan dari Rp. 86.210.016.057,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 16.099.532.949,- pada tahun 2018, namun pada tahun 2019-2020 kembali mengalami peningkatan hingga sebesar Rp. 63.816.901.113.

Jika dilihat pada periode 2016-2020 penerimaan pembiayaan Kabupaten Solok Selatan di dominasi oleh penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, SILPA ini merupakan selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah tahun sebelumnya, baik yang berasal dari kelebihan target pendapatan atau merupakan hasil dari penghematan atau kelebihan penganggaran kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Jika dilihat dari penggunaan SILPA ini pada penganggaran cenderung berfluktuatif namun cenderung meningkat yaitu dari Rp. 89.475.438.657,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 22.004.356.720,- pada tahun 2019. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selama periode 2016-2019 hanya digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah yang diinvestasikan kepada Bank Nagari dan PDAM.

Dihat dari keseluruhan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2016-2020 terdapat surplus / kelebihan anggaran setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 48.423.147.117,-; tahun 2017 Rp. 19.646.692.949,-; tahun 2018 Rp. 22.004.556.720,-; tahun 2019 Rp. 66.825.361.913,-; dan tahun 2020 Rp. 69.573.319.583,- Besar kecilnya surplus anggaran ini sangat tergantung surplus pendapatan, penghematan belanja / banyaknya pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk tahun berikutnya dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Gambar 3.3.
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020



KODE	URAIAN	2016			2017			2018			2019			2020			Rata-rata Realisasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	89.475.438.657	89.502.016.057	100,03	50.813.693.968	48.423.486.387	95,30	19.646.692.949	19.654.532.949	100,04	22.004.356.720	22.004.356.720	100,00	66.825.361.913	66.816.901.113	99,99	99,07
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.475.438.657	89.475.438.657	100,00	48.374.912.054	48.371.280.054	99,99	19.646.692.949	19.646.692.949	100,00	22.004.356.720	22.004.356.720	100,00	66.825.361.913	66.816.901.113	99,99	100,00
6 1 04	Penerimaan Pembiayaan Daerah		26.577.400		2.438.781.914		-										-
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					52.206.333			7.840.000								-
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000	3.292.000.000	82,30	3.000.000.000	1.690.000.000	56,33	4.500.000.000	3.555.000.000	79,00	5.500.000.000	1.000.000.000	18,18	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	67,16
6 2 01	Pembentukan Dana Cadangan																-
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	3.292.000.000	82,30	3.000.000.000	1.690.000.000	56,33	4.500.000.000	3.555.000.000	79,00	5.500.000.000	1.000.000.000	18,18	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	67,16
6 2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo																-
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah																-
6 2 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan																-
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH		85.475.438.657	86.210.016.057	100,86	47.813.693.968	46.733.486.387	97,74	15.146.692.949	16.099.532.949	106,29	16.504.356.720	21.004.356.720	127,27	63.825.361.913	63.816.901.113	99,99	106,43
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		214.306.000	48.423.147.117		-	19.646.692.949		-	22.004.556.720		-	66.825.361.913		-	69.573.319.583		

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3.2.

Realisasi dan Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020

KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
4	PENDAPATAN DAERAH											
4 1	Pendapatan Asli Daerah	51,138,125,857	24.10	75,505,887,737	47.65	60,545,296,360	19.81	67,842,785,844	12.05	76,864,310,842	13.30	10.72
4 1 01	Pajak Daerah	4,962,467,019	12.40	6,991,350,183	40.88	7,618,652,370	8.97	8,435,031,571	10.72	6,800,569,116	19.38	8.20
4 1 02	Restribusi Daerah	6,609,883,615	329.64	1,047,275,596	84.16	922,009,350	11.96	1,362,801,219	47.81	1,199,290,190	12.00	(34.73)
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,290,537,143	11.49	1,984,389,875	53.76	1,470,319,095	25.91	1,677,244,574	14.07	1,843,023,859	9.88	9.32
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	38,275,238,080	13.25	65,482,872,084	71.08	50,534,315,546	22.83	56,367,708,481	11.54	67,021,427,678	18.90	15.03
4 2	Pendapatan Transfer	724,594,959,126	6.84	717,774,678,203	0.94	711,389,400,944	0.89	821,250,271,081	15.44	760,455,717,407	7.40	1.21
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681,759,444,527	6.47	677,599,018,899	0.61	672,016,315,387	0.82	775,072,867,765	15.34	720,618,426,239	7.03	1.40
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21,017,409,395	2.95	14,713,776,966	29.99	18,494,085,264	25.69	13,309,793,071	28.03	23,408,771,495	75.88	2.73
	Dana Alokasi Umum	488,996,271,000	12.78	480,406,179,000	1.76	480,406,179,000	-	490,084,500,000	2.01	441,989,749,000	9.81	(2.50)
	Dana Alokasi Khusus	110,276,258,234	3.81	146,846,570,891	33.16	137,314,855,550	6.49	191,972,340,694	39.80	186,601,678,744	2.80	14.05
	Dana Insentif Daerah							36,296,683,000		24,095,009,000	33.62	
	Dana Otonomi Khusus	33,740,219,898	41.95	206,368,042	99.39	79,794,574	61.33					
	Dana Desa	27,729,286,000	124.42	35,426,124,000	27.76	35,721,400,999	0.83	43,409,551,000	21.52	44,523,218,000	2.57	12.57
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	42,835,514,599	13.17	40,175,659,304	6.21	39,373,085,557	2.00	46,177,403,316	17.28	39,837,291,168	13.73	(1.80)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	35,223,394,599	4.45	38,125,659,304	8.24	39,373,085,557	3.27	46,177,403,316	17.28	39,837,291,168	13.73	3.13
	Bantuan Keuangan	7,612,120,000	84.54	2,050,000,000	73.07	-	100.00			-		
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	780,000,000	96.11	2,550,069,672	226.93	22,805,713,899	794.32	24,165,267,503	5.96	24,678,304,505	2.12	137.17
4 3 01	Pendapatan Hibah	780,000,000	96.11	2,550,069,672	226.93	22,805,713,899	794.32	24,165,267,503	5.96	24,678,304,505	2.12	137.17
4 3 02	Dana Darurat											
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan											
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	776,513,084,983	5.01	795,830,635,612	2.49	794,740,411,203	0.14	913,258,324,428	14.91	861,998,332,754	5.61	2.65
5	BELANJA DAERAH											
5 1	Belanja Operasi	501,526,655,783	9.64	503,469,860,804	0.39	503,917,690,715	0.09	558,625,718,272	10.86	580,349,141,160	3.89	3.72
5 1 01	Belanja Pegawai	298,098,182,133	3.52	292,765,272,924	1.79	316,931,115,174	8.25	341,301,328,498	7.69	348,620,480,143	2.14	3.99
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196,017,636,650	27.46	205,528,037,880	4.85	181,141,399,111	11.87	208,116,228,520	14.89	200,105,481,056	3.85	0.52
5 1 03	Belanja Hibah	7,395,837,000	49.53	4,995,800,000	32.45	5,845,176,430	17.00	6,246,161,254	6.86	31,473,429,961	403.88	43.63
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	15,000,000	98.52	180,750,000	1,105.00	-	100.00	2,962,000,000		149,750,000	94.94	77.75
5 2	Belanja Modal	234,219,029,497	8.71	230,734,913,890	1.49	196,414,121,045	14.87	210,375,471,214	7.11	124,575,198,868	40.78	(14.60)
5 2 01	Belanja Modal Tanah	3,879,752,000	20.84	6,081,543,300	56.75	4,933,038,500	18.89	2,253,842,825	54.31	1,646,375,000	26.95	(19.29)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,069,831,230	43.63	32,278,557,889	34.10	16,923,032,193	47.57	30,013,601,145	77.35	45,520,194,621	51.67	17.27
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37,740,591,674	1.73	47,738,196,050	26.49	35,803,303,200	25.00	59,276,348,372	65.56	54,832,639,480	7.50	9.79
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167,333,725,773	28.15	142,255,443,251	14.99	133,431,112,457	6.20	115,276,142,333	13.61	20,898,145,980	81.87	(40.55)
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,195,128,820	113.42	2,381,173,400	99.24	5,323,634,695	123.57	3,555,536,539	33.21	1,677,843,787	52.81	8.85

KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
5 3	Belanja Tidak Terduga	2,054,360,530	109.88	1,740,062,966	- 15.30	793,070,852	- 54.42	1,832,664,273	131.08	57,805,877,089	3,054	130.32
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	2,054,360,530	109.88	1,740,062,966	- 15.30	793,070,852	- 54.42	1,832,664,273	131.08	57,805,877,089	3,054.20	130.32
5 4	Belanja Transfer Keuangan	76,499,908,113	158.95	86,972,591,391	13.69	87,710,504,820	0.85	96,603,465,476	10.14	93,511,697,167	- 3.20	5.15
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	347,044,191	- 42.73	584,205,303	68.34	859,851,917	47.18	1,055,973,744	22.81	892,649,723	- 15.47	26.64
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	76,152,863,922	163.18	86,388,386,088	13.44	86,850,652,903	0.54	95,547,491,732	10.01	92,619,047,444	- 3.06	5.02
JUMLAH BELANJA DAERAH		814,299,953,923	15.77	822,917,429,051	1.06	788,835,387,432	- 4.14	867,437,319,235	9.96	856,241,914,284	- 1.29	1.26
SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN		(37,786,868,940)	- 204.81	(27,086,793,439)	- 28.32	5,905,023,771.31	- 121.80	45,821,005,193	675.97	5,756,418,470	- 87.44	
6	PEMBIAYAAN DAERAH											
6 1	Penerimaan Pembiayaan	89,502,016,057	61.49	48,423,486,387	- 45.90	19,654,532,949	- 59.41	22,004,356,720	11.96	66,816,901,113	203.65	(7.05)
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89,475,438,657	61.44	48,371,280,054	- 45.94	19,646,692,949	- 59.38	22,004,356,720	12.00	66,816,901,113	203.65	(7.04)
6 1 02	Pencairan Dana Cadangan											
6 1 03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan											
6 1 04	Penerimaan Pembiayaan Daerah	26,577,400										
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			52,206,333		7,840,000	- 84.98	-	100.00			
6 1 06	Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,292,000,000	64.60	1,690,000,000	- 48.66	3,555,000,000	110.36	1,000,000,000	- 71.87	3,000,000,000	200.00	(2.30)
6 2 01	Pembentukan Dana Cadangan											
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	3,292,000,000	64.60	1,690,000,000	- 48.66	3,555,000,000	110.36	1,000,000,000	- 71.87	3,000,000,000	200.00	(2.30)
6 2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo											
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah											
6 2 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan											
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH		86,210,016,057	61.37	46,733,486,387	- 45.79	16,099,532,949	- 65.55	21,004,356,720	30.47	63,816,901,113	203.83	(7.24)
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)		48,423,147,117	- 45.88	19,646,692,949	- 59.43	22,004,556,720	12.00	66,825,361,913	203.69	69,573,319,583	4.11	9.48

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3.3.

Proporsi / Kontibusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020

KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
4	PENDAPATAN DAERAH											-
4 1	Pendapatan Asli Daerah	51,138,125,857	6.59	75,505,887,737	9.49	60,545,296,360	7.62	67,842,785,844	7.43	76,864,310,842	8.92	8.01
4 1 01	Pajak Daerah	4,962,467,019	0.64	6,991,350,183	0.88	7,618,652,370	0.96	8,435,031,571	0.92	6,800,569,116	0.79	0.84
4 1 02	Restribusi Daerah	6,609,883,615	0.85	1,047,275,596	0.13	922,009,350	0.12	1,362,801,219	0.15	1,199,290,190	0.14	0.28
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,290,537,143	0.17	1,984,389,875	0.25	1,470,319,095	0.19	1,677,244,574	0.18	1,843,023,859	0.21	0.20
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	38,275,238,080	4.93	65,482,872,084	8.23	50,534,315,546	6.36	56,367,708,481	6.17	67,021,427,678	7.78	6.69
4 2	Pendapatan Transfer	724,594,959,126	93.31	717,774,678,203	90.19	711,389,400,944	89.51	821,250,271,081	89.93	760,455,717,407	88.22	90.23
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681,759,444,527	87.80	677,599,018,899	85.14	672,016,315,387	84.56	775,072,867,765	84.87	720,618,426,239	83.60	85.19
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21,017,409,395	2.71	14,713,776,966	1.85	18,494,085,264	2.33	13,309,793,071	1.46	23,408,771,495	2.72	2.21
	Dana Alokasi Umum	488,996,271,000	62.97	480,406,179,000	60.37	480,406,179,000	60.45	490,084,500,000	53.66	441,989,749,000	51.28	57.75
	Dana Alokasi Khusus	110,276,258,234	14.20	146,846,570,891	18.45	137,314,855,550	17.28	191,972,340,694	21.02	186,601,678,744	21.65	18.52
	Dana Insentif Daerah		-		-		-	36,296,683,000	3.97	24,095,009,000	2.80	1.35
	Dana Otonomi Khusus	33,740,219,898	4.35	206,368,042	0.03	79,794,574	0.01		-		-	0.88
	Dana Desa	27,729,286,000	3.57	35,426,124,000	4.45	35,721,400,999	4.49	43,409,551,000	4.75	44,523,218,000	5.17	4.49
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	42,835,514,599	5.52	40,175,659,304	5.05	39,373,085,557	4.95	46,177,403,316	5.06	39,837,291,168	4.62	5.04
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	35,223,394,599	4.54	38,125,659,304	4.79	39,373,085,557	4.95	46,177,403,316	5.06	39,837,291,168	4.62	4.79
	Bantuan Keuangan	7,612,120,000	0.98	2,050,000,000	0.26	-	-	-	-	-	-	0.25
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	780,000,000	0.10	2,550,069,672	0.32	22,805,713,899	2.87	24,165,267,503	2.65	24,678,304,505	2.86	1.76
4 3 01	Pendapatan Hibah	780,000,000	0.10	2,550,069,672	0.32	22,805,713,899	2.87	24,165,267,503	2.65	24,678,304,505	2.86	1.76
4 3 02	Dana Darurat		-		-		-		-		-	-
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan		-		-		-		-		-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		776,513,084,983	100.00	795,830,635,612	100.00	794,740,411,203	100.00	913,258,324,428	100.00	861,998,332,754	100.00	100.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.2. Neraca Daerah

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap, jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban, jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Jika dilihat dari Tabel 3.3 yang menggambarkan perkembangan Neraca Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2020, terlihat bahwa pertumbuhan total aset meningkat, yaitu dari Rp. 1.677.234.003.880 pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.888.776.851.560 pada tahun 2020, dengan peningkatan rata-rata 3,01%.

Disisi perembangan asset lancar daerah Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 jumlah asset lancar mengalami penurunan dari Rp. 67.432.218.767,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 65.067.569.141 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 72.284.179.354,- pada tahun 2018 dan Rp. 119.779.847.072,- pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali

mengalami penurunan menjadi Rp. 106.452.808.114,-. Naik turunnya asset lancar sangat dipengaruhi oleh besar naik dan turunnya uang yang tersimpan di kas daerah dan kas BLUD (SiLPA tahun berjalan) serta meningkatnya persediaan barang yang akan digunakan pada tahun berikutnya serta piutang daerah.

Selanjutnya untuk asset tetap pada periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari Rp. 1.465.785.884.718,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.741.598.174.178,- pada tahun 2020 dengan rata-rata peningkatannya sebesar 4,40%. Rendahnya peningkatan asset tetap ini tidak sesuai dengan besaran dari realisasi belanja modal daerah, hal ini disebabkan oleh: 1) meningkatnya penyusutan asset tetap daerah, 2). Kebijakan daerah untuk menjual atau melelang aset tetap daerah yang nilai manfaatnya lebih rendah dari biayanya (seperti kendaraan, peralatan kantor dll). Sedangkan untuk asset lainnya pada periode 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dari Rp 144.015.900.395,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 40.725.869.267,- pada tahun 2020. Penurunan yang signifikan terjadi pada disebabkan oleh penurunan dari asset lain-lain yaitu penyerahan asset konkuren ke Provinsi Sumatera Barat sebagai akibat Undang-Undang 23 Tahun 2014 yaitu pemindahan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi Sumatera Barat, penghapusan asset akibat bencana alam dan asset rusak.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga sama untuk pertumbuhan jumlah dari kewajiban dan ekuitas dana. Jika dilihat pada periode tahun 2016-2020 terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap kewajiban pemerintah daerah terutama kewajiban jangka pendek meskipun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yaitu dari Rp.6.682.856.519,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 21.501.016.105,- pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 14.551.279.008,-. Peningkatan ini disebabkan peningkatan kewajiban jangka pendek terutama utang beban terkait dengan belanja modal dan belanja BLUD. Sedangkan perkembangan ekuitas dana lebih mendominasi dan cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tahun 2016 ekuitas dana Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 1.670.551.147.365,- menjadi Rp. 1.783.749.080.986,- pada tahun 2019. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya investasi pemerintah daerah dalam bentuk asset, cadangan persediaan dan SiLPA.

Jika dilihat komposisi pembentuk ekuitas dan kewajiban dapat dilihat komposisi ekuitas dana jauh lebih besar dibandingkan total kewajiban yaitu rata-rata sekitar 99,26% ekuitas dana dan hanya 0,74% kewajiban daerah

Tabel 3.4.
Realisasi dan Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	%	
1	ASET	1.677.234.003.880	1.716.684.335.161	1.802.642.385.364	1.805.250.097.091	1.888.776.851.560	4,63	3,01
1,1	ASET LANCAR	67.432.218.767	65.067.569.141	72.284.179.354	119.779.847.072	106.452.808.114	(11,13)	12,09
1.1.1	Kas	49.018.708.198	19.652.332.931	22.004.356.720	67.189.958.573	69.710.682.471	3,75	9,20
1.1.2	Piutang	10.686.773.313	39.206.120.695	40.985.002.059	37.541.456.449	21.383.027.488	(43,04)	18,93
1.1.3	Persediaan	7.726.737.256	6.209.115.515	9.294.820.575	15.048.432.050	15.359.098.156	2,06	18,74
1,2	ASET TETAP	1.465.785.884.718	1.591.395.211.592	1.665.484.054.995	1.632.237.654.136	1.741.598.174.178	6,70	4,40
1.2.1	Tanah	188.437.819.675	195.023.329.026	200.006.076.326	202.007.927.303	332.314.984.366	64,51	15,24
1.2.2	Peralatan dan mesin	201.908.712.615	221.072.164.440	231.987.655.239	263.991.989.468	308.663.313.849	16,92	11,19
1.2.3	Gedung dan bangunan	468.253.289.691	503.223.195.783	524.517.791.389	583.283.408.463	628.886.323.215	7,82	7,65
1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	853.692.152.326	960.994.541.677	1.079.812.107.851	1.167.077.446.691	1.246.187.126.686	6,78	9,92
1.2.5	Aset tetap lainnya	105.700.609.893	120.649.259.988	126.044.655.039	33.915.758.081	35.626.512.748	5,04	(23,81)
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	47.034.259.812	83.075.449.391	116.431.714.231	144.486.219.623	78.098.953.785	(45,95)	13,52
1.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(399.240.959.294)	(492.642.728.713)	(613.315.945.080)	(762.525.095.493)	(888.179.040.471)	16,48	22,13
1,3	ASET LAINNYA	144.015.900.395	60.221.554.427	64.874.151.015	53.232.595.883	40.725.869.267	(23,49)	(27,08)
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran							
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	23.012.381.385						(100,00)
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua							
1.3.4	Aset tak berwujud	417.630.000	389.354.000	312.568.000	326.479.500	596.059.000	82,57	9,30
1.3.5	Aset Lain-lain	83.764.568.407	24.187.030.693	26.706.531.486	14.540.563.584	155.103.711	(98,93)	(79,26)
1.3.6	Aset yang dibatasi penggunaannya	102.687.338						(100,00)
1.3.7	Investasi Jangka Panjang	36.718.633.266	35.645.169.734	37.855.051.528	38.365.552.798	39.974.706.556	4,19	2,15
2	KEWAJIBAN	6.682.856.516	6.459.245.421	17.124.861.473	21.501.016.105	14.551.279.008	(32,32)	21,47
2,1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.682.856.516	6.459.245.421	17.124.861.473	21.501.016.105	14.551.279.008	(32,32)	21,47
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	64.860.107	5.639.982		23.273.415	88.519.643	280,3466	8,09
2.1.2	Uang muka dari kas daerah							
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	103.491.102	344.917.337	17.705.476	2.330.640	88.375.629	3.691,90	(3,87)
2.1.4	Utang Beban	6.278.757.269	5.667.251.736	16.706.928.394	21.134.088.805	14.325.540.491	(32,22)	22,90
2.1.5	Utang jangka Pendek lainnya	235.036.419	441.436.366	400.227.603	341.323.245	48.843.245	(85,69)	(32,48)
2.1.6	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran SKPD	711.619						(100,00)
3	EKUITAS DANA	1.670.551.147.365	1.710.225.089.740	1.785.517.523.891	1.783.749.080.986	1.874.225.572.552	5,07	2,92
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.677.234.003.881	1.716.684.335.161	1.802.642.385.364	1.805.250.097.091	1.888.776.851.560	4,63	3,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memahami kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilakukan analisis rasio keuangan, meliputi *rasio likuiditas* dan *rasio solvabilitas*. *Rasio likuiditas* lebih ditujukan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Sedangkan *rasio solvabilitas* berguna untuk mengukur kemampuan pemerintahan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Dari Tabel 3.5 dapat dilihat rasio likuiditas keuangan (rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek) Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2016-2020 relatif baik namun cenderung mengalami penurunan. Untuk *current ratio* dari 10,09 pada tahun 2016 menjadi 7,32 pada tahun 2020, hal ini berarti bahwa aset lancar daerah adalah 5,57 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan untuk *quick ratio* yang tidak memperhitungkan persediaan (hanya memperhitungkan kas dan piutang dalam asset lancar) karena memerlukan tahap untuk menjadi kas juga mengalami penurunan dari 8,93 pada tahun 2016 menjadi 6,26 pada tahun 2020, hal ini berarti bahwa nilai kas dan piutang daerah adalah 6,26 kali jika dibandingkan kewajiban jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok Selatan mempunyai kemampuan yang baik untuk melunasi hutang jangka pendek.

Sedangkan untuk rasio solvabilitas (rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya) dapat dilihat kemampuan keuangan Kabupaten Solok Selatan sangatlah baik. Hal ini dikarenakan semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Dilihat dari rasio total hutang terhadap ekuitas dana atau total asset Kabupaten Solok Selatan berada angka 1. Ini berarti hutang yang dimiliki Kabupaten Solok Selatan berada dibawah jumlah aset atau ekuitas dananya. Rendahnya nilai rasio likuiditas dan solvabilitas lebih disebabkan oleh rendahnya nilai hutang pemerintah daerah.

Berdasarkan analisa dari ke empat rasio keuangan diatas dapat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang sangat kuat (baik) dalam melunasi seluruh hutangnya. Namun dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan belum memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari pihak lain seperti hibah dari perusahaan (BUMD, BUMN dan Swasta) atau pemerintahan lainnya maupun pinjaman daerah. Hal ini disebabkan belum adanya program pembangunan yang membutuhkan dana yang besar yang mempunyai aspek ekonomis terhadap peningkatan pendapatan daerah dimasa datang. Karena pengambilan

kebijakan tersebut akan berdampak peningkatan kewajiban pada masa yang akan datang yang akan mengakibatkan pada penurunan sumber daya ekonomi di masa datang.

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2020 (Kali)

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas						
1	Rasio lancar (current ratio)	10,09	10,07	4,22	5,57	7,32
2	Rasio quick (quick ratio)	8,93	9,11	3,68	4,87	6,26
Rasio Solvabilitas						
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,003984	0,003763	0,009500	0,011910	0,007704
4	Rasio hutang terhadap modal	0,004000	0,003777	0,009591	0,012054	0,007764

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara umum telah dicapai hasil perbaikan tata kelola yang ditunjukkan dengan opini dari BPK RI periode 2016-2020 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari kondisi Wajar Dengan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Solok Selatan. Proporsi belanja dapat menunjukkan perbandingan besaran anggaran operasional serta belanja program dan kegiatan. Semakin tinggi anggaran opsional maka semakin kecil anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan atau sebaliknya. Analisis ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja belanja dan efektifitas dari penggunaan anggaran untuk pembangunan.

Dilihat proporsi Belanja Kabupaten Solok Selatan periode 2016-2020 per jenis belanja terhadap belanja total daerah dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi belanja operasi 63,77, belanja modal 24,10%, belanja tidak terduga 1,51% dan 10,63% untuk belanja transfer ke nagari.

Untuk belanja operasi bahwa belanja pegawai merupakan komponen paling besar dengan rata-rata 38,48% dari total belanja daerah, dan kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa yang didalamnya termasuk belanja barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan rata-rata 23,87% dari belanja daerah.

Sedangkan rata-rata belanja daerah yang digunakan untuk belanja hibah dan bantuan sosial hanya sebesar 1,33% dan 0,08%.

Tabel 3.6.
Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2016-2020

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
		%	%	%	%	%	
5	BELANJA DAERAH						
5 1	Belanja Operasi	61.59	61.18	63.88	64.40	67.78	63.77
5 1 01	Belanja Pegawai	36.61	35.58	40.18	39.35	40.72	38.48
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.07	24.98	22.96	23.99	23.37	23.87
5 1 03	Belanja Hibah	0.91	0.61	0.74	0.72	3.68	1.33
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.02	-	0.34	0.02	0.08
5 2	Belanja Modal	28.76	28.04	24.90	24.25	14.55	24.10
5 2 01	Belanja Modal Tanah	0.48	0.74	0.63	0.26	0.19	0.46
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.96	3.92	2.15	3.46	5.32	3.56
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.63	5.80	4.54	6.83	6.40	5.64
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.55	17.29	16.91	13.29	2.44	14.10
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.15	0.29	0.67	0.41	0.20	0.34
5 3	Belanja Tidak Terduga	0.25	0.21	0.10	0.21	6.75	1.51
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	0.25	0.21	0.10	0.21	6.75	1.51
5 4	Belanja Transfer Keuangan	9.39	10.57	11.12	11.14	10.92	10.63
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	0.04	0.07	0.11	0.12	0.10	0.09
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	9.35	10.50	11.01	11.01	10.82	10.54
JUMLAH BELANJA DAERAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

Untuk dapat melihat besaran anggaran belanja daerah yang sudah dibelanjakan untuk pemenuhan belanja program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja daerah maka perlu diketahui pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam menjalankan tupoksinya dan belanja wajib mengikat serta prioritas utama.

A. Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja daerah untuk aparatur, termasuk belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kebijakan belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur juga menunjukkan kebijakan yang relatif baik dengan rata-rata 48,36% dan cenderung mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 385.554.409.026,- (47,16% dari belanja daerah) pada tahun 2016 menjadi Rp. 441.623.141.491,- (51,40% dari belanja daerah) pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh: 1) meningkatnya belanja pegawai dari Rp. 217.690.371.255,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 221.611.094.686

pada tahun 2020 sebagai akibat kenaikan gaji ASN dan penambahan pegawai;

2). Kebijakan daerah untuk menaikkan tambahan penghasilan ASN yang perhitungannya sesuai dengan arahan Menpan RB yaitu berdasarkan kelas jabatan dan kinerja sehingga menyebabkan kenaikan tambahan penghasilan ASN dari Rp. 79.709.785.670,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 112.873.330.893,- pada tahun 2020;

3) Kebijakan daerah untuk pemenuhan belanja modal sarana pendukung perkantoran dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan dari Rp. 23.925.631.230,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 45.520.194.621,- pada tahun 2020.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	217.690.371.255	201.838.852.666	205.373.431.724	218.519.657.283	221.611.094.686
2	Belanja Tambahan Penghasilan	79.709.785.670	74.812.220.826	100.394.022.736	111.930.913.238	112.873.330.893
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	396.000.000	396.000.000	250.800.000
4	Belanja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	225.955.052	239.225.748	146.419.000	138.510.250	92.524.700
5	Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	10.426.118.199	15.339.807.684	10.455.067.714	9.881.331.227	13.224.787.864
6	Belanja Uang Lembur	219.494.000	235.166.000	166.174.000	434.916.500	567.942.000
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	105.350.000	205.500.000	178.750.000	92.850.000	88.000.000
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.189.788.000	1.572.578.000	1.161.776.000	1.102.535.000	695.620.000
9	Belanja premi asuransi kesehatan	77.330.000	59.869.800	342.029.078	66.732.000	64.800.000
10	Belanja makanan dan minuman pegawai	508.276.600	610.187.500	1.304.252.471	1.218.128.048	1.345.025.118
11	Belanja pakaian dinas dan atributnya	373.328.400	385.179.000	392.508.000	588.443.000	464.629.970
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.766.371.973	1.709.137.133	1.496.252.525	1.563.858.431	465.731.525
13	Belanja perjalanan dinas	48.036.608.647	50.566.662.869	39.914.833.607	49.165.579.657	44.358.660.114
14	Belanja perjalanan pindah tugas					
15	Belanja Pemulangan Pegawai					
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	23.925.631.230	34.183.052.958	16.923.032.193	30.013.601.145	45.520.194.621
	TOTAL	385.554.409.026	382.057.440.184	378.644.549.048	425.113.055.779	441.623.141.491

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

Tabel 3.8.
Perbandingan Belanja Pemenuhan Aparatur Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2016	385.554.409.026	817.591.953.923	47,16
2	Tahun anggaran 2017	382.057.440.184	824.607.429.051	46,33
3	Tahun anggaran 2018	378.644.549.048	792.390.387.432	47,79
4	Tahun anggaran 2019	425.113.055.779	868.437.319.235	48,95
5	Tahun Anggaran 2020	441.623.141.491	859.241.914.284	51,40
	Total	2.012.992.595.528	4.162.269.003.925	48,36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

B. Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Perhitungan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja ini terdiri dari:

- 1) Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahunnya oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bunga atau belanja sejenisnya.
- 2) Belanja periodik dan prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dan prioritas daerah seperti operasional kantor, operasional pelayanan kesehatan, pendidikan dll

Berdasarkan hal diatas, pada tabel 3.8 dan 3.9 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Solok Selatan dari Rp. 431.243.599.982,-, pada tahun 2016 menjadi Rp. 531.987.159.744,- pada tahun 2020, atau mengalami peningkatan rata-rata 5,39%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari Belanja Pegawai terutama kenaikan gaji ASN dan belanja tambahan penghasilan ASN seiring perubahan perhitungan dari Tunjangan Daerah menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai yang perhitungannya mengarah ke berbasis kinerja. Selain itu dari sisi belanja barang dan jasa peningkatan terjadi pada belanja yang diperuntukan operasional kantor dan pelayanan masyarakat terutama pada pos belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor , premi asuransi (Jamkesda). Sedangkan untuk belanja transfer keuangan disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan anggaran dana desa setiap tahunnya serta kebijakan pemerintah untuk menganggarkan kewajiban pemerintah daerah untuk desa/nagari sebesar 10% dari dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Jika dilihat dari realisasi wajib mengikat terhadap pengeluaran belanja daerah dapat dilihat bahwa rata-rata 48,36% dari Belanja daerah. Belanja wajib mengikat serta prioritas utama merupakan yang harus dianggarkan setiap tahunnya. Semakin besar belanja wajib mengikat dan prioritas utama ini maka semakin kecil kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.9.
Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Operasional	354.743.691.869	340.525.598.153	382.918.455.250	418.915.421.658	438.475.462.577	5,44
I	Belanja Pegawai	297.926.111.977	277.190.299.240	306.309.873.460	330.985.080.771	334.827.750.279	2,96
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	217.690.371.255	201.838.852.666	205.373.431.724	218.519.657.283	221.611.094.686	0,45
2	Belanja Tambahan Penghasilan	79.709.785.670	74.812.220.826	100.394.022.736	111.930.913.238	112.873.330.893	9,09
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	396.000.000	396.000.000	250.800.000	(4,38)
4	Belanja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	225.955.052	239.225.748	146.419.000	138.510.250	92.524.700	(20,01)
II	Belanja Barang dan Jasa	56.817.579.892	63.335.298.913	76.608.581.790	87.930.340.887	103.647.712.298	16,22
1	Belanja Bahan Habis Pakai	4.642.106.599	5.217.348.362	7.315.682.809	13.572.809.240	16.511.937.262	37,33
2	Belanja Bahan/Material Obat- Obatan	3.194.458.585	2.326.922.605	12.032.221.486	7.334.904.397	8.416.298.815	27,40
3	Belanja Jasa Kantor	32.653.797.941	37.378.316.283	39.504.442.711	48.505.184.602	56.150.668.393	14,51
4	Belanja Premi Asuransi	6.567.580.400	8.475.698.600	8.290.902.626	9.125.412.740	12.926.335.182	18,45
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.517.242.858	8.618.944.593	8.377.210.447	8.521.838.353	8.238.924.037	(0,83)
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	1.137.043.509	1.112.568.470	909.371.711	777.341.555	1.315.548.609	3,71
8	Belanja Beasiswa Pedidikan PNS	105.350.000	205.500.000	178.750.000	92.850.000	88.000.000	(4,40)
9	Belanja makanan dan minuman			2.372.481.120	1.977.088.823	2.343.548.332	(0,61)
B	Belanja Transfer Keuangan	76.499.908.113	86.972.591.391	87.710.504.820	96.603.465.476	93.511.697.167	5,15
1	Belanja Bagi Hasil Pemerintahan Desa	347.044.191	584.205.303	859.851.917	1.055.973.744	892.649.723	26,64
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	76.152.863.922	86.388.386.088	86.850.652.903	95.547.491.732	92.619.047.444	5,02
C	Pembiayaan Pengeluaran						
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Pembayaran pokok utang						
3	Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah						
	TOTAL (A+B+C)	431.243.599.982	427.498.189.544	470.628.960.070	515.518.887.134	531.987.159.744	5,39

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

Tabel 3.10.
Perbandingan Belanja Pemenuhan Aparatur Terhadap Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	385,554,409,026	817,591,953,923	47.16
2	Tahun Anggaran 2017	382,057,440,184	824,607,429,051	46.33
3	Tahun Anggaran 2018	378,644,549,048	792,390,387,432	47.79
4	Tahun Anggaran 2019	425,113,055,779	868,437,319,235	48.95
5	Tahun anggaran 2020	441,623,141,491	859,241,914,284	51.40
	Total	2,012,992,595,528	4,162,269,003,925	48.36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan
A. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill

Analisis ini bertujuan untuk melihat gambaran masa lalu tentang kebijakan untuk menutup defisit rill anggaran pemerintah daerah. Dilihat pada Tabel 3.11 dan 3.12, bahwa dari realisasi anggaran Kabupaten Solok Selatan

pada periode tahun 2016-2020, defisit anggaran hanya terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dengan defisit anggaran sebesar Rp. 41.078.868.940,- dan Rp. 28.776.793.439 namun defisit ini bisa tertutupi oleh SILPA Anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 realisasi antara pendapatan dengan belanja daerah sudah surplus, hal ini disebabkan karena terdapatnya kegiatan yang optimal terealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja maupun kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Surplus anggaran ini akan menjadi SILPA anggaran tahun berkenaan dan bisa digunakan untuk penutup defisit penganggaran tahun berikutnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah cukup baik terutama pada tahun 2018-2020 dimana realisasi pendapatan sudah dapat menutupi realisasi belanja daerah.

Tabel 3.11.
Defisit Riil Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020

NO	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	776.513.084.983	795.830.635.612	794.740.411.203	913.258.324.428	861.998.332.754
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	814.299.953.923	822.917.429.051	788.835.387.432	867.437.319.235	856.241.914.284
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.292.000.000	1.690.000.000	3.555.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000
A	Defisit riil	(41.078.868.940)	(28.776.793.439)	2.350.023.771	44.821.005.193	2.756.418.470
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	89.475.438.657	48.371.280.054	19.646.692.949	22.004.356.720	66.816.901.113
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Piutang Daerah	26.577.400	52.206.333	7.840.000	-	-
A-B	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan	48.423.147.117	19.646.692.949	22.004.556.720	66.825.361.913	69.573.319.583

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

Tabel 3.12.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	217,81	168,09	836,02	49,09	2.424,05
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,06	0,18	0,33	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberikan komposisi pembentuk sisa lebih perhitungan anggaran. Pada Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa komposisi utama pembentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan periode tahun 2016-2020 penyebab utamanya karena terdapatnya kegiatan yang tidak

terrealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja dan pembiayaan daerah serta kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun berkenaan dengan besaran belanja daerah Kabupaten Solok Selatan, maka besaran SILPA tahun berkenaan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan dapat dikatakan cukup baik yaitu sekitar 4,69%.

Tabel 3.13.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	48.423.147.117,02	100,0%	19.646.692.948,75	100,0%	22.004.556.720,06	100,0%	66.825.361.913,08	100,0%	69.573.319.583	100,0%
2	Pelampauan penerimaan PAD	6.511.810.750,00	13,4%	(3.354.568.374,07)	-17,1%	(8.394.246.861,57)	-38,1%	(8.586.918.238,97)	-12,8%	653096158481%	9,4%
3	Pelampauan penerimaan dana transfer	(6.667.059.334,00)	-13,8%	(19.731.207.797,00)	-100,4%	(11.331.969.017,00)	-51,5%	(55.301.626.180,00)	-82,8%	(10.757.254.624,00)	-15,5%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(1.220.000.000,00)	-2,5%	(2.649.930.328,00)	-13,5%	(1.811.315.033,00)	-8,2%	(4.543.132.497,00)	-6,8%	(160.865.495,00)	-0,2%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	49.063.818.301,02	101,3%	46.462.607.028,35	236,5%	42.589.247.631,88	193,5%	130.757.038.828,99	195,7%	73.968.938.917,00	106,3%
6	Total penghematan pembiayaan	734.577.400,00	1,5%	(1.080.207.580,53)	-5,5%	952.839.999,75	4,3%	4.500.000.000,06	6,7%	(8.460.800,00)	0,0%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (data diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah, maka diperlukan peningkatan pendapatan daerah yang cukup besar. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih. Peningkatan ini sangat diperlukan akan tetapi harus disesuaikan dengan

potensi yang dimiliki, kinerja tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kondisi perekonomian nasional, provinsi dan daerah yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dilihat dari kinerja beberapa tahun belakangan dapat dilihat bahwa belanja transfer (nasional dan provinsi) sangat mempengaruhi naik turunnya pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan derajat fiskal daerah yang memang masih rendah, oleh sebab itu pertumbuhan pendapatan asli daerah harus menjadi prioritas untuk digali dan ditingkatkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit. Ini mengakibatkan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah) akan mengikuti besaran penerimaan daerah baik berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan perkembangan dari realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2016-2020 dan perkiraan dari realisasi tahun 2021 dengan memakai tahun dasar target APBD Perubahan tahun 2021 serta pertimbangan kondisi perekonomian daerah, provinsi dan nasional maka diproyeksikan pendapatan daerah rata-rata tumbuh sekitar 2,57% pertahun yaitu dari Rp.821.433.706,944,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 932.366.308,102,- pada tahun 2026. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah ditargetkan mengalami penurunan dari tahun target tahun 2021 yaitu dari Rp. 69.573.319.583,- menjadi Rp. 11.063.181.943,- pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2026 menjadi Rp. 11.654.578.851,-. Rendahnya peningkatan penerimaan pembiayaan ini dikarenakan mempertimbangkan prinsip anggaran yaitu efisiensi, efektifitas dan kehati-hatian, sebab sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Berdasarkan hal tersebutlah maka penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2023-2026 diproyeksikan sebesar 1,25% dari pendapatan tahun bersangkutan.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah maka diproyeksikan belanja daerah sampai tahun 2026 diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan dari target 2021 sebesar 1,13% pertahun yaitu dari Rp. 891.007.026.527,- menjadi Rp. 942.520.886.953,-.

Dalam hal ini ada beberapa asumsi yang dipakai dalam melakukan proyeksi keuangan daerah dalam kurun waktu 2021-2026, yaitu:

1. Secara umum pendapatan Daerah diproyeksi mengalami peningkatan rata-rata 2,56% dengan rincian peningkatan sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diasumsikan mengalami peningkatan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,88%. Peningkatan ini ditunjang oleh peningkatan Retribusi Daerah sebesar 7,39%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 5,17% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 4,81%. Sedangkan untuk pajak daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 5,77%. Penurunan lebih disebabkan karena terjadinya peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2021 yang diperkirakan berasal dari penerimaan BPHTB dari Perkebunan Mitra Kerinci yang jatuh tempo pada tahun 2021
- ❖ Peningkatan Dana Transfer Daerah diasumsikan mengalami peningkatan yang berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,63%. Peningkatan ini ditunjang oleh peningkatan rata-rata transfer pusat 2,95% sedangkan untuk transfer bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan mengalami rata-rata penurunan 1,62%. Untuk dana transfer dari pemerintah pusat diasumsikan peningkatan tersebut berasal dari peningkatan rata-rata Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 2,40%, peningkatan Dana Alokasi Umum 2,50%, peningkatan Dana Alokasi Khusus 4,81%, Peningkatan Dana Intensif Daerah 10%. Sedangkan untuk Dana Desa diasumsikan tetap karena besaran dana desa sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan untuk transfer bagi hasil pajak dari provinsi meskipun secara rata-rata mengalami penurunan 1,62% dari tahun 2021, namun jika dihitung dari 2022-2026 transfer bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan 2,0%
- ❖ Untuk peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperkirakan hanya berasal dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yaitu berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena prinsip penganggaran belanja BOS harus sesuai besaran pendapatannya sehingga tidak akan mempengaruhi besaran kapasitas fiskal daerah maka pendapatan ini diasumsikan tetap.

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah diatas maka kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan adalah:

- a. Optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.
 - b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah
 - c. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak) terutama yang berasal dari kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.
 - d. Mengoptimalkan penggunaan aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
 - e. Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan.
 - f. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.
 - g. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah
2. Untuk Pembiayaan Daerah diproyeksikan mengalami surplus setiap tahunnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan mempertimbangkan perkiraan rill SILPA tahun 2021 dan prinsip kehati-hatian maka pada tahun 2023-2026 diasumsikan Penerimaan SILPA sebesar 1,25% dari Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditargetkan tetap dan hanya digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari.
 3. Berdasarkan asumsi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah maka Belanja Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,13%.

Sesuai Proyeksi diatas, maka Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2021-2026 adalah

- a) Pemenuhan pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama, yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pelayanan pemerintah daerah.
- b) Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah dan Alokasi belanja lainnya yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penggunaannya tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- c) Alokasi Belanja Daerah untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendanai dan mendukung program prioritas pencapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati.
- d) Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah
- e) Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan
- f) Untuk belanja daerah yang terikat penggunaannya Seperti DAK, BOS, BKK, dll dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempedomani pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

Tabel 3.14.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021-2026

KODE	URAIAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH												
4 1	Pendapatan Asli Daerah	83,320,197,385	8.40	82,890,175,000	(0.52)	83,217,553,641	0.39	87,956,584,502	5.69	92,579,584,156	5.26	96,044,277,079	3.74
4 1 01	Pajak Daerah	18,480,500,000	171.75	11,659,775,000	(36.91)	11,869,813,750	1.80	14,101,254,438	18.80	13,072,094,659	(7.30)	13,727,847,142	5.02
4 1 02	Restribusi Daerah	1,566,000,000	30.58	2,564,500,000	63.76	1,716,075,000	(33.08)	1,861,220,000	8.46	2,032,812,000	9.22	2,237,156,638	10.05
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,700,551,019	(7.73)	2,100,000,000	23.49	1,890,000,000	(10.00)	1,984,500,000	5.00	2,083,725,000	5.00	2,187,911,250	5.00
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	61,573,146,366	(8.13)	66,565,900,000	8.11	67,741,664,891	1.77	70,009,610,064	3.35	75,390,952,496	7.69	77,891,362,049	3.32
4 2	Pendapatan Transfer	715,420,329,291	(5.92)	758,508,513,948	6.02	779,881,912,716	2.82	802,235,648,359	2.87	800,563,236,639	(0.21)	814,419,712,856	1.73
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	661,007,767,319	(8.27)	712,172,001,928	7.74	733,313,718,136	2.97	754,503,248,914	2.89	751,637,527,209	(0.38)	764,270,860,689	1.68
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25,247,665,000	7.86	27,593,720,433	9.29	27,731,689,035	0.50	27,870,347,480	0.50	28,149,050,955	1.00	28,430,541,465	1.00
	Dana Alokasi Umum	437,174,072,000	(1.09)	445,669,182,095	1.94	454,412,456,961	1.96	473,135,859,280	4.12	479,994,792,084	1.45	494,295,953,838	2.98
	Dana Alokasi Khusus	142,329,724,319	(23.73)	181,796,000,000	27.73	193,114,000,000	6.23	194,404,750,000	0.67	183,261,000,000	(5.73)	180,057,250,000	(1.75)
	Dana Insentif Daerah	8,567,934,000	(64.44)	9,424,727,400	10.00	10,367,200,140	10.00	11,403,920,154	10.00	12,544,312,169	10.00	13,798,743,386	10.00
	Dana Otonomi Khusus	-		-		-		-		-		-	
	Dana Desa	47,688,372,000	7.11	47,688,372,000	-	47,688,372,000	-	47,688,372,000	-	47,688,372,000	-	47,688,372,000	-
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	54,412,561,972	36.59	46,336,512,020	(14.84)	46,568,194,580	0.50	47,732,399,445	2.50	48,925,709,431	2.50	50,148,852,166	2.50
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	51,912,561,972	30.31	46,336,512,020	(10.74)	46,568,194,580	0.50	47,732,399,445	2.50	48,925,709,431	2.50	50,148,852,166	2.50
	Bantuan Keuangan	2,500,000,000											
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	22,693,180,268	(8.04)	21,693,180,268	(4.41)	21,693,180,268	-	21,693,180,268	-	21,693,180,268	-	21,693,180,268	-
4 3 01	Pendapatan Hibah	1,000,000,000	(95.95)	-		-		-		-		-	
4 3 02	Dana Darurat	-											
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	21,693,180,268		21,693,180,268	-	21,693,180,268	-	21,693,180,268	-	21,693,180,268	-	21,693,180,268	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	821,433,706,944	(4.71)	863,091,869,216	5.07	884,792,646,626	2.51	911,885,413,129	3.06	914,836,001,063	0.32	932,157,170,203	1.89
5	BELANJA DAERAH												
5 1	Belanja Operasi	645,782,302,046	11.27	638,917,137,571	(1.06)	639,622,870,952	0.11	678,530,646,136	6.08	660,053,071,114	(2.72)	671,198,962,492	1.69
5 1 01	Belanja Pegawai	372,237,680,527	6.77	377,821,245,735	1.50	383,488,564,421	1.50	389,240,892,887	1.50	395,079,506,281	1.50	401,005,698,875	1.50
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	265,069,322,575	32.46	252,617,447,432	(4.70)	247,565,098,484	(2.00)	251,278,574,961	1.50	256,304,146,460	2.00	261,430,229,389	2.00
5 1 03	Belanja Hibah	8,327,298,944	(73.54)	8,328,964,404	0.02	8,412,254,048	1.00	37,846,376,588	349.90	8,496,376,588	(77.55)	8,581,340,354	1.00
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	148,000,000	(1.17)	149,480,000	1.00	156,954,000	5.00	164,801,700	5.00	173,041,785	5.00	181,693,874	5.00
5 2	Belanja Modal	147,089,817,503	18.07	160,327,901,078	9.00	155,471,582,141	(3.03)	141,870,602,777	(8.75)	162,728,944,288	14.70	167,555,264,653	2.97
5 3	Belanja Tidak Terduga	2,054,233,614	(96.45)	2,156,945,295	5.00	2,000,000,000	(7.28)	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	2,054,233,614	(96.45)	2,156,945,295	5.00	2,000,000,000	(7.28)	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
5 4	Belanja Transfer Keuangan	96,080,673,364	2.75	96,437,089,753	0.37	97,261,375,475	0.85	99,385,240,120	2.18	100,013,246,970	0.63	101,557,521,908	1.54
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	2,150,127,664	140.87	1,422,427,500	(33.84)	1,358,588,875	(4.49)	1,596,247,444	17.49	1,510,490,666	(5.37)	1,596,500,378	5.69
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	93,930,545,700	1.42	95,014,662,253	1.15	95,902,786,600	0.93	97,788,992,676	1.97	98,502,756,304	0.73	99,961,021,530	1.48
	JUMLAH BELANJA DAERAH	891,007,026,527	4.06	897,839,073,697	0.77	894,355,828,568	(0.39)	921,786,489,033	3.07	924,795,262,372	0.33	942,311,749,054	1.89
	SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN	(69,573,319,583)	(1,308.6)	(34,747,204,481)	(50.06)	(9,563,181,942)	(72.5)	(9,901,075,905)	3.53	(9,959,261,309)	0.59	(10,154,578,851)	1.96

KODE	URAIAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
6	PEMBIAYAAN DAERAH													
6 1	Penerimaan Pembiayaan	69,573,319,583	4.13	34,747,204,481	(50.06)	11,063,181,943	(68.16)	11,401,075,905	3.05	11,459,261,309	0.51	11,654,578,851	1.70	(30.05)
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	69,573,319,583	4.13	34,747,204,481	(50.06)	11,063,181,943	(68.16)	11,401,075,905	3.05	11,459,261,309	0.51	11,654,578,851	1.70	(30.05)
6 1 02	Pencairan Dana Cadangan													
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-		-		1,500,000,000		1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	-
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	-		-		1,500,000,000		1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	100.00
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH		69,573,319,583	9.02	34,747,204,481	(50.06)	9,563,181,943	(72.5)	9,901,075,905	3.53	9,959,261,309	0.59	10,154,578,851	1.96	(31.95)
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)		- 0		0		0		0		- 0		0		

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah baik untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih serta pencapaian target nasional dan provinsi yang dibebankan kepada Kabupaten Solok Selatan. Perhitungan ini dilakukan dengan menguragi proyeksi penerimaan daerah yang terdiri dari proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pengeluaran pembiayaan.

Dari Tabel 3.15 dapat dilihat bahwa diperkirakan peningkatan dari kemampuan belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan yaitu dari Rp. 313.533.170.008,- pada tahun 2022 menjadi Rp. 326.014.946.779,- atau mengalami peningkatan rata-rata 0,9% pertahun

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menyusun Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 2,56%
2. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya diperkirakan 1,25% dari pendapatan daerah kecuali untuk tahun 2021 dan 2022 yang merupakan perkiraan riil.
3. Pengeluaran pembiayaan daerah diperkirakan tetap atau tidak mengalami pertumbuhan dari rencana tahun 2023.
4. Pengeluaran belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata 3,50% setiap tahunnya.
5. Penggunaan sumber pendanaan lain diluar APBD yang bersifat mengikat, terutama yang berdampak terhadap belanja tahun berikutnya seperti seperti pinjaman daerah, pengalokasian anggarannya ditujukan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja Daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti Infrastruktur Pekerjaan Umum, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan.

Tabel 3.15.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2021-2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	821,433,706,944	863,091,869,216	884,792,646,626	911,885,413,129	914,836,001,063	932,157,170,203
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	69,573,319,583	34,747,204,481	11,063,181,943	11,401,075,905	11,459,261,309	11,654,578,851
	Total penerimaan (Kapasitas Riil keuangan Daerah)	891,007,026,527	897,839,073,697	895,855,828,568	923,286,489,033	926,295,262,372	943,811,749,054
	Dikurangi:						
4.	Belanja Wajib dan Mengikat serta prioritas utama	550,606,710,335	574,877,945,197	594,823,673,279	610,467,501,843	631,833,864,408	653,948,049,662
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	340,400,316,192	322,961,128,500	299,532,155,289	311,318,987,190	292,961,397,964	288,363,699,392

Selanjutnya pada Tabel 3.16 dapat dilihat proyeksi rencana penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang disusun kedalam tiga prioritas belanja berikutnya, yaitu :

1. **Prioritas I:** dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
2. **Prioritas II:** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
3. **Prioritas III:** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.16.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil keuangan Daerah	891,007,026,526.8	897,839,073,697.0	895,855,828,568.1	923,286,489,033.2	926,295,262,371.7	943,811,749,054.2
	Dikurangi:						
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar)	467,000,715,780.0	431,403,399,103.0	422,868,822,247.8	427,324,124,934.6	434,410,948,156.2	442,475,699,681.3
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	424,006,310,746.8	466,435,674,594.0	472,987,006,320.3	495,962,364,098.5	491,884,314,215.5	501,336,049,372.9
	Dikurangi:						
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II (Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah)	317,766,908,555	359,561,625,544	359,619,676,781	350,846,001,604	374,046,270,471	382,717,745,755
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I dan II (I-II-III)	106,239,402,192	106,874,049,050	113,367,329,540	145,116,362,494	117,838,043,744	118,618,303,618
	Dikurangi:						
4	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III (Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah)	106,239,402,192	106,874,049,050	113,367,329,540	145,116,362,494	117,838,043,744	118,618,303,618

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 maka diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk masing-masing strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sementara itu Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam merumuskan strategi dana arah kebijakannya Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 selain diharuskan memperhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMD Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, juga diharuskan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV (Tahun 2020-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025.

6.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahap IV Tahun 2020-2025 RPJPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025

Periode Pembangunan Tahun 2021-2026 jika disandingkan dengan penahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan periode RPJMD keempat atau RPJMD terakhir yaitu tahun 2020-2025 dari siklus RPJPD 2005-2025. Pada periode ini diharapkan beberapa capaian dalam pembangunan daerah sudah dapat dilihat manfaat dan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Pada Tahap IV arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada pada bidang-bidang berikut

1. Pembangunan Agama dan Budaya

Kebijakannya:

- a) Teraplikasikannya kehidupan masyarakat berdasarkan sendi-sendi agama dan adat, berhasilnya sosialisasi aturan-aturan agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat
- b) Terlaksananya kelanjutan pendidikan budi pekerti dan akhlak di sekolah dan pendidikan informal dalam keluarga dengan dukungan produk hukum dari lembaga keagamaan dan adat setempat

- c) Terlaksananya kelanjutan penerapannya melalui organisasi sosial dan keagamaan dan masyarakat madani pada umumnya
- d) Terlaksananya fungsi dan peran surau dan mesjid sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dakwah, terlaksananya kelanjutan pembinaan terhadap TPA dan TPSA
- e) Teraplikasikannya produk hukum dan aturan pro masyarakat nagari melalui pendekatan adat dan budaya kepada masyarakat bersama Ninik Mamak
- f) Terlaksananya event-event budaya dengan melibatkan pemuka masyarakat dan lembaga kebudayaan
- g) Terlaksananya peningkatan ketahanan budaya daerah dengan menyusun materi muatan lokal Budaya Alam Minangkabau yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain yang relevan

2. Pembangunan Sistem Hukum, Pemerintahan dan Kewarganegaraan

Kebijakannya:

- a) Terlaksananya kelanjutan pendidikan aparatur pemerintah, sistim rekrutmen yang selektif dan penempatan aparatur yang sesuai dengan bidang ilmunya
- b) Terlaksananya sistim pelayanan satu pintu kepada masyarakat, terwujudnya produk hukum dan aturan tentang pelayanan publik
- c) Terwujudnya produk hukum dan aturan yang mengatur pemerintahan nagari, penerapan dan sosialisasi oleh aparatur nagari kepada masyarakat
- d) Terlaksananya pengembangan sistim pengelolaan keuangan berbasis IT, memperketat penataan keuangan dengan berpedoman pada Perundangundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e) Terlaksananya kelanjutan penataan SKPD dalam penegakan produk hukum daerah serta mensosialisasikan produk-produk hukum kepada masyarakat
- f) Terciptanya program-program sosial kemasyarakatan yang dinamis dan program yang membuat kesamaan sudut pandang masyarakat terhadap kehidupan yang ditentukan oleh hukum, undang-undang dan agama
- g) Melanjutkan peningkatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Solok Selatan baik terhadap aparatur maupun masyarakat

3. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Kebijakannya:

- a) Terpenuhinya kebutuhan jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan serta pengadaan bahan pengajaran yang sesuai kurikulum dalam jumlah yang memadai untuk setiap jenjang pendidikan
- b) Terealisasinya sarana dan prasarana pendidikan serta kebutuhan guru dan siswa sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional
- c) Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, terlaksananya pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis di puskesmas dan RSUD sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan Nasional
- d) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana olahraga disertai tenaga-tenaga keolahragaan baik olahraga pendidikan, olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi, berupa pelatih, instruktur olahraga, wasit dan juri
- e) Terlaksananya peran organisasi sosial dan organisasi perempuan serta sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial pada masyarakat
- f) Terbebaskannya Kabupaten Solok Selatan dari dampak gizi buruk pada masyarakat, antara lain dengan memberikan bantuan gizi tambahan bagi balita dan anak usia sekolah
- g) Terlaksananya kelanjutan pengembangan IPTEK disekolah, penambahan kuantitas dan kualitas peralatan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna untuk disosialisasikan pada masyarakat

4. Pembangunan Perekonomian Daerah

Kebijakannya:

- a) Terlaksananya akses perekonomian pada daerah terisolir serta terbangunnya infrastruktur perekonomian yang berbasiskan ekonomi kerakyatan
- b) Terwujudnya pasar Padang Aro, Pasar Muaro Labuh yang representatif, dan berkembangnya pasar nagari sebagai pusat pertumbuhan baru.
- c) Terlaksananya kelanjutan pembinaan koperasi dan peningkatan produktivitas, terlaksananya program kemitraan dan pemberian modal kerja.
- d) Terlaksananya sistem pelayanan standar dalam izin usaha bagi investor dan terjaminnya keamanan investasi bagi investor.

- e) Melanjutkan terpeliharanya jaringan irigasi yang sudah ada dan melanjutkan terbangunnya irigasi teknis pengganti irigasi desa serta irigasi kawasan tadah hujan
- f) Melanjutkan teraplikasikannya pengetahuan petani tentang kualitas bibit dan produk pertanian dan perkebunan dibawah kontrol lembaga pertanian dan perkebunan
- g) Dilanjutkannya pengembangan kelembagaan usaha bisnis *agro industry* dengan pola kemitraan dan terjaminnya keamanan serta kepastian hukum investasi
- h) Terbinanya secara berkelanjutan sistim pemasaran dan koperasi sebagai mitra petani dan terlaksananya promosi produk secara nasional dan internasional
- i) Terlaksananya tanaman hutan industri pada hutan rakyat di beberapa nagari yang masyarakatnya sudah mampu mengelola

5. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan

Kebijakannya:

- a) Dipertahankannya pengembangan wilayah dengan zona pengembangan yang sesuai dengan RTRW yang sudah ada
- b) Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi lingkungan yang baik kepada masyarakat dan pengusaha dengan melibatkan aparatur pemerintah dan anggota masyarakat
- c) Terlaksananya pengembangan RTRW yang sesuai dengan tuntutan pembangunan selanjutnya
- d) Terlaksananya kelanjutan implementasi pengelolaan kawasan konservasi dalam bersama masyarakat dengan kontrol aparatur pemerintah dan masyarakat

6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Kebijakannya:

- a) Terlaksananya kelanjutan pelebaran jalan utama, pembukaan jalan baru bagi daerah terisolir dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan lindung
- b) Terlaksananya pembangunan jembatan sesuai dengan kebutuhan ruas jalan yang ada, perbaikan jembatan yang sudah rusak di jalan utama
- c) Terlaksananya penyelesaian pembangunan jalan tembus Kabupaten Solok Selatan-Dharmasraya dan Kambang-Muara Labuh yang sesuai dengan aturan kawasan hutan lindung

- d) Melanjutkan pengembangan pembangunan pemukiman di kawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Aro dan kawasan-kawasan strategis lainnya
- e) Beroperasinya pembangkit listrik tenaga panas bumi pada tingkat optimal sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat sampai ke daerah tetangga
- f) Terlaksananya penataan sumur Bor secara baik, penambahan kapasitas debit air serta jaringan untuk daerah padat pemukiman
- g) terselesaikannya pembangunan seluruh Kantor Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan guna memberikan pelayanan pada masyarakat.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 maka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Solok Selatan Tahun 2021-2026, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan yang berkaitan pencapaian sasaran daerah disepakati untuk dilaksanakan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 6.1.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas penduduk usia sekolah 2. Meningkatkan ketersediaan guru berkualitas 3. Peningkatan ketersediaan Sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan 4. Menciptakan generasi muda yang berkarakter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu memanfaatkan teknologi 2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan 3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis jorong 4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan) 5. Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat terutama untuk penduduk usia sekolah. 6. Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik TK, SD dan SLTP (Tunjangan kinerja) 2. Pembangunan satu rumah tahfiz Quran per Jorong 3. Beasiswa unggulan daerah untuk perguruan tinggi didalam dan luar negeri 4. Peningkatan kualitas pendidikan non formal 5. Bantuan pengembangan Madrasah, SMA, SMK dan perguruan tinggi
	Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat 3. Menurunnya prevalensi stunting 4. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan pangan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. 4. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 6. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan (Total coverage) 2. Pemberdayaan kader kesehatan melalui posyandu 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
			7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	
	Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas (kompetensi) tenaga kerja 2. Penciptaan wirausaha baru	1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru 2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja	1. Penciptaan Wirausahawan Baru

Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Peningkatan investasi daerah 2. Peningkatan nilai tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Peningkatan nilai tambah sektor Industri dan UMKM 4. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan 5. Peningkatan sektor pariwisata unggulan daerah 6. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk 7. Mengurangi ketimpangan pendapatan penduduk	1. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan regulasi terkait kegiatan investasi 2. Meningkatkan Investasi 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta daya saing daerah menuju kemandirian daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian , penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta penggunaan teknologi tepat guna 4. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan pertanian, perikanan dan non pertanian. 5. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura peternakan dan perikanan 6. Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna 7. Mensinergikan pengelolaan pertanian dan	1. Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi hasil komoditi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu keluarga 3. Penguatan tata niaga dan informasi pasar 4. Penciptaan wirausahawan baru dan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata. 5. Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berbasis agrowisata, ekowisata dan budaya di setiap nagari 6. Pengelolaan perhutanan

Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
			peternakan 8. Integrasi program pertanian, peternakan perkebunan perikanan dan industrialisasi hasil pertanian 9. Mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan serta pemasaran produk berbasis teknologi infomasi 10. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku UMKM dalam perluasan pasar 11. Meningkatkan konektifitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 12. Pengembangan ekonomi kreatif 13. Pengembangan destinasi wisata yang memiliki differensiasi sesuai potensi daerah 14. Fasilitasi perluasan kawasan budidaya dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (distribusi lahan)	sosial dan penurunan status kawasan hutan untuk peningkatan ekonomi

Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Memperkuat kelembagaan dan tata laksana yang berbasis kinerja dengan prinsip efisiensi 2. Meningkatkan Profesionalisme ASN 3. Menerapkan Pola	1. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi 2. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 3. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah 2. Peningkatan iniovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik

Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Manajemen ASN berbasis Merit Sistem 4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Meningkatkan Sistem (Pengawasan yang professional dan Sinergis) / Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas korupsi	4. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif 5. Meningkatkan manajemen kinerja ASN 6. Menyusun perencanaan dan pengadaan ASN berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja 7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool 8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif 9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaporan 11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa 12. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah 13. Meningkatkan kapabilitas APIP 14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
	Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. Menyusun kebijakan pelayanan publik 2. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan 3. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus 4. Menciptakan inovasi pelayanan publik	1. Peningkatan manajemen pemerintahan terpercaya, cepat, tepat dan tanggap 2. Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah.

Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
		3. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	5. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	3. Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik 5. Penyediaan kendaraan operasional jorong 6. Peningkatan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi

Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan	Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan	1. Percepatan pembangunan kawasan Ibukota kabupaten dan kawasan pertumbuhan 2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah untuk menunjang perekonomian dan pelayanan publik 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat 4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian, pelayanan publik dan mitigasi bencana	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi 3. Meningkatkan kinerja PDAM dalam peningkatan layanan kepada masyarakat 4. Meningkatkan akses air minum layak dan sanitasi layak berbasis masyarakat 5. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau 6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) 7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana	1. Percepatan pembangunan kawasan ibukota dan kawasan pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan akses perhubungan dan telekomunikasi 2. Peningkatan jalan strategis antar nagari dan kecamatan 3. Pengadaan satu unit ekskavator satu kecamatan 4. Peningkatan layanan air bersih serta peningkatan akses sanitasi dan peningkatan kualitas hunian masyarakat (Bedah Rumah) 5. Penguatan mitigasi alam dan sosial (termasuk penanganan Covid 19) 6. Normalisasi sungai dan revitalisasi daerah irigasi

Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
				7. Pengadaan satu unit ekskavator satu kecamatan
Tujuan 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan 3. Peningkatan cakupan layanan persampahan yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle)	1. Pelestarian lingkungan hidup 2. Peningkatan Pengelolaan persampahan

Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Meningkatnya aktualisasi nilai seni, budaya, olahraga dan kearifan lokal dalam interaksi kehidupan masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat	1. Pengembangan dan Pembinaan kesenian tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat. 2. Penguatan kelembagaan adat dan budaya.	1. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 2. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 3. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat	1. Pelaksanaan festival seni dan budaya 2. Pelestarian kawasan cagar budaya daerah 3. Penguatan pelajaran muatan lokal pada kurikulum SD dan SLTP 4. Fasilitasi Operasional KAN
	Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Berolahraga masyarakat	1. Peningkatan dan pembinaan olahraga berbasis sekolah dan masyarakat	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas	1. Pelaksanaan event-event olah raga 2. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap Nagari

Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
			sarana prasarana olahraga	
Tujuan 2 : Menurunnya Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial	Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Peningkatan penanganan PPKS	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial / PMKS (jompo, difabel, korban bencana alam, anak terlantar, komunitas adat terpencil) 2. Pemberdayaan zakat dalam pengentasan kemiskinan
Tujuan 3 : Meningkatnya peran Nagari, masyarakat dan Swasta dalam pembangunan	Sasaran 1. Peningkatan peran Pemerintah Nagari dan Masyarakat dalam pembangunan daerah	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah 2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	1. Peningkatan peran perantau dalam pembangunan nagari
	Sasaran 2. Meningkatnya kesetaraan Gender dalam pembangunan	1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pemerintah	1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 3. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan	
	Sasaran 3. Peningkatan partisipasi swasta dan perusahaan	1. Meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah	1. Menjalinkan koordinasi dan yang antara pemerintah dan swasta terkait dengan pembangunan daerah 2. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan,	1. Peningkatan peran CSR dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
	dalam pembangunan		pegawasan dan pelaksanaan pembangunan	

Tabel. 6.2.

Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif					
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					
1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu memanfaatkan teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pemanfaatan teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pemanfaatan teknologi teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pemanfaatan teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui teknologi
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan
3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis jorong	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah dan masyarakat	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat dan jorong	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat dan jorong	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat dan jorong
4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)
5. Pengembangan budaya literasi dan gemar membaca khususnya penduduk usia sekolah.	5. Pengembangan budaya literasi dan gemar membaca khususnya penduduk usia sekolah.	5. Pengembangan budaya literasi dan kelompok literasi penduduk usia sekolah.	5. Pengembangan budaya literasi dan kelompok literasi penduduk usia sekolah.	5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	5. Pengembangan budaya literasi dan gemar membaca khususnya penduduk usia sekolah.
6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana	6. Peningkatan ketersediaan sarana	6. Peningkatan ketersediaan sarana	6. Peningkatan sekolah	6. Peningkatan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	pendidikan yang berkualitas 7. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional	dan prasarana pendidikan yang berkualitas 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan 8. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional	6. Peningkatan sekolah penggerak 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan 8. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional	penggerak 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan	ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 5. Meningkatkan pemberdayaan	1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 5. Meningkatkan	1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 4. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam	1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 4. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam	1. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan	1. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat</p> <p>6. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>7. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas</p>	<p>pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat</p> <p>6. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas</p>	<p>berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat</p> <p>6. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat</p> <p>7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas</p>	<p>berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat</p> <p>6. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat</p> <p>7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas</p> <p>8. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (on call) di tingkat nagari</p>	<p>upaya kesehatan berbasis masyarakat</p> <p>5. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat</p> <p>6. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas</p> <p>7. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>8. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (on call) di tingkat nagari</p>	<p>upaya kesehatan berbasis masyarakat</p> <p>5. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat</p> <p>6. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas</p> <p>7. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>8. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (on call) di tingkat nagari</p>
Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja					
<p>1. Melakukan identifikasi dan pendataan link match kebutuhan pasar kerja</p> <p>2. Menyusun regulasi perlindungan tenaga kerja</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru</p> <p>2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru</p> <p>2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru</p> <p>2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru</p> <p>2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru</p> <p>2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja</p>
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah					
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah					
<p>1. Menyusun regulasi penanaman modal dan perizinan yang</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi regulasi penanaman modal</p>	<p>1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan</p>	<p>1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan</p>	<p>1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan</p>	<p>1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan</p>

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>medukung iklim investasi</p> <p>2. Meningkatkan kepastian penggunaan lahan dan penerapan LP2B</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Membentuk pusat pembibitan sapi dan revitalisasi balai benih induk</p> <p>6. Mendorong terbentuknya komisi pengawasan terhadap pupuk bersubsidi</p> <p>7. Memberikan ransangan bangkitnya UMKM yang mengolah komoditi unggulan lokal</p> <p>8. Menyusun regulasi pemanfaatan produk lokal</p> <p>9. Melakukan sosialisasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>10. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-Commerce)</p> <p>11. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-</p>	<p>dan meningkatkan kemudahan mengurus perizinan</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Meningkatkan produksi bibit dan perbaikan kualitas</p> <p>6. Mendorong aktifnya pengawasan terhadap pupuk bersubsidi</p> <p>7. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>8. Mmeningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>9. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Meningkatkan kualitas bibit dari penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-</p>

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
comerce 12. Memfasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 13. Menyusun regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif 14. Mendorong aktifnya pokdarwis 15. Mendorong dan memfasilitasi kelembagaan pemanfaatan perhutanan sosial	10. Meningkatkan kerja sama dengan platform digital (e-Commerce) 11. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 12. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 13. Mengembangkan ekonomi kreatif 14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 15. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	Comerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Mengembangkan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	platform digital (e-Commerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Menyusun regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	platform digital (e-Commerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Mengembangkan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	Comerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Mengembangkan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani					
Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih					
1. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi 2. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	1. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi 2. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan	1. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju	1. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 2. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan	1. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 2. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan	1. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 2. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	berbasis elektronik	profesionalisme	pelaporan	pelaporan	pelaporan
4. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	3. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	2. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi	3. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	3. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	3. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa
5. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	4. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	3. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	4. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah	4. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah	4. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah
6. Menyusun perencanaan dan pengadaan ASN berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja	5. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	4. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	5. Meningkatkan kapabilitas APIP	5. Meningkatkan kapabilitas APIP	5. Meningkatkan kapabilitas APIP
7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool	6. Menyusun perencanaan dan pengadaan ASN berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja	5. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	6. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	6. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	6. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif	7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool	6. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	7. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi	7. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi	7. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi
9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)	8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif	7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool	8. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	8. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	8. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi
10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaporan	9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)	8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif	9. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	9. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	9. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif
11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan,	9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah	10. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	10. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	10. Meningkatkan manajemen kinerja ASN
12. Perbaiki manajemen				11. Membangun pola	11. Membangun sistem

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>pengelolaan barang milik daerah</p> <p>13. Meningkatkan kapabilitas APIP</p> <p>14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</p>	<p>penganggaran dan pelaporan</p> <p>11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>12. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah</p> <p>13. Meningkatkan kapabilitas APIP</p> <p>14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</p>	<p>(SPIP)</p> <p>10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaporan</p> <p>11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>12. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah</p> <p>13. Meningkatkan kapabilitas APIP</p> <p>14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</p>	<p>11. Meningkatkan majanemen kinerja ASN</p> <p>12. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool</p> <p>13. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif</p>	<p>karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool</p> <p>12. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif</p>	<p>reward dan punishment yang objektif</p>
Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani					
<p>1. Menyusun kebijakan pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>3. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>4. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Menyusun kebijakan pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>2. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>3. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>3. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>3. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menciptakan inovasi pelayanan publik 5. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	3. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana					
Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan					
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan , nagari 3. Meningkatkan kinerja PDAM dalam peningkatan layanan kepada masyarakat 4. Meningkatkan akses air minum layak dan sanitasi layak berbasis masyarakat 5. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau 6. Penguatan mitigasi bencana dalam	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari 3. Meningkatkan kualitas layanan air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum layak dan sanitasi layak berbasis masyarakat 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro dan Muara Labuh 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Meningkatkan kualitas layanan air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro dan Muara Labuh 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Perluasan jaringan dan layanan Air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Lubuak Malako dan Abai 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Perluasan jaringan dan layanan Air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Lubuak Malako dan Abai 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Perluasan jaringan dan layanan Air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) dan penanganan pasca bencana</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) dan penanganan pasca bencana</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
<p>1. Penyusunan dan sosialisasi regulasi lingkungan hidup</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat					
Sasaran 1 : Meningkatnya peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat					
1. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 2. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 3. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat	1. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 2. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 3. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Mendorong pengembangan klub kesenian lokal	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Mendorong pengembangan klub kesenian local	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Mendorong keaktifan klub kesenian lokal	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 4. Mendorong keaktifan klub kesenian lokal	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 4. Mendorong prestasi klub kesenian lokal
Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Berolahraga masyarakat					
1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong perkembangan klub olahraga berbasis masyarakat	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong perkembangan klub olahraga berbasis masyarakat	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong keaktifan klub olahraga melalui kompetisi antar klub	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong keaktifan klub olahraga melalui kompetisi antar klub	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong prestasi olahraga
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Melakukan pemutakhiran data PPKS 3. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3. Mengupayakan pendanaan untuk panti melalui sektor swasta secara berkelanjutan	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Sasaran 1. Peningkatan peran Pemerintah Nagari dan Masyarakat dalam pembangunan daerah					
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat termasuk	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku
Sasaran 2. Meningkatnya kesetaraan Gender dalam pembangunan					
1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 3. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan	1. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan 2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 4. Mewujudkan Solok Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan 2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 4. Mewujudkan Solok Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan 2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Sasaran 3. Peningkatan partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan					
1. Menjalin koordinasi dan yang antara pemerintah dan swasta terkait dengan pembangunan daerah 2. Melibatkan pihak swasta/perusahaan	1. Menjalin koordinasi dan yang antara pemerintah dan swasta terkait dengan pembangunan daerah	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	2. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah

6.3. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang merupakan instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah dirumuskan dari misi, sasaran dan strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih sesuai dengan Tabel 6.2 di bawah ini.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan daerah. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka waktu perencanaan. Sedangkan Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Solok Selatan Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan lima tahun kedepan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan periode Tahun 2021-2026 untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

5.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2025. Berdasarkan Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 Visi Kabupaten Solok Selatan adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BERMARTABAT YANG AMANAH : AMAN,
MAKMUR-SEJAHTERA, AGAMIS, NALAR DAN HARMONIS”**

Penjelasan tentang makna yang terkandung Visi Kabupaten yang memegang AMANAH atau mandat masyarakat memiliki rumusan sebagai berikut

- ❖ **Aman** memiliki maksud Martabat kabupaten ini pertama-tama terletak pada adanya rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha, baik bagi rakyat dan pemerintahan-nya, maupun bagi orang luar yang berusaha di kabupaten ini.
- ❖ **Makmur dan Sejahtera** memiliki maksud martabat kabupaten ini terletak pada terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam arti, bahwa sumber daya alam dan manusianya digunakan sebesar besarnya untuk meningkatkan kemakmuran dan

- ❖ **Agamis** memiliki maksud martabat kabupaten ini terletak pada terwujudnya ajaran dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari. Ini sekaligus memperkuat ajaran filosofi dan/ atau doktrin sosial adat Alam Minangkabau yang berbunyi *Adat basandi syara'; Syara' basandi Kitabullah (ABS-SBK) – Syara' mangato, adat mamakai*
- ❖ **Nalar dan Harmonis** memiliki maksud martabat kabupaten ini terletak pada upaya mendahulukan nalar dari pada emosi, dalam arti lebih mengedepan pikiran-pikiran rasional dan inovatif dalam memecahkan masalah. Namun bernalar saja tidak cukup. Perlu ditambahkan etos kerja keras. Nalar dan etos kerja keras tumbuh dari rasa percaya diri dan keduanya merupakan mesin perubahan

Sejalan dengan Visi di atas, Misi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha bagi rakyat dan pemerintah di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mempercepat upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesadaran beragama dalam masyarakat yang tercermin dalam praktek ibadah dan perilaku sosial
4. Mendorong terciptanya iklim intelektual dan akal sehat yang lebih mengedepankan fikiran-fikiran rasional dan inovatif dalam memecahkan masalah bersama

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi daerah tersebut adalah

1. Meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha bagi rakyat dan pemerintah di kabupaten Solok Selatan
2. Mempercepat upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkelanjutan
3. Mewujudkan kesadaran beragama dalam masyarakat yang tercermin dalam praktek ibadah dan perilaku sosial
4. Mendorong terciptanya iklim intelektual dan akal sehat yang lebih mengedepankan fikiran-fikiran rasional dan inovatif dalam memecahkan masalah bersama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi jangka panjang daerah terdapat 6 (enam) agenda utama kebijakan umum pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025 yaitu:

1. Pembangunan Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya; **Sasarannya**
 - a) Terwujudnya Masyarakat Berbudhi Luhur dan Berakhlak Mulia

- b) Terwujudnya Kerukunan hidup beragama dan Kepedulian Sosial
 - c) Terciptanya Kehidupan Sosial Yang Harmonis dalam Suasana Multikultura
 - d) Terciptanya ketahanan adat budaya lokal
2. Pembangunan Sistem Hukum, Pemerintahan dan Kewarganegaraan; **Sasarannya**
- a) Terciptanya Aparatur Pemerintah yang profesional, berkualitas dan bertakwa
 - b) Terwujudnya pelayanan umum yang baik melalui penataan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat
 - c) Terwujudnya Sistem Pemerintahan Nagari yang Baik
 - d) Terwujudnya sistim pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - e) Terwujudnya penegakan produk-produk hukum daerah yang tepat, jelas dan demokratis
 - f) Terwujudnya Mekanisme Penyelesaian Konflik Dari dan Untuk Masyarakat
3. Pembangunan Sumberdaya Manusia; **Sasarannya**
- a) Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata.
 - b) Terwujudnya Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Merata
 - c) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana olahraga untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat dan cerdas
 - d) Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial
 - e) Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi balita dan manula
 - f) Terwujudnya apresiasi dan kemampuan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna
4. Pembangunan Perekonomian Daerah; **Sasarannya**
- a) Terwujudnya Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengentasan Kemiskinan.
 - b) Terwujudnya Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi
 - c) Terwujudnya Sistim Koperasi dan UKM.
 - d) Terwujudnya Investasi Berbasis Sumberdaya Alam Lokal dan Kapasitas Keuangan Daerah
 - e) Terwujudnya komoditas pertanian dan perkebunan yang berdaya saing tinggi
 - f) Terwujudnya Pengembangan Pasar dan Pemasaran Hasil Pertanian Petani

5. Pengembangan Tataruang dan Lingkungan; **Sasarannya:**
 - a) Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Wilayah
 - b) Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang Baik dan Bertanggung Jawab
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum; **Sasarannya**
 - a) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan.
 - b) Terwujudnya Pembangunan Pemukiman dan Perumahan
 - c) Terwujudnya Pembangunan Fasilitas Perkantoran Pemerintah

5.2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026

5.2.1. Visi

Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan H. Khairunas S.IP, M.Si dan Ir. H.Yulian Efi, MM yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan pada tanggal 26 April 2021.

Visi :

MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN MAJU DAN SEJAHTERA

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu:

Penjelasan Visi:

- ❖ **Solok Selatan** : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 47 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan telah ditegaskan oleh beberapa peraturan perundang-undangan tentang penegasan batas wilayah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- ❖ **Solok Selatan Maju**, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang

lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.

- ❖ **Solok Selatan Sejahtera** memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat

5.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 butir sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif

Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang berdaya saing dengan fokus utama adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif berkaitan dengan 3 (tiga) bidang pembangunan yaitu:

1) Bidang Pendidikan

- ❖ Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik TK, SD dan SLTP
- ❖ Beasiswa unggulan daerah untuk perguruan tinggi didalam dan luar negeri
- ❖ Bantuan pengembangan Madrasah, SMA, SMK dan perguruan tinggi
- ❖ Pembangunan satu rumah tahfiz Quran per Jorong
- ❖ Peningkatan kualitas pendidikan non formal

2) Bidang Kesehatan

- ❖ Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan (*total coverage*)
- ❖ Pemberdayaan kader kesehatan melalui posyandu
- ❖ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

3) Bidang Ketenagakerjaan

- ❖ Penciptaan Wirausahawan Baru

2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah

Misi ini menitikberatkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan UMKM, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian dalam menunjang sektor pariwisata.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah, berkaitan dengan bidang ekonomi yaitu:

- ❖ Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi hasil komoditi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan
- ❖ Penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu keluarga
- ❖ Penguatan tata niaga dan informasi pasar
- ❖ Penciptaan wirausahawan baru dan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata.
- ❖ Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berbasis agrowisata, ekowisata dan budaya di setiap nagari
- ❖ Pengelolaan perhutanan sosial dan penurunan status kawasan hutan untuk peningkatan ekonomi

3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, berkaitan dengan bidang pemerintahan yaitu:

- ❖ Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah

- ❖ Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- ❖ Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik
- ❖ Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah
- ❖ Penyediaan kendaraan operasional jorong

4. Pembangunan infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur daerah dan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana).

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, berkaitan dengan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yaitu:

- ❖ Percepatan pembangunan kawasan ibu kota dan kawasan pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan akses perhubungan dan telekomunikasi
- ❖ Peningkatan jalan strategis antar nagari dan kecamatan
- ❖ Pengadaan satu unit ekskavator satu kecamatan
- ❖ Peningkatan kualitas kawasan perumahan (bedah rumah, air bersih, sanitasi dan persampahan)
- ❖ Pelestarian lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana alam dan sosial

5. Pelestarian seni, budaya, olahraga dan penanganan permasalahan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Misi ini menitikberatkan pada beberapa hal yaitu:

- ❖ Pelestarian seni dan budaya daerah terutama dalam mendukung prioritas pariwisata daerah Untuk itu kawasan cagar budaya, koleksi-koleksi budaya dan kepurbakalaan yang amat berharga, serta kesenian terus dilestarikan dengan tujuan diwariskan kepada generasi

berikutnya. Selain itu peningkatan peran dan fungsi kelembagaan lembaga adat kebudayaan dalam kehidupan masyarakat

- ❖ Membudayakan olahraga bagi masyarakat. Selain untuk peningkatan prestasi olahraga titik berat dari misi ini adalah membudayakan olahraga dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan persepsi bahwa olahraga hanya ditujukan untuk peningkatan prestasi, tetapi tujuan utamanya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- ❖ Penanganan permasalahan sosial menitikberatkan pada penanganan masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Penanganan permasalahan sosial tidak lagi hanya dipandang sekedar memberikan bantuan sosial saja, akan tetapi lebih memberdayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat hidup layak dan setara dengan masyarakat lainnya.
- ❖ Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah menitikberatkan pada peningkatan peran nagari, masyarakat (termasuk perantau) dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya dianggap objek dari pembangunan saja tetapi juga dijadikan subjek dalam pembangunan. Hal ini akan mendorong bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu dengan pendanaan yang berasal dari APBD saja, akan tetapi dengan pemanfaatan seluruh potensi yang ada. Pemanfaatan potensi ini dioptimalkan selain melalui peningkatan sinkronsasi perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten dan nagari juga memanfaatkan keterlibatan masyarakat, perantau serta dunia usaha.

Terdapat beberapa program prioritas daerah yang merupakan program unggulan Bupati/Wakil Bupati dalam pencapaian misi daerah Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, berkaitan dengan beberapa bidang yaitu:

1) Bidang Pendidikan dan Olahraga:

- ❖ Penguatan mata pelajaran muatan lokal pada kurikulum SD dan SMP
- ❖ Pelaksanaan event-event olahraga
- ❖ Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap Nagari

2) Bidang Kebudayaan

- ❖ Pelestarian cagar budaya daerah
- ❖ Pelaksanaan event-event seni dan budaya

- ❖ Peningkatan fasilitasi operasional KAN
- 3) Bidang Sosial
 - ❖ Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - ❖ Pemberdayaan zakat dalam pengentasan kemiskinan
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - ❖ Peningkatan peran perantau dalam pembangunan nagari
 - ❖ Peningkatan peran CSR dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

5.3. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dari penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dijabarkan menjadi **7 (tujuh) Tujuan dengan 12 (dua belas) indikator Tujuan dan 14 (empat belas) Sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) indikator Sasaran** yang dirinci pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif										
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,04	69,44	69,83	70,37	70,92	71,47	71,93	71,93
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,39	8,48	8,57	8,66	8,76	8,85	8,85
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,71	12,97	13,08	13,20	13,31	13,43	13,54	13,54
	Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 -15) Hafiz Qur'an									
	a). 1 Juz	Persen	2,47	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	7,50
	b). 2 Juz	Persen	0,32	0,39	0,46	0,56	0,62	0,69	0,76	0,76
	c). Lebih atau sama 3 Juz	Persen	0,36	0,42	0,49	0,56	0,62	0,70	0,80	0,80
Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,81	68,01	68,21	68,41	68,61	68,81	69,01	69,01
	Prevalensi Stunting	Persen	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1	13,7
Sasaran 3 : Meningkatkan Produktifitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta /Tahun	64,81	66,08	68,82	73,20	77,20	82,20	86,27	86,27
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah										
Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,62	5,44	5,38	5,26	5,17	5,03	4,89	4,89
	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,15	7,32	7,20	7,07	6,94	6,81	6,68	6,68
	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,307	0,297	0,295	0,291	0,286	0,280	0,274	0,274
Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,24	2,40	2,79	4,07	4,41	4,52	4,65	4,65

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani										
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	85,00	85,00
Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks SPBE	Indeks	1,70	1,94	2,14	2,34	2,54	2,74	2,94	2,94
	Nilai/Predikat SAKIP	Indeks	54,25 C	60 CC	65 B	70 B	80 BB	85 A	90 A	90 A
	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	n.a	3,04	3,05	3,08	3,10	3,12	3,15	3,15
Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	n.a	2,75	3,3	3,9	4,3	4,6	4,75	4,75
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana										
Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	32	37	40	44	46	51	57	57
Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan	Indeks Ketersedian Infrastruktur Dasar	Indeks	69,16	70,75	72,38	74,30	76,28	78,60	80,55	80,55
	Indeks Kesulitan Geografis (IKG) / Rata-Rata Kab	Indeks	29,43	28,5	26,8	25,1	23,4	21,7	20,00	20,00
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,42
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,72	79,73	79,74	79,75	79,76	79,77	79,78	79,78
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat										
Tujuan 1 : Meningkatnya aktualisasi nilai seni, budaya, olahraga dan kearifan lokal dalam interaksi kehidupan masyarakat	Pertumbuhan jumlah lembaga kesenian	Persen	3,6	10	10	10	10	10	10	95
	Pertumbuhan jumlah klub / perkumpulan olahraga	Persen	0,45	3	5	5	5	5	5	5

Misi/Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sasaran 1 : Meningkatkan peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat	Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kandung)	persen	39,47	47,37	57,89	68,42	78,95	92,11	100,00	100,00
	Persentase lembaga Seni dan Budaya yang aktif	persen	32,25	37,63	43,01	48,39	53,76	59,14	64,52	64,52
Sasaran 2 : Meningkatkan Budaya Berolahraga masyarakat	Persentase klub / perkumpulan olahraga aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Tujuan 2 : Menurunnya Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial	Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	70,28	71,30	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	85,00
Sasaran 1 : Penurunan masyarakat yang mengalami masalah sosial	Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	70,28	71,30	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	85,00
Tujuan 3 : Meningkatkan peran Nagari, masyarakat dan Swasta dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun Persentase	Indeks	0,7133	0,7425	0,7782	0,8125	0,8345	0,8612	0,8855	0,8855
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,05	96,20	96,59	97,15	97,70	98,25	98,70	98,70
	Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	Persen	85	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah	Persentase Nagari Mandiri	Persen	7,63	17,9	21,23	29,78	36,17	42,55	48,94	48,94
Sasaran 2. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,05	96,20	96,59	97,15	97,70	98,25	98,70	98,70
Sasaran 3. Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	na	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5.4. Keterkaitan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat dengan Program Unggulan Kabupaten Solok Selatan

1. Sumbang Sehat dan Cerdas

Terkait dengan Progul Kabupaten Solok Selatan antara lain:

1) Bidang Pendidikan

- ❖ Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik TK, SD dan SLTP
- ❖ Beasiswa unggulan daerah untuk perguruan tinggi didalam dan luar negeri
- ❖ Bantuan pengembangan Madrasah, SMA, SMK dan perguruan tinggi
- ❖ Penguatan mata pelajaran muatan lokal pada kurikulum SD dan SMP
- ❖ Peningkatan kualitas pendidikan non formal

2) Bidang Kesehatan

- ❖ Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan (*total coverage*)
- ❖ Pemberdayaan kader kesehatan melalui posyandu
- ❖ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- ❖ Pelaksanaan event-event olah raga
- ❖ Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap Nagari

2. Sumbang Religius dan Berbudaya

Terkait dengan Progul Kabupaten Solok Selatan antara lain:

- ❖ Pembangunan satu rumah tahfiz Quran per Jorong
- ❖ Pelestarian cagar budaya daerah
- ❖ Pelaksanaan event-event seni dan budaya
- ❖ Peningkatan fasilitasi operasional KAN

3. Sumbang Sejahtera

Terkait dengan Progul Kabupaten Solok Selatan antara lain:

- ❖ Penciptaan Wirausahawan Baru
- ❖ Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi hasil komoditi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan
- ❖ Penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu keluarga
- ❖ Penguatan tata niaga dan informasi pasar
- ❖ Penciptaan wirausahawan baru dan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata.
- ❖ Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berbasis agrowisata, ekowisata dan budaya di setiap nagari
- ❖ Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- ❖ Pemberdayaan zakat dalam pengentasan kemiskinan
- ❖ Pengelolaan perhutanan sosial dan penurunan status kawasan hutan untuk peningkatan ekonomi
- ❖ Peningkatan peran perantau dalam pembangunan nagari
- ❖ Peningkatan peran CSR dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- ❖ Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap Nagari

4. Sumbar Berkeadilan

Terkait dengan Progul Kabupaten Solok Selatan antara lain:

- ❖ Percepatan pembangunan kawasan ibu kota dan kawasan pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan akses perhubungan dan telekomunikasi
- ❖ Peningkatan jalan strategis antar nagari dan kecamatan
- ❖ Pengadaan satu unit ekskavator satu kecamatan
- ❖ Peningkatan kualitas kawasan perumahan (bedah rumah, air bersih, sanitasi dan persampahan)
- ❖ Pelestarian lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana alam dan sosial

5.5. Keterkaitan Visi Misi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 Goals (tujuan) yaitu:

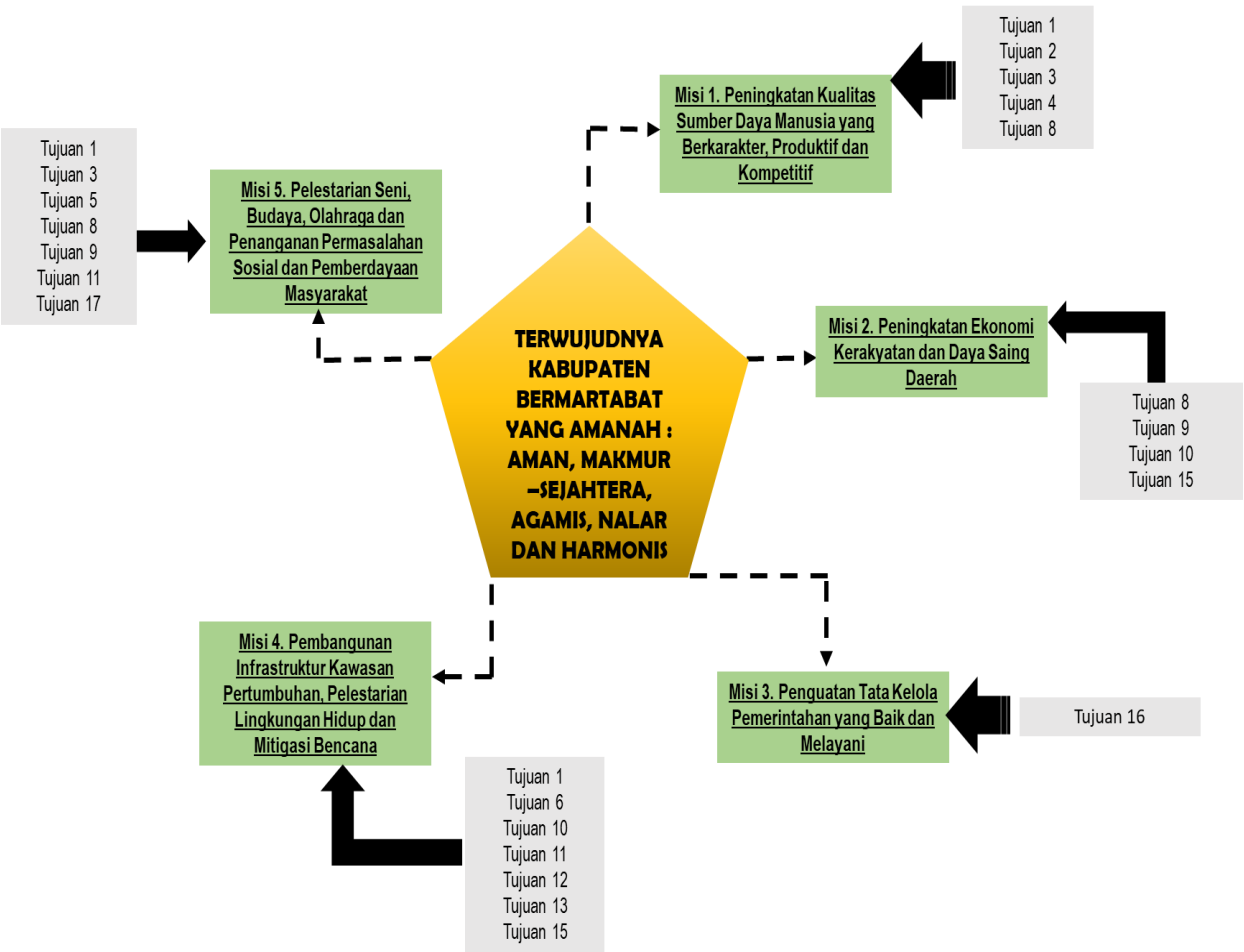
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan),
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan).
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas).
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender).
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak).
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau).
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur).
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan).
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim).
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan).
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan).
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Dari gambar dan tabel dibawah dapat dilihat keterkaitan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Target TPB/SDGs yang telah ditetapkan melalui

Gambar 5.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati dengan Visi Kabupaten Solok Selatan (RPJPD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Tabel 5.2.
Telaahan Visi Misi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)	Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
1	Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif				
	Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif		Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Tujuan 1 Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g) : SS 1.4.1.(h) : SB
				Tujuan 4	Semua indikator
			Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Tujuan 1 Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a) : SB 1.3.1.(b) : SB
				Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk	1.4.1.(b) : SS 1.4.1.(c) : SB 1.4.1.(d) : SB 1.4.1.(e) : SB

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
					keuangan mikro.	
				Tujuan 2	Semua menjadi target	semua indikator
				Tujuan 3	Semua menjadi target	semua indikator
			Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Tujuan 1	Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b) : SB
				Tujuan 8	Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* : NA 8.3.1.(a) : SB 8.3.1.(b) : NA 8.3.1.(c) : SB
					target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* : NA 8.5.2* : SB 8.5.2.(a) : NA
					Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1* : NA
2	Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah					

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
	Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat		Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi daerah	Tujuan 8	Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* : SB 8.1.1.(a) : SB
					Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1.* : NA
					Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* ; SB 8.10.1.(a) : NA 8.10.1.(b) : SS
				Tujuan 8	Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* : SB 8.1.1.(a) : SB
				Tujuan 9	Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1* : NA 9.2.2* : SB

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
					Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1.* : NA 9.3.2* : SB
				Tujuan 10	Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1* : SS 10.1.1.(a) : SS
					Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a) : NA
				Tujuan 15	Target 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a) : SB
3	Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani					
	Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani		Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang	Tujuan 16	Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) : NA

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
			baik dan bersih Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani		Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) : SS 16.6.1.(b) : NA 16.6.1.(c) : SB 16.6.1.(d) : SB
4	Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana					
	Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan		Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan	Tujuan 1	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a) : SB 1.5.1.(e) : NA 1.5.3* : SS
				Tujuan 6	Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a) : SB 6.1.1.(b) : SS 6.1.1.(c) : SB
					Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a) : SS 6.2.1.(b) : SB 6.2.1.(c) : SS 6.2.1.(d) : SS 6.2.1.(e) : SB 6.2.1.(f) : SS
					Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan	6.3.1.(a) : SB 6.3.1.(b) : SB 6.3.2.(b) : SS

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
					kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	
				Tujuan 11	Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a) : SB
					Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a) : SB 11.5.1.(c) : SS
					Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> 2015-2030.	11.b.2* : SS
			Sasaran 2 : Meningkatnya	Tujuan 6; 11; 12; 13;		

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
			kualitas lingkungan hidup	15		
				Tujuan 1	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a) : SB 1.5.1.(e) : NA 1.5.3* : SS
				Tujuan 11	Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a) : SB 11.5.1.(c) : SS
				Tujuan 13	Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1* : SS
5 Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat						
	Tujuan 1 : Terwujudnya Pengelolaan Seni dan Budaya, Olahraga dan Kearifan Lokal dalam interaksi kehidupan masyarakat		Sasaran 1 : Meningkatnya peran adat, seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat	Tujuan 8	Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.91* : NA 8.9.1.(a) : SB 8.9.1.(b) : SB 8.9.1.(c) : NA
				Tujuan 11	Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a) : SS

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
			Sasaran 2 : Meningkatnya budaya berolahraga masyarakat	Tujuan 3		
	Tujuan 2 : Menurunnya Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial		Sasaran 1 : Penurunan masyarakat yang mengalami masalah sosial	Tujuan 1	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b) : SB 1.5.1.(c) : SB
				Tujuan 3	Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.2* : SB 3.4.2.(a) : SS
	Tujuan 3 : Meningkatnya peran Nagari, masyarakat dan Swasta dalam pembangunan		Sasaran 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah	Tujuan 8	Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* : NA 8.3.1. (a) : SB 8.3.1.(b) : NA
				Tujuan 9	Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1* : SB 9.c.1.(a) : SB 9.c.1.(b) : SS

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
				Tujuan 17	Target 17.6. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b) : NA 17.6.2.(c) : SS
					Target 17.8. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1* : SS
			Sasaran 2: Penyetaraan gender dalam pembangunan	Tujuan 5	Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* : SB
					Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* : SS 5.2.1.(a) : SS 5.2.2* : SS 5.2.2.(a) : SS

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
					Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* : SS 5.3.1.(a) : NA 5.3.1.(b) : SB
					Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1* : SB 5.5.2* : SB
			Sasaran 3. Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan	Tujuan 8	Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* : NA
					Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a) : NA
					Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1.* : NA

No	Misi	Sasaran RPJMD (*)		Keterkaitan dengan TPB/SDGs	Target TPB/SDGs	Indikator TPB
				Tujuan 17	Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1* : SS 17.1.1.(a) : SS 17.1.2.* : NA

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 maka diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk masing-masing strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sementara itu Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam merumuskan strategi dana arah kebijakannya Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 selain diharuskan memperhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMD Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, juga diharuskan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV (Tahun 2020-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025.

6.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahap IV Tahun 2020-2025 RPJPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025

Periode Pembangunan Tahun 2021-2026 jika disandingkan dengan penahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan periode RPJMD keempat atau RPJMD terakhir yaitu tahun 2020-2025 dari siklus RPJPD 2005-2025. Pada periode ini diharapkan beberapa capaian dalam pembangunan daerah sudah dapat dilihat manfaat dan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Pada Tahap IV arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada pada bidang-bidang berikut

1. Pembangunan Agama dan Budaya

Kebijakannya:

- a) Teraplikasikannya kehidupan masyarakat berdasarkan sendi-sendi agama dan adat, berhasilnya sosialisasi aturan-aturan agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat
- b) Terlaksananya kelanjutan pendidikan budi pekerti dan akhlak di sekolah dan pendidikan informal dalam keluarga dengan dukungan produk hukum dari lembaga keagamaan dan adat setempat

- c) Terlaksananya kelanjutan penerapannya melalui organisasi sosial dan keagamaan dan masyarakat madani pada umumnya
- d) Terlaksananya fungsi dan peran surau dan mesjid sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dakwah, terlaksananya kelanjutan pembinaan terhadap TPA dan TPSA
- e) Teraplikasikannya produk hukum dan aturan pro masyarakat nagari melalui pendekatan adat dan budaya kepada masyarakat bersama Ninik Mamak
- f) Terlaksananya event-event budaya dengan melibatkan pemuka masyarakat dan lembaga kebudayaan
- g) Terlaksananya peningkatan ketahanan budaya daerah dengan menyusun materi muatan lokal Budaya Alam Minangkabau yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain yang relevan

2. Pembangunan Sistem Hukum, Pemerintahan dan Kewarganegaraan

Kebijakannya:

- a) Terlaksananya kelanjutan pendidikan aparatur pemerintah, sistim rekrutmen yang selektif dan penempatan aparatur yang sesuai dengan bidang ilmunya
- b) Terlaksananya sistim pelayanan satu pintu kepada masyarakat, terwujudnya produk hukum dan aturan tentang pelayanan publik
- c) Terwujudnya produk hukum dan aturan yang mengatur pemerintahan nagari, penerapan dan sosialisasi oleh aparatur nagari kepada masyarakat
- d) Terlaksananya pengembangan sistim pengelolaan keuangan berbasis IT, memperketat penataan keuangan dengan berpedoman pada Perundangundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e) Terlaksananya kelanjutan penataan SKPD dalam penegakan produk hukum daerah serta mensosialisasikan produk-produk hukum kepada masyarakat
- f) Terciptanya program-program sosial kemasyarakatan yang dinamis dan program yang membuat kesamaan sudut pandang masyarakat terhadap kehidupan yang ditentukan oleh hukum, undang-undang dan agama
- g) Melanjutkan peningkatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Solok Selatan baik terhadap aparatur maupun masyarakat

3. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Kebijakannya:

- a) Terpenuhinya kebutuhan jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan serta pengadaan bahan pengajaran yang sesuai kurikulum dalam jumlah yang memadai untuk setiap jenjang pendidikan
- b) Terealisasinya sarana dan prasarana pendidikan serta kebutuhan guru dan siswa sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional
- c) Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, terlaksananya pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis di puskesmas dan RSUD sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan Nasional
- d) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana olahraga disertai tenaga-tenaga keolahragaan baik olahraga pendidikan, olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi, berupa pelatih, instruktur olahraga, wasit dan juri
- e) Terlaksananya peran organisasi sosial dan organisasi perempuan serta sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial pada masyarakat
- f) Terbebaskannya Kabupaten Solok Selatan dari dampak gizi buruk pada masyarakat, antara lain dengan memberikan bantuan gizi tambahan bagi balita dan anak usia sekolah
- g) Terlaksananya kelanjutan pengembangan IPTEK disekolah, penambahan kuantitas dan kualitas peralatan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna untuk disosialisasikan pada masyarakat

4. Pembangunan Perekonomian Daerah

Kebijakannya:

- a) Terlaksananya akses perekonomian pada daerah terisolir serta terbangunnya infrastruktur perekonomian yang berbasiskan ekonomi kerakyatan
- b) Terwujudnya pasar Padang Aro, Pasar Muaro Labuh yang representatif, dan berkembangnya pasar nagari sebagai pusat pertumbuhan baru.
- c) Terlaksananya kelanjutan pembinaan koperasi dan peningkatan produktivitas, terlaksananya program kemitraan dan pemberian modal kerja.
- d) Terlaksananya sistem pelayanan standar dalam izin usaha bagi investor dan terjaminnya keamanan investasi bagi investor.

- e) Melanjutkan terpeliharanya jaringan irigasi yang sudah ada dan melanjutkan terbangunnya irigasi teknis pengganti irigasi desa serta irigasi kawasan tadah hujan
- f) Melanjutkan teraplikasikannya pengetahuan petani tentang kualitas bibit dan produk pertanian dan perkebunan dibawah kontrol lembaga pertanian dan perkebunan
- g) Dilanjutkannya pengembangan kelembagaan usaha bisnis *agro industry* dengan pola kemitraan dan terjaminnya keamanan serta kepastian hukum investasi
- h) Terbinanya secara berkelanjutan sistim pemasaran dan koperasi sebagai mitra petani dan terlaksananya promosi produk secara nasional dan internasional
- i) Terlaksananya tanaman hutan industri pada hutan rakyat di beberapa nagari yang masyarakatnya sudah mampu mengelola

5. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan

Kebijakannya:

- a) Dipertahankannya pengembangan wilayah dengan zona pengembangan yang sesuai dengan RTRW yang sudah ada
- b) Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi lingkungan yang baik kepada masyarakat dan pengusaha dengan melibatkan aparatur pemerintah dan anggota masyarakat
- c) Terlaksananya pengembangan RTRW yang sesuai dengan tuntutan pembangunan selanjutnya
- d) Terlaksananya kelanjutan implementasi pengelolaan kawasan konservasi dalam bersama masyarakat dengan kontrol aparatur pemerintah dan masyarakat

6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

Kebijakannya:

- a) Terlaksananya kelanjutan pelebaran jalan utama, pembukaan jalan baru bagi daerah terisolir dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan lindung
- b) Terlaksananya pembangunan jembatan sesuai dengan kebutuhan ruas jalan yang ada, perbaikan jembatan yang sudah rusak di jalan utama
- c) Terlaksananya penyelesaian pembangunan jalan tembus Kabupaten Solok Selatan-Dharmasraya dan Kambang-Muara Labuh yang sesuai dengan aturan kawasan hutan lindung

- d) Melanjutkan pengembangan pembangunan pemukiman di kawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Aro dan kawasan-kawasan strategis lainnya
- e) Beroperasinya pembangkit listrik tenaga panas bumi pada tingkat optimal sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat sampai ke daerah tetangga
- f) Terlaksananya penataan sumur Bor secara baik, penambahan kapasitas debit air serta jaringan untuk daerah padat pemukiman
- g) terselesaikannya pembangunan seluruh Kantor Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan guna memberikan pelayanan pada masyarakat.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 maka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Solok Selatan Tahun 2021-2026, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan yang berkaitan pencapaian sasaran daerah disepakati untuk dilaksanakan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 6.1.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas penduduk usia sekolah 2. Meningkatkan ketersediaan guru berkualitas 3. Peningkatan ketersediaan Sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan 4. Menciptakan generasi muda yang berkarakter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu memanfaatkan teknologi 2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan 3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis jorong 4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan) 5. Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat terutama untuk penduduk usia sekolah. 6. Peningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik TK, SD dan SLTP (Tunjangan kinerja) 2. Pembangunan satu rumah tahfiz Quran per Jorong 3. Beasiswa unggulan daerah untuk perguruan tinggi didalam dan luar negeri 4. Peningkatan kualitas pendidikan non formal 5. Bantuan pengembangan Madrasah, SMA, SMK dan perguruan tinggi
	Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat 3. Menurunnya prevalensi stunting 4. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan pangan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. 4. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 6. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan (Total coverage) 2. Pemberdayaan kader kesehatan melalui posyandu 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
			7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	
	Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas (kompetensi) tenaga kerja 2. Penciptaan wirausaha baru	1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru 2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja	1. Penciptaan Wirausahawan Baru

Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Peningkatan investasi daerah 2. Peningkatan nilai tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Peningkatan nilai tambah sektor Industri dan UMKM 4. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan 5. Peningkatan sektor pariwisata unggulan daerah 6. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk 7. Mengurangi ketimpangan pendapatan penduduk	1. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan regulasi terkait kegiatan investasi 2. Meningkatkan Investasi 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta daya saing daerah menuju kemandirian daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian , penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta penggunaan teknologi tepat guna 4. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan pertanian, perikanan dan non pertanian. 5. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura peternakan dan perikanan 6. Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna 7. Mensinergikan pengelolaan pertanian dan	1. Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi hasil komoditi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu keluarga 3. Penguatan tata niaga dan informasi pasar 4. Penciptaan wirausahawan baru dan peningkatan daya saing UMKM yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata. 5. Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berbasis agrowisata, ekowisata dan budaya di setiap nagari 6. Pengelolaan perhutanan

Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
			peternakan 8. Integrasi program pertanian, peternakan perkebunan perikanan dan industrialisasi hasil pertanian 9. Mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan serta pemasaran produk berbasis teknologi infomasi 10. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku UMKM dalam perluasan pasar 11. Meningkatkan konektifitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 12. Pengembangan ekonomi kreatif 13. Pengembangan destinasi wisata yang memiliki differensiasi sesuai potensi daerah 14. Fasilitasi perluasan kawasan budidaya dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (distribusi lahan)	sosial dan penurunan status kawasan hutan untuk peningkatan ekonomi

Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Memperkuat kelembagaan dan tata laksana yang berbasis kinerja dengan prinsip efisiensi 2. Meningkatkan Profesionalisme ASN 3. Menerapkan Pola	1. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi 2. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 3. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan manajemen pemerintah dalam pembangunan daerah 2. Peningkatan iniovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik

Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Manajemen ASN berbasis Merit Sistem 4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Meningkatkan Sistem (Pengawasan yang professional dan Sinergis) / Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas korupsi	4. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif 5. Meningkatkan manajemen kinerja ASN 6. Menyusun perencanaan dan pengadaan ASN berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja 7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool 8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif 9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaporan 11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa 12. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah 13. Meningkatkan kapabilitas APIP 14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
	Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. Menyusun kebijakan pelayanan publik 2. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan 3. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus 4. Menciptakan inovasi pelayanan publik	1. Peningkatan manajemen pemerintahan terpercaya, cepat, tepat dan tanggap 2. Perkuatan peran pemerintah kecamatan dan percepatan kemandirian nagari dalam pembangunan daerah.

Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
		3. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat	5. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	3. Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik 5. Penyediaan kendaraan operasional jorong 6. Peningkatan inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi

Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan	Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan	1. Percepatan pembangunan kawasan Ibukota kabupaten dan kawasan pertumbuhan 2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah untuk menunjang perekonomian dan pelayanan publik 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat 4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perekonomian, pelayanan publik dan mitigasi bencana	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi 3. Meningkatkan kinerja PDAM dalam peningkatan layanan kepada masyarakat 4. Meningkatkan akses air minum layak dan sanitasi layak berbasis masyarakat 5. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau 6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) 7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana	1. Percepatan pembangunan kawasan ibukota dan kawasan pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan akses perhubungan dan telekomunikasi 2. Peningkatan jalan strategis antar nagari dan kecamatan 3. Pengadaan satu unit ekskavator satu kecamatan 4. Peningkatan layanan air bersih serta peningkatan akses sanitasi dan peningkatan kualitas hunian masyarakat (Bedah Rumah) 5. Penguatan mitigasi alam dan sosial (termasuk penanganan Covid 19) 6. Normalisasi sungai dan revitalisasi daerah irigasi

Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
				7. Pengadaan satu unit ekskavator satu kecamatan
Tujuan 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan 3. Peningkatan cakupan layanan persampahan yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle)	1. Pelestarian lingkungan hidup 2. Peningkatan Pengelolaan persampahan

Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1 : Meningkatnya aktualisasi nilai seni, budaya, olahraga dan kearifan lokal dalam interaksi kehidupan masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat	1. Pengembangan dan Pembinaan kesenian tradisional, budaya dan kearifan lokal masyarakat. 2. Penguatan kelembagaan adat dan budaya.	1. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 2. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 3. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat	1. Pelaksanaan festival seni dan budaya 2. Pelestarian kawasan cagar budaya daerah 3. Penguatan pelajaran muatan lokal pada kurikulum SD dan SLTP 4. Fasilitasi Operasional KAN
	Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Berolahraga masyarakat	1. Peningkatan dan pembinaan olahraga berbasis sekolah dan masyarakat	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas	1. Pelaksanaan event-event olah raga 2. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap Nagari

Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
			sarana prasarana olahraga	
Tujuan 2 : Menurunnya Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial	Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Peningkatan penanganan PPKS	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial / PMKS (jompo, difabel, korban bencana alam, anak terlantar, komunitas adat terpencil) 2. Pemberdayaan zakat dalam pengentasan kemiskinan
Tujuan 3 : Meningkatnya peran Nagari, masyarakat dan Swasta dalam pembangunan	Sasaran 1. Peningkatan peran Pemerintah Nagari dan Masyarakat dalam pembangunan daerah	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nagari dan daerah 2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	1. Peningkatan peran perantau dalam pembangunan nagari
	Sasaran 2. Meningkatnya kesetaraan Gender dalam pembangunan	1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pemerintah	1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 3. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan	
	Sasaran 3. Peningkatan partisipasi swasta dan perusahaan	1. Meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah	1. Menjalinkan koordinasi dan yang antara pemerintah dan swasta terkait dengan pembangunan daerah 2. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan,	1. Peningkatan peran CSR dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Unggulan
	dalam pembangunan		pegawasan dan pelaksanaan pembangunan	

Tabel. 6.2.

Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif					
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					
1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu memanfaatkan teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pemanfaatan teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pemanfaatan teknologi teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui pemanfaatan teknologi	1. Meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui teknologi
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan	2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan
3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis jorong	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah dan masyarakat	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat dan jorong	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat dan jorong	3. Pengembangan rumah tahfiz berbasis sekolah, masyarakat dan jorong
4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)	4. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan dan kecakapan hidup (keterampilan)
5. Pengembangan budaya literasi dan gemar membaca khususnya penduduk usia sekolah.	5. Pengembangan budaya literasi dan gemar membaca khususnya penduduk usia sekolah.	5. Pengembangan budaya literasi dan kelompok literasi penduduk usia sekolah.	5. Pengembangan budaya literasi dan kelompok literasi penduduk usia sekolah.	5. Peningkatan sarana pendidikan yang berkualitas	5. Pengembangan budaya literasi dan gemar membaca khususnya penduduk usia sekolah.
6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana	6. Peningkatan ketersediaan sarana	6. Peningkatan sekolah	6. Peningkatan sekolah	6. Peningkatan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	pendidikan yang berkualitas 7. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional	dan prasarana pendidikan yang berkualitas 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan 8. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional	6. Peningkatan sekolah penggerak 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan 8. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional	penggerak 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan	ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 5. Meningkatkan pemberdayaan	1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 5. Meningkatkan	1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 4. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi wanita produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam	1. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 2. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 4. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam	1. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan	1. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan 3. Meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan bagi produktif, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 6. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 7. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkualitas	pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 6. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan 7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 6. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	berprilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 6. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 7. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas 8. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (on call) di tingkat nagari	upaya kesehatan berbasis masyarakat 5. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 6. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas 7. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 8. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (on call) di tingkat nagari	upaya kesehatan berbasis masyarakat 5. Mengoptimalkan preventif, promotif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat 6. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas 7. Meningkatkan standarisasi dan kompetensi tenaga kesehatan 8. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (on call) di tingkat nagari
Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja					
1. Melakukan identifikasi dan pendataan link match kebutuhan pasar kerja 2. Menyusun regulasi perlindungan tenaga kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru 2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru 2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru 2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru 2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja untuk menumbuhkan wirausahawan baru 2. Meningkatkan jaminan serta perlindungan hak-hak tenaga kerja
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah					
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah					
1. Menyusun regulasi penanaman modal dan perizinan yang	1. Melakukan sosialisasi regulasi penanaman modal	1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan	1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan	1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan	1. Menjaga iklim investasi yang baik dan kenyamanan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>medukung iklim investasi</p> <p>2. Meningkatkan kepastian penggunaan lahan dan penerapan LP2B</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Membentuk pusat pembibitan sapi dan revitalisasi balai benih induk</p> <p>6. Mendorong terbentuknya komisi pengawasan terhadap pupuk bersubsidi</p> <p>7. Memberikan ransangan bangkitnya UMKM yang mengolah komoditi unggulan lokal</p> <p>8. Menyusun regulasi pemanfaatan produk lokal</p> <p>9. Melakukan sosialisasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>10. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-Commerce)</p> <p>11. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-</p>	<p>dan meningkatkan kemudahan mengurus perizinan</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Meningkatkan produksi bibit dan perbaikan kualitas</p> <p>6. Mendorong aktifnya pengawasan terhadap pupuk bersubsidi</p> <p>7. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>8. Mmeningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>9. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Meningkatkan kualitas bibit dari penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-</p>	<p>berusaha</p> <p>2. Meningkatkan Produksi dan produktifitas pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi penyuluh dan optimalisasi pemberdayaan</p> <p>4. Mendorong tumbuhnya penangkar lokal sesuai komoditi unggulan</p> <p>5. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi</p> <p>6. Meningkatkan fasilitasi dan peningkatan kualitas produk UMKM</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan produk lokal melalui system PBJ dan keg pemerintahan</p> <p>8. Meningkatkan implementasi program integrasi ternak dan pertanian</p> <p>9. Melakukan kerja sama dengan platform digital (e-</p>

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
comerce 12. Memfasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 13. Menyusun regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif 14. Mendorong aktifnya pokdarwis 15. Mendorong dan memfasilitasi kelembagaan pemanfaatan perhutanan sosial	10. Meningkatkan kerja sama dengan platform digital (e-Commerce) 11. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 12. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 13. Mengembangkan ekonomi kreatif 14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 15. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	Comerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Mengembangkan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	platform digital (e-Commerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Menyusun regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	platform digital (e-Commerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Mengembangkan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan sosial	Comerce) 10. Melakukan pelatihan dan kapasitas pelaku UMK terhadap platform e-commerce 11. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar 12. Mengembangkan ekonomi kreatif 13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata 14. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan pemanfaatan perhutanan
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani					
Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih					
1. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi 2. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	1. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi 2. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan	1. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju	1. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 2. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan	1. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 2. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan	1. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) 2. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	berbasis elektronik	profesionalisme	pelaporan	pelaporan	pelaporan
4. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	3. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	2. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi	3. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	3. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	3. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa
5. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	4. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	3. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	4. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah	4. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah	4. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah
6. Menyusun perencanaan dan pengadaan ASN berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja	5. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	4. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	5. Meningkatkan kapabilitas APIP	5. Meningkatkan kapabilitas APIP	5. Meningkatkan kapabilitas APIP
7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool	6. Menyusun perencanaan dan pengadaan ASN berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban kerja	5. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	6. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	6. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	6. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif	7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool	6. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	7. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi	7. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi	7. Melaksanakan pembinaan perangkat daerah terhadap struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi
9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)	8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif	7. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool	8. Menciptakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	8. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	8. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi
10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaporan	9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP)	8. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif	9. Menciptakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi	9. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	9. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif
11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan,	9. Melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian internal pemerintah	10. Peningkatan kualifikasi bagi ASN melalui model pengembangan kompetensi yang inovatif	10. Meningkatkan manajemen kinerja ASN	10. Meningkatkan manajemen kinerja ASN
12. Perbaiki manajemen				11. Membangun pola	11. Membangun sistem

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>pengelolaan barang milik daerah</p> <p>13. Meningkatkan kapabilitas APIP</p> <p>14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</p>	<p>penganggaran dan pelaporan</p> <p>11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>12. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah</p> <p>13. Meningkatkan kapabilitas APIP</p> <p>14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</p>	<p>(SPIP)</p> <p>10. Melakukan peningkatan kualitas terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaporan</p> <p>11. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>12. Perbaiki manajemen pengelolaan barang milik daerah</p> <p>13. Meningkatkan kapabilitas APIP</p> <p>14. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</p>	<p>11. Meningkatkan majanemen kinerja ASN</p> <p>12. Membangun pola karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool</p> <p>13. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif</p>	<p>karier ASN berdasarkan Rencana Suksesi dan Talent Pool</p> <p>12. Membangun sistem reward dan punishment yang objektif</p>	<p>reward dan punishment yang objektif</p>
Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani					
<p>1. Menyusun kebijakan pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>3. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>4. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Menyusun kebijakan pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>2. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>3. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>3. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan</p> <p>2. Menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk untuk yang masyarakat berkebutuhan khusus</p> <p>3. Menciptakan inovasi pelayanan publik</p>

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menciptakan inovasi pelayanan publik 5. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	3. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik	4. Menyediakan media konsultasi dan pengaduan publik
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana					
Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan					
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan , nagari 3. Meningkatkan kinerja PDAM dalam peningkatan layanan kepada masyarakat 4. Meningkatkan akses air minum layak dan sanitasi layak berbasis masyarakat 5. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau 6. Penguatan mitigasi bencana dalam	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari 3. Meningkatkan kualitas layanan air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum layak dan sanitasi layak berbasis masyarakat 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro dan Muara Labuh 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Meningkatkan kualitas layanan air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Ibu Kota Padang Aro dan Muara Labuh 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Perluasan jaringan dan layanan Air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Lubuak Malako dan Abai 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Perluasan jaringan dan layanan Air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan pusat pemerintahan, perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Lubuak Malako dan Abai 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi antar Kecamatan dan nagari dan pusat pertumbuhan 3. Perluasan jaringan dan layanan Air bersih PDAM 4. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak 5. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) dan penanganan pasca bencana</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan) dan penanganan pasca bencana</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>	<p>Huni</p> <p>6. Penguatan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana (alam, sosial dan kesehatan)</p> <p>7. Peningkatan peran serta masyarakat mulai dari mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana</p>
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
<p>1. Penyusunan dan sosialisasi regulasi lingkungan hidup</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran utama pada peningkatan kualitas Air</p> <p>2. Menerapkan pembangunan berbasis pola ruang dan ramah lingkungan</p> <p>3. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pengurangan sampah yang memenuhi prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) melalui pemberdayaan masyarakat</p>

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat					
Sasaran 1 : Meningkatnya peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat					
1. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 2. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 3. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat	1. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 2. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 3. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Mendorong pengembangan klub kesenian lokal	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Mendorong pengembangan klub kesenian local	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Menggali dan melestarikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa 4. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Mendorong keaktifan klub kesenian lokal	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 4. Mendorong keaktifan klub kesenian lokal	1. Integrasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah 2. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal 3. Penguatan peran tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai) dalam kehidupan sosial masyarakat 4. Mendorong prestasi klub kesenian lokal
Sasaran 2 : Meningkatnya Budaya Berolahraga masyarakat					
1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah	1. Membudayakan dan mengembangkan olah raga berbasis masyarakat dan rekreasi 2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi berdasarkan cabang unggulan dan potensi daerah

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong perkembangan klub olahraga berbasis masyarakat	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong perkembangan klub olahraga berbasis masyarakat	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong keaktifan klub olahraga melalui kompetisi antar klub	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong keaktifan klub olahraga melalui kompetisi antar klub	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga 4. Mendorong prestasi olahraga
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Melakukan pemutakhiran data PPKS 3. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3. Mengupayakan pendanaan untuk panti melalui sektor swasta secara berkelanjutan	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat 2. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Sasaran 1. Peningkatan peran Pemerintah Nagari dan Masyarakat dalam pembangunan daerah					
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat termasuk	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi dana desa/nagari dan alokasi dana desa/nagari 2. Meningkatkan peran serta dan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku	keterlibatan masyarakat termasuk perantau dalam pembangunan 3. Menganggarkan kewajiban pemerintah daerah kepada Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku
Sasaran 2. Meningkatnya kesetaraan Gender dalam pembangunan					
1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 3. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan	1. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan 2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 4. Mewujudkan Solok Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan 2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 4. Mewujudkan Solok Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan responsif gender dalam pembangunan 2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	1. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Sasaran 3. Peningkatan partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan					
1. Menjalin koordinasi dan yang antara pemerintah dan swasta terkait dengan pembangunan daerah 2. Melibatkan pihak swasta/perusahaan	1. Menjalin koordinasi dan yang antara pemerintah dan swasta terkait dengan pembangunan daerah	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	1. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	2. Melibatkan pihak swasta/perusahaan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah	2. Mensinergikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan program Prioritas Pemerintah Daerah

6.3. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang merupakan instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah dirumuskan dari misi, sasaran dan strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih sesuai dengan Tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.3

**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026**

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan				148.731		176.896		144.057		144.713		149.448		150.486		914.331	
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,04	69,44	148.731	69,83	176.896	70,37	144.057	70,92	144.713	71,47	149.448	71,93	150.486	71,93	914.331	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,28	8,39	62.332	8,48	79.518	8,57	50.993	8,66	50.160	8,76	51.000	8,85	51.250	8,85	345.253	
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,71	12,97		13,08		13,20		13,31		13,43		13,54		13,54		
	Persentase Penduduk Usia Sekolah Hafiz Qur'an																
	a). 1 Juz	2,47	3,33		4,17		5,00		5,83		6,67		7,50		7,50		
	b). 2 Juz	0,32	0,39		0,46		0,56		0,62		0,69		0,76		0,76		
	c). Lebih atau sama 3 Juz	0,36	0,42		0,49		0,56		0,62		0,70		0,80		0,80		
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	55,88	57,25	57.702	59,68	62.893	63,48	43.393	67,28	42.560	72,28	43.000	75	43.000	75	292.548	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	APK SD/MI	115,50	100		100		102,25		105,75		108,35		110		110		
	APK SMP/MTs	90,33	100		100		100		100		100		100		100		
	APM SD/MI	99,20	99,30		99,50		99,75		100		100		100		100		
	APM SMP/MTs	76,90	77,00		77,25		80,75		82,35		84,35		85		85		
	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	96,71	97,13		98,25		99,15		99,75		100		100		100		
	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	99,11	99,50		99,75		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP)	7,26	8,75	-	11,17	-	19,55	200	27,93	200	33,52	200	39,11	200	39,11	800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik :			-		-		300		300		300		400		1.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	SD/MI	91,94	92,00		93,65		94,35		95,25		96,15		97		97		
	SMP/MTs	95,54	96,25		96,00		96,75		97,00		97,75		98		98		
	Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat	91,67	92,75		91,67		95,75		100,00		100,00		100		100		
	Persentase Pengawas yang bersertifikat	46,43	50,25		46,43		75,25		80,25		100,00		100		100		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100	100	4.358	100	6.530	100	6.500	100	6.500	100	6.900	100	7.000	100	37.788	Sekretariat Daerah
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan (pustaka konvensional dan digital)	2501	2700	272	2800	10.095	3500	600	3700	600	3900	600	4100	650	20700	12.817	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun) (IKU)	67,81	68,01	85.377	68,21	95.118	68,41	91.489	68,61	92.942	68,81	96.823	69,01	97.581	69,01	559.330	
	Pravelensi Stunting	13,7	13,6		13,5		13,4		13,3		13,2		13,1		13,1		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna	26,67	26,67	13.284	53,33	49.887	80,00	50.387	100	50.500	100	52.500	100	53.000	100	269.558	RSUD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :			66.114		38.854		34.854		36.000		37.700		37.700		251.222	Dinas Kesehatan
	kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27		26		25		24		23		22		22		
	prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0,12		0,11		0,1		0,09		0,08		0,07		0,07		
	kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16		21,8		21,48		21,14		20,80		20,46		20,46		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
	Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4,6		4,5		4,4		4,3		4,2		4,1		4,1		
	rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37		14,24		13,11		11,98		10,85		10,85				
	API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01				
	Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07		19,73		19,39		19,05		18,39		18,05				
	Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01				
	Persentase balita kurang gizi	6,6	6,5		6,4		6,3		6,2		6,1		6				
	Persentase balita stunting	13,7	13,6		13,5		13,4		13,3		13,2		13,1		13,1		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	20	23	333	25	50	32	50	39	50	45	50	50	60	50	593	Dinas Kesehatan
Program Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum	Persentase ketersediaan Farmasi	95	97	777	98	2.530	98,5	2.500	99	2.500	100	2.500	100	2.500	100	13.307	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan alkes	60	61		62		63		65		67		69				
	Cakupan pengawasan PIRT	85	90		91		92		93		94		95		95		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga menerapkan standar PHBS	74,92	75	418	77	50	79	50	81	50	83	50	85	60	87	678	Dinas Kesehatan
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan akseptor KB aktif	81,65	81,75	3.177	81,95	2.471	82,25	2.200	82,40	2.200	82,75	2.200	83,25	2.200	83,25	14.448	DP2KB, PP&PA
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	28,33	30,40	100	32,50	131	35,10	120	37,30	150	39,60	150	41,20	200	41,20	851	DP2KB, PP&PA
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase nagari yang memiliki infrastruktur kemandirian pangan	2,00	2,00	519	22,00	50	21,00	85,71	26,00	88	34,00	90	43,00	92	43,00	924	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	77	77	483	78	765	79	915	83	1.070	85	1.240	86	1.419	86	5.892	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase nagari rawan pangan yang ditangani	100	100	171	100	230	100	225	100	230	100	235	100	241	100	1.333	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase temuan pelaku usaha menggunakan zat berbahaya (per 100 sampel)	-	-	-	10,00	100	8,00	102	6,00	105	4,00	107	2,00	110	2,00	524	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sasaran 3 : Meningkatkan Produktifitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	64,81	66,08	1.023	68,82	2.260	73,20	1.575	77,20	1.611	82,20	1.625	86,27	1.655	86,27	9.749	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau	na	40,00	496	40,00	1.105	45,00	800	50,00	821	60,00	825	65,00	850	65,00	4.897	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	19,62	19,82	32	19,82	40	20,82	75	21,62	90	22,82	100	23,82	105	23,82	442	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan tindaklanjut penyelesaian Hubungan	100,00	100,00	50	100,00	60	100,00	200	100,00	200	100,00	200	100,00	200	100,00	910	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda	1600	1660	445	1715	1.055	1750	500	1780	500	1810	500	1850	500	1850	3.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah			24.105		21.878		28.931		38.196		34.454		36.835		184.399		
Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,62	5,44	24.105	5,38	21.878	5,26	28.931	5,17	38.196	5,03	34.454	4,89	36.835	4,89	184.399	
	Persentase Penduduk Miskin	7,47	7,32		7,2		7,07		6,94		6,81		6,68				
	Indeks Gini Ratio	0,299	0,297		0,295		0,291		0,286		0,28		0,274		0,274		
Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	-1,24	2,4	24.105	2,79	21.878	4,07	28.931	4,41	38.196	4,52	34.454	4,65	36.835	4,65	184.399	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha	16,52	18,26	27	20,00	30	21,74	31	23,48	31	25,22	32	26,96	32	26,96	183	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	133,66	0,1	106	1,02	495	0,51	269	0,50	270	0,50	271	0,25	272	0,25	1.683	Dinas Perindagkop dan UMKM

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat	
			2021		2022		2023		2024		2025		2026					
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)		
Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha	0,07	0,1	159	0,15	117	0,15	120	0,15	121	0,15	122	0,15	123	0,85	762	Dinas Perindagkop dan UMKM	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan yang mendukung penanaman modal	1	2	66	0	-	1	30	1	31	1	32	1	33	6	192	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat	1	1	80	2	50	3	50	4	50	5	50	5	50	20	330	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin dan non Perizinan yang diterbitkan	1000	1000	498	1100	306	1200	300	1200	300	1250	301	1250	303	7000	2.008	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	1661	1991	2.038	2159	1.035	2343	1.859	2542	2.720	3595	3.620	2758	4.523		15.795	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS Perairan Umum	21	23	-	25	-	27	200	29	205	31	209	33	214	565	828	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Tingkat Konsumsi Ikan	31,58	31,58	137	32,10	75	32,60	77	33,40	78	34,20	80	35,00	82	35	530	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Jumlah Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	5	11		11		15		17		18		19		19			
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	10	11	861	12	900	13	912	14	2.133	15	2.182	15	3.232	15	10.219	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang Dipasarkan	10	11	300	12	275	13	250	14	256	15	262	15	268	90	1.610	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ruang Kreatif Yang Dikelola	0	0	0	0	0	1	150	1	153	2	300	2	154	2	757	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Objek Wisata yang Dikelola Oleh Pokdarwis	35,00	37	167	38	90	43	412	50	422	57	731	62	748	62	2.569	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi hasil			4.997		11.697		14.281		22.565		18.082		18.775		90.397	Dinas Pertanian	
	Padi (Ton)	142.581	100.072		105.136		110.362		115.755		121.320		127.061		822.287			
	Jagung (Ton)	82.909	86.259		89.743		93.369		113.239		120.924		120.924		707.367			
	Kacang tanah (Ton)	757	772		787		803		819		836		853		5.627			
	Manggis (Ton)	898,9	448		456		464		472		480		480		3.699			
	Cabe (Ton)	5.281	7.026		7.149		7.274		7.401		7.530		7.530		49.191			
	Bawang merah (Ton)	4.318	4.305		4.387		4.474		4.564		4.655		4.655		31.358			
	Kelapa Sawit (Ton)	52.654	52.654		56.866		61.416		66.943		72.968		72.968		436.469			
	Kopi (Ton)	2.754	3.139		3.319		3.502		3.678		3.862		3.862		74.016			
	Porang (Ton)	na	150		165		182		200		220		242		1.159			
	Durian (Ton)	28,24	30		31		33		34		36		38		202			
	Kapulaga (Ton)	5.337	5.364		5.391		5.417		5.688		5.973		6.271		34.104			
	Populasi ternak besar (Ekor)	18.962	19.815		20.905		22.263		23.688		25.010		26.136		26.136			
	Telur (Kg)	4.173,83	434,24		442,93		451,78		460,82		470,03		470,03		6.904			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian/Ha/Tahun			2.586		1.230		1.246		1.275		1.304		1.334		8.975	Dinas Pertanian
		Padi	5,44	5,10		5,25		5,41		5,56		5,71		5,87		5,87		
		Jagung	5,25	5,35		5,46		5,57		5,68		5,80		5,91		5,91		
Kacang tanah		1,61	1,63		1,64		1,66		1,68		1,69		1,71		1,71			
Kelapa Sawit (ton/tahun)		16,7	16,9		17,3		17,8		18,2		18,70		19,20		19,20			
Kopi		2,07	2,07		2,07		2,18		2,29		2,4		2,52		2,52			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan penanggulangann kasus penyakit menular hewan (%)	100	100,0	196	100	563	100	540	100	552	100	565	100	578	100	2.994	Dinas Pertanian	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan penanggulangan bencana pertanian (hama)	100	100	99	100	60	100	61	100	62	100	64	100	65	100	411	Dinas Pertanian	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100	100	42	100	100	100	102	100	105	100	107	100	110	100	566	Dinas Pertanian	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase ketersediaan penyuluh	57,43	50,88	1.763	64,04	1.070	77,19	1.290	90,35	1.526	94,74	1.771	100	2.028	100	9.447	Dinas Pertanian	
	Persentase peningkatan kelas Kelompok Tani																	
	a. Pemula	86,16	73,04		81,18		76,0647		73,6476		69,0108		833		833			
	b. Lanjut	13,15	24,20		17,80		22,6576		24,88408		29,2117		435		435			

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
	c. Madya	0,69	2,61		0,94		1,1925		1,313756		1,62287		23		23		
	d. Utama	0	0,15		0,09		0,08518		0,15456		0,15456		3		3		
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan yang memiliki Izin	71	71	-	74,00	70	77,00	71,00	85,00	85	89,00	90	89,00	95	89,00	411	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemamfaatan sarana Sarana Distribusi Perdagangan	41,3	51	458	70,46	2.335	80,17	810	85,03	810	87,46	820	89,89	800	89,89	6.033	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu	na	12-15	112	12-15	305	11-14	312	10-13	313	10-13	315	10-13	320	10-13	1.677	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan usaha bertanda tera sah yang berlaku	43,30	44	45	45,00	265	48,00	1.771	50,00	1.273	50,00	775	52,00	279	52,00	4.408	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (lokal)	na	28	-	44	100	56	100	78	101	83	102	89	103	89	506	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dikembangkan	4	4	9.333	4	579	4	3.575	4	2.580	4	2.084	4	2.127	4	20.277	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	22,22	55,56	35											55,56	35	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	22,22	55,56		100	131	100	113	100	180	100	183	100	188	100	795	Dinas Perindagkop dan UMKM
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani				20.606		23.532		23.978		24.845		27.668		28.850		149.478	
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	60	64	20.606	68	23.532	72	23.978	76	24.845	80	27.668	85	28.850	85	149.478	
Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih	Indek SPBE	1,7	1,94	20.003	2,14	20.558	2,34	21.198	2,54	21.955	2,74	24.583	2,94	25.630	2,94	133.926	
	Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP								
	Nilai SAKIP	54,24 (CC)	60 (CC)		66 (B)		70 (B)		75 (B)		83 (A)		85 (A)				
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	na	3,04		3,05		3,08		3,10		3,12		3,15				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	119	100	254	100	290	100	310	100	350	100	365	100	1.688	Kecamatan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang memiliki akses pemanfaatan data kependudukan	0	24	-	48	170	72	100	100	100	100	110	100	121	100	601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	n.a	82	1.379	84	1.012	86	1.000	88	1.050	89	2.500	90	1.600	90	8.541	Bappeda
	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	100	100		100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	837	100	1.137	100	1.050	100	1.100	100	1.500	100	1.400	100	7.024	Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	n.a	80		82		84		86		88		90		90		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	0	0	68	20	150	30	300	40	300	50	300	60	300	60	1.418	Bappeda
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda	41,67	100	9.325	100	10.113	100	10.200	100	10.650	100	11.000	100	12.000	100	63.288	Sekretariat DPRD
	Jumlah Perda inisiatif yang diterbitkan	1	1		1		1		1		1		1		6		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	n.a	3,04	320	3,05	350	3,08	380	3,10	410	3,12	440	3,15	470	3,15	2.370	Bagian Pem Otoda / Bagian Hukum Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	II+	II+	1.129	II+	645	III	1.100	III	1.100	III	1.200	III	1.859	III	7.033	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas SPIP	2,6	2,6	202	2,6	205	2,8	150	3	180	3,1	200	3,2	450	3,3	1.387	Inspektorat
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	154	176	1.968	226	1.745	250	1.745	300	1.800	325	1.900	325	1.900	80	11.058	BKPSDM
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	7,65	10	1.107	13	1.430	15	1.450	20	1.500	22	1.500	25	1.500	25	8.487	BKPSDM
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	60	70	1.380	80	1.010	90	1.033	100	1.030	100	1.075	100	1.100	100	6.628	Dinas Komuikasi dan Informatika
Program Aplikasi informatika	Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi	84,4%	87	1977	89,6	2.199	92,2	2.250	94,8	2.275	97	2.350	100	2.400	100	13.451	Dinas Komuikasi dan Informatika
	Persentase penanganan terhadap gangguan cyber	0%	100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola	73,96	100	158	100	100	100	100	100	100	105	100	110	100	673	Dinas Komuikasi dan Informatika	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi daerah	100	100	33	100	38	100	50	100	50	100	53	100	55	100	278	Dinas Komuikasi dan Informatika
Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani	Indek Pelayanan Publik	na	2,75	603	3,3	2.974	3,9	2.780	4,3	2.890	4,6	3.085	4,75	3.220	4,75	15.552	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN yang diselenggarakan	100	100	175	100	370	100	385	100	385	100	430	100	450	100	2.195	Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat	100	100	364	100	679	100	695	100	705	100	755	100	770	100	3.968	Kecamatan
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase rumah tangga yang memiliki KK	92,66	94	49	95	1.662	98	1.500	100	1.600	100	1.700	100	1.800	100	8.311	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	88,93	100		100		100		100		100		100		100		
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	20	30		40		50		60		75		85		85		
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85,94	95	15	97,5	263	100	200	100	200	100	200	100	200	100	1.078	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup				117.449		125.321		153.967		137.043		156.123		159.816		849.719	
Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Mendukung Kawasan Pertumbuhan	Indeks Infrastruktur Wilayah	32	37	110.407	40	121.771	44	150.294	46	133.058	51	152.252	57	155.817	57	823.598	
Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat dan kewilayahan	Indeks Ketersedian Infrastruktur dasar	69,16	70,75	110.407	72,38	121.771	74,3	150.294	76,28	133.058	78,6	152.252	80,66	155.817	80,66	823.598	
	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	29,43	28,5		26,8		25,1		23,4		21,7		20,0				
	Indek Ketahanan Daerah	0,3	0,32		0,34		0,36		0,38		0,40		0,42		0,42		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten	25	30	11.690	35	3.305	40	9.550	45	9.738	50	10.100	55	10.278	55	54.661	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	25,69	27,05		28,09		29,13		30,17		31,21		32,25	-	32,25		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses air minum layak	77,04	-	-	80,05	8.430	82,50	8.800	85	8.982	88,50	9.300	90	9.533	90	45.045	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses sanitasi layak	59,17	-	-	61,97	3.090	63,27	3.575	64,47	3.652	66,37	3.800	68,17	3.931	68,17	18.048	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik	NA	30	1.280	32	8.018	36	7.675	38	7.700	40	7.900	50	8.000	50	40.573	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	0	1,25	1.543	2,50	16.175	3,75	16.800	2,50	2.000	2,50	17.310	2,50	17.715	15,00	71.543	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	41,54	44,09	47.796	45,29	60.205	46,49	78.139	47,69	74.772	48,89	78.550	50,09	80.246	50,09	419.708	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
	Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	78,26	79		80		82	-	85	-	88	-	90	-	90		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	0	0	0	100	40	100	40	100	42	100	43	100	44	100	208	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,73	100	318	100	325	100	300	100	325	100	330	100	350	100	1.948	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses air minum layak	77,04	78	6.087												6.087	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan LH
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses sanitasi layak	59,17	60,47	2.100												2.100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan LH
Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten	100	100	4	100	580	100	500	100	500	100	550	100	575	100	2.709	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100	100	1.303	100	1.060	100	2.050	100	2.101	100	2.350	100	2.528	100	11.391	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	90,73	0	0	91,25	400	91,5	350,0	91,75	357	92	400	92,25	425	92,25	1.932	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	1,25	1,25	8.862	1,25	10.583	1,25	10.826	1,25	11.000	1,25	11.330	1,25	11.590	8,75	64.190	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketersediaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten	0	30%	498	100%	15	100%	15	100%	20	100%	20	100%	25	100%	593	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	capaian waktu tanggap (response time)	53,85	54,85	1.558	55,85	1.200	56,85	3.200	57,85	3.200	59,85	1.400	61,85	1.400	61,85	11.958	Pol PP Damkar
Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi	35	35	1.804	36	2.125	37	2.174	38	2.220	39	2.250	40	2.327	40	12.900	BPBD
	Persentase penduduk terdampak bencana yang ditangani	100	100		100		100		100		100	0	100	0	100		
	Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	80	80		80		80		80		80	0	80		80		
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	1.605	100	50	100	50	100	50	100	70	100	100	100	1.925	Dinsos PMD
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100	100	21.659	100	5.020	100	5.100	100	5.250	100	5.350	100	5.500	100	47.879	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	0,29	0,27	2.298	0,25	1.150	0,23	1.150	0,21	1.150	0,19	1.200	0,17	1.250	0,17	8.198	Dinas Perhubungan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio konektifitas	0,48	0,48		0,49		0,49		0,51		0,54		0,61		0,61		
	Persentase Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio di jalan)	29	29,7		30,3		30,4		30,4	0	38,4	0	38,4	0	0,384		
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,72	79,73	7.043	79,74	3.550	79,75	3.673	79,76	3.985	79,77	3.871	79,78	3.999	79,78	26.121	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan LH yang disusun	0	2	460	0	0	0	0	1	300	0	-	0	-		760	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKA	67,5	67,53	602	67,56	375	67,59	384	67,62	390	67,65	410	67,68	425	67,68	2.586	
	IKU	93,26	93,26		93,26		93,26		93,26		93,26		93,26		93,26		
	ITL	75,64	75,64		75,64		75,64		75,64		75,64		75,64		75,64		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Kabupaten	0,15	0	2.175	0,2	25	0,22	25	0,24	26	0,25	27	0,3	30	0,3	2.308	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola usaha dan/atau perusahaan	100	100	30	100	25	100	26	100	26	100	27	100	27	100	161	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	50	100	100	100	102	100	105	100	107	100	110	100	573	
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Persentase Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui	0	0	0	100	25	100	26	100	26	100	27	100	27	100	131	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kader lingkungan yang mendapat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	0	5	207	28	75	53	60	70	60	97	70	123	75	246	547	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima (Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi)	0	0	0	12	25	12	26	12	26	12	27	12	27	60	131	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat/ penegakan hukum lingkungan	100	100	15	100	25	100	26	100	26	100	27	100	27	100	146	
Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan Layanan Persampahan	27,78	45	3.504	75	2.875	80	3.000	100	3.000	100	3.150	100	3.250	100	18.779	
	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	28	30		45		60		65	0	70	0	75	0	75		
	Persentase pengurangan sampah	NA	5		5		5		5	0	5	0	5	0	5		
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan				6.875		11.936		8.687		6.048		6.354		6.731		46.631	
Tujuan 1 : Meningkatkan aktualisasi nilai seni, budaya, olahraga dan kearifan lokal dalam interaksi kehidupan	Peningkatan jumlah lembaga/perkumpulan kesenian	3,6	5	3.315	5	5.849	5	3.078	5	3.180	5	3.238	5	3.241	30	21.901	
	Peningkatan jumlah klub / perkumpulan olahraga	0,45	3		5		5		5		5		5		28		
Sasaran 1 : Meningkatnya peran lembaga adat ,seni dan budaya dalam interaksi sosial masyarakat	Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)	39,47	47,37	627	58	925	68,42	1.328	78,95	1.345	92,11	1.374	100	1.403	100	7.002	
	Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	32,25	37,63		43,01		48,39		53,76		59,14		64,52		64,52		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase lembaga adat aktif	100	100	461	100	455	100	465	100	472	100	482	100	493	100	2.829	
	Persentase kesenian yang dilestarian	100	100		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ nagari (LPMN) aktif	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat				
			2021		2022		2023		2024		2025		2026								
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)					
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan nagari (LPMN) aktif	100	100	109	100	130	100	100	100	100	100	100	47	100	47	639	Dinsos PMD				
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	130	130	0	130	230	133	650	136	658	139	674	142	689	142	2.901	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif	30	35	57	50	110	60	113	70	115	85	118	95	120	95	633	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
Sasaran 2 : Meningkatkan Budaya Berolahraga masyarakat	Persentase klub / perkumpulan olahraga aktif	100,00	100,00	2.688	100,00	4.924	100,00	1.750	100,00	1.835	100,00	1.864	100,00	1.838	100,00	14.899					
Program Pengembangan Kapasitas dan daya saing keolahragaan	jumlah atlet berprestasi	n.a	12	2.688	16	4.924	20	1.750	25	1.835	30	1.864	35	1.838	138	14.899	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
Tujuan 2 : Menurunnya Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial	Persentase PPKS yang Ditangani	57,62	71,30	686	73,00	560	76,00	400	79,00	550	82,00	550	85,00	650	85,00	3.396					
Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Ditangani	57,62	71,30	686	73,00	560	76,00	400	79,00	550	82,00	550	85,00	650	85,00	3.396					
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	100	-	-	20	100	40	100	60	150	80	150	100	200	100	700	Dinsos PMD				
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang ditangani	57,62	70	456	73	170	76	150	80	200	84	200	88	200	88	1.376	Dinsos PMD				
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	100	100	230	100	290	100	150	100	200	100	200	100	250	100	1.320	Dinsos PMD				
Tujuan 3 : Meningkatnya peran Nagari, Masyarakat dan Swasta dalam pembangunan	Rata-rata Indeks Desa Membangun	0,7133	0,7425	2.874	0,7782	5.527	0,8125	5.209	0,8345	2.318	0,8612	2.566	0,8855	2.840	0,8855	21.334					
	Indek Pembangunan Gender	95,08	96,20				96,59				97,15				97,70			98,25		98,70	
	Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	85	100				100				100				100			100		100	
Sasaran 1. Peningkatan peran Pemerintahan Nagari dan masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan	Persentase Nagari Mandiri	7,63	17,9	1.393	21,23	4.118	29,78	565	36,17	640	42,55	760	48,94	790	48,94	8.266					
Program Penataan Desa	Jumlah nagari pemekaran	0	8	202	3	0	3	50	3	70	3	100	3	100	23	522	Dinsos PMD				
	Persentase nagari mandiri	7,63	17,9		21,23		29,73		36,17		42,55		48,94		48,94						
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama nagari di fasiltasi	9	9	99	9	150	10	120	10	150	10	150	10	150	10	819	Dinsos PMD				
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase nagari yang lengkap administrasi pemerintahan nagari (perencanaan, keuangan dan asset)	60	65	876	70	3.675	75	100	80	100	85	120	90	120	90	4.991	Dinsos PMD				
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan	100	100	216	100	293	100	295	100	320	100	390	100	420	100	1.934	Kecamatan Sangir Balai Janggo				
Sasaran 2: Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	95,08	96,20	1.155	96,59	1.190	97,15	1.135	97,70	1.160	98,25	1.280	98,70	1.515	98,70	7.435					
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks pemberdayaan gender	53,15	53,75	530	54,15	530	55,30	500	57	500	58,5	500	60	600	60	3.160	DP2KB, PP&PA				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0,021	0,020	-	0,018	25	0,015	25	0,012	30	0,009	100	0,005	125	0,005	305	DP2KB, PP&PA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	n.a	10	625	20	575	30	550	40	550	50	550	60	650	60	3.500	DP2KB, PP&PA
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status kabupaten layak anak	belum	belum		sudah	20	sudah	20	sudah	30	sudah	50	sudah	50	sudah	170	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang responsif gender	18,18	21,21	-	36,36	20	54,54	20	72,72	25	90	40	100	40	100	145	DP2KB, PP&PA
Pogram Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	89,7	100	-	100	20	100	20	100	25	100	40	100	50	100	155	DP2KB, PP&PA
Sasaran 3. Peningkatan Partisipasi swasta dan perusahaan dalam pembangunan	Persentase pemamfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	na	85,00	326	100,00	219	100,00	3.509	100,00	518	100,00	526	100,00	535	100,00	5.633	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	85	85	326	90	219	95	3.509	100	518	100	526	100	535	100	5.633	
				317.767		359.562		359.620		350.846		374.046		382.718		2.144.558	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan selain ditujukan untuk penyusunan perencanaan program untuk pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2021-2026, Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tetap mempertimbangkan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah baik yang sifatnya pemenuhan dann pencapaian Stadar Pelayanan Minimal seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maupun sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi Urusan Pendidikan minimal 20 % dari belanja daerah, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan Kesehatan minimal 10 % dari belanja daerah. Selain itu belanja daerah juga dialokasikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 7.1.
Pagu Indikatif Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Kode	Kapasitas Rill/Belanja	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5 1	Belanja Operasi	645,782,302,046	638,917,137,571	639,622,870,952	678,530,646,136	660,053,071,114	671,198,962,492
5 2	Belanja Modal	147,089,817,503	160,327,901,078	155,471,582,141	141,870,602,777	162,728,944,288	167,555,264,653
5 3	Belanja Tidak Terduga	2,054,233,614	2,156,945,295	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
5 4	Belanja Transfer Keuangan	96,080,673,364	96,437,089,753	97,261,375,475	99,385,240,120	100,013,246,970	101,557,521,908
JUMLAH BELANJA DAERAH		891,007,026,527	897,839,073,697	894,355,828,568	921,786,489,033	924,795,262,372	942,311,749,054

7.2. Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung pada pencapaian Visi, Misi dan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Tabel 6.2) serta terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah, dan Mandatory program dan kegiatan yang harus dianggarkan oleh daerah, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*). Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dengan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan. Pendanaan Program bersifat indikatif dalam arti disusun dengan menggunakan metode prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang akan diwujudkan serta dengan mempertimbangkan realisasi belanja dan pencapaian kinerja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya

Dalam rangka kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan Kabupaten/kota yang dimiliki sebagaimana yang terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Nomenklatur program yang digunakan dalam dokumen RPJMD ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Berikutnya Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan oleh seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 7.2 dibawah ini:

Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Jt)	
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urusan Wajib				624.808		621.471		614.674		596.621		624.538		632.744		3.714.856	
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				547.936		552.659		558.538		542.474		569.086		575.306		3.345.999	
Urusan Pendidikan				239.963		250.488		231.893		231.060		232.500		233.600		1.419.504	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	182.261	100	187.595	100	188.000	100	188.000	100	189.000	100	190.000	100	1.124.856	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	55,88	57,25	57.702	59,68	62.893	63,48	43.393	67,28	42.560	72,28	43.000	75	43.000	75	292.548	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	APK SD/MI	115,50	100		100		102,25		105,75		108,35		110		110		
	APK SMP/MTs	90,33	100		100		100		100		100		100		100		
	APM SD/MI	99,20	99,30		99,50		99,75		100		100		100		100		
	APM SMP/MTs	76,90	77,00		77,25		80,75		82,35		84,35		85		85		
	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	96,71	97,13		98,25		99,15		99,75		100		100		100		
	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	99,11	99,50		99,75		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP)	7,26	8,75	-	11,17	-	19,55	200	27,93	200	33,52	200	39,11	200	39,11	800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik :			-		-		300		300		300		400		1.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	SD/MI	91,94	92,00		93,65		94,35		95,25		96,15		97		97		
	SMP/MTs	95,54	96,25		96,00		96,75		97,00		97,75		98		98		
	Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat	91,67	92,75		91,67		95,75		100,00		100,00		100		100		
	Persentase Pengawas yang bersertifikat	46,43	50,25		46,43		75,25		80,25		100,00		100		100		
Urusan Wajib Kesehatan				194.575		157.700		153.341		154.600		160.300		161.320		981.836	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	64.714	100	20.342	100	20.500	100	20.500	100	21.500	100	21.500	100	169.056	RSUD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna Masyarakat	26,67	26,67	13.284	53,33	49.887	80,00	50.387	100	50.500	100	52.500	100	53.000	100	269.558	RSUD
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional kantor	100	100	48.935	100	45.987	100	45.000	100	45.000	100	46.000	100	46.500	100	277.422	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :			66.114		38.854		34.854		36.000		37.700		37.700		251.222	Dinas Kesehatan
	kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27		26		25		24		23		22		22		
	prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0,12		0,11		0,1		0,09		0,08		0,07		0,07		
	kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16		21,8		21,48		21,14		20,80		20,46		20,46		
	Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4,6		4,5		4,4		4,3		4,2		4,1		4,1		

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
	rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37		14,24		13,11		11,98		10,85		10,85		10,85		
	API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01				
	Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07		19,73		19,39		19,05		18,39		18,05		18,05		
	Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01				
	Persentase balita kurang gizi	6,6	6,5		6,4		6,3		6,2		6,1		6		6		
	Persentase balita stunting	13,7	13,6		13,5		13,4		13,3		13,2		13,1		13,1		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	20		23		333		25		50		32		50		
Program Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum	Persentase ketersediaan Farmasi	95	97	777	98	2.530	98,5	2.500	99	2.500	100	2.500	100	2.500	100	13.307	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan alkes	60	61		62		63		65		67		69		69		
	Cakupan pengawasan PIRT	85	90		91		92		93		94		95		95		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga menerapkan standar PHBS	74,92	75	418	77	50	79	50	81	50	83	50	85	60	87	678	Dinas Kesehatan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				78.566		112.060		137.638		120.210		140.685		143.757		732.916	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	7.751	100	12.472	100	12.759	100	13.000	100	13.352	100	13.660	100	72.994	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten	25	30	11.690	35	3.305	40	9.550	45	9.738	50	10.100	55	10.278	55	54.661	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	25,69	27,05		28,09		29,13		30,17		31,21		32,25	-	32,25		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses air minum layak	77,04	-	-	80,05	8.430	82,50	8.800	85	8.982	88,50	9.300	90	9.533	90	45.045	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses sanitasi layak	59,17	-	-	61,97	3.090	63,27	3.575	64,47	3.652	66,37	3.800	68,17	3.931	68,17	18.048	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik	NA	30	1.280	32	8.018	36	7.675	38	7.700	40	7.900	50	8.000	50	40.573	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	0	1,25	1.543	2,50	16.175	3,75	16.800	2,50	2.000	2,50	17.310	2,50	17.715	15,00	71.543	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	41,54	44,09	47.796	45,29	60.205	46,49	78.139	47,69	74.772	48,89	78.550	50,09	80.246	50,09	419.708	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
	Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	78,26	79				80		82	-	85	-	88	-	90	-	

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	0	0	0	100	40	100	40	100	42	100	43	100	44	100	208	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,73	100	318	100	325	100	300	100	325	100	330	100	350	100	1.948	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses air minum layak	77,04	78	6.087												6.087	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan LH
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses sanitasi layak	59,17	60,47	2.100												2.100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan LH
Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman				15.520		17.061		18.266		18.528		19.300		19.893		108.567	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	4.854	100	4.423	100	4.525	100	4.550	100	4.650	100	4.750	100	27.752	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten	100	100	4	100	580	100	500	100	500	100	550	100	575	100	2.709	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100	100	1.303	100	1.060	100	2.050	100	2.101	100	2.350	100	2.528	100	11.391	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	90,73	0	0	91,25	400	91,5	350,0	91,75	357	92	400	92,25	425	92,25	1.932	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	1,25	1,25	8.862	1,25	10.583	1,25	10.826	1,25	11.000	1,25	11.330	1,25	11.590	8,75	64.190	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketersediaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten	0	30%	498	100%	15	100%	15	100%	20	100%	20	100%	25	100%	593	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat				12.337		11.281		13.487		13.911		12.087		12.280		75.383	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	4.168	100	3.906	100	3.906	100	3.920	100	4.000	100	4.050	100	23.950	Pol PP Damkar

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	100	100	1.456	100	915	100	1.000	100	1300	100	1100	100	1100	100	6.871	Pol PP Damkar
Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	capaian waktu tanggap (response time)	53,85	54,85	1.558	55,85	1.200	56,85	3.200	57,85	3.200	59,85	1.400	61,85	1.400	61,85	11.958	Pol PP Damkar
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3.350	100	3.135	100	3.207	100	3.271	100	3.337	100	3.403	100	19.703	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	35	35	1.804	36	2.125	37	2.174	38	2.220	39	2.250	40	2.327	40	12.900	BPBD
	Persentase penduduk terdampak bencana yang ditangani	100	100		100		100		100		100	0	100	0	100		
	Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	80	80		80		80		80		80	0	80		80		
Urusan Wajib Sosial				6.974		4.069		3.914		4.165		4.215		4.457		27.794	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	4.683	100	3.449	100	3.449	100	3.520	100	3.550	100	3.657	100	22.308	Dinsos PMD
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	100	-	-	20	100	40	100	60	150	80	150	100	200	100	700	Dinsos PMD
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang ditangani	57,62	70	456	73	170	76	150	80	200	84	200	88	200	88	1.376	Dinsos PMD
Program Perlindungan dan Jaminan Sos	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	100	100	230	100	290	100	150	100	200	100	200	100	250	100	1.320	Dinsos PMD
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	1.605	100	50	100	50	100	50	100	70	100	100	100	1.925	Dinsos PMD
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan dikelola	0	0	0	1	10	1	15	1	45	1	45	1	50	1	165	Dinsos PMD
Urusan WajibTerkait Pelayanan Non Pelayanan Dasar				76.873		68.813		56.135		54.147		55.452		57.437		368.857	
Urusan Wajib Tenaga Kerja				4.059		4.806		4.669		4.686		4.782		4.996		27.998	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100,00	100,00	3.481	100,00	3.601	100,00	3.494	100,00	3.575	100,00	3.657	100,00	3.741	100,00	21.549	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Ketersediaan dokumen tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	0	0	0	0	-	50,00	100	-	0	-	0	50,00	100	100,00	200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha	na	40,00	496	40,00	1.105	45,00	800	50,00	821	60,00	825	65,00	850	65,00	4.897	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	19,62	19,82	32	19,82	40	20,82	75	21,62	90	22,82	100	23,82	105	23,82	442	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan tindaklanjut penyelesaian Hubungan Industrial	100,00	100,00	50	100,00	60	100,00	200	100,00	200	100,00	200	100,00	200	100,00	910	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak				1.155		1.190		1.135		1.160		1.280		1.515		7.435	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks pemberdayaan gender	53,15	53,75	530	54,15	530	55,30	500	57	500	58,5	500	60	600	60	3.160	DP2KB, PP&PA
Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0,021	0,020	-	0,018	25	0,015	25	0,012	30	0,009	100	0,005	125	0,005	305	DP2KB, PP&PA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	n.a	10	625	20	575	30	550	40	550	50	550	60	650	60	3.500	DP2KB, PP&PA
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status kabupaten layak anak	belum	belum		sudah	20	sudah	20	sudah	30	sudah	50	sudah	50	sudah	170	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang responsif gender	18,18	21,21	-	36,36	20	54,54	20	72,72	25	90	40	100	40	100	145	DP2KB, PP&PA
Pogram Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	89,7	100	-	100	20	100	20	100	25	100	40	100	50	100	155	DP2KB, PP&PA
Urusan Wajib Pangan				4.186		4.042		4.226		4.428		4.676		4.933		26.491	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	3.012	100	2.897	100	2.898	100	2.936	100	3.003	100	3.072	100	17.818	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase nagari yang memiliki infrastruktur kemandirian pangan	2,00	2,00	519	22,00	50	21,00	85,71	26,00	88	34,00	90	43,00	92	43,00	924	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	77	77	483	78	765	79	915	83	1.070	85	1.240	86	1.419	86	5.892	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase nagari rawan pangan yang ditangani	100	100	171	100	230	100	225	100	230	100	235	100	241	100	1.333	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase temuan pelaku usaha menggunakan zat berbahaya (per 100 sampel)	-	-	-	10,00	100	8,00	102	6,00	105	4,00	107	2,00	110	2,00	524	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Wajib Pertanian				21.659		5.020		5.150		5.302		5.402		5.553		48.086	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan (masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah)	100	0	0	0	0	50	50	50	52	50	52	50	53	50	207	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100	100	21.659	100	5.020	100	5.100	100	5.250	100	5.350	100	5.500	100	47.879	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Wajib Lingkungan Hidup				7.043		3.550		3.673		3.985		3.871		3.999		26.121	

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan LH yang disusun	0	2	460	0	0	0	0	1	300	0	-	0	-		760	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKA IKU ITL	67,5 93,26 75,64	67,53 93,26 75,64	602	67,56 93,26 75,64	375	67,59 93,26 75,64	384	67,62 93,26 75,64	390	67,65 93,26 75,64	410	67,68 93,26 75,64	425	67,68 93,26 75,64	2.586	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Kabupaten	0,15	0	2.175	0,2	25	0,22	25	0,24	26	0,25	27	0,3	30	0,3	2.308	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola usaha dan/atau perusahaan	100	100	30	100	25	100	26	100	26	100	27	100	27	100	161	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	50	100	100	100	102	100	105	100	107	100	110	100	573	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Persentase Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui	0	0	0	100	25	100	26	100	26	100	27	100	27	100	131	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kader lingkungan yang mendapat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	0	5	207	28	75	53	60	70	60	97	70	123	75	246	547	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima (Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi)	0	0	0	12	25	12	26	12	26	12	27	12	27	60	131	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat/ penegakan hukum lingkungan	100	100	15	100	25	100	26	100	26	100	27	100	27	100	146	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan Layanan Persampahan	27,78	45	3.504	75	2.875	80	3.000	100	3.000	100	3.150	100	3.250	100	18.779	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	28	30		45		60		65	0	70	0	75	0	75		
	Persentase pengurangan sampah	NA	5		5		5		5	0	5	0	5	0	5		
Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				4.986		5.243		4.948		5.060		5.200		5.416		30.853	

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	4.922	100	3.118	100	3.118	100	3130	100	3150	100	3245	100	20.683	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase rumah tangga yang memiliki KK	92,66	94	49	95	1.662	98	1.500	100	1.600	100	1.700	100	1.800	100	8.311	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	88,93	100		100		100		100		100						
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	20	30		40		50		60		75		85				
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85,94	95	15	97,5	263	100	200	100	200	100	200	100	200	100	1.078	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang memiliki akses pemanfaatan data kependudukan	0	24	-	48	170	72	100	100	100	100	110	100	121	100	601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan dokumen profil kependudukan (dokumen)	1	1	-	1	30	1	30	1	30	1	40	1	50	6	180	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				1.286		3.955		370		420		470		470		6.971	
Program Penataan Desa	Jumlah nagari pemekaran	0	8	202	3	0	3	50	3	70	3	100	3	100	23	522	Dinsos PMD
	Persentase nagari mandiri	7,63	17,9		21,23		29,73		36,17		42,55		48,94		48,94		
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama nagari di fasiltasi	9	9	99	9	150	10	120	10	150	10	150	10	150	10	819	Dinsos PMD
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase nagari yang lengkap administrasi pemerintahan nagari (perencanaan, keuangan dan asset)	60	65	876	70	3.675	75	100	80	100	85	120	90	120	90	4.991	Dinsos PMD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan nagari (LPMN) aktif	100	100	109	100	130	100	100	100	100	100	100	47	100	47	639	Dinsos PMD
Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				6.346		5.495		5.233		5.310		5.400		5.540		33.324	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	3.009	100	2.893	100	2.893	100	2.930	100	3.000	100	3.090	100	17.815	DP2KB, PP&PA
Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,45	0,45	60	0,45	0	0,45	20	0,45	30	0,45	50	0,45	50	0,45	210	DP2KB, PP&PA
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan akseptor KB aktif	81,65	81,75	3.177	81,95	2.471	82,25	2.200	82,40	2.200	82,75	2.200	83,25	2.200	83,25	14.448	DP2KB, PP&PA
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	28,33	30,40	100	32,50	131	35,10	120	37,30	150	39,60	150	41,20	200	41,20	851	DP2KB, PP&PA
Urusan Perhubungan				7.203		4.688		4.749		4.800		4.965		5.100		31.504	

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	4.305	100	3.518	100	3.599	100	3.650	100	3.765	100	3.850	100	22.686	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	0,29	0,27	2.298	0,25	1.150	0,23	1.150	0,21	1.150	0,19	1.200	0,17	1.250	0,17	8.198	Dinas Perhubungan
	Rasio konektifitas	0,48	0,48		0,49		0,49		0,51		0,54		0,61		0,61		
	Persentase Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio di jalan)	29	29,7		30,3		30,4		30,4	0	38,4	0	38,4	0	0,384		
Program Pengelolaan Pelayaran	% Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Pelayaran	80	80	600	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	Dinas Perhubungan
	% Penduduk yang terlayani angkutan sungai	40	40		40		0		0		0		0		0		
Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika				6.881		6.362		6.498		6.585		6.775		6.940		40.041	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100%	100	3.524	100	3.153	100	3.215	100	3.279	100	3.350	100	3.440	100	19.962	Dinas Komuikasi dan Informatika
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	60	70	1.380	80	1.010	90	1.033	100	1.030	100	1.075	100	1.100	100	6.628	Dinas Komuikasi dan Informatika
Program Aplikasi informatika	Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi	84,4%	87	1977	89,6	2.199	92,2	2.250	94,8	2.275	97	2.350	100	2.400	100	13.451	Dinas Komuikasi dan Informatika
	Persentase penanganan terhadap gangguan cyber	0%	100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100		
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				719		857		635		639		645		650		4.145	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	56,52	60,00	37	62,61	70	65,22	70	67,83	71	69,57	72	70,43	73	70,43	393	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi Sehat	6,78	10,17	-	13,56	80	16,95	80	20,34	81	23,73	82	27,12	83	27,12	406	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan	24,35	30,43	390	33,04	65	35,65	65	38,26	65	40,00	66	41,74	67	41,74	719	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha	16,52	18,26	27	20,00	30	21,74	31	23,48	31	25,22	32	26,96	32	26,96	183	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	133,66	0,1	106	1,02	495	0,51	269	0,50	270	0,50	271	0,25	272	0,25	1.683	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha	0,07	0,1	159	0,15	117	0,15	120	0,15	121	0,15	122	0,15	123	0,85	762	Dinas Perindagkop dan UMKM
Urusan Wajib Penanaman Modal				4.486		3.873		7.742		4.542		4.681		4.860		30.183	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	3.449	100	3.218	100	3.775	100	3.563	100	3.691	100	3.858		21.554	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan yang mendukung penanaman modal	1	2	66	0	-	1	30	1	31	1	32	1	33	6	192	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat	1	1	80	2	50	3	50	4	50	5	50	5	50	20	330	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	85	85	326	90	219	95	3.509	100	518	100	526	100	535	100	5.633	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan	1000	1000	498	1100	306	1200	300	1200	300	1250	301	1250	303	7000	2.008	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terkelola	100	100	66	100	80	100	78	100	80	100	81	100	81	100	466	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga				3.351		6.279		2.700		2.785		2.714		2.688		20.517	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda	1600	1660	445	1715	1.055	1750	500	1780	500	1810	500	1850	500	1850	3.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas dan daya saing keolahragaan	jumlah atlet berprestasi	n.a	15	2.688	16	4.924	20	1.750	25	1.835	30	1.864	35	1.838	141	14.899	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	100	100	218	100	300	100	300	100	300	100	200	100	200	100	1.518	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan kapasitas dan daya saing olahraga	Terfasiliasinya kegiatan tour de Singkarak	0	1	-	1		1	150	1	150	1	150	1	150	6	600	Sekretariat Daerah
Urusan Wajib Statistik				158		100		100		100		105		110		673	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola	73,96	100	158	100	100	100	100	100	100	100	105	100	110	100	673	Dinas Komuikasi dan Informatika
Urusan Wajib Persandian				33		38		50		50		53		55		278	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi daerah	100	100	33	100	38	100	50	100	50	100	53	100	55	100	278	Dinas Komuikasi dan Informatika
Urusan Kebudayaan				558		795		1.228		1.245		1.274		1.303		6.403	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase lembaga adat aktif	100	100	461	100	455	100	465	100	472	100	482	100	493	100	2.829	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase kesenian yang dilestarikan	100	100		100		100		100		100		100		100		
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	130	130	0	130	230	133	650	136	658	139	674	142	689	142	2.901	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif	30	35	57	50	110	60	113	70	115	85	118	95	120	95	633	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Jumlah objek sejarah yang didokumentasikan	1	1	40											1	40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan Wajib Perpustakaan				2.667		12.396		2.910		2.940		3.029		3.160		27.102	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	2.395	100	2.271	100	2.280	100	2.300	100	2.369	100	2.440	100	14.055	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan (pustaka konvensional dan digital)	2501	2700	272	2800	10.095	3500	600	3700	600	3900	600	4100	650	20700	12.817	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang didokumentasikan	n.a	n.a	-	3	30	4	30	4	40	5	60	5	70	21	230	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan				96		125		120		110		130		150		731	
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	33,33	66,6	54	100	65	100	60	100	60	100	70	100	80	100	389	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	persentase arsip daerah yang dikelola	20	30	42	50	60	60	60	70	50	80	60	90	70	90	342	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan				42.055		38.638		46.259		55.897		52.575		55.387		290.811	
Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan				2.175		1.110		2.136		3.003		3.909		4.820		17.152	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	1661	1991	2.038	2159	1.035	2343	1.859	2542	2.720	3595	3.620	2758	4.523		15.795	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS Perairan Umum	21	23	-	25	-	27	200	29	205	31	209	33	214	565	828	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	31,58	31,58	137	32,10	75	32,60	77	33,40	78	34,20	80	35,00	82	35	530	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	5	11		11		15		17		18		19		19		
Urusan Pilihan Pariwisata				5.677		5.255		5.765		7.058		7.663		8.686		40.104	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	4.349	100	3.990	100	4.042	100	4.094	100	4.188	100	4.285	100	24.948	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	10	11	861	12	900	13	912	14	2.133	15	2.182	15	3.232	15	10.219	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang Dipasarkan	10	11	300	12	275	13	250	14	256	15	262	15	268	90	1.610	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ruang Kreatif Yang Dikelola	0	0	0	0	0	1	150	1	153	2	300	2	154	2	757	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Objek Wisata yang Dikelola Oleh Pokdarwis	35,00	37	167	38	90	43	412	50	422	57	731	62	748	62	2.569	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan Pilihan Pertanian				20.698		25.303		28.346		37.160		33.223		34.480		179.211	
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	11.016	100	10.583	100	10.826	100	11.075	16.469	11.330	14.383	11.591	100	66.421	Dinas Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi hasil pertanian			4.997		11.697		14.281		22.565		18.082		18.775		90.397	Dinas Pertanian
	Padi (Ton)	142.581	#####		105.136	#####		#####		#####			127.061		822.287		
	Jagung (Ton)	82.909	86.259		89.743	93.369		#####		#####			120.924		707.367		
	Kacang tanah (Ton)	757	772		787	803		819		836			853		5.627		
	Manggis (Ton)	898,9	448		456	464		472		480			480		3.699		

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat		
			2021		2022		2023		2024		2025		2026						
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)			
	Cabe (Ton)	5.281	7.026		7.149		7.274		7.401		7.530		7.530		49.191				
	Bawang merah (Ton)	4.318	4.305		4.387		4.474		4.564		4.655		4.655		31.358				
	Kelapa Sawit (Ton)	43.516	52.654		56.866		61.416		66.943		72.968		72.968		427.331				
	Kopi (Ton)	2.754	3.139		3.319		3.502		3.678		3.862		3.862		64.878				
	Porang (Ton)	na	150		165		182		200		220		242		1.159				
	Durian (Ton)	28,24	30		31		33		34		36		38		202				
	Kapulaga (Ton)	5.337	5.364		5.391		5.417		5.688		5.973		6.271		34.104				
	Populasi ternak besar (Ekor)	18.962	19.815		20.905		22.263		23.688		25.010		26.136		26.136				
	Telor (Kg)	4.173,83	434,24		442,93		451,78		460,82		470,03		470,03		6.904				
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian/Ha/Tahun			2.586		1.230		1.246		1.275		1.304		1.334		8.975	Dinas Pertanian		
	Padi	5,44	5,10		5,25		5,41		5,56		5,71		5,87		5,87				
	Jagung	5,25	5,35		5,46		5,57		5,68		5,80		5,91		5,91				
	Kacang tanah	1,61	1,63		1,64		1,66		1,68		1,69		1,71		1,71				
	Kelapa Sawit (ton/tahun)	16,7	16,9		17,3		17,8		18,2		18,70		19,20		19,20				
	Kopi	2,07	2,07		2,07		2,18		2,29		2,4		2,52		2,52				
	Cakupan penanggulangan kasus penyakit menular hewan (%)	100	100,0		196		100		563		100		540		100			552	100
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan penanggulangan bencana pertanian (hama)	100	100	99	100	60	100	61	100	62	100	64	100	65	100	411	Dinas Pertanian		
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100	100	42	100	100	100	102	100	105	100	107	100	110	100	566	Dinas Pertanian		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase ketersediaan penyuluh	57,43	50,88	1.763	64,04	1.070	77,19	1.290	90,35	1.526	94,74	1.771	100	2.028	100	9.447	Dinas Pertanian		
	Persentase peningkatan kelas Kelompok Tani																		
	a. Pemula	86,16	73,04		81,18		76,0647		73,648		69,0108		833		833				
	b. Lanjut	13,15	24,20		17,80		22,6576		24,884		29,2117		435		435				
	c. Madya	0,69	2,61		0,94		1,1925		1,3138		1,62287		23		23				
	d. Utama	0	0,15		0,09		0,08518		0,1546		0,15456		3		3				
Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral				25		-		-		-		-		-		25			
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Pemanfaatan langsung Panas Bumi yang memiliki Izin	100	100	25											100	25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
Urusan Pilihan Perdagangan				615		3.075		3.064		2.582		2.102		1.597		13.035			
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan yang memiliki Izin	71	71	-	74,00	70	77,00	71,00	85,00	85	89,00	90	89,00	95	89,00	411	Dinas Perindagkop dan UMKM		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Kabupaten)	41,3	51	458	70,46	2.335	80,17	810	85,03	810	87,46	820	89,89	800	89,89	6.033	Dinas Perindagkop dan UMKM		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu	na	12-15'	112	12-15'	305	11-14	312	10-13'	313	10-13'	315	10-13'	320	10-13'	1.677	Dinas Perindagkop dan UMKM		
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan usaha bertanda tera sah yang berlaku	43,30	44	45	45,00	265	48,00	1.771	50,00	1.273	50,00	775	52,00	279	52,00	4.408	Dinas Perindagkop dan UMKM		

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (Jenis Produk UMKMI)	na	28	-	44	100	56	100	78	101	83	102	89	103	89	506	Dinas Perindagkop dan UMKM
Urusan Pilihan Perindustrian				12.701		3.896		6.947		6.094		5.678		5.804		41.120	
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	3.333	100	3.186	100	3.259	100	3.334	100	3.411	100	3.489	100	20.013	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dikembangkan	4	4	9.333	4	579	4	3.575	4	2.580	4	2.084	4	2.127	4	20.277	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	22,22	55,56	35											55,56	35	Dinas Perindagkop dan UMKM
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	22,22	55,56		100	131	100	113	100	180	100	183	100	188	100	795	Dinas Perindagkop dan UMKM
Urusan Pilihan Transmigrasi				163		-		-		-		-		-		163	-
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya perencanaan kawasan transmigrasi	47	47	99												99	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Satuan Kawasan Transmigrasi	1	1	6												6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terbangunnya satuan kawasan pemukiman baru yang mandiri	1	1	59												59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				224.137		237.730		233.423		269.269		247.682		254.181		1.466.422	1.467.022
Unsur pendukung Urusan Pemerintahan				59.202		56.516		49.680		52.200		53.100		55.241		325.939	
Sekretariat Daerah				32.035		28.990		23.980		25.950		26.400		27.070		164.425	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	27.130	100	22.030	100	17.050	100	19.000	100	19.000	100	19.570	100	123.780	Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP	54,24 (CC)	60 (CC)		65 (B)		70 (B)		80(BB)		85 (A)		90 (A)		90 (A)		
	Nilai LPPD	n.a	3,04		3,05		3,08		3,10		3,12		3,15		3,15		
	Persentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	100	100		100		100		100		100		100		100		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100	100	4.358	100	6.530	100	6.500	100	6.500	100	6.900	100	7.000	100	37.788	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjuti	100	100	547	100	430	100	430	100	450	100	500	100	500	100	2.857	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD				27.167		27.526		25.700		26.250		26.700		28.171		161.514	

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	17.842	100	17.413	100	15.500	100	15.600	100	15.700	100	16.171	100	98.226	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda	41,67	100	9.325	100	10.113	100	10.200	100	10.650	100	11.000	100	12.000	100	63.288	Sekretariat DPRD
	Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan	1	1		1		1		1		1		1		6		
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				141.549		158.836		160.713		164.013		170.058		172.839		968.008	
Perencanaan				6.057		5.900		5.310		5.450		7.499		6.550		36.766	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	3.841	100	3.751	100	3.260	100	3.300	100	3.499	100	3.550	100	21.201	Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	n.a	82	1.379	84	1.012	86	1.000	88	1.050	89	2.500	90	1.600	90	8.541	Bappeda
	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPd dan RPJMD	100	100		100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	837	100	1.137	100	1.050	100	1.100	100	1.500	100	1.400	100	7.024	Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	n.a	80		82		84		86		88		90		90		
Keuangan				117.741		125.019		127.658		130.414		133.799		136.774		771.405	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	16.417	100	21.476	100	19.597	100	20.522	100	21.639	100	23.968	100	123.619	BPKD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100.455	WTP	102.724	WTP	106.819	WTP	108.514	WTP	110.572	WTP	110.914	WTP	639.998	BPKD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD berkategori baik	60,61	60,61	301	69,70	301	75,76	506	84,85	568	90,91	737	100	1.013	100	3.426	BPKD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian target Pajak dan Retribusi	95	97	568	98	518	98	736	98	810	98	851	98	880	98	4.362	BPKD
Kepegawaian				16.555		26.337		25.945		26.299		26.900		27.650		149.686	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	14.587	100	24.592	100	24.200	100	24.499	100	25.000	100	25.750	100	138.628	BKPSDM
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	154	176	1.968	226	1.745	250	1.745	300	1.800	325	1.900	325	1.900	80	11.058	BKPSDM
Pendidikan dan Pelatihan				1.107		1.430		1.450		1.500		1.500		1.500		8.487	
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	7,65	10	1.107	13	1.430	15	1.450	20	1.500	22	1.500	25	1.500	25	8.487	BKPSDM
Penelitian dan Pengembangan				68		150		300		300		300		300		1.418	

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	0	0	68	20	150	30	300	40	300	50	300	60	300	60	1.418	Bappeda
Pengelolaan Perbatasan				21		-		50		50		60		65		246	
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Segmen Batas Nagari Yang Diselesaikan	21	23	21	49	-	62	50	74	50	87	60	100	65	100	246	Sekretariat Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				5.014		4.937		5.337		5.380		5.600		6.635		32.903	
Inspektorat				5.014		4.937		5.337		5.380		5.600		6.635		32.903	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	3.683	100	4.087	100	4.087	100	4.100	100	4.200	100	4.326	100	24.483	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	II+	II+	1.129	II+	645	III	1.100	III	1.100	III	1.200	III	1.859	III	7.033	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas SPIP	2,6	2,6	202	2,6	205	2,8	150	3	180	3,1	200	3,2	450	3,3	1.387	Inspektorat
Unsur Kewilayahan (Kecamatan)				15.621		14.874		15.135		15.601		16.114		16.627		93.972	
Kecamatan Sangir				2.105		2.269		2.310		2.370		2.450		2.500		14.004	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	1.927	100	1.969	100	1.980	100	2.010	100	2.070	100	2.100	100	12.056	Kecamatan Sangir
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	8	100	39	100	50	100	50	100	50	100	55	100	252	Kecamatan Sangir
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN	40	40	11	55	60	70	60	85	60	100	60	100	65	100	316	Kecamatan Sangir
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	100	95	100	135	100	150	100	150	100	170	100	170	100	870	Kecamatan Sangir
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	100	100	3	100	13	100	20	100	40	100	30	100	30	100	136	Kecamatan Sangir
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6	6	61	6	53	6	50	6	60	6	70	6	80	6	374	Kecamatan Sangir
Kecamatan Sungai Pagu				2.597		2.406		2.470		2.525		2.638		2.685		15.321	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	2.513	100	2.196	100	2.225	100	2.250	100	2.318	100	2.350	100	13.852	Kecamatan Sungai Pagu
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	16	100	28	100	40	100	40	100	50	100	55	100	229	Kecamatan Sungai Pagu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN	30	30	19	40	47	50	50	100	50	100	60	100	60	100	286	Kecamatan Sungai Pagu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	100	28	100	93	100	100	100	105	100	130	100	130	100	586	Kecamatan Sungai Pagu

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	100	100	3	100	7	100	20	100	40	100	30	100	30	100	130	Kecamatan Sungai Pagu
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6	6	18	6	35	6	35	6	40	6	50	6	60	6	238	Kecamatan Sungai Pagu
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh				2.666		2.432		2.470		2.515		2.625		2.695		15.403	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	2.556	100	2.225	100	2.225	100	2.250	100	2.300	100	2.350	100	13.906	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	9	100	29	100	40	100	40	100	50	100	55	100	223	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN	30	30	45	40	47	50	50	100	50	100	60	100	65	100	317	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	100	44	100	86	100	90	100	90	100	90	100	95	100	495	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	100	100	0	0	0	100	20	100	40	100	50	100	55	100	165	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6	6	12	6	45	6	45	6	45	6	75	6	75	6	297	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Kecamatan Sangir Jujuan				2.102		1.907		1.940		2.026		2.080		2.145		12.200	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	2.026	100	1.697	100	1.700	100	1.751	100	1.800	100	1.850	100	10.824	Kecamatan Sangir Jujuan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	8	100	28	100	30	100	40	100	50	100	55	100	211	Kecamatan Sangir Jujuan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN	35	35	0	35	41	35	50	35	50	35	60	35	70	35	271	Kecamatan Sangir Jujuan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	100	30	100	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	480	Kecamatan Sangir Jujuan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	100	100	0	100	6	100	20	100	40	100	20	100	20	100	106	Kecamatan Sangir Jujuan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6	6	38	6	45	6	50	6	55	6	60	6	60	6	308	Kecamatan Sangir Jujuan
Kecamatan Sangir Batang Hari				2.283		2.129		2.140		2.185		2.235		2.427		13.399	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	2.146	100	1.819	100	1.830	100	1.850	100	1.900	100	2.082	100	11.627	Kecamatan Sangir Batang Hari
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	30	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100	505	Kecamatan Sangir Batang Hari

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN	35	40	24	50	60	60	60	70	60	80	70	90	70	90	344	Kecamatan Sangir Batang Hari
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	100	44	100	108	100	100	100	105	100	110	100	120	100	587	Kecamatan Sangir Batang Hari
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	100	100	6	100	12	100	20	100	40	100	20	100	20	100	118	Kecamatan Sangir Batang Hari
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6	6	33	6	35	6	35	6	35	6	40	6	40	6	218	Kecamatan Sangir Batang Hari
Kecamatan Pauh Duo					1.989		1.830		1.870		1.935		1.980		2.050		11.654
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100%	100	1.788	100	1.630	100	1.650	100	1.680	100	1.730	100	1.800	100	10.278	Kecamatan Pauh Duo
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	36	100	30	100	40	100	50	100	60	100	60	100	276	Kecamatan Pauh Duo
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN	30	35	67	40	55	50	55	100	55	100	60	100	60	100	352	Kecamatan Pauh Duo
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	100	64	100	65	100	65	100	65	100	65	100	65	100	389	Kecamatan Pauh Duo
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	100	100	0	100	10	100	20	100	40	100	20	100	20	100	110	Kecamatan Pauh Duo
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6	6	34	6	40	6	40	6	45	6	45	6	45	6	249	Kecamatan Pauh Duo
Kecamatan Sangir Balai Janggo					1.879		1.901		1.935		2.045		2.106		2.125		11.991
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	1.765	100	1.646	100	1.670	100	1.700	100	1.751	100	1.760	100	10.292	Kecamatan Sangir Balai Janggo
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	100	100	20	100	44	100	45	100	45	100	45	100	45	100	244	Kecamatan Sangir Balai Janggo
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan PATEN	40	40	9	55	60	70	60	95	60	100	60	100	60	100	309	Kecamatan Sangir Balai Janggo
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	100	59	100	102	100	100	100	100	100	100	100	100	100	561	Kecamatan Sangir Balai Janggo
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	100	100	6	100	9	100	20	100	100	100	100	100	100	100	335	Kecamatan Sangir Balai Janggo
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6	6	20	6	40	6	40	6	40	6	50	6	60	6	250	Kecamatan Sangir Balai Janggo
Unsur Pemerintahan Umum					2.751		2.567		2.558		32.075		2.810		2.839		45.600
Kesatuan Bangsa dan Politik					2.751		2.567		2.558		32.075		2.810		2.839		45.600

Urusan / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi		Perangkat Daerah Penanggungjawab Perangkat
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja pada		
			Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Prrogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	100	1.267	100	1.137	100	1.150	100	1.185	100	1.200	100	1.229	100	7.168	Kantor Kesbang dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila	0	0	60	0	30	0	30	0	30	0	40	0	40	13,80	230	Kantor Kesbang dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol Yang Mendapat Pembinaan	100	100	1.006	100	1.050	100	1.050	100	30.400	100	1.100	100	1.100	100	35.706	Kantor Kesbang dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas Yang Diawasi	100	100	20	100	25	100	25	100	40	100	50	100	50	100	210	Kantor Kesbang dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100	100	257	100	275	100	253	100	300	100	300	100	300	100	1.685	Kantor Kesbang dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kasus Narkoba Yang Tertangani	100	100	141	100	50	100	50	100	120	100	120	100	120	100	601	Kantor Kesbang dan Politik
				891.001		897.839		894.356		921.786		924.795		942.312		5.472.089	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada pada BAB V disajikan pada Tabel 8.1 berikut

Tabel 8.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif									
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,04	69,44	69,83	70,37	70,92	71,47	71,93	71,93
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,39	8,48	8,57	8,66	8,76	8,85	8,85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,71	12,97	13,08	13,20	13,31	13,43	13,54	13,54
Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 - 15) Hafiz Qur'an									
a). 1 Juz	Persen	2,47	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	7,50
b). 2 Juz	Persen	0,32	0,39	0,46	0,56	0,62	0,69	0,76	0,76
c). Lebih atau sama 3 Juz	Persen	0,36	0,42	0,49	0,56	0,62	0,70	0,80	0,80
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,81	68,01	68,21	68,41	68,61	68,81	69,01	69,01
Prevalensi Balita Stunting	Persen	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1	13,1
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. Juta /Tahun	64,81	66,08	68,82	73,20	77,20	82,20	82,20	82,20
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah									
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,62	5,44	5,38	5,26	5,17	5,03	4,89	4,89
Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,15	7,32	7,20	7,07	6,94	6,81	6,68	6,68
Indeks Gini Ratio	Indeks	0,307	0,297	0,295	0,291	0,286	0,280	0,274	0,274
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,24	2,40	2,79	4,07	4,41	4,52	4,65	4,65
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani									
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	85,00	85,00
Indeks SPBE	Indeks	1,70	1,94	2,14	2,34	2,54	2,74	2,94	2,94
Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/ Prediket	54,25 CC	60 CC	65 B	70 B	80 BB	85 BB	90 A	90 A
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	n.a	3,04	3,05	3,08	3,10	3,12	3,15	3,15
Indek Pelayanan Publik	Indeks	n.a	2,75	3,3	3,9	4,3	4,6	4,75	4,75
Indek Pelayanan Publik	Indeks	n.a	2,75	3,3	3,9	4,3	4,6	4,75	4,75
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana									
Indek Infastruktur Wilayah	Indeks	32	37	40	44	46	51	57	57
Indeks Ketersedian Infrastruktur dasar	Indeks	69,16	70,75	72,38	74,30	76,28	78,60	80,55	80,55
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab	Indeks	29,43	28,5	26,8	25,1	23,4	21,7	20,00	20,00
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,42
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,72	79,73	79,74	79,75	79,76	79,77	79,78	79,78

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat									
Peningkatan jumlah lembaga kesenian	Persen	3,6	5	5	5	5	5	5	30
Peningkatan jumlah Klub/Perkumpulan Olahraga	Persen	0,45	3	5	5	5	5	5	28
Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kandung)	Persen	39,47	47,37	57,89	68,42	78,95	92,11	100,0	100,0
Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	Persen	32,25	37,63	43,01	48,39	53,76	59,14	64,52	64,52
Persentase Klub/Perkumpulan Olahraga yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	57,62	71,30	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	85,00
Persentase PPKS yang Ditangani	Persen	57,62	71,30	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	85,00
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7133	0,742	0,778	0,812	0,834	0,861	0,885	0,885
Persentase Nagari Mandiri	Persen	7,63	17,9	21,23	29,78	36,17	42,55	48,94	48,94
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,08	96,20	96,59	97,15	97,70	98,25	98,70	98,70
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,08	96,20	96,59	97,15	97,70	98,25	98,70	98,70
Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	Persen	85	100	100	100	100	100	100	100
Perentase Nagari Mandiri	Persen	7,63	17,9	21,23	29,78	36,17	42,55	48,94	48,94
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,05	96,20	96,59	97,15	97,70	98,25	98,70	98,70
Persentase pemamfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	na	85,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

8.1. Indikator Kinerja Kunci Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintah daerah pada akhir tahun perencanaan RPJMD. Indikator kinerja kunci ini dilihat dari 2 (dua) Aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum .

Aspek kesejahteraan diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan pemerintahan daerah sesuai kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama lima tahun kedepan disajikan pada Tabel 8.2 dan Tabel 8.3 berikut:

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Makro Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI									
1	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	69,04	69,44	69,83	70,37	70,92	71,47	71,93
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,24	2,40	2,79	4,07	4,41	4,52	4,65
3	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Juta/ Tahun	31,82	32,40	33,74	35,16	37,09	38,56	40,52
4	PDRB per kapita (Harga Konstan)	Juta/ Tahun	21,58	22,13	22,35	22,85	23,45	24,10	24,80
5	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	Ribu/ Tahun	10.325	10.452	10.501	10.686	10.910	11.151	11.412
6	Indek Gini Ratio	Indek	0,307	0,297	0,295	0,291	0,286	0,28	0,274
7	Tingkat Pengangguran	%	5,62	5,44	5,38	5,26	5,17	5,03	4,89
8	Tingkat Kemiskinan	%	7,47	7,32	7,20	7,07	6,94	6,81	6,68

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja per Urusan Pemerintahan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK PELAYANAN UMUM									
I	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.	Pendidikan								
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,28	8,39	8,48	8,57	8,66	8,76	8,85
2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,71	12,97	13,08	13,2	13,31	13,43	13,54
3	Angka Melanjutkan								
	a.SD/MI ke SMP/MTs	%	96,71	96,71	98,25	99,15	99,75	100	100
	b.SMP/MTs ke SMA/AM/SMK	%	99,11	99,11	99,75	100	100	100	100
4	Angka Melek Huruf	%	94,91	95,75	96,6	97,5	98,8	99,5	100
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	a. TK/PAUD	%	55,88	55,88	59.68	63.48	67.28	72.28	75
	b.SD/MI/SDLB/Paket A	%	115,5	100	100	102,25	105,75	108,35	110
	c.SMP/MTs/SMPLB/Pa ket B	%	90,33	100	100	100	100	100	100
	d.SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	%	79,71	79,71	81,25	83	85,75	88	90
6	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,2	99,2	99,5	99,75	100	100	100
	b.SMP/MTs/SMPLB/P aket B	%	76,9	76,9	77,25	80,75	82,35	84,35	85
	c.SMA/SMK/MA/SMAL B/Paket C	%	64,3	64,3	66,6	69,25	72,65	74	75,75
7	Persentase guru bersertifikat Pendidik								
	a. SD/MI	%	91,94	91,94	93,65	94,35	95,25	96,15	97
	b. SMD/MTs	%	95,54	95,54	96	96,75	97	97,75	98

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	c. SMA/MA	%	97,4	97,4	98	98,75	99	99,5	100
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92,37	93	94,5	96	100	100	100
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,94	96	96,5	97	100	100	100
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	75,94	78	84	88	100	100	100
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,94	1,7	1,5	1,3	0,9	0,7	0,5
2.	Kesehatan								
1	Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	67,81	68,01	68,21	68,41	68,61	68,81	69,01
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	198	192	186	180	174	168	162
3	Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	7,98	7,3	7	6,7	6,4	6,1	5,8
4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Prevalensi Balita Stunting	%	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1
6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	C	C	C	C	C	B	B
7	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,77	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	69,47	74,2	78,5	81,8	84,2	88,5	92
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	73,04	76	80	84	89	94	100
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	83,84	85	87	89	91	93	95
12	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	85,9	87	89	91	93	95	98

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,19	89,2	91,2	93,4	94,7	95,8	97,5
14	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86,95	88,5	90	92,4	94,7	96	98
15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	69,17	71	72,3	74,5	76	77,5	79
16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	54,82	58	62	66	70	74	78
17	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	62,84	65	68	71	74	78	81
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	9,04	10,5	12	14	16	18	20
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	46,73	100	100	100	100	100	100
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	25	30	35	40	45	50	55
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	25,6	27,0	28,1	29,1	30,2	31,2	32. 2
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	%	77,04	78,00	80,05	82,50	85,00	88,50	90,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota (Akses air minum layak)								
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses sanitasi layak)	%	59,17	60,47	61,97	63,27	64,47	66,37	68,17
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	41,54	44,09	45,29	46,49	47,69	48,89	50,09
8	Tingkat Kemantapan jembatan	%	78,26	79	80	82	85	88	90
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	100	100	100	100	100
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase Rumah layak huni	%	90,73	91	91.25	91.50	91,75	92	92,25
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	96,18	96,75	97,31	97,88	98,44	99,01	99,57
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	9,27	9	8,75	8,5	8,25	8	7,75
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	49,64	50.89	52.14	53.39	54.64	55.89	57.14
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Cakupan Penanganan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	0	0	50	100	100	100	100
3	Pencapaian Respon time	%	53,85	54,85	55,85	56,85	57,85	59,85	61,85
4	Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana	%	11,50	11,00	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	63.996	0	500	1000	2000	2000	2000
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	40	0	100	100	100	100	100
8	Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti	%	80	80	80	80	80	80	80
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	53,86	100	100	100	100	100	100
6	Urusan Sosial								
1	Persentase Cakupan Pelayanan PPKS	%	57,56	70	73	76	80	84	88
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100	100	100	100	100
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1	Urusan Ketenagakerjaan								
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,72	1,80	1,88	1,96	2,04	2,12	2,20
2	Persentase tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	%	19,62	19,82	19,82	20,82	21,82	22,82	23,82
3	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)	%	46,05	46,3	46,6	46,9	46,9	47,0	47,1
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,00	12,82	15,38	17,95	17,95	17,95	17,95
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat								
1	Indek Pembangunan Gender	indeks	95,08	96,2	96,59	97,15	97,7	98,25	98,7
2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	89,7	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	12,64	12,65	12,66	12,67	12,67	12,68	12,68
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,0036	0,0036	0,0034	0,0032	0,0030	0,0028	0,0026
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,11	1,05	1	0.50	0.30	0.20	0.10
3	Urusan Pangan								
1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	5	5	10	10	10	10	10
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	77	77	77,8	79	84	85	85
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	122,29	122,66	123,04	123,42	127,12	131,06	131,06
4	Urusan Pertanahan								
1	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan 9masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah)	%	-	-	-	50	50	50	50
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,72	79,73	79,74	79,75	79,76	79,77	79,78
2	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	28	30	45	60	65	70	75
3	Persentase pengurangan sampah di wilayah kab	%	na	5	5	5	5	5	5
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	92,66	94	95	98	100	100	100
2	Perekaman KTP Elektronik	%	88,93	100	100	100	100	100	100
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	%	24,76	30	40	50	60	75	80
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	85,95	95	97,5	100	100	100	100
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	0	6	12	18	25	25	25
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa /Nagari	9	9	10	14	18	22	25
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	23,33	23,33	25,64	35,90	46,15	56,41	64,10
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Cakupan akseptor KB aktif	%	81,86	82	83,9	85,2	86,5	88	90

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,45	0.40	0,3	0,35	0,3	0,25	0,2
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,87	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	65,45	66	67	69	70,5	72	73,5
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	0	0	0	0	0	0	0
9	Urusan Perhubungan								
1	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan lalin	Korban Meninggal Per 100 Kecelakaan	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17
2	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,48	0,48	0,49	0,49	0,51	0,54	0,61
3	Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten)	%	29	29,7	30,3	40,4	30,4	38,4	38,4
10	Urusan Komunikasi dan Informasi								
1	Nilai Indeks SPBE	Nilai	1,70	1,94	2,14	2,34	2,54	2,74	2,94
2	Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi	%	84,4	87	89,6	92,2	94,8	97,4	100
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30,3	30,3	31	33	35	38	40
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	%	25,44	28	31	35	40	45	50
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya (Koperasi Berkualitas)	%	1,34	1,34	3,48	5,22	6,96	8,7	10,43
2	Persentase KSP/USP Koperasi berprestasi	%	2,7	2,7	8,11	13,51	18,92	24,32	29,73
3	Persetase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	5	5	5	5	5	5	5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	Urusan Penanaman Modal								
4	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	-28,45	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
1	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	20	25	40	43	45	50	54
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,22	0,50	5,75	10,55	15,75	20,75	25,25
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,56	1,56	5,25	10,35	15,55	20,75	25,55
4	Peningkatan prestasi olahraga								
	Ø emas	Buah	n.a	n.a	3	5	7	10	12
	Ø Perak	Buah	n.a	n.a	5	6	8	14	17
	Ø Perunggu	Buah	n.a	n.a	6	8	11	16	20
13	Urusan Statistik								
1	Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola	%	73,96	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Urusan Persandian								
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	%	0	0	22	24	26	28	30
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Urusan Kebudayaan								
1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	130	131	133	136	136	136	136
2	Jumlah Sanggar Budaya dibina	Sanggar	25	35	93	93	93	93	93
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	30,77	100	100	100	100	100	100
16	Urusan Perpustakaan								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	2501	2700	2800	3500	3700	3900	4100
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,95	67	68	69	70	71	72
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	18,66	19	20	21	22	23	24
17	Urusan Kearsipan								
1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	33,33	21,21	27,27	33,33	45,45	60,61	75,76
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai Rata	24,47	26	30	34	39	44	50
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai Rata	2,67	2,75	2,9	3,02	3,16	4,05	4,2
III	Urusan Pilihan								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
1	Kontribusi Subsektor Perikanan thd Sektor Pertanian	Persen	0,94	1,08	1,15	1,24	1,33	1,43	1,53
2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	31,58	31,58	32,10	32,6	33,40	34,2	35
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	1661	1991	2159	2343	2542	2758	2758
2	Urusan Pariwisata								
1	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang siap dipasarkan	Objek	10	10	10	4	5	5	5
2	Persentase Pelaku ekraf yang dibina	%	10	11	12	13	14	15	15
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-100	5	5	10	10	10	10
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	-46,58	5	10	10	15	15	15
5	Tingkat hunian	%	41,66	45	45	50	55	55	55

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	akomodasi								
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	25,29	25,4	25,5	25,6	25,7	25,8	25,9
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,61	1,61	1,61	1,8	1,9	2	2,1
3	Urusan Pertanian								
1	Kontribusi sektor pertanian	Persen	28,78	30,22	31,73	33,32	34,98	36,73	38,57
2	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan								
	- Padi	Ton	142581	100072	105136	110362	115755	121320	127061
	- Jagung	Ton	82909	86259	89743	93369	97141	101066	105147
	- Kacang tanah	Ton	757	870	879	886	898	907	907
	- Manggis	Ton	448	448	456	464	472	480	480
	- Cabe	Ton	7026	7026	7.149	7.274	7401	7530	7530
	- Bawang Merah	Ton	4305	4305	4.387	4.474	4564	4655	4655
	- Kopi	Ton	2754	3139	3.319	3.502	3678	3862	3862
	- Porang	Ton	na	150	165	182	200	220	242
	- Kelapa sawit	Ton	52.654	52.654	56.866	61.416	66943	72968	72968
	Populasi ternak besar	ekor	19864	20757	21691	22668	23688	24754	25868
	- Telor	Ton	434,24	434,24	442,92	451,78	460,82	470,03	470,03
3	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan kelas:								
	a. Pemula	Keltan	996	978	953	893	953	893	833
	b. Lanjut	Keltan	152	324	209	266	322	378	435
	c. Madia	Keltan	8	35	11	14	17	21	23
	d. Utama	Keltan	0	2	1	1	2	2	3
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,44	5,71	5,99	6,29	6,61	6,94	7,29
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	27,76	29,18	30,6	32,13	33,34	35,42	37,2
4	Urusan Energi Sumber Daya Mineral								
1	Cakupan pemanfaatan langsung panas bumi yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Urusan Perdagangan								
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	20,2	20,3	20,5	21	21,3	21,6	22
2	Persentase peningkatan produk unggulan daerah (Lokal)	%	30	40	50	60	70	80	100
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	65	71	74	77	85	89	89
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	19,03	20	25	30	35	40	50

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	50,02	52	54	56	58	60	62
6	Urusan Perindustrian								
1	Kontribusi Sektor Perindustrian	%	4,3	4,4	4,95	4,98	5	5,2	5,4
2	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	%	4,63	4,8	5	5	5,5	5,8	6
3	Persentase pertumbuhan izin Industri	%	5	5	10	15	20	25	30
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	30	35	38	40	42	43	45
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	45,95	60	80	90	100	100	100
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100
IV	Fungsi Penunjang								
1	Perencanaan								
1	Persentase Pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)	%	58,37	60,00	73,33	80,00	83,33	86,67	93,33
2	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	%	n.a	82	84	86	88	89	90
3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RKPD dan RPJMD								
4	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	%	n.a	80	82	84	86	88	90
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0	0	20	30	40	50	60
3	Keuangan								
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	109,29	100	100	100	100	100	100
3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	8,98	8,7	9,35	9,37	9,58	9,76	9,8
4	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	29,44	30,7	31	30,2	30,3	30,2	30,2
5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	1,94	2	2	2	2	2	2
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,09	64,1	64,25	64,5	64,75	64,75	65
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	0	0	0	0	0	0
9	Assets Management	Nilai	4	4	4	4	4	4	4
10	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,70	8,05	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Kepegawaian								
1	Indeks Sistem Merit	indeks	154	176	226	250	300	325	325

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	47,76	55	60	65	70	75	75
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,87	28,77	32,68	36,59	40,5	44,4	48,31
4	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,64	32,5	36,43	48,16	52,07	55,98	59,89
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	47,25	51,13	55,04	58,95	62,86	66,77	70,68
5	Pelayanan Pemerintahan lainnya								
1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	60	64	68	72	75	78	80
2	Nilai LPPD	Nilai	n.a	3,0400	3,0514	3,0763	3,1000	3,1153	3,1477
3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	70	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indek	n.a	baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	15,16	20	24	28	34	38	50
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	94,72	95	96	97	98	99	100
8	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	1	1	1	1	1	1	1
9	Maturitas SPIP	nilai	2,6	2,6	2,6	3	3,1	3,2	3,3
10	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	II+	II+	II+	III	III	III	III

BAB IX PENUTUP

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program perangkat daerah, dan program lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan serta pedoman transisi yang mengatur perencanaan tahunan pada akhir periode RPJMD.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD, serta merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Bupati/Wakil Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Bupati/Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan RPJMD kepada masyarakat;
4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD;
5. Penyusunan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026”.; dan
6. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

9.2 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, dipandang perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Bupati/Wakil Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan																								
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13.4	14.5	15.7	17.9	19.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68.8	69.2	70.3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9									
		Peningkatan kuantitas/ketahan an air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4.4	4.7	5.1	5.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	25.69	27.05	28.09	29.13	30.17	31.21	32.25
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten	25	30	35	40	45	50	55
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3									
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90.4	91.6	92.8	94	95.2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31										
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	77	77	78	79	83	85	86
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31										
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5										
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31										
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5										
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under_x005f nourish ment/PoU)	6.2	5.8	5.5	5.2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31										
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5.2	4.8	4.5	4.2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31										
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5										
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)			22	24	27	28	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah nagari rawan pangan yang ditangani	30	5	5	5	5	5	5	
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83.5	84	84.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase penurunan temuan pelaku usaha menggunakan zat berbahaya (per 100 sampel)	0	0	60	70	80	90	100	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	31.58	31.58	32.10	32.60	33.40	34.20	35.00
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742		Jumlah Poklaksar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	5	11	11	15	17	18	19
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39.27	40	40.5	41.6	42.4	44									
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (%)			45	50	55	60	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan penyuluh	57.43	50.88	64.04	77.19	90.35	94.74	100	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100		Persentase peningkatan kelas Kelompok Tani a. Madya b. c. d.								
																			a. Pemula	86.16	73.04	81.18	76.06	73.65	69.01	833.00	
																			b. Lanjut	13.15	24.20	17.80	22.66	24.88	29.21	435.00	
																			c. Madya	0.69	2.61	0.94	1.19	1.31	1.62	23.00	
																			d. Utama	0	0.15	0.09	0.09	0.15	0.15	3.00	
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23.4	24.2	25.1	26	26.9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350										
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	780	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)			250	250	300	350	350	350										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)			3.32	3.33	3.39	3.71	3.78	3.97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	1661	1991	2159	2343	2542	3595	2758	
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)			256,747	262,256	274,280	284,467	295,226	306,934										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)			5	20	40	60	80	100										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)			17	17	17	19	19	19										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)			52	67	72	79	85	93										
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)			80	82	84	86	90	92	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah POKMASWAS Perairan Umum	21	23	25	27	29	31	33	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)			6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	5	11	11	15	17	18	19	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)			15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742		Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	31.58	31.58	32.10	32.60	33.40	34.20	35.00	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)			39.27	40	40.5	41.6	42.4	44										
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3.6	3.7	3.8	3.9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)			60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	56.52	60.00	62.61	65.22	67.83	69.57	70.43	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69									
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)		50	50	60	70	80	90	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha	16.52	18.26	20.00	21.74	23.48	25.22	26.96
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)		45	100	120	125	130	615	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	133.66	0.1	1.02	0.51	0.50	0.50	0.25
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3.7	3.7	3.9	4	4.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83.5	84	84.5										
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi hasil pertanian							
																			Padi (Ton)	142,581	100,072	105,136	110,362	115,755	121,320	127,061
																			Jagung (Ton)	82,909	86,259	89,743	93,369	113,239	120,924	120,924
																			Kacang tanah (Ton)	757	772	787	803	819	836	853
																			Manggis (Ton)	898.9	448	456	464	472	480	480
																			Cabe (Ton)	5,281	7,026	7,149	7,274	7,401	7,530	7,530
																			Bawang merah (Ton)	4,318	4,305	4,387	4,474	4,564	4,655	4,655
																			Kelapa Sawit (Ton)	43,516	52,654	56,866	61,416	66,943	72,968	72,968
																			Kopi (Ton)	2,754	3,139	3,319	3,502	3,678	3,862	3,862
																			Porang (Ton)	na	150	165	182	200	220	242
																			Durian (Ton)	28,24	30	31	33	34	36	38
																			Kapulaga (Ton)	5,337	5,364	5,391	5,417	5,688	5,973	6,271
																			Populasi ternak besar (Ekor)	18,962	19,815	20,905	22,263	23,688	25,010	26,136
																			Telur (Kg)	4,173.83	434.24	442.93	451.78	460.82	470.03	470.03
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1.4	1.45	1.51	1.57	1.62	1.68									
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)			5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian/Ha/Tahun							
																			Padi	5,22	5,36	5,51	5,66	5,83	6,00	6,18
																			Jagung	5	5.01	5.03	5.04	5.05	5.06	5.08
																			Kacang tanah	1.83	1.84	1.85	1.87	1.89	1.91	1.93
																			Kelapa Sawit (ton/tahun)	24	6.26	6.26	6.56	7.15	7.80	8.50
																			Kopi	2.07	2.07	2.07	2.18	2.29	2.4	2.52

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100									
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0.63	0.6	0.57	0.54		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan penanggulangan bencana pertanian (hama)	100	100	100	100	100	100	100
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)		0.93	0.99	1.07	1.09	1.11	1.17									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit)		1,400	1,423	1,590	1,739	1,768	1,800									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)		3	3	3	3	3	3									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)		100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)		220,615	222,693	225,081	227,546	230,081	232,762									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3.32	3.33	3.39	3.71	3.78	3.97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	1661	1991	2159	2343	2542	3595	2758
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256,747	262,256	274,280	284,467	295,226	306,934									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93									
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742										
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39.27	40	40.5	41.6	42.4	44										
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5.5	6.5	7.5	8.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)			20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dikembangkan	4	4	4	4	4	4	4	4
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)			72	74	76	78		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	22. 22	55. 56						
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)			41,373	43,263	45,363	47,673		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	22. 22	55. 56	100	100	100	100	100	
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4.8	5	5.2	5.3	5.5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	10	11	12	13	14	15	15	
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2.5	4	5.5	7	8.5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang Dipasarkan	10	11	12	13	14	15	15	
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1.5	3	4.5	6	7.5	9										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29										
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1,689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)			0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Ruang Kreatif Yang Dikelola	0	0	0	1	1	2	2
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Objek Wisata yang Dikelola Oleh Pokdarwis	35	37	38	43	50	57	62	
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2	4	6	8	10	12										
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5.6	6.2	6.9	7.8	8.4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah kebijakan yang mendukung penanaman modal	1	2	0	1	1	1	1	
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)		4	4	4	5	5	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat	1	1	2	3	4	5	5	
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun))		4.8	5.1	5.6	6.1	6.7	7.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	85	85	90	95	100	100	100	
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)		15	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola	100	100	100	100	100	100	100	
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)		0	2	1	1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaaan dokumen tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	1	0	0	50	0	0	50	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha	n/a	40	40	45	50	60	65
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)		31.77	35.52	36.01	36.5	36.99	37.97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	19.62	19.82	19.82	20.82	21.82	22.82	23.82
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68									
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14.2	14.6	15	15.2	15.7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)				20	20	25	25									
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19.7	20.3	20.9	21.4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)				20	20	25	25									
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13.5	14	14.5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17									
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2.5	4	5.5	7	8.5									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1.5	3	4.5	6	7.5	9									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29									
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88									
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)		0	50	100	150	200	250									
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696									
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2	4	6	8	10	12									
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3.9	4.2	4.8	5.5	6.2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US\$)		#####	#####	#####	#####											
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0.3	1	3	7.5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)			5.5	5.8	6.2	6.5										
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)			6	6	6	6										
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27.5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA													
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
																									2020	2021	2022	2023	2024	2020
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)				11		19		19		19		19								
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)				1		2.5		4		5.5		7		8.5						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)				1.5		3		4.5		6		7.5		9						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)				3.19		3.21		3.23		3.25		3.27		3.29						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)				1.58		1.64		1.7		1.76		1.82		1.88						
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4																						
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23.2	22.2	21.1	20.1	18																						
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)				4		6		10		12		15		17						
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)				11		19		19		19		19		19						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)				1		2.5		4		5.5		7		8.5						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)				1.5		3		4.5		6		7.5		9						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)				3.19		3.21		3.23		3.25		3.27		3.29						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)				1.58		1.64		1.7		1.76		1.82		1.88						
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																												

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)				5	5	5	5									
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1.4	1.45	1.51	1.57	1.62	1.68									
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)				5	5	5	5									
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100									
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)		73.92	75	77	79	81	82	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	41.54	44.09	45.29	46.49	47.69	48.89	50.09
																			Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	78.26	79	80	82	85	88	90
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0			0																				
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42.85	50	50	62.5	62.5	62.5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	0	0	20	30	40	50	60
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	7,65	10	13	15	20	22	25
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12									
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0			0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	55,88	59,08	59,68	63.48	67.28	72.28	75

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	115,50	100	100	102.25	105.75	108.35	110
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	90,33	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69.07	71.07	74.07	77.07	80	83.02	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik :							
																			SD/MI	91,94	91,94	93.65	94.35	95.25	96.15	97
																			SMP/MTs	95,54	95,54	96.00	96.75	97.00	97.75	98
																			Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat	91.67	91,67	91,67	95,75	100.00	100.00	100
																			Persentase Pengawas yang bersertifikat	46,43	46,43	46,43	75,25	80,25	100.00	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :							
																			kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22
																			prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07
																			kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
																			Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1
																			rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
																		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target								Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	20	23	25	32	39	45	50		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna	26.67	26.67	53.33	80.00	100	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga menerapkan standar PHBS	74.92	75	77	79	81	83	85		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum	Persentase ketersediaan Farmasi	95	97	98	98.5	99	100	100		
																			Persentase ketersediaan alkes	60	61	62	63	65	67	69		
																			Cakupan pengawasan PIRT	85	90	91	92	93	94	95		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Angka Kesakitan :									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22		

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11		Persentase balita kurang gizi	6,6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100		Persentase balita stunting	13,7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)			82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak	77.04	77.04	80.05	82.50	85	88.50	90	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)			81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses sanitasi layak	59.17	59.17	61.97	63.27	64.47	66.37	68.17	
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)			0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)			77	79	81	83	85	87	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			75	77	79	81	83	85										
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)			70	71	72	73	74	75	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencapaian response time	53.85	54.85	55.85	56.85	57.85	59.85	61.85	
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang ditangani	57,56	70	73	76	80	84	88	
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100										
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)				100	100	100	100	100	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																										
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		26.66	40	50	60	70	80	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase rumah tangga yang memiliki KK	92,66	94	95	98	100	100	100		
								PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97.16	97.75	98	98.25	98.5	99	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP		88,93	100	100	100	100	100	100			
								PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)		91.47	94	95	96	97	98	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak		20	30	40	50	60	75	85			
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85,94	95	97.5	100	100	100	100		
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100											
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100											

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)			3	6	9	12	15	18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang memiliki akses pemanfaatan data kependudukan	0	24	48	72	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)			1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1									
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)			3	3	3	3	3	3	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan dokumen profil kependudukan (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)			80	80	85	90	90	90	Program Pengendalian Pe	Laju pertumbuhan penduduk	0.072	0,067	0,062	0,057	0,052	0,047	0,047
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	Program Pembinaan Kelu	Cakupan akseptor KB aktif	80,26	80,75	81,25	81,75	82,25	82,75	83,25
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)			51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	28,33	30,40	32,50	35,10	37,30	39,60	41,20
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	100	-	20	40	60	80	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65.2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687									
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)				25	25	25	25	25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)				100	100	100	100	100									
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)				30	35	40	50										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :							
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk		28	27	26	25	24	23	22	
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk		0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07	
									Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	kasus diare per 100 ribu penduduk		22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46	
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita		4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1	
									Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk		16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85	
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	API Malaria per 1000 penduduk		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
									Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)		21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05	
									Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Persentase balita gizi buruk		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
									Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Persentase balita kurang gizi	6,6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6		

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																										2020	2021
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kopeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100									
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5									
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87									
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11									
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6									
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20.6	19.5	18.6	17.6	16	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82									
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
																									2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6											
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12.9	12.2	11.6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96											

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target									Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100											

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61.8	62.2	62.5	62.9	63.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan akseptor KB aktif	80,26	80,75	81,25	81,75	82,25	82,75	83,25	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.6	8.3	8	7.7	7.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75										
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75										
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)			51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24.1	21.1	18.4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Persentase balita kurang gizi	6,6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
																									2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19											
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)				82	82	84	86	88	90										
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)				81	83	85	87	88	90										
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)				1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan akses PSU	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100											
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100											
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100											
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100											
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291.79	292.98	294.15	295.31												
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82.5	83	84	84.5												

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)				22	24	27	28											
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)				83	83.5	84	84.5											
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)		10,800	11,300	11,800	12,300	12,800	13,300											
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)		299	350	400	450	500	544											
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah LPM Mandiri (LPM)		0	7	15	25	37	50											
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)		2,319	2,400	2,500	2,600	2,700	2,800											
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62											
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)		5	10	20	30	40	50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	60	70	80	90	100	100	100		

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11										
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742										
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39.27	40	40.5	41.6	42.4	44										
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5											
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1.4	1.45	1.51	1.57	1.62	1.68										
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0.63	0.6	0.57	0.54											
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)			4	8	12	16											
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)			100	100	100	100											
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8.1	7.8	7.5	7.3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :								
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk		28	27	26	25	24	23	22

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Persentase balita kurang gizi	6,6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Persentase balita kurang gizi	6,6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Persentase balita kurang gizi	6,6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.1

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Persentase balita kurang gizi	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Insidensi hepatitis B (persen)	1.68	1.54	1.39	1.24	1.09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190			rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96			API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2			Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8			Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19			Persentase balita kurang gizi	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40			Persentase balita stunting	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6											
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9.1	9	8.9	8.8	8.7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96			kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90			prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86			kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96			Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190			rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96			API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19								
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :							
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19		Persentase balita kurang gizi	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34,4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19										
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19										
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19										
			Persentase tekanan darah tinggi	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan :									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk	28	27	26	25	24	23	22		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	0,13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	0.07		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		kasus diare per 100 ribu penduduk	22,5	22,16	21,8	21,48	21,14	20,80	20,46		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	4,7	4.6	4.5	4.4	4,3	4.2	4.1		

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	16,5	15,37	14,24	13,11	11,98	10,85	10,85
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		API Malaria per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	21,42	20,07	19,73	19,39	19,05	18,39	18,05
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Persentase balita gizi buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Persentase balita kurang gizi	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Persentase balita stunting	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna	26.67	26.67	53.33	80.00	100	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96										
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna	26.67	26.67	53.33	80.00	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi keehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100										
									PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6										
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	55,88	59,08	59,68	63.48	67.28	72.28	75	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	115,50	100	100	102.25	105.75	108.35	110	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	90,33	100	100	100	100	100	100	
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38										
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27										
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57										
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.75	8.85	8.95	9.06	9.16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	55,88	59,08	59,68	63.48	67.28	72.28	75	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	115,50	100	100	102.25	105.75	108.35	110	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	90,33	100	100	100	100	100	100	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13.41	13.6	13.79	13.97	14.16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	55,88	59,08	59,68	63.48	67.28	72.28	75
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	115,50	100	100	102.25	105.75	108.35	110
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	90,33	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)		27	33	39	45	51	57									
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69.07	71.07	74.07	77.07	80	83.02									
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)		6	21	36	51	66	81									
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.34	68.1	69.87	71.66	73.49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	Program Pemenuhan Hak	Status kabupaten layak anak	belum	belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83.5	84	88	92	96	100	Pogram Perlindungan Khu	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	89,7	89,7	100	100	100	100	100

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)			2	3	4	5	6	7									
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)			83,5	84	88	92	96	100									
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.212	91.278	91.279	91.335	91.386	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks pemberdayaan gender	53,15	53,15	54,15	55,30	57	58,5	60
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.245	73.501	73.741	73.966	74.177	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09									
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52.512	53.134	53.756	54.378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09									
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			84	84	88	92	96	100	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0,097	0,021	0,018	0,015	0,012	0,009	0,005

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)		69.5	70	70.5	71	71.5	72	Program Peningkatan Kua	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	n.a	10	20	30	40	50	60
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.33	56.5	56.5	58.17	57.67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)		14	15	16	17	18	20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda							
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda baru (orang)		230	268	348	348	348	1890									
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27.9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	Program Perlindungan dan	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25.6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687									
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	2E+06	2E+06	1E+06	1E+06	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000									
			Bidang tanah yang diredistribusi	750000		0		8E+06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)		65	70	75	80	85	90									
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6E+06		0		6E+07	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95									
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95									
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)		50	55	60	70	75	80									
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44.8	46.6	48.4	50.2	52.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	55,88	59,08	59,68	63.48	67.28	72.28	75
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	115,50	100	100	102.25	105.75	108.35	110
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	90,33	100	100	100	100	100	100

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68									
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.																		
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68									
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																								
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)		2.7	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila	0	0	0	0	0	0	0
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)			8	8	8	8										
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)			21	23	23	23										
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)			11	16	21	26										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)				15	15	15	15										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)				15	15	15	15										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)				30000	35000	40000	45000										
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemuenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)				4	8	12	16										
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14										
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)		N/A	3	6	9	12	15										
									PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)		N/A	6	12	18	24	30										
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)			1.41	1.52	1.62	1.72	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan (pustaka konvensional dan digital)	2501	2700	2800	3500	3700	3900	4100		
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42.85	50	50	62.5	62.5	62.5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	0	0	20	30	40	50	60	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50										
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																									
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92.84	93.44	94	94.63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82.35	83.5	84.8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55.46	56.85	58.23	59.62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95										
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3.05	3.1	3.3	3.6	4																			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses sanitasi layak	59.17	59.17	61.97	63.27	64.47	66.37	68.17	
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan akses PSU	1,25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5.95	4.46	2.98	1.49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19										
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
																									2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19											
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penangan; 3.70% pengura ngan	73.70% penangan; 5.51% pengura ngan	75.28% penangan; 9.13% pengura ngan	77.64% penangan; 14.57% pengura ngan	80% penangan; 20% pengura ngan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan akses PSU	1,25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)			75	75	75	75	75	75	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kader lingkungan yang mendapat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	0	5	28	53	70	97	123		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.7%)	93.8% (JP: 25.4%, BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1%, BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga menerapkan standar PHBS	74.92	75	77	79	81	83	85			
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96												
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90												
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86												
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96												
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190												

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100										
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11										

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19									
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pemukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20									
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7.3	8.4	10	12.2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)			82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak	77.04	77.04	80.05	82.50	85	88.50	90
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)			0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52.502	55.181	57.06	58.105	58.499	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5									
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	25.69	27.05	28.09	29.13	30.17	31.21	32.25
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5									
			Luas lahan pertanian padi dan non_x005f padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229	115943	116143	116343	116343	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5									

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	35	35	36	37	38	39	40
																			Persentase penduduk terdampak bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
																			Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	80	80	80	80	80	80	80
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4.27	11.433	11.433	11.433	11.433	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5									
									PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)		1	10	10	10	10	10									
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0.29	0.297	0.303	0.304	0.304	0.384	0.384
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17
																		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektifitas	0,48	0,48	0,49	0,49	0,51	0,54	0,61
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100	100	100	100	100	100	100

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			0																				
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)			0																				
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)		1	1	1	1	1	5									
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100									
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45									
		Energi Dan Ketenagalistrika n	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9									
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9									
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4.71	4.92	5.36	5.91	6.07	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)		3	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi	84.4%	87	89.6	92.2	94.8	97	100
																			Persentase penanganan terhadap gangguan cyber	0%	100	100	100	100	100	100

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72.6	74.2	79.2	80.7	82.3																		
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97.5	98	98.5	99	100																		
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75.7																		
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																								
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKU	93.26	93.26	93.26	93.26	93.26	93.26	93.26
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA	67.5	67.53	67.56	67.59	67.62	67.65	67.68
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58.5	59	59.5	60	60.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80									
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61.6	62.5	63.5	64.5	65.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	ITL	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA																							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target																					
																									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)			19		19		19		19		19		19		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kabupaten		0.15		0		0.2		0.22		0.24		0.25		0.3
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0.34	0.59	0.81	1	1.15																																
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4.5	4	3.5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)			70		71		72		73		74		75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana		35		35		36		37		38		39		40	
																										Persentase penduduk terdampak bencana yang ditangani		100		100		100		100		100		100		100
																										Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya		80		80		80		80		80		80		80
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11.8	12.5	12.8	12.8	13.2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)			28		29		33.3		35.7		51.7		51.8																	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45.8	50.7	53.1	57.2	58.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)					5		5		5		5																			
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)			1.4		1.45		1.51		1.57		1.62		1.68																	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)					5		5		5		5																			
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)			20		20		20		20		20		100																	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)		3	1.08	1.28	1.44	1.65	5.48										
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0.63	0.6	0.57	0.54											
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)			5	7	8	10											
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)		3	3	3	3	3	15										
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26										
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20										
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3										
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8.5	9	9.3	9.4	9.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)		2	2	3	3	3	3										
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses sanitasi layak	59.17	59.17	61.97	63.27	64.47	66.37	68.17	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km)		1	2	10	15	25	36	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik	NA	30	32	36	38	40	50	
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%)			60	65	70	75		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Layanan Persampahan	27.78	45	75	80	100	100	100	
																			Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	NA	22	45	60	65	70	75	
																			Persentase pengurangan sampah	NA	5	5	5	5	5	5	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2.3	2.5	2.6	2.9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80										
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100										
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45										
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6.5	6.6	6.8	7	7.3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000										
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350										
7		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																									
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75.3	75.35	75.4	75.45	75.5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)		3.26	3.27	3.28	3.29	3.3	3.31	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol Yang Mendapat Pembinaan	100	100	100	100	100	100	100	100
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95.07	95.27	95.47	95.67	95.67										Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas Yang Diawasi	100	100	100	100	100	100	100	100

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85																				
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)		100	100	100	100	100	100											
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)		100	100	100	100	100	100											
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)		8	12	16	18	20	22											
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)		7	8	10	12	14	16		Nilai LAKIP/SAKIP	54,25 (CC)	60 (CC)	65 (B)	70 (B)	80 (A)	85 (A)	90 (A)		
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)		5	7	9	11	13	15											
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)		65	70	75	80	85	90	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas SPIP	2,6	2,6	2,6	2,8	3	3,1	3,2		
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70																				
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0.26	0.25	0.24	0.22	0.2																				
			Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kasus Narkoba Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kasus Narkoba Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kasus Narkoba Yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100

PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dihitung dan dikeluarkan oleh BPS
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal Angka Rata-rata lama sekolah dihitung dan dikeluarkan oleh BPS
Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun keatas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah dimasa mendatang Angka Harapan Lama Sekolah dihitung dan dikeluarkan oleh BPS
Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan (7 -15) Hafiz Qur'an	
a). 1 Juz	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah 7 – 15 tahun yang hafiz Quran 1 juz}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah 7 – 15 tahun}} \times 100$
b). 2 Juz	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah 7 – 15 tahun yang hafiz Quran 2 juz}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah 7 – 15 tahun}} \times 100$
c). Lebih atau sama 3 Juz	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah 7 – 15 tahun yang hafiz Quran } \geq 3 \text{ juz}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah 7 – 15 tahun}} \times 100$
Angka Harapan Hidup	Umur harapan hidup adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah Umur Harapan Hidup dihitung dan dikeluarkan oleh BPS
Prevalensi Balita Stunting	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Balita pada waktu tahun tertentu}} \times 100$
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100$ Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja dihitung berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh BPS
Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$ Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh BPS

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan
Persentase Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin (persentase penduduk yang pengeluarannya berada dibawah Garis Kemiskinan (GK))}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ <p>Persentase Penduduk Miskin dihitung berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh BPS</p>
Indeks Gini Ratio	<p>Indeks Gini Ratio adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut</p> <p>Indek Gini dihitung dan dikeluarkan oleh BPS</p>
Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah PDRB ADHK pada tahun } n - \text{Jumlah PDRB ADHK pada Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah PDRB ADHK pada Tahun } (n-1)} \times 100$ <p>PDRB dihitung berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh BPS</p>
Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Indeks Reformasi Birokrasi adalah indek yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Indek Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>
Indeks SPBE	<p>Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat telaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.</p> <p>Indeks SPBE dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
Nilai/Predikat SAKIP	<p>Nilai/Predikat SAKIP merupakan Nilai/Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB</p>
Opini BPK terhadap LKPD	<p>Opini BPK terhadap LKPD adalah Nilai Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	<p>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan Nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri</p>
Indek Pelayanan Publik	<p>Indeks Pelayanan Publik merupakan indek yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pemerintah.</p> <p>Interval Indek pelayanan Publik adalah 1-5</p> <p>Indeks pelayanan publik dihitung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17</p>

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan
	Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Indek Infastruktur Wilayah	Indek Infastruktur Wilayah = $\frac{[40\%\{50\% (50\% \text{ Kemantapan Jalan} + 50\% \text{ Kemantapan Jembatan})\} + \{40\% (50\% \text{ Daerah Irigasi Kondisi Baik} + 50\% \text{ Drainase Kondisi Baik})\} + (10\% \text{ Bangunan Sesuai Standar})] + [20\%\{50\% \text{ Pengurangan sampah} + 50\% \text{ Pengelolaan sampah}\}] + [30\% \text{ Kinerja Lalu Lintas}] + [10\% (\{50\% \text{ Nagari Tangguh Bencana} + 30\% \text{ Pelayanan Evakuasi Korban Bencana} + 20\% \text{ Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang ditangani}\} + \{100\% \text{ Capaian Waktu Tanggap (Response time)}\})]}{2}$
Indeks Ketersedian Infrastruktur Dasar	Indeks Ketersedian Infrastruktur Dasar = (0,4122 x Kondisi jalan mantap)+ (0,4149 x akses air minum layak) + (0,462x Akses Sanitasi Layak) + (0,4368 x Rasio elektrifikasi) + (0,5037 x Akses telekomunikasi)
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab	Indeks Kesulitan Geografis merupakan Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Interval Nilai 0-100 Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dimaksud merupakan rata-rata dari Indek Kesulitan Geografis seluruh Nagari di Kabupaten Solok Selatan Indek Kesulitan Geografis dihitung dan dikeluarkan oleh BPS
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi. Indeks ketahanan daerah dihitung dari 71 Indikator yang ditetapkan oleh BNPB Interval nilai 0-5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH kabupaten /kota = (0,376 X IKA)+ (0,405 X IKU)+ (0,219 X IKTL) IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indek Kulaitas Udara IKTL= Indek Kualitas Tutupan Lahan
Jumlah lembaga kesenian	$\frac{(\text{Jumlah Group atau Lembaga atau Perkumpulan kesenian pada tahun } n) - (\text{Jumlah Group atau Lembaga atau Perkumpulan kesenian pada Tahun } (n-1))}{\text{Jumlah Group atau Lembaga atau Perkumpulan kesenian pada Tahun } (n-1)} \times 100$

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan
Jumlah Klub/ Perkumpulan Olahraga	$\frac{(\text{Jumlah Klub atau Perkumpulan Olahraga pada tahun } n) - (\text{Jumlah Klub atau Perkumpulan Olahraga pada Tahun } (n-1))}{\text{Jumlah Klub atau Perkumpulan Olahraga pada Tahun } (n-1)} \times 100$
Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)	$\frac{\text{Jumlah lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)}}{\text{Jumlah lembaga Adat (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)}} \times 100$
Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	$\frac{\text{Jumlah lembaga/Group/Perkumpulan Seni dan budaya yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga/Group/Perkumpulan Seni dan budaya}} \times 100$
Persentase Klub/ Perkumpulan Olahraga yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Klub/ Perkumpulan Olahraga yang aktif}}{\text{Jumlah Klub/ Perkumpulan Olahraga}} \times 100$
Persentase PPKS yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)}} \times 100$
Indeks Desa Membangun	<p>Indeks Desa Membangun adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). <p>Interval Indek Desa Membangun 0-1 Nilai Indeks Desa Membangun yang dimaksud merupakan Rata-Rata Kabupaten merupakan rata-rata dari Indeks Desa Membangun seluruh Nagari di Kabupaten Solok Selatan Indeks Desa Membangun dihitung dan di publikasikan oleh Kementerian Desa, PDT DAN Transmigrasi</p>
Indeks Pembangunan Gender	<p>Indek Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010 ndek Kesulitan Geografis dihitung dan dikeluarkan oleh BPS</p>

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan
Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR}}{\text{Jumlah Perusahaan yang wajib mengeluarkan CSR}} \times 100$
Perentase Nagari Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari}} \times 100$
Persentase pemamfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Total CSR}}{\text{Jumlah Alokasi CSR yang sesuai dengan Prioritas Pemerintah}} \times 100$

2. INDIKATOR TERKAIT DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
INDIKATOR TERKAIT DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Urusan Wajib		
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar		
Urusan Pendidikan		
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada daerah bersangkutan}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan SD}}{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada daerah bersangkutan}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan SMP}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada daerah bersangkutan}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidika dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dar menengah pada daerah bersangkutan}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Angka Melek Huruf	proporsi penduduk berusia 15-64 tahun yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya Angka melek huruf dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
APK SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang Pendidikan SD/MI}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
APK SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang Pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
APM SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7 – 12 Tahun pada jenjang Pendidikan SD/MI}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
APM SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13 – 15 pada jenjang Pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan SD}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan SMA/MAN}}{\text{Jumlah lulusan SMP/MTs}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP)	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang menerapkan kurikulum Tahfiz}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Persentase Guru SD/MI Bersertifikat Pendidik	$\frac{\text{Jumlah Guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi)}}{\text{Jumlah Guru SD/MI}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Persentase Guru SMP/MTs Bersertifikat Pendidik	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi)}}{\text{Jumlah Guru SD/MI}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Kepala Sekolah}}{\text{Jumlah Kepala sekolah}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Persentase Pengawas yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Pengawas yang memiliki sertifikat Pengawas}}{\text{Jumlah Pengawas}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Urusan Wajib Kesehatan		
Angka Kematian Ibu Melahirkan	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan dan kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama}} \times 1000$	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang meninggal pada umur < 1 tahun pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama}} \times 1000$	Dinas Kesehatan
Peningkatan Tipe Rumah Sakit	Tipe rumah sakit rujukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 340/MENKES/PER/III/2010.	RSUD
Rasio daya tampung RS Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	RSUD
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah rumah sakit}} \times 100$	RSUD
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil}} \times 100$	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu bersalin}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah bayi balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penduduk 15 – 29 tahun}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 29 tahun}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarr}}{\text{Jumlah orang terduga TBC}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna	$\frac{\text{Capaian Nilai Akreditasi Paripurna}}{\text{Total Nilai Akreditasi Paripurna}} \times 100$	RSUD
Prevalensi TB BTA+ per 100 ribu penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk penderita TB BTA}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan
Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk	$\frac{\text{Jumlah kasus HIV}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	Dinas Kesehatan
Prevalensi kasus diare per 100 ribu penduduk	$\frac{\text{Jumlah kasus diare}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita	$\frac{\text{Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Angka kesakitan DBD per 100 ribu penduduk	$\frac{\text{Jumlaj Kasus DBD}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan
API Malaria per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang menderita malaria}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan
Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar)	$\frac{\text{Jumlah kematian}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan
Persentase / prevalensi balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase /prevalensi balita kurang gizi	$\frac{\text{Jumlah balita kurang gizi}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase / prevalensi balita stunting	$\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kesehatan}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase ketersediaan Farmasi	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan farmasi}}{\text{Jumlah Farmasi yang dibutuhkan}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase ketersediaan alkes	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan alkes}}{\text{Jumlah alkes yang dibutuhkan}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Cakupan pengawasan PIRT	$\frac{\text{Jumlah PIRT (Pelaku Industri Rumah Tangga) yang terawasi}}{\text{Jumlah PIRT (Pelaku Industri Rumah Tangga)}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Persentase rumah tangga menerapkan standar PHBS	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menerapkan PHBS}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT)}} \times 100$	Dinas Kesehatan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Akses air minum layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT)}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Akses sanitasi layak	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Panjang drainase yang berfungsi dengan baik}}{\text{Panjang drainase}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	$\frac{\text{Jumlah gedung pemerintah laik fungsi}}{\text{Jumlah gedung pemerintahan}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Tingkat kemantapan jalan kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	$\frac{\text{Jumlah jembatan kabupaten kondisi mantap}}{\text{Jumlah jembatan kabupaten}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	$\frac{\text{Jumlah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang}}{\text{Jumlah kebijakan pembangunan yang dilakukan}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase kepatuhan IMB Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemamfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB berlaku}} \times 100$	Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		
Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani, dibangun atau direhab}}{\text{Jumlah rumah korban bencana}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah, bangunan, penerima subsidi uang sewa dan penerima rumah layak huni akibat program pemerintah}}{\text{Jumlah rumah yang terkena relokasi akibat program pemerintah}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Jumlah kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase rumah tangga pengguna listrik	$\frac{\text{Jumlah unit rumah berlistrik}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase rumah yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah terfasilitasi PSU atau akses PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Ketersediaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman	$\frac{\text{Jumlah elemen data dan informasi yang tersedia}}{\text{Jumlah elemen data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman harus tersedia}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Kabupaten		
Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat		
Cakupan penegakan Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Ketersediaan Satlinmas	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang tersedia}}{\text{Jumlah Satlinmas yang harus tersedia sesuai standar}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana	$\frac{(\text{Jumlah jiwa terdampak bencana pada tahun } (n-1) - \text{Jumlah jiwa terdampak bencana pada Tahun } (n))}{\text{Jumlah jiwa terdampak bencana pada Tahun } (n-1)} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah jumlah laporan/pengaduan gangguan Trantibum}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Capaian waktu tanggap (response time)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi bencana}}{\text{Jumlah Penduduk pada daerah rawan bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penduduk terdampak bencana yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah penduduk terdampak bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	$\frac{\text{Jumlah daerah pascabencana yang ditindaklanjuti penanganannya}}{\text{Jumlah daerah terkena bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Wajib Sosial		
Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	$\frac{\text{Jumlah tenaga pendamping pemberdayaan sosial}}{\text{Jumlah tenaga pendamping pemberdayaan sosial seharusnya (sesuai standar)}} \times 100$	Dinsos PMD
Persentase PPKS yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani}}{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)}} \times 100$	Dinsos PMD
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti}} \times 100$	Dinsos PMD

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial}}{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)}} \times 100$	Dinsos PMD
Persentase korban bencana yang ditangani (Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota)	$\frac{\text{Jumlah penduduk korban bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah penduduk terdampak bencana}} \times 100$	Dinsos PMD
Jumlah taman makam pahlawan dikelola	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola pemerintah	Dinsos PMD
Urusan WajibTerkait Pelayanan Non Pelayanan Dasar		
Urusan Wajib Tenaga Kerja		
Ketersediaan dokumen tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	$\frac{\text{Jumlah dokumen tenaga kerja yang ada}}{\text{Jumlah dokumen tenaga kerja yang seharusnya tersedia}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah kasus tenaga kerja yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan/laporan kasus tenaga kerja}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan urusan ternaga kerja}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)	$\frac{\text{Jumlah PDRB berdasarkan ADHB}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah keseluruhan calon tenaga kerja yang dilatih dalam satu tahun}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Pencegahan dan tindaklanjut penyelesaian Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus hubungan industrial dan tenaga kerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\text{Jumlah kejadian perselisihan yang terdaftar}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Pemberdayaan Perempuan		

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat										
Dan Pelindungan Anak												
Indeks pemberdayaan gender	<p>Indek pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur peran aktif wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik</p> <p>Indikator Indeks Pemberdayaan Gender</p> <table border="1"> <tr> <th>Dimensi</th><th>Indikator</th><th>IDG</th></tr> <tr> <td>Keterwakilan di Parlemen</td><td>Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan</td><td rowspan="3">atau GEM</td></tr> <tr> <td>Pengambilan Keputusan</td><td>Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki-laki dan perempuan</td></tr> <tr> <td>Distribusi Pendapatan</td><td>Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan</td></tr> </table> <p>Sumber: Badan Pusat Statistik</p>	Dimensi	Indikator	IDG	Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	atau GEM	Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki-laki dan perempuan	Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	DP2KB, PP&PA
Dimensi	Indikator	IDG										
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	atau GEM										
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki-laki dan perempuan											
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan											
Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender pada belanja program dan kegiatan APBD}}{\text{Jumlah belanja program dan kegiatan APBD (diluar operasional, hibah, bansos, dan belanja transfer)}} \times 100$	DP2KB, PP&PA										
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan}} \times 100$	DP2KB, PP&PA										
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	DP2KB, PP&PA										
Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	DP2KB, PP&PA										
Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar}}{\text{Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)}} \times 100$	DP2KB, PP&PA										
Status kabupaten layak anak	Kabupaten Layak Anak adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA kepada kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terencana. Penghargaan KLA dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama											
Persentase OPD yang responsif gender	$\frac{\text{Jumlah OPD yang responsif gender}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	DP2KB, PP&PA										
Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan tindakan kekerasan anak}} \times 100$	DP2KB, PP&PA										
Urusan Wajib Pangan												
Persentase nagari yang memiliki infrastruktur kemandirian pangan	$\frac{\text{Jumlah nagari yang memiliki infrastruktur kemandirian pangan}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan										
Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH merupakan indikator mutu gizi, keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (nilai maksimal 100)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan										

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
	<p>Gambar 1. Pembobotan dalam Kelompok Pangan PPH</p>	
Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah di BULOG	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase nagari rawan pangan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah nagari rawan pangan yang ditangani}}{\text{Jumlah nagari rawan pangan}} \times 100$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase temuan pelaku usaha menggunakan zat berbahaya (per 100 sampel)	$\frac{\text{Jumlah temuan pelaku usaha menggunakan zat berbahaya}}{\text{Jumlah sampel}} \times 100$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Wajib Pertanahan		
Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan (masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah)	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi}}{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang dilaporkan}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	$\frac{\text{Luas ganti rugi tanah untuk pembangunan yang diselesaikan}}{\text{Luas tanah yang direncanakan untuk pembangunan}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Urusan Wajib Lingkungan Hidup		
Jumlah dokumen perencanaan LH yang disusun	Jumlah dokoumen perencanaan yang disusun pada tahun tertentu	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH kabupaten /kota = (0,376 X IKA)+ (0,405 X IKU)+ (0,219 X IKTL)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Indek Kualitas Air (IKA)	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$ <p> $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat </p>	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Indek Kualitas Udara (IKU)	IKU = 100 – [50/0.9 x (leu – 0.1)]	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Indek Tutupan Lahan (ITL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan </p>	
Persentase RTH Kabupaten	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase Limbah B3 yang terkelola usaha dan/atau perusahaan	$\frac{\text{Limbah B3 yang dikelola usaha dan/atau kegiatan}}{\text{Limbah B3 yang dihasilkan usaha dan/atau kegiatan}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah}}{\text{Jumlah Usaha dan kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang diakui	$\frac{\text{Jumlah MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH yang diakui}}{\text{Jumlah MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase Kader lingkungan yang mendapat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kader Lingkungan yang mendapat pendidikan pelatihan dan penyuluhan LH}}{\text{Jumlah Kader Lingkungan}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima (Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi)	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima (Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi) pada tahun tertentu	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat/ penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/kasus lingkungan hidup yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan/kasus lingkungan}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Cakupan Layanan Persampahan	$\frac{\text{Luas wilayah yang mendapatkan layanan persampahan}}{\text{Luas wilayah yang direncanakan mendapatkan layanan persampahan}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total Volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total timbunan sampah}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Persentase pengurangan sampah	$\frac{\text{Jumlah timbunan sampah sebelumnya}(n - 1) - \text{jumlah sampah tahun } n}{\text{jumlah sampah tahun sebelumnya } (n - 1)} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan lingkungan Hidup
Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Persentase rumah tangga yang memiliki KK	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki KK}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 17 \text{ yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 17 \text{ atau telah menikah}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } < 17 \text{ yang memiliki kartu identitas anak}}{\text{Jumlah penduduk usia } < 17 \text{ atau belum menikah}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	<p>❖ Rasio bayi berakte kelahiran = $\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$</p> <p>❖ Rasio pasangan berakte nikah = $\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase perangkat daerah yang memiliki akses pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses pemanfaatan data kependudukan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Ketersediaan dokumen profil kependudukan (dokumen)	Tersusunnya dokumen Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
Jumlah nagari pemekaran	Jumlah Nagari Pemekaran	Dinsos PMD
Persentase nagari mandiri	$\frac{\text{Jumlah Nagari mandiri}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$	Dinsos PMD
Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah Nagari berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan IDM}}{\text{Jumlah Nagari berkembang pada awal tahun}} \times 100$	Dinsos PMD
Jumlah kerjasama nagari di fasiltasi	Jumlah kerjasama yang difasilitasi baik kerjasama antar nagari, nagari dengan lembaga non pemerintahan, LSM, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi	Dinsos PMD
Persentase nagari yang lengkap administrasi pemerintahan nagari (perencanaan, keuangan dan asset)	$\frac{\text{Jumlah Nagari yang lengkap administrasi pemerintahan nagari (perencanaan, keuangan dan asset) dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$	Dinsos PMD
Persentase lembaga kemasyarakatan nagari (LPMN) aktif	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan nagari (LPMN) aktif}}{\text{Jumlah LPMN}} \times 100$	Dinsos PMD
Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
Laju pertumbuhan penduduk	$\frac{(\text{Jumlah penduduk tahun } n - \text{jumlah penduduk tahun sebelumnya})}{\text{jumlah penduduk tahun sebelumnya}} \times 100$	DP2KB, PP&PA
TFR (Angka Kelahiran Total)	<p>TFR (Angka Kelahiran Total)= rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya</p> $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i</p> <p>i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>	DP2KB, PP&PA
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	DP2KB, PP&PA
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB yang tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	DP2KB, PP&PA

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Cakupan akseptor KB aktif	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	DP2KB, PP&PA
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	DP2KB, PP&PA
Urusan Perhubungan		
Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	$\frac{\text{Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan}}{\text{Jumlah total kecelakaan}} \times 100$	Dinas Perhubungan
Rasio konektifitas	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) ❖ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kab/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) ❖ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kab/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kab/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) 1. Jumlah trayek yang dilayani adalah Jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP 2. Jumlah kebutuhan trayek adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu	Dinas Perhubungan
Persentase Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio di jalan)	$\frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas jalan raya}} \times 100$	Dinas Perhubungan
% Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Pelayaran	$\frac{(\text{Jumlah penduduk tahun n} - \text{jumlah penduduk tahun sebelumnya})}{\text{jumlah penduduk tahun sebelumnya}} \times 100$	Dinas Perhubungan
% Penduduk yang terlayani angkutan sungai	$\frac{\text{Jumlah rata rata penumpang angkutan sungai)}}{\text{Jumlah penduduk yang transportasi utamanya transportasi air}} \times 100$	
Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika		
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Merupakan hasil survey masyarakat melalui website terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komuikasi dan Informatika
Persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi	$\frac{\text{Jumlah jorong dilayani akses telekomunikasi}}{\text{Jumlah total jorong}} \times 100$	Dinas Komuikasi dan Informatika
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	Dinas Komuikasi dan Informatika
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100$	Dinas Komuikasi dan Informatika

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase penanganan terhadap gangguan cyber	$\frac{\text{Jumlah gangguan cyber yang ditangani}}{\text{Jumlah total gangguan}} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya/ Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi meningkat skala usahanya, aset dan kelembagaannya}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro keseluruhan}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase KSP/USP Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah KSP/USP Sehat}}{\text{Jumlah KSP/USP}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Koperasi yang meningkat skala usaha	$\frac{\text{Jumlah Koperasi meningkat permodalan/skala usahanya}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase pertumbuhan UMKM	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n - \text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Peningkatan Skala Usaha UMKM	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Urusan Wajib Penanaman Modal		
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Investasi (PMDN + PMA) tahun } n - \text{Jumlah Investasi (PMDN + PMA) tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Investasi (PMDN + PMA) tahun } (n - 1)} \times 100$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah kebijakan yang mendukung penanaman modal	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan/dilaksanakan yang mendukung iklim investasi dan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah Investor yang berminat	Jumlah investor yang berminat atau mempunyai keinginan untuk berinvestasi di daerah (orang/lembaga/badan usaha) yang dibuktikan oleh melakukan peninjauan lapangan / surat / persiapan berkas perizinan dll	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Persentase perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang patuh terhadap regulasi penanaman modal}}{\text{Jumlah perusahaan yang diatur dalam regulasi penanaman modal}} \times 100$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Jumlah dokumen perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan	Jumlah dokumen perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan dalam satu tahun sesuai dengan kewenangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Persentase data perizinan dan non perizinan yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah data pokok perizinan dan non perizinan yang terkelola}}{\text{Jumlah data pokok perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan}} \times 100$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga		
Persentase Organisasi kepemudaan aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi kepemudaan aktif}}{\text{Jumlah Organisasi kepemudaan}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang berwirausaha}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah medali yang didapatkan oleh atlet daerah dalam event provinsi, nasional maupun internasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Jumlah wirausaha muda	Jumlah akumulasi wirausaha muda pada satu tahun Wirausaha muda adalah seseorang yang masih berusia muda mampu menjalankan, mengatur, dan berani mengambil resiko bagi pekerjaan yang dijalankannya dalam dunia usaha atau bisnis secara mandiri.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet daerah yang berprestasi pada event-event event provinsi, nasional maupun internasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Persentase gugus depan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah gugus depan yang aktif}}{\text{Jumlah gugus depan}} \times 100$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasi kegiatan tour de Singkarak	Terlaksananya kegiatan event Tour De Singkarak	Sekretariat Daerah
Urusan Wajib Statistik		
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase elemen data sektoral yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah data sektoral yang sudah divalidasi}}{\text{Jumlah total elemen data sektoral yang wajib tersedia}} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Urusan Wajib Persandian		
Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki keamanan informasi}}{\text{Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat keamanan informasi daerah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Kebudayaan		
Persentase lembaga adat aktif	$\frac{\text{Jumlah lembaga adat aktif}}{\text{Jumlah lembaga adat}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase kesenian yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah kesenian daerah yang dilestarikan}}{\text{Jumlah kesenian daerah yang direncanakan atau harus dilestarikan}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang direncanakan atau harus dilestarikan}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase jumlah lembaga, group, sanggar kesenian tradisional yang aktif	$\frac{\text{Jumlah lembaga/kelompok/group/sanggar kesenian tradisional yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga/kelompok/group/sanggar kesenian tradisional}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah objek sejarah yang didokumentasikan	Jumlah objek/dokumentasi sejarah yang didokumentasikan pada satu tahun	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan Wajib Perpustakaan		
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur melalui survey/kajian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai indek pembangunan literasi masyarakat didapat dengan metoda sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah kunjungan perpustakaan (pustaka konvensional dan digital)	Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah (pustaka daerah dan pustaka digital)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah naskah kuno yang didokumentasikan	Jumlah naskah kuno yang didokumentasikan pada satu tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan		
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$\frac{\text{persentase arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip} + \text{persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip} + \text{persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik} + \text{persentase jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{4}$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$\frac{\begin{aligned} &\text{Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban} + \\ &\text{Tingkat kesesuaian pemusnahan arsip dengan NSPK} + \\ &\text{tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari} \\ &\text{bencana dengan NSPK} + \\ &\text{Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD yang digabung atau} \\ &\text{dibubarkan dan pemekaran daerah dengan NSPK} + \\ &\text{Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media} \\ &\text{dengan NSPK} + \text{Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK} + \\ &\text{Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izi penggunaan arsip yang bersifat tertutup} \\ &\text{dengan NSPK} \end{aligned}}{6} \times 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase arsip daerah yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah arsip daerah yang dikelola}}{\text{Jumlah arsip daerah yang seharusnya dikelola}} \times 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan		
Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan		
Kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian	$\frac{\text{Jumlah PDRB sub sektor perikanan berdasarkan ADHB}}{\text{Jumlah PDRB sub sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan berdasarkan ADHB}} \times 100$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya pada satu tahun di Kabupaten Solok Selatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah POKMASWAS Perairan Umum	Jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pengawasan perikanan di perairan umum seperti sungai, waduk, embung, irigasi dll	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	AKI = A + B + C dimana : A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT) B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Jumlah Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	Jumlah usaha/kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Pilihan Pariwisata		
Persentase Pelaku ekraf yang dibina	$\frac{\text{Jumlah pelaku ekraf yang dibina}}{\text{Jumlah pelaku ekraf}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\begin{aligned} &\text{Jumlah wisatawan manca negara pada tahun } n - \\ &\text{Jumlah wisatawan manca negara pada tahun } (n - 1) \end{aligned}}{\text{Jumlah wisatawan manca negara pada tahun } (n - 1)} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan nusantara pada tahun } n - \text{Jumlah wisatawan nusantara pada tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisatawan nusantara pada tahun } (n - 1)} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{jumlah rata - rata kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Jumlah PDRB sektor pariwisata berdasarkan ADHB}}{\text{Jumlah PDRB berdasarkan ADHK}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PAD}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	Jumlah destinasi wisata yang dikelola baik oleh pemerintah, badan usaha, perorangan maupun kelompok masyarakat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Destinasi Wisata yang Dipasarkan	Jumlah destinasi wisata dikelola yang dipasarkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Ruang Kreatif Yang Dikelola	Jumlah ruang kreatif yang dikelola baik oleh pemerintah, badan usaha, perorangan maupun kelompok masyarakat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase Objek Wisata yang Dikelola Oleh Pokdarwis	$\frac{\text{Jumlah objek wisata yang dikelola oleh pokdarwis}}{\text{Jumlah objek wisata}} \times 100$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan Pilihan Pertanian		
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian berdasarkan ADHB}}{\text{Jumlah PDRB ADHB}} \times 100$	Dinas Pertanian
Jumlah produksi hasil pertanian	Jumlah produksi hasil pertanian dalam satu tahun	Dinas Pertanian
Produktivitas pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pertahun}}{\text{Luas panen pertahun}} \times 100$	Dinas Pertanian
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun } (n - 1) - \text{Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun } (n)}{\text{Jumlah kasus penyakit hewan menular tahun } (n - 1)} \times 100$	Dinas Pertanian
Cakupan penanggulangan kasus penyakit menular hewan (%)	$\frac{\text{Jumlah kejadian kasus penyakit menular hewan yang ditanggulangi}}{\text{Jumlah kejadian kasus penyakit menular hewan ditemukan}} \times 100$	Dinas Pertanian
Cakupan penanggulangan bencana pertanian (hama)	$\frac{\text{Jumlah bencana pertanian yang ditangani}}{\text{Jumlah bencana pertanian}} \times 100$	Dinas Pertanian
Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah usulan izin usaha pertanian}} \times 100$	Dinas Pertanian
Persentase ketersediaan penyuluh	$\frac{\text{Jumlah penyuluh yang ada}}{\text{Jumlah penyuluh sesuai standar/kebutuhan}} \times 100$	Dinas Pertanian

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase peningkatan kelas Kelompok Tani	$\frac{\text{Jumlah penyuluh pada satu tingkatan/kelas}}{\text{Jumlah penyuluh}} \times 100$ Tingkatan penyuluh : 1. Pemula; 2. Lanjut; 3. Madya; 4. Utama	Dinas Pertanian
Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral		
Persentase Pemanfaatan langsung Panas Bumi yang memiliki Izin	$\frac{\text{Jumlah usaha pemanfaatan langsung panas bumi yang memiliki izin}}{\text{Jumlah usaha pemanfaatan langsung panas bumi}} \times 100$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Urusan Pilihan Perdagangan		
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB sektor perdagangan berdasarkan ADHB}}{\text{Jumlah PDRB ADHB}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)}}{\text{Jumlah pelaku usaha}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi pupuk}}{\text{Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Perusahaan yang memiliki Izin	$\frac{\text{Jumlah usaha perdagangan yang memiliki Izin}}{\text{Jumlah usaha perdagangan yang wajib memiliki izin}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase pemanfaatan sarana perdagangan yang dibangun /direvitalisasi (pasar kabupaten)	$\frac{\text{Jumlah daya tampung Kios dan Loss yang terisi}}{\text{Jumlah daya tampung Kios dan Loss}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	$\frac{\text{Penjumlahan Rata – rata variasi harga kebutuhan bahan pokok}}{12} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan usaha bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan usaha bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan usaha wajib tera}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Daerah (Produk UMKM)	$\frac{\text{Jumlah jenis produk UMKM Lokal yang digunakan dalam kegiatan pemerintah}}{\text{Jumlah jenis produk lokal yang dihasilkan UMKM}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Urusan Pilihan Perindustrian		
Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun (n) – Jumlah industri Kecil dan Menengah (n – 1)}}{\text{Jumlah industri Kecil dan Menengah}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK}}{\text{Jumlah sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan daerah}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan daerah}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	$\frac{\text{Jumlah keterbaruan atau keterkinian atau ketersediaan kelengkapan informasi industri}}{\text{jumlah Kelengkapan informasi industri}} \times 100$ <p>Kelengkapan informasi industry meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 0-6 bulan • Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 7-12 • Tersedianya data informasi produksi dan kapasitas industry • Tersedianya informasi bahan baku dan bahan penolong • Tersedianya informasi bahan bakar dan energy • Tersedianya informasi tenaga kerja • Tersedianya informasi investasi 	Dinas Perindagkop dan UMKM
Jumlah Sentra Industri Kabupaten yang dikembangkan	Jumlah sentra industri Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan pada satu tahun	Dinas Perindagkop dan UMKM
Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaporan ke Aplikasi SIINAS	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan dalam aplikasi SIINAS}}{\text{Jumlah perusahaan yang wajib melakukan pelaporan dalam aplikasi SIINAS}} \times 100$	Dinas Perindagkop dan UMKM
Urusan Pilihan Transmigrasi		
Tersedianya perencanaan kawasan transmigrasi	Jumlah perencanaan kawasan transmigrasi yang diselesaikan dalam satu tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terlaksananya Penataan Satuan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan kawasan transmigrasi yang ditata	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terbangunnya satuan kawasan pemukiman baru yang mandiri	Jumlah peningkatan/pembangunan satuan kawasan pemukiman baru yang mandiri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
Unsur pendukung Urusan Pemerintahan		
Sekretariat Daerah		
Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB	Sekretariat Daerah
Nilai LPPD	Nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
Persentase pencapaian SPM	$\frac{\text{Jumlah pencapaian indikator SPM}}{\text{Jumlah indikator SPM}} \times 100$	Sekretariat Daerah
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Dirjen PSDKP, 2017)	Sekretariat Daerah
Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang lelang}} \times 100$	Sekretariat Daerah
Persentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan}}{\text{Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang lelang}} \times 100$	Sekretariat Daerah
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan}}{\text{Jumlah nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan yang lelang}} \times 100$	Sekretariat Daerah
Persentase Kebijakan bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Kebijakan bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan dalam satu tahun}} \times 100$	Sekretariat Daerah
Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan dalam satu tahun}} \times 100$	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD		
Persentase usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda	$\frac{\text{Jumlah usulan ranperda OPD yang dibahas menjadi Perda}}{\text{Jumlah usulan Ranperda}} \times 100$	Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan	Jumlah Perda Inisitif DPRD yang diterbitkan dalam satu tahun	Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
Perencanaan		
Persentase pencapaian nilai SKIP (perencanaan)	$\frac{\text{Pencapaian nilai indikator perencanaan pada penilaian SAKIP}}{\text{Nilai indikator perencanaan pada penilaian SAKIP}} \times 100$	Bappeda
Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	$\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Utama Daerah yang mencapai atau melewati target yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Indikator Kunci Daerah yang ditetapkan}} \times 100$	Bappeda
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Prioritas RKPD yang sinkron dengan prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD}}{\text{Jumlah Prioritas RKPD}} \times 100$	Bappeda
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang sinkron dengan Program RPJMD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100$	Bappeda
Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Kunci Daerah yang mencapai atau melewati target yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Kunci Daerah yang ditetapkan}} \times 100$	Bappeda
Persentase jumlah total proyek kontruksi yag dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal I	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama pada tahun berikutnya}}{\text{Jumlah kontrak pada tahun perhitungan}} \times 100$	Bappeda
Keuangan		
Opini BPK	Nilai Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKD
Persentase Pencapaian Target PAD	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD}}{\text{Jumlah target PAD}} \times 100$	BPKD
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD}}{\text{Jumlah Belanja}} \times 100$	BPKD
Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah Belanja APBD}} \times 100$	BPKD
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100$	BPKD
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan pemerintahan – Transfer expenditure}}{\text{Jumlah Belanja APBD}} \times 100$	BPKD

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Jumlah Belanja APBD dikurangi satu}} \times 100$	BPKD
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dikurangi satu}} \times 100$	BPKD
Assets Management	<div>Manajemen Aset</div> <div> <p>1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</p> <p>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)</p> <p>Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)</p> </div>	BPKD
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi Silpa}}{\text{Total anggaran tahun perhitungan}} \times 100$	BPKD
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat diakses di Website}}{\text{Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat diakses di Website}} \times 100$	BPKD
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasi di Website Pemda}}{\text{Total dokumen yang telah dirinci}} \times 100$	BPKD
Persentase BMD ber kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Baran Milik Daerah yang ber kondisi baik}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah}} \times 100$	BPKD
Persentase pencapaian target Pajak dan Retribusi	$\frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan daerah}}{\text{Jumlah target pendapatan daerah}} \times 100$	BPKD
Kepegawaian		
Indeks Sistem Merit	<p>Indeks Sistem Merit adalah Nilai yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah</p> <p>Sistem Merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan</p>	BKPSDM

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	BKPSDM
Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$	BKPSDM
Pendidikan dan Pelatihan		
Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	Indek Profesional ASN adalah Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	BKPSDM
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah ASN Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah ASN Fungsional}} \times 100$	BKPSDM
Penelitian dan Pengembangan		
Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kelitbangan yang dipakai dalam perumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi kelitbangan yang dikeluarkan pada satu tahun}} \times 100$	Bappeda
Pengelolaan Perbatasan		
Persentase Segmen Batas Nagari Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah segmen batas nagari yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perencanaan penyelesaian segmen batas pada satu tahun}} \times 100$	Sekretariat Daerah
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
Inspektorat		
Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP adalah Tingkatan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Level Kapabilitas APIP terbagi 5 level	Inspektorat
Maturitas SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maturitas SPIP dinilai oleh yang dinilai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nilai interval 0-5	Inspektorat
Unsur Kewilayahan (Kecamatan)		
Kecamatan Sangir		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	$\frac{\text{Jumlah nagari yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah nagari dalam kecamatan bersangkutan}} \times 100$	Kecamatan

Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perangkat
Persentase Layanan PATEN	$\frac{\text{Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan oleh Kecamatan}}{\text{Jumlah layanan PATEN yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100$	Kecamatan
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penugasan yang dilaksanakan oleh Kecamatan}}{\text{Jumlah penugasan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100$	Kecamatan
Cakupan Penegakan Perda Yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Penegakan Perda yang difasilitasi Kecamatan}}{\text{Jumlah Perda yang haues difasilitasi Kecamatan}} \times 100$	Kecamatan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilakukan atau difasilitasi oleh Kecamatan	Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum		
Kesatuan Bangsa dan Politik		
Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila	Jumlah kasus penyimpangan terhadap ideologi pancasila dalam satu tahun	Kantor Kesbang dan Politik
Persentase Parpol Yang Mendapat Pembinaan	Jumlah Partai Politik yang mendapat pembinaan dalam satu tahun	Kantor Kesbang dan Politik
Persentase Ormas Yang Diawasi	$\frac{\text{Jumlah ormas yang diawasi}}{\text{Jumlah ormas yang wajib diawasi sesuai dengan kewenangan}} \times 100$	Kantor Kesbang dan Politik
Persentase Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus konflik sosial}} \times 100$	Kantor Kesbang dan Politik
Persentase Kasus Narkoba Yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah kasus Narkoba yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus Narkoba}} \times 100$	Kantor Kesbang dan Politik